



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang penting yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Salah satu fungsi laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, untuk menilai kondisi keuangan, untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta untuk membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai (*user*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik, keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundangundangan;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas pemerintah daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- d. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦫꦺꦃꦠꦤ꧀ꦢꦶꦪꦩꦼꦮꦏꦂꦠ

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor:1425);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- k. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
- l. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9);
- m. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);
- n. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);
- o. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 14);
- p. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 6);
- q. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 tanggal 30 November 2011);
- r. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2014);



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦗꦼꦝꦏꦿꦠꦤ꧀ꦢꦼꦫꦁꦢꦼꦫꦁꦲꦶꦠꦶꦩꦼꦮꦪꦒꦿꦏꦿꦠꦤ꧀

- s. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);
- t. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2015);
- u. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- v. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100);
- w. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah.
- x. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 125) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 36);
- y. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 130);
- z. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
- å. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 141);
- ä. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 64) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 73);

1.3. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi

Secara geografis, DIY terletak pada bagian tengah Pulau Jawa, dengan sisi selatan dibatasi Samudera Indonesia, sedangkan di bagian lainnya berbatasan dengan enam kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:

1. Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo, di sebelah Timur Laut
2. Kabupaten Wonogiri di sebelah Timur dan Tenggara
3. Kabupaten Purworejo di sebelah Barat
4. Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut
5. Kabupaten Boyolali di sebelah Utara



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦃꦢꦤꦢꦫꦺꦢꦢꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦏꦂꦠ

DIY terdiri atas satu kota dan empat kabupaten dengan 78 kecamatan dan 438 desa/ kelurahan, dengan perincian:

1. Kota Yogyakarta terdiri atas 14 kecamatan dan 45 kelurahan/ desa;
2. Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kecamatan dan 75 kelurahan/ desa;
3. Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan, 88 kelurahan/ desa;
4. Kabupaten Gunungkidul terdiri atas 18 kecamatan dan 144 kelurahan/ desa;
5. Kabupaten Sleman terdiri atas 17 kecamatan dan 86 kelurahan/ desa.



Gambar 1.1 Peta Administrasi DIY
(Sumber: Bappeda DIY, 2013)

DIY posisinya terletak diantara $7^{\circ}.33'$ - $8^{\circ}.12'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}.00'$ - $110^{\circ}.50'$ Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km² atau 0,17% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km²).

Pemda DIY menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemda DIY meliputi urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan dengan masing-masing urusan sebagai berikut:

1. Urusan wajib meliputi:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum
 - d. Perumahan
 - e. Penataan Ruang
 - f. Perencanaan Pembangunan
 - g. Perhubungan
 - h. Lingkungan Hidup
 - i. Pertanahan
 - j. Kependudukan dan Catatan Sipil



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6.	Satuan Polisi Pamong Praja
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8.	Dinas Sosial dengan 6 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi.
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan 2 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi.
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan 1 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi.
12.	Dinas Perhubungan dengan 1 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi.
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika
14.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
15.	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
16.	Dinas Kebudayaan dengan 18 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi.
17.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
18.	Dinas Kelautan dan Perikanan dengan 2 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi
19.	Dinas Pariwisata
20.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan 2 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi
21.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan 1 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi
22.	Gubernur dan Wakil Gubernur
23.	Sekretariat Daerah dengan 14 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi
24.	Badan Penghubung Daerah
25.	DPRD
26.	Sekretariat DPRD
27.	Inspektorat
28.	Paniradya Kaistimewan
29.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 1 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi
30.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset dengan 5 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi
31.	PPKD
32.	Badan Kepegawaian Daerah
33.	Badan Pendidikan dan Pelatihan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦃꦢꦤ꧀ꦢꦫꦺꦃꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦫꦠ

Setiap entitas akuntansi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelola dalam bentuk laporan keuangan. Entitas akuntansi pada Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk mengkonsolidasikan semua laporan keuangan entitas akuntansi pada Kuasa Pengguna Anggaran di bawahnya. Selanjutnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset akan melakukan konsolidasi semua laporan keuangan entitas akuntansi pada Pengguna Anggaran dan PPKD.

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
 - 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1. Informasi tentang Kebijakan Keuangan dan Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Umum dan Strategi dan Prioritas APBD
 - 2.3. Rencana Program dan Kegiatan
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja
 - 3.2. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1. Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP pada SKPD
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
 - 5.1. Rincian dan Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan-LRA
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Transfer
 - 5.1.4. Pembiayaan Netto
 - 5.2. Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan SAL
 - 5.3. Rincian dan Penjelasan Neraca
 - 5.3.1. Aset
 - 5.3.2. Kewajiban
 - 5.3.3. Ekuitas
 - 5.4. Rincian dan Penjelasan Laporan Operasional
 - 5.4.1. Pendapatan-LO
 - 5.4.2. Beban
 - 5.5. Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦧꦶꦱꦶꦁꦠꦺꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦭꦥꦺꦫꦤ꧀ꦏꦸꦁꦁꦤ꧀

5.6. Rincian dan Penjelasan Laporan Arus Kas

5.6.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

5.6.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan

5.6.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

5.6.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

5.7. Peristiwa Setelah Laporan Keuangan

Bab VI. Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan

Bab VII. Penutup



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN EKONOMI/KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET EKONOMI APBD

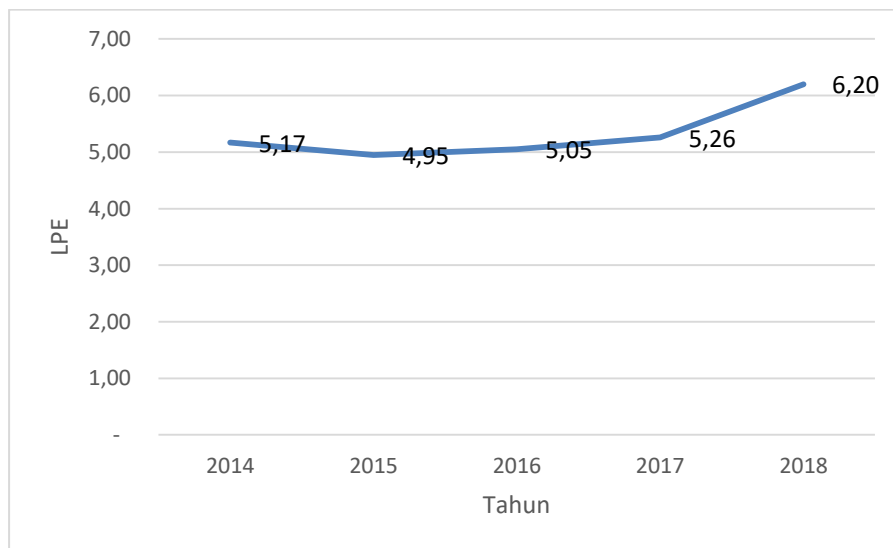
2.1. Informasi tentang Kebijakan Keuangan dan Ekonomi Makro

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi daerah memperlihatkan kinerja sektor-sektor ekonomi masyarakat yang berperan dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara lebih luas. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum dapat dicerminkan dari tingkat kondisi perekonomian daerah.

A. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian DIY tumbuh dengan tren meningkat sejak tahun 2015. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada tahun 2015 turun 0,22 poin menjadi 4,95% dari 5,17% di tahun sebelumnya. LPE senantiasa meningkat setelah tahun 2015 dengan capaian 6,20% di tahun 2018. Peningkatan LPE tahun 2018 merupakan kenaikan tertinggi pada periode 2015 – 2018 dengan kenaikan sebesar 0,94 poin. Berikut ini adalah gambar pertumbuhan ekonomi DIY selama lima tahun terakhir.



Gambar 2.1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (LPE) DIY Tahun 2014-2018 (%)

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2019

Pada tahun 2018, semua lapangan usaha tumbuh positif, bahkan dua lapangan usaha tumbuh di atas 10% yaitu konstruksi serta pertambangan dan penggalian. Sektor konstruksi tumbuh 13,1% serta pertambangan dan penggalian tumbuh 10,59%. Pertumbuhan tertinggi ketiga adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 6,77%. Ketiga sektor tersebut tumbuh di atas LPE. Sementara itu, beberapa sektor mengalami penurunan laju pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, jasa perusahaan, serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦏꦸꦫꦏꦠꦫꦠ

Tabel 2.1. Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (%)

Lapangan Usaha		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2,10	2,60	1,46	1,94	2,16
2	Pertambangan dan Penggalian	2,11	0,12	0,42	3,39	10,59
3	Industri Pengolahan	3,82	1,75	5,07	5,74	5,12
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,53	(1,32)	14,26	3,96	5,31
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,91	2,90	2,36	3,46	5,13
6	Konstruksi	5,65	4,24	5,42	6,94	13,1
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,69	6,19	6,09	5,72	5,54
8	Transportasi dan Pergudangan	3,80	3,73	4,61	4,74	6,6
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6,79	5,77	5,51	6,21	6,77
10	Informasi dan Komunikasi	6,13	5,11	8,32	6,14	6,48
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,89	8,27	4,98	2,80	6,14
12	Real Estat	7,77	6,45	5,14	4,94	5,54
13	Jasa Perusahaan	7,61	7,31	3,43	5,86	5,51
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,90	5,18	5,57	4,51	4,06
15	Jasa Pendidikan	7,91	7,28	3,07	5,56	6,01
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,65	7,15	4,52	5,84	6,05
17	Jasa lainnya	5,29	8,00	5,70	5,76	6,06
DIY		5,18	4,94	5,05	5,26	6,20

Sumber: BPS PDIIY, 2019

Pengeluaran konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar dalam PDRB pada tahun 2017 dan 2018. Nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga pada PDRB ADHB tahun 2018 adalah 86.753.197 juta rupiah atau 57.522.317 juta rupiah pada PDRB ADHK. Meskipun demikian, pengeluaran konsumsi tumbuh relatif lambat dibanding LPE yaitu sebesar 3,95%. Kontributor terendah pembentukan PDRB adalah perubahan inventori dengan nilai sebesar 1.435.491 juta rupiah atas dasar harga berlaku atau 1.104.088 juta rupiah atas dasar harga konstan tahun 2010.

Tabel 2.2. Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2017

No	Komponen Pengeluaran	2017		2018		Laju Pertumbuhan (%)
		ADH Berlaku (Juta Rp)	ADH Konstan (Juta Rp)	ADH Berlaku (Juta Rp)	ADH Konstan (Juta Rp)	
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	81.335.820	55.364.064	86.753.197	57.552.317	3,95
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3.756.395	2.589.250	4.095.046	2.657.407	2,63
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	19.508.172	13.104.559	21.346.113	13.559.566	3,47
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	37.111.4368	24.791.862	43.173.678	27.313.862	10,17
5	Perubahan Inventori	1.368.184	1.066.314	1.435.491	1.104.088	3,54
6	Ekspor Luar Negeri	7.436.959	4.808.527	8.749.632	5.424.903	12,82
7	Impor Luar Negeri	6.540.719	4.905.222	7.206.068	5.210.391	6,22
8	Net Ekspor Antar-Daerah	(24.845.137)	(4.517.332)	(28.469.631)	(4.375.109)	-3,15
PDRB DIY		119.131.000	92.302.202	119.172.906	98.026.564	6,20

Sumber: BPS DIY, 2019

Kinerja ekonomi antara kabupaten/kota se-DIY masih belum merata dan terdapat dinamika antar wilayah. Selama tahun 2013 sampai 2016, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta adalah dua wilayah yang mencapai pertumbuhan tertinggi. Namun di tahun 2017, Kabupaten Kulon Progo mencapai



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

pertumbuhan tertinggi yaitu 5,97%. Capaian Kabupaten Kulon Progo menunjukkan peningkatan yang tinggi mengingat pada tahun sebelumnya kabupaten tersebut mencapai pertumbuhan terendah yaitu sebesar 4,76%.

Tabel 2.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota, 2013-2017

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Kulon Progo	4,87	4,57	4,62	4,76	5,97
Bantul	5,46	5,04	4,97	5,06	5,14
Gunungkidul	4,97	4,54	4,82	4,89	5,00
Sleman	5,89	5,30	5,18	5,25	5,35
Yogyakarta	5,47	5,28	5,09	5,11	5,24
DIY	5,47	5,17	4,95	5,05	5,26

Sumber: BPS DIY, 2019

Nilai PDRB ADHB per kapita di DIY selama tahun 2014-2018 senantiasa meningkat. Nilainya adalah 34,15 juta rupiah di tahun 2018 yang meningkat 2,47 juta rupiah dari 31,68 juta rupiah pada tahun sebelumnya.

B. Inflasi

Pada periode 2013 sampai dengan 2018, inflasi Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi. Laju inflasi di Kota Yogyakarta pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Inflasi tahun 2017 adalah 4,20% yang kemudian menurun menjadi 2,66% di tahun berikutnya. Kenaikan harga tertinggi pada tahun 2018 terdapat pada kelompok pengeluaran sandang yang mencapai 3,61%, sedangkan yang terendah terdapat pada pengeluaran kesehatan sebesar 1,19%.

Tabel 2.4. Laju Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2013-2017

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Umum	6,59	3,09	2,29	4,20	2,66
1	Bahan Makanan	7,7	4,64	4,77	2,71	3,15
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	2,95	5,04	3,84	2,79	2,63
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	8,92	4,41	1,64	5,63	2,43
4	Sandang	3,61	5,87	3,04	3,84	3,61
5	Kesehatan	5,49	4,21	4,17	2,76	1,19
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	2,37	1,36	2,40	2,81	3,34
7	Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	9,36	-2,51	-2,06	6,72	2,46

Sumber: BPS DIY, 2019

C. ICOR

Perkembangan ICOR dan pertumbuhan ekonomi DIY selama kurun waktu 2013-2017 berbanding terbalik seperti yang ditunjukkan oleh gambar dibawah, yaitu ketika angka ICOR menurun pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, dan sebaliknya. Hal ini berarti bahwa ketika ICOR rendah maka dengan investasi tertentu akan menghasilkan output besar yang dapat meningkatkan nilai PDRB. Kenaikan nilai PDRB dapat mendorong terjadinya laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Faktor-faktor yang menentukan besaran ICOR diantaranya adalah besarnya penambahan investasi dan komposisi atau alokasi investasi menurut sektor produksi yang tepat. Pada tahun 2017 angka ICOR DIY tercatat sebesar 5,61 dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,26%. Perkembangan ICOR selama periode tersebut menunjukkan bahwa ICOR DIY masih relatif tinggi dengan besaran nilai di atas 5. Level ICOR yang cukup



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

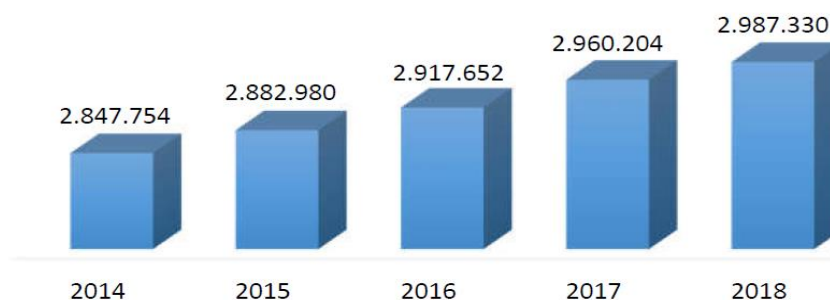
Tabel 2.6. Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan DIY Tahun 2014-2018

Kegiatan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Angkatan kerja	2.023.461	1.971.463	2.099.436	2.117.187	2.191.742
Bekerja	1.956.043	1.891.218	2.042.400	2.053.168	2.118.392
Penganggur	67.418	80.245	57.036	64.019	73.350
Bukan angkatan kerja	824.293	911.517	818.216	843.017	795.588
Sekolah	270.545	297.972	273.286	266.870	247.191
Mengurus rumah tangga	439.522	475.397	430.895	472.108	452.310
Lainnya	114.226	138.148	114.035	104.039	96.087
Penduduk usia kerja	2.847.754	2.882.980	2.917.652	2.960.204	2.987.330
TPAK (%)	71,05	68,38	71,96	71,52	73,37
TPT (%)	3,33	4,07	2,72	3,02	3,35
TKK (%)	96,67	95,93	97,28	96,98	96,65

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2019

Penduduk Usia Kerja

Penduduk Usia Kerja (PUK) adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas. Kuantitas dan tren PUK tergantung pada naik turunnya jumlah penduduk secara keseluruhan sesuai dengan terjadinya perubahan faktor-faktor demografi. Selama lima tahun sejak tahun 2014 sampai tahun 2018, jumlah penduduk usia kerja di DIY mengalami penambahan yang cukup besar, yakni sebanyak 139.576 orang (4,90%), dari sebanyak 2.847.754 orang pada tahun 2014 menjadi 2.987.330 orang tahun 2018 seperti gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi, 2019

Gambar 2.3. Penduduk Usia Kerja, 2014 -2018 (orang)

Selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 penduduk usia kerja di DIY masih didominasi oleh golongan usia muda yaitu di bawah usia 35 tahun. Berdasarkan tingkat pendidikan, terjadi peningkatan yang besar pada PUK dengan pendidikan SMA baik umum maupun kejuruan dan juga lulusan universitas. PUK lulusan SMK bertambah sebanyak 89.991 orang (20,07%) dari 448.365 orang menjadi 538.356 orang. PUK lulusan universitas bertambah sebanyak 54.506 orang (23,65%) dari semula 230.421 orang menjadi 284.927 orang. Kondisi ini menggambarkan bahwa kualitas PUK di DIY kualitasnya semakin meningkat apabila dilihat dari sisi pendidikannya.

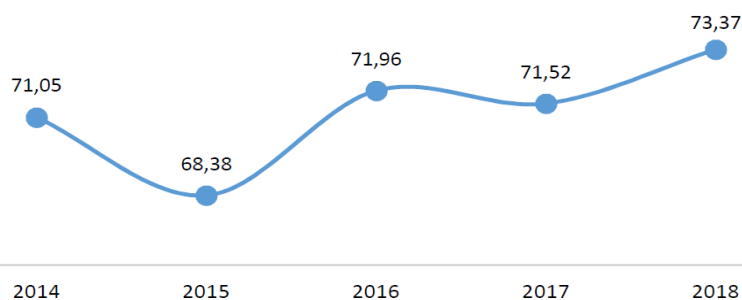
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif, meskipun secara tren mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 TPAK sebesar 71,05% dan naik menjadi 73,37% pada tahun 2018 seperti yang disajikan pada gambar berikut.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DIY



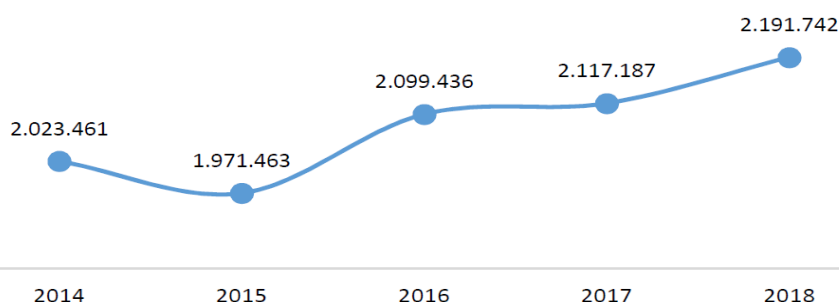
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2019

Gambar 2.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja DIY Tahun 2014-2018

Berdasarkan pendidikan, dari tahun ke tahun semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi Tingkat Partisipasi Angkanya. Hal ini menggambarkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan semakin banyak yang masuk ke pasar kerja.

Angkatan Kerja

Jumlah angkatan kerja dipengaruhi oleh jumlah penduduk usia kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja, artinya dengan kenaikan dua indikator tersebut maka secara langsung jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan. Keadaan angkatan kerja di DIY selama tahun 2014-2018 mengalami peningkatan meskipun untuk tahun 2015 terjadi sedikit penurunan. Secara umum struktur angkatan kerja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa karakteristik yang secara rinci sebagai berikut.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2019

Gambar 2.5. Angkatan Kerja Tahun 2014-2018

Angkatan kerja di DIY masih didominasi golongan umur 25-54 tahun (angkatan kerja produktif) jumlahnya mencapai 1.358.696 orang (67,15%) dari total angkatan kerja tahun 2014), sampai tahun 2018 bertambah sebanyak 62.286 orang (4,58%) menjadi 1.420.982 orang. Pada tahun 2018 angkatan kerja golongan umur 60 tahun ke atas menduduki proporsi yang tergolong tinggi sebesar 14,75% dengan jumlah 323.289 orang. Tingginya jumlah angkatan kerja lanjut usia disebabkan angka harapan hidup yang semakin meningkat dan tingginya tingkat pendidikan yang menyebabkan usia tidak menjadi halangan untuk tetap berkarya. Namun demikian bagi sebagian penduduk yang ada di pedesaan tetap bekerja di usia tua merupakan pilihan untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan angkatan kerja berdasarkan pendidikan untuk pendidikan SMU ke atas selalu mengalami kenaikan pada periode 2014-2018. Pada tahun 2014 sebesar 49,58%, tahun 2015 sebesar 50,96%, tahun 2016 sebesar 51,64%, tahun 2017 sebesar 52,52%, dan tahun 2018 sebesar 54,89%. Peningkatan kesejahteraan dan



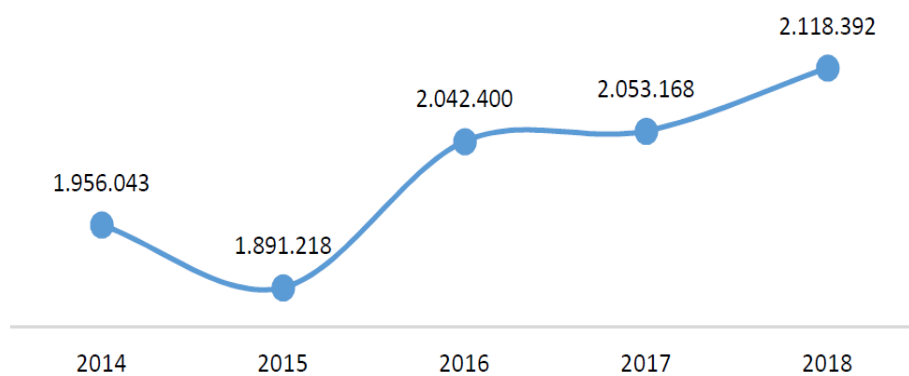
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DIY

kesadaran masyarakat DIY akan pentingnya pendidikan berdampak pada peningkatan kualitas angkatan kerja di DIY.

Penduduk yang Bekerja

Sesuai dengan konsep, yang dimaksud penduduk bekerja adalah orang yang melakukan sesuatu dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan/keuntungan selama paling sedikit satu jam berturut-turut dan tidak terputus dalam seminggu yang lalu. Di bawah ini merupakan gambar yang menunjukkan penduduk DIY yang bekerja pada tahun 2014-2018.



Sumber : BPS Provinsi DIY, 2019

Gambar 2.6. Penduduk yang Bekerja Tahun 2014-2018

Gambar di atas menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan. Peningkatan pada tahun 2016 sebesar 151.182 orang, Tahun 2017 sebesar 10.768 orang sementara tahun 2018 meningkat sebesar 65.224 orang sehingga menjadi 2.118.392 orang.

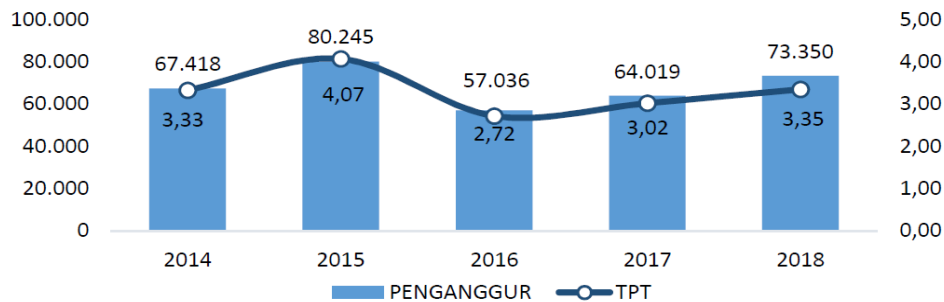
Pengangguran Terbuka

Penganggur terbuka adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sebagian besar penganggur di DIY berada dalam kelompok usia muda dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi serta umumnya belum mempunyai keterampilan khusus dan belum memiliki pengalaman kerja. Latar belakang pendidikan yang tidak relevan dengan lapangan kerja dan jumlah lapangan kerja di sector formal yang terbatas membuat jumlah penganggur muda ini tetap tinggi setiap tahunnya.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

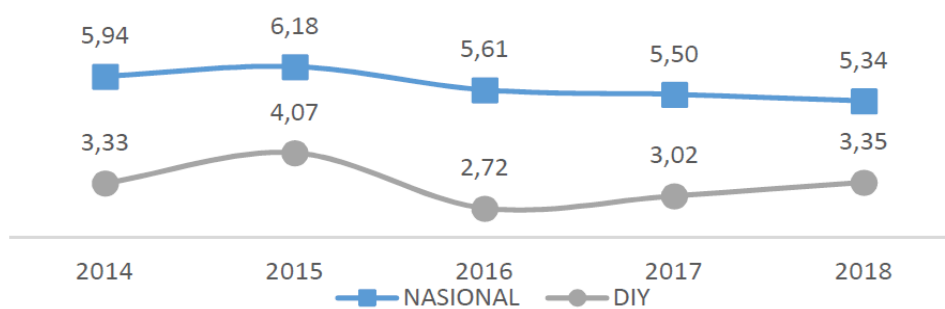
پيمرنتاه دايراه ايسيمهوا يوجياكارتا



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2019

Gambar 2.7. Pengangguran Terbuka dan TPT Tahun 2014-2018

Berdasarkan gambar di atas, pengangguran terbuka tahun 2014- 2018 menunjukkan angka yang relevan antara Jumlah Pengangguran Terbuka dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan jumlah yang fluktuatif. Tahun 2014 jumlah penganggur 67.418 orang dengan TPT sebesar 3,33% dan mengalami peningkatan tahun 2015. Jumlah penganggur dan TPT mengalami penurunan cukup tajam pada tahun 2016 dan mengalami tren kenaikan pada dua tahun terakhir menjadi 73.350 penganggur dengan TPT sebesar 3,35%. Pengangguran menurut kelompok umur didominasi penganggur usia muda dan produktif berusia di bawah 35 tahun yang mencapai 78,80% pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan mencapai 89,59%. Pengangguran menurut pendidikan didominasi pendidikan menengah (SMA dan SMK) meskipun mengalami penurunan menjadi 46,51% pada tahun 2018. Sebaliknya, penganggur berpendidikan Diploma dan Sarjana mencapai 21,26% pada tahun 2014 dan mengalami peningkatan signifikan menjadi 36,62% pada tahun 2018. Sebagai pembandingan, Tingkat Pengangguran Terbuka selama lima tahun terakhir antara DIY dan Nasional ditunjukkan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2019

Gambar 2.8. TPT Nasional dan DIY Tahun 2014-2018

Berdasarkan grafik di atas, TPT DIY dari tahun 2014 sampai 2018 masih jauh lebih rendah dari TPT nasional. Kondisi TPT di DIY dalam kurun waktu tiga tahun terakhir selalu meningkat, tetapi tetap dibawah TPT Nasional. TPT DIY tahun 2018 sebesar 3,35%, sedangkan TPT nasional sebesar 5,34%.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

E. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di DIY pada tahun 2016 sebesar 13,10% berada pada peringkat 13 tertinggi nasional dan masih berada di atas rata-rata nasional. Potret tingkat kemiskinan DIY menempatkan Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo, dan Kab. Bantul dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di DIY, sehingga diperlukan intervensi khusus terhadap kabupaten-kabupaten tersebut agar jumlah penduduk miskin menurun sebagaimana target tingkat kemiskinan DIY tahun 2018 dalam RPJMN sebesar 10,9%. Sesuai dengan Arahan Gubernur terhadap pembangunan tahun 2018, maka penurunan kemiskinan dibarengi pula dengan penurunan ketimpangan pendapatan dan penurunan ketimpangan wilayah.

F. Ketimpangan Antar Wilayah

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Pembangunan daerah selalu berupaya memperoleh pertumbuhan yang tinggi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa disertai pemerataan tidaklah mencerminkan pembangunan yang berkeadilan. Oleh karena itu, pengurangan kesenjangan antarwilayah harus selalu diupayakan. Demikian halnya dengan DIY yang masih dihadapkan pada ketimpangan wilayah, yang ditunjukkan oleh Kabupaten Sleman dan Yogyakarta, yang hanya seluas sekitar 19% dari wilayah DIY tetapi menguasai sekitar 60% dari total PDRB DIY. Faktor utama penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional antar-daerah adalah konsentrasi kegiatan ekonomi. Konsentrasi kegiatan ekonomi di DIY ada di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Tidak mengherankan jika PDRB per kapita kedua wilayah tersebut sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan tiga kabupaten yang lain. Faktor lain penyebab ketimpangan adalah alokasi investasi yang belum merata baik PMA maupun PMDN.

Ketimpangan antar-wilayah pada periode 2011-2015 di DIY menunjukkan kecenderungan menurun, yaitu ditandai dengan penurunan indeks Williamson dari 47,56% pada tahun 2011 menjadi 46,95% pada tahun 2015. Namun demikian, angka tersebut masih dipandang tinggi. Oleh karenanya diperlukan upaya pemerataan pembangunan dengan program-program afirmatif untuk Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo serta meningkatkan konektivitas antar-wilayah. Meskipun upaya akselerasi pembangunan di Kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul dan Bantul telah dilakukan, namun data menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut masih berada di bawah rata-rata DIY. Pertumbuhan ekonomi DIY masih disumbang oleh Sleman dan Yogyakarta. Pertumbuhan yang cukup pesat di Kabupaten Sleman dan Yogyakarta ini terutama didorong oleh sektor-sektor tersier seperti perdagangan, konstruksi, dan jasa-jasa.

Sebagai daerah penyangga utama, perkembangan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman menghasilkan nilai PDRB terbesar "secara relatif" dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, porsi distribusinya mencapai sepertiga dari total PDRB DIY. Kabupaten Sleman masih memiliki potensi terus berkembang lebih cepat, sementara itu Kota Yogyakarta perkembangannya sudah mengarah ke titik jenuh, pangsa distribusinya di bawah Sleman yaitu sekitar 26%. Bantul sebagai penyangga lapis kedua perkembangan perkotaan pangsa distribusinya bergerak lebih meningkat dibanding kabupaten/kota lain meskipun masih di bawah 20%.

Sementara dua kabupaten lainnya, Kulon Progo dan Gunungkidul yang mencakup 65% dari luas wilayah DIY, pangsa distribusi ekonomi dua wilayah ini terhadap DIY hanya sekitar 21%. Letak geografis kedua kabupaten ini terpisah dari pusat Kota Yogyakarta, sehingga perkembangan ekonominya tidak dapat langsung mengandalkan rembesan mekarnya perkotaan. Dua kabupaten ini perlu terobosan investasi besar untuk mengembangkan potensi ekonomi, terutama peningkatan akses melalui



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாழ்வானகாவகாழிபுறமாவட்டம்

pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas wilayah. Oleh karena itu agar ketimpangan wilayah di DIY tidak semakin melebar dan pertumbuhan ekonomi semakin merata, isu ketimpangan wilayah ini dimunculkan dalam Tematik Pembangunan Tahun 2018 sehingga dapat diperoleh sinergi antarsektor dan kabupaten/kota dalam rangka upaya penurunan ketimpangan antar-wilayah melalui program dan kegiatan yang dapat menumbuhkan wilayah-wilayah yang masih tertinggal.

G. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Ketimpangan pendapatan yang digambarkan melalui Indeks Gini pada tahun 2017 sebesar 0,425. Hal ini menggambarkan pembangunan di DIY baru dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat berpenghasilan tinggi dan tidak merata di seluruh kelas masyarakat. Upaya penurunan kemiskinan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal dimana penurunan kemiskinan setiap tahunnya masih berada dibawah 1%.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam penanggulangan kemiskinan dalam implementasinya masih terjadi hambatan dikarenakan beberapa permasalahan, diantaranya: (1) Validasi data; (2) Kebanyakan program/kegiatan yang kurang efektif; (3) Kurangnya sinergi dan implementasi program/kegiatan; (4) Eksekusi program yang terlambat; serta (5) Pendampingan program yang belum optimal. Berdasarkan hal tersebut maka tematik penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dipilih dalam Musrenbang tahun 2017 agar dapat diperoleh strategi penurunan kemiskinan yang lebih tepat sasaran dengan pendekatan kewilayahan sehingga dihasilkan program dan kegiatan yang melibatkan antar-sektor dan kabupaten/kota dalam upaya penurunan kemiskinan.

2.2. Kebijakan Umum, Strategi dan Prioritas APBD

Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 sebagai penjabaran tahun kelima dari RPJMN 2015-2019 dirancang sebagai keberlanjutan upaya yang telah dimulai tahun 2015. Sehingga, tema yang ditetapkan untuk RKP Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”

Pendekatan perencanaan dan penganggaran yang bersifat money follows program tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah secara lebih efektif, efisien dan berkeadilan. Sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMN, penyusunan RKP 2019 difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN. Dalam penyusunan RKP 2019, pendekatan perencanaan dan penganggaran yang digunakan adalah tematik, holistik, integratif, dan spasial, yaitu:

1. Tematik, yaitu tema-tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Untuk RKP 2019 tema utama adalah “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” yang dilaksanakan dalam lima Prioritas Nasional;
2. Holistik, yaitu penjabaran tematik dari program Presiden ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan;
3. Integratif, yaitu upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran kementerian/lembaga, daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan;



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦏꦂꦠ

4. Spasial, yaitu kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.

Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, RKP 2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi, pembangunan manusia dan masyarakat, dan dimensi pemerataan. Indikator sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi (%) diperkirakan dapat mencapai $5,4 \pm 5,8$;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) diperkirakan 4,8 – 5,2 persen;
3. Angka Kemiskinan (%) ditargetkan antara 8,5 -9,5 persen;
4. Rasio Gini (Indeks) antara 0,38 -0,39;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah 71,98.

Adapun sasaran pembangunan untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap indikator makro berdasarkan rancangan awal RKP 2019 adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,65 persen.
2. Tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 12,39 persen.
3. Tingkat pengangguran ditargetkan sebesar 2,55 persen.

wilayah Pulau Jawa diperkirakan akan memberikan kontribusi ekonomi sebesar 58,15 persen terhadap perekonomian nasional dengan laju pertumbuhan ekonomi 5,74 persen di tahun 2019. Sebagai penggerak ekonomi nasional, Pulau Jawa merupakan pusat dari kegiatan Industri nasional serta penghubung antara kegiatan pertanian dengan nonpertanian.

Dari segi pertanian, salah satu potensi terbesar Pulau Jawa adalah kondisi tanahnya yang sangat cocok untuk produksi pangan, terutama padi sehingga diarahkan untuk mewujudkan lumbung pangan nasional yang berkelanjutan. Sedangkan dari segi Industri, Pulau Jawa telah dilengkapi dengan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta sumber daya manusia yang lebih memadai. Potensi lain yang dimiliki adalah posisinya secara geografis maupun ekonomis sebagai hub perdagangan domestik maupun internasional. Strategi pengembangan Pulau Jawa selain diharapkan mengarah pada menjaga lahan pertanian, juga pada peningkatan keterhubungan (linkages) antara kegiatan pertanian, industry (pengolahan maupun kreatif), serta perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan.

2.2.1. Visi dan Misi Jangka Panjang

Visi Jangka Panjang

Cita-cita pembangunan DIY yang akan dicapai dalam dua puluh tahun mendatang tertuang dalam Rencana Pembangunan Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJPD DIY) 2005-2025 yang memiliki visi “*Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera*”.

DIY sebagai **pusat pendidikan terkemuka**, pada tahun 2025 diharapkan dapat menghasilkan SDM yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan berakhlak mulia yang dilandasi pengamalan agama dan didukung oleh lembaga pendidikan yang kredibel, berstandar nasional ataupun internasional. Di samping itu, sebagai pusat pendidikan terkemuka, DIY beserta lingkungan sosial masyarakatnya merupakan lingkungan yang kondusif dan nyaman untuk belajar dan menuntut ilmu. DIY sebagai **pusat budaya terkemuka**, dirancang menjadi tempat pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

peningkatan dimensi nilai, pencarian nilai-nilai kebenaran, dimensi ekonomi terkait nilai kegunaan, dimensi estetis pada keindahan, dimensi sosial pada nilai "trust", dimensi politik pada nilai kuasa, dimensi keagamaan, dan nilai ketuhanan yang berkebudayaan.

Dalam konteks "Renaissance Yogyakarta" sebagai "sintesa", ketika nilai-nilai Trilogi Filosofi Keistimewaan (*Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, dan Manunggaling Kawula Gusti*) diletakkan sebagai "tesa" bagi pembangunan DIY, maka "anti-tesa" yang dihadapi dalam implementasinya adalah nilai-nilai pragmatis yang melahirkan gejala-gejala yaitu: (1) *Bawana* Yogyakarta tidak *Hayu* lagi baik dalam dimensi *Bawana Alit-Bawana Ageng* maupun *Bawana Lahir-Bawana Batin*; (2) pembangunan dan perubahan-perubahan yang terjadi di Yogyakarta telah menunjukkan gejala meninggalkan jati diri dan nilai-nilai kawitan atau nilai-nilai *sangkan paraning dumadi*-nya Yogyakarta; dan (3) gejala dikotomi yang semakin nyata dalam konteks hubungan antara pamong penyelenggara birokrasi dengan masyarakat atas nama nilai-nilai kebebasan, sehingga kepentingan-kepentingan bersama serta nilai-nilai kebersamaan yang lebih luas menjadi terabaikan bahkan terkorbankan.

Konsep tersebut diatas mendasari tema visi pembangunan DIY tahun 2017-2022 yaitu "Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja". **Abad Samudera Hindia** ialah momentum yang perlu dimanfaatkan segenap pemangku kepentingan DIY untuk memanfaatkan potensi kelautan di kawasan selatan DIY sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga serta mengurangi angka kemiskinan. Menyongsong Abad Samudera Hindia yang dimaksud dalam tema visi dilandasi pada aspek kesejahteraan, fenomena-fenomena *Indian Ocean Rim Association (IORA)*, *Kra-Canal/Thai Canal Project* serta kemiskinan di kawasan selatan.

Harapan akan potensi dan tantangan masa depan dari Abad Samudera Hindia tentunya berada di wilayah selatan DIY. Kabupaten-kabupaten yang berada di wilayah selatan DIY memiliki kesenjangan relatif tinggi dibanding wilayah utara dilihat dari angka kemiskinan. Fenomena kemiskinan dan kesenjangan di wilayah selatan DIY ini melatarbelakangi pentingnya memberikan fokus dan perhatian terhadap pembangunan wilayah tersebut. Hal ini selaras dengan tema visi untuk menyongsong "Abad Samudera Hindia" juga untuk meningkatkan "Harkat dan martabat warga miskin di wilayah bagian selatan khususnya, dan di seluruh wilayah DIY pada umumnya". Dengan demikian, potensi wilayah selatan DIY perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar lebih memiliki harkat dan martabat mulia.

Kemuliaan martabat manusia Jogja dapat digambarkan dalam "**Lima Kemuliaan**" atau "**Panca Mulia**" yakni:

- 1) Terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing;
- 2) Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan;
- 3) Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan;
- 4) Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis; dan
- 5) Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாழ்வாக நலமாக நலமுடன் வாழ்வதற்காக

Manusia Jogja yang bermartabat mulia digambarkan sebagai manusia sejahtera paripurna baik dari segi hidup-kehidupan-penghidupan sebagai individu, terlibat dan memperoleh manfaat dari ekonomi yang tumbuh dan berkeadilan, hidup dalam harmoni kolektif dan terlindungi oleh penyelenggaraan pemerintahan demokratis yang dijalankan oleh aparatur yang berintegritas. Manusia Jogja yang bermartabat mulia merupakan substansi penting yang menggambarkan adanya tujuan peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja. Peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja mencakup pengertian peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan sosial dan beradab. Untuk itu strategi kebudayaan untuk meningkatkan harmoni kehidupan bersama masyarakat DIY, serta mengatasi kesenjangan dan kemiskinan dalam kerangka meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja sangat perlu dikedepankan. Pembangunan ekonomi di DIY yang ditopang dengan pembangunan infrastruktur wilayah diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang kurang beruntung.

Visi

Pada setiap tahapan RPJPD DIY 2005-2025 terdapat Penekanan 5 tahunan sebagai pedoman dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 2.7. Penekanan 5 Tahun RPJPD DIY dan RPJMD DIY

Penekanan 5 Tahun Pertama 2005-2009	Penekanan 5 Tahun Kedua 2010-2014	Penekanan 5 Tahun Ketiga 2015-2019	Penekanan 5 Tahun Keempat 2020-2025
<p>Pembangunan sarana dan prasarana dasar keunggulan daerah, dan persiapan dasar kompetensi SDM yang berdaya saing unggul, serta konsolidasi potensi-potensi unggulan.</p> <p>Keyword: Menyiapkan fondasi/meletakkan dasar</p>	<p>Pembangunan fasilitas- Fasilitas pendukung utama keunggulan daerah yang memiliki daya dukung berantai positif (<i>backward effect and forward effect</i>) untuk mendorong kemajuan daerah dan melanjutkan pembangunan ompetensi SDM yang berdaya saing unggul secara lebih luas serta menggerakkan potensi ekonomi dan industri unggulan.</p> <p>Keyword: Membangun/melanjutkan pembangunan di atas fondasi/dasar yang telah diletakkan.</p>	<p>Pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah.</p> <p>Keyword: Mendayagunakan dan menguatkan yang telah dibangun.</p>	<p>Penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung oleh ketersediaan energi.</p> <p>Keyword: Menguatkan dan mengoptimalkan yang telah di dayagunakan untuk mewujudkan cita-cita.</p>
Implementasi dalam RPJMD DIY			
	RPJMD DIY 2009 -2013	RPJMD DIY 2012 -2017 "Jogja Renaisans"	RPJMD DIY 2017 -2022 "Abad Samudera Hindia" (Rancangan Awal)
Visi	"Pemerintah daerah yang katalistik dan masyarakat mandiri yang berbasis keunggulan daerah serta sumberdaya manusia yang berkualitas unggul dan beretika".	"Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru"	"Menyongsong "Abad Samudera Hindia" untuk kemuliaan martabat manusia Jogja"

Sumber : RPJMD DIY 2017-2022, diolah



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦠꦪꦺꦴꦒꦶꦏꦂꦠ

Berangkat dari tinjauan filosofis, berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY, memperhatikan perkembangan dan kondisi terkini masyarakat, serta selaras dengan uraian diatas tema visi “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” dapat dirumuskan bahwa Abad Samudera Hindia menjadi arah dari pembangunan DIY untuk mengangkat potensi selatan dalam kurun waktu 2017-2022 dengan visi:

“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”

Terwujudnya dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang diharapkan pada lima tahun ke depan untuk terlaksana atau terbukti melalui **peningkatan**, yaitu proses, cara, perbuatan meningkatkan suatu kondisi yang telah ada menuju kondisi yang lebih baik.

Kemuliaan dimaknai paripurna dalam memenuhi Panca Mulia yakni dengan terpenuhinya:

1. Peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban;
2. Peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat yang tumbuh, dan berkeadilan;
3. Terwujudnya kondisi hidup dalam harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi;
4. Pelayanan publik dengan tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis; dan
5. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur yang bermartabat dan memiliki integritas.

Martabat adalah tingkat harkat kemanusiaan, atau harga diri. Manusia yang bermartabat adalah manusia yang berumur panjang dan hidup bahagia, mempunyai akses yang luas terhadap pengetahuan, dan dapat hidup layak.

Manusia Jogja adalah insan di DIY yang menjadi subyek pembangunan. "Manusia Jogja" adalah semua individu yang hidup, berkehidupan dan berpenghidupan di wilayah DIY. Secara lebih rinci, yang dimaksud dengan manusia Jogja adalah:

1. Semua individu yang telah menggantungkan hidupnya pada sumberdaya yang berada di wilayah DIY.
2. Semua individu yang telah membangun jaringan dan juga telah dikuatkan serta dimuliakan oleh jaringan kehidupan sosial budaya masyarakat di wilayah DIY.
3. Semua individu yang telah membangun serta menggantungkan penghidupannya pada sumberdaya dan jaringan perekonomian dan jaringan sumber pendapatan yang berada di wilayah DIY.

Sedangkan ciri khas manusia Jogja dalam perumusan visi "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja" adalah mencakup pengertian mulia martabat hidupnya, mulia martabat kehidupannya, dan mulia martabat penghidupannya. Secara lebih rinci dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Manusia Jogja yang memiliki hidup biologis yang mulia karena didukung oleh kualitas dan kuantitas asupan makanan yang baik, memiliki tingkat kesehatan yang baik, dan hidup dalam kualitas lingkungan fisik yang baik. Sebaliknya, manusia Jogja akan memiliki martabat yang buruk apabila kondisi fisik biologisnya buruk karena asupan makanan yang buruk serta memiliki tingkat kesehatan yang buruk, serta hidup dalam lingkungan fisik infrastruktur yang buruk. Sebagai catatan, bahwa di wilayah DIY masih terdapat kasus-kasus keluarga dan anak-anak yang memiliki tingkat kesehatan buruk akibat bergizi buruk.
2. Manusia Jogja yang memiliki kehidupan bermasyarakat yang mulia, termasuk: (i) mulia dalam berlalulintas (sopan santun, tenggang rasa serta taat disiplin pada peraturan lalulintas), (ii) mulia



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Wisata Kulinier, Kesehatan, dan Kebudayaan

- dalam perilaku berkehidupan bersama di ruang publik (perilaku memarkir kendaraan yang tidak mematuhi orang lain sehubungan ukuran lebar jalan-jalan di Jogja relatif kecil, tidak membuang sampah dan limbah ke sungai atau jalan atau ruang publik, tidak membuat atau memancing rasa permusuhan terhadap kelompok masyarakat lain), (iii) mulia dalam berkehidupan menjalankan agama (saling menghormati kehidupan beragama kelompok agama lain).
3. Manusia Jogja yang memiliki penghidupan yang mulia, mencakup: (i) cara-cara menjalankan kegiatan penghidupan yang mulia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (tidak merendahkan martabat dirinya, tidak melanggar hukum atau melakukan tindak pidana kriminal, tidak mengganggu kesehatan dirinya maupun orang lain), (ii) tempat menjalankan penghidupan yang mulia (tidak menjalankan usahanya pada tempat-tempat yang mengganggu atau menzolimi atau merugikan hak orang lain, (iii) sistem kerja yang mulia (tidak mengeksploitasi anak-anak dan perempuan, memberi atau mendapat imbalan sesuai ketentuan yang berlaku, tidak merusak dan mencemari alam serta warisan budaya).

Misi

Kemuliaan martabat manusia Jogja yang meningkat sebagai tujuan dari Visi digambarkan dalam rumusan Panca Mulia. Visi tersebut kemudian diselaraskan dengan data maupun analisa teknokratik untuk dapat dicapai melalui upaya-upaya yang diterjemahkan dalam misi. Misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi diharapkan dapat merepresentasikan penggambaran visi yang ingin dicapai.

Rumusan misi dalam RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah di DIY. Rumusan misi tersebut diupayakan memenuhi substansi tujuan dan sasaran dalam rangka:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Memajukan daerah;
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
4. Menyelesaikan persoalan daerah;
5. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota;
6. Provinsi dengan nasional; dan
7. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

Oleh karena itu perwujudan Panca Mulia dapat dirumuskan dalam dua misi pembangunan DIY tahun 2017–2022 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban

Rumusan misi pertama ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia 1, 2 dan 3. Melalui misi pertama ini, Pemda DIY, segenap pemangku kepentingan dan masyarakat akan mewujudkan peningkatan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan sekurangnya dari aspek:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dari aspek kesehatan dan akses infrastruktur dasar;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan;
- c. Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumberdaya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan termasuk didalamnya upaya



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெர்தகூவகநகவகநகபூதபயதயவகநகநக

menurunkan angka kemiskinan DIY, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan (Indeks Gini), dan menurunkan ketimpangan antar wilayah (Index Williamson).

d. Peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik yang memenuhi rasa aman, nyaman dan tertib bagi seluruh warga.

2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;

Rumusan misi kedua ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia ke-4 dan ke-5. Misi kedua tersebut akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, dan mewujudkan perilaku aparatur sipil negara yang berintegritas. Upaya mewujudkan misi kedua ini sekurangnya melalui:

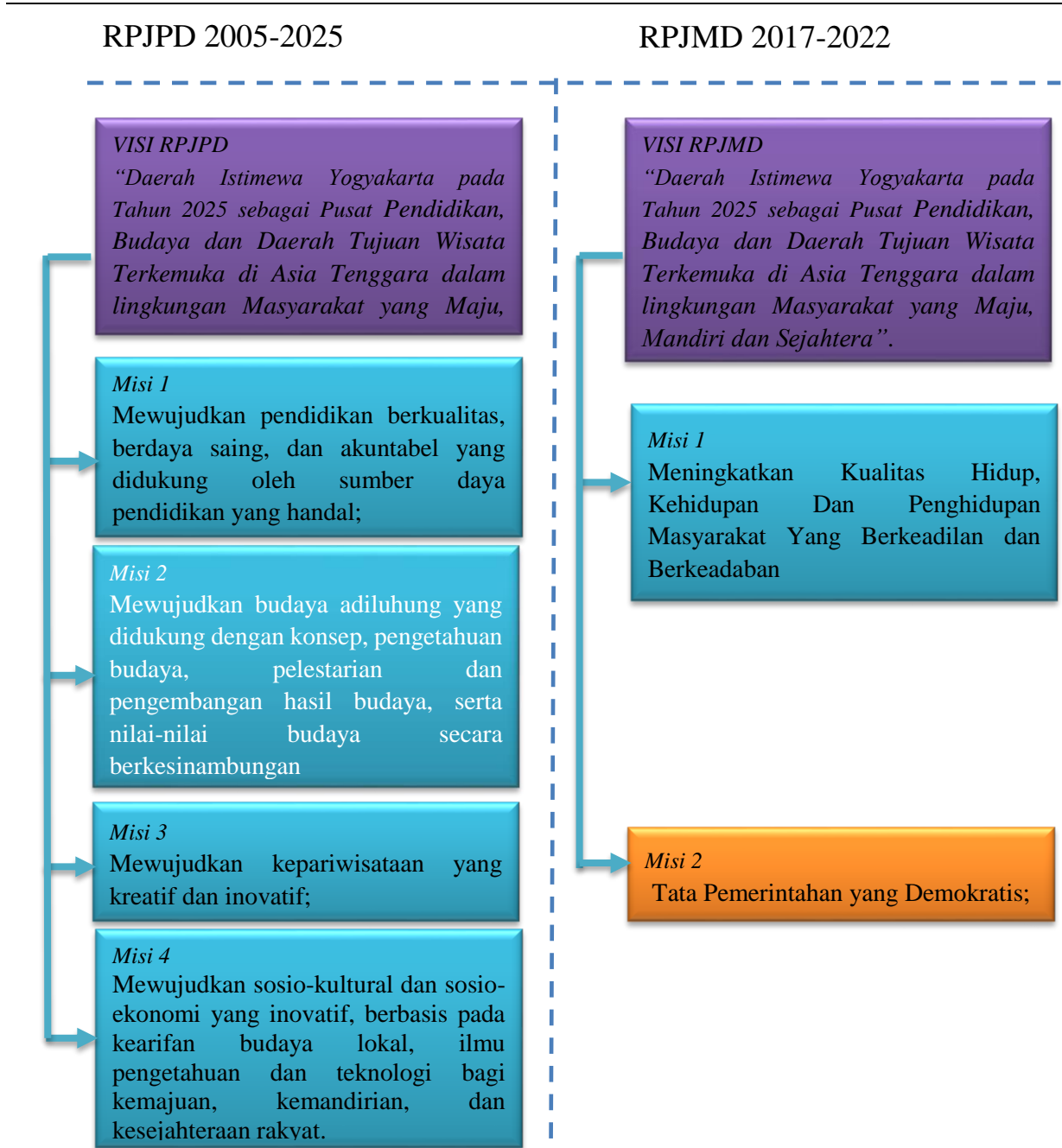
- Melakukan semangat perjumpaan dan silang birokrasi akan diletakkan sebagai strategi untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang demokratis, baik melalui "strategi silang vertikal" (keterbukaan di internal SKPD), "strategi silang horisontal" (keterbukaan antar SKPD), dan "strategi silang heterarki" (gabungan keterbukaan vertikal dan horisontal antar SKPD).
- Mendorong semangat "Perjumpaan" dan "Silang Kelembagaan" akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara, melalui "silang belajar" ke lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemerintahan DIY, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perekonomian swasta, serta belajar dari pengalaman-pengalaman daerah dan negara lain, dalam rangka menciptakan "Trilogi SDM-DIY" atau "E2-K" yakni: ETOS, ETIKA, dan KUALITAS. Etos, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan perubahan persepsi (*mind set*) dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantoran, menjadi tugas birokrasi sebagai "karya peradaban", yang mengandung arti bahwa semua karya pelayanan birokrasi adalah "karya peradaban", karena tanpa kontribusi karya pelayanan birokrasi, peradaban di DIY tentu tidak akan berkembang menjadi peradaban seperti yang dapat kita saksikan hari ini. Etika, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan "kemuliaan" dalam pengertian bersatunya "pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia", dalam rangka menciptakan SDM yang "berintegritas" yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kualitas, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan adanya pergeseran *mind set*, bahwa karya birokrasi tidak hanya dilihat sebagai "karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran", melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa karya birokrasi DIY adalah "karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga-lembaga lainnya (nasional maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan", maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang "diniati" untuk menjadi "karya berkualitas tinggi". Untuk itu, membangun birokrasi dengan "Ruh budaya karya berkualitas tinggi" akan menjadi penting bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Lima Tahun ke depan. Ketiga aspek "Trilogi SDM-DIY", merupakan satu kesatuan yang utuh. Negara Skandinavia dan Jepang, adalah contoh negara yang memiliki SDM dengan etos kerja tinggi, etika tinggi, dan budaya kualitas tinggi.

Misi kedua pada hakikatnya adalah penguatan secara menyeluruh kelembagaan Pemda DIY mulai dari kualitas individu, institusi hingga perbaikan pola kerja menjadi sebuah karya yang berkualitas tinggi yang untuk mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis. Dalam pelaksanaannya misi kedua menjadi sebuah *"initial condition"* untuk terwujudnya Misi pertama yaitu *"Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban"*.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦏꦂꦠ



Gambar 2.9. Keterkaitan Visi-Misi RPJPD dan Visi-Misi RPJMD

Sumber: RPJMD DIY 2017-2022, diolah

Tujuan

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan pembangunan daerah untuk mewujudkan misi selama kurun waktu lima tahun dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan pembangunan DIY tahun 2017-2022 adalah:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦺꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Tabel 2.8. Tujuan yang hendak dicapai

Misi	Tujuan
Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta
Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)

Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dalam rangka mengarahkan tujuan pembangunan agar lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien. Sasaran pembangunan DIY selama kurun waktu 2017-2022 adalah:

Tabel 2.9. Sasaran Pembangunan DIY

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Derajat Kualitas SDM Meningkatnya Derajat ekonomi masyarakat. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks Gini Persentase Angka Kemiskinan Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi Pertumbuhan Ekonomi IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan Indeks Williamson
Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan Meningkatnya Pengelolaan dan 	<ol style="list-style-type: none"> Opini BPK Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP) Persentase capaian sasaran Pelaksanaan Keistimewaan. bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Wibawa Nugraha Nugraha Nugraha

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
		pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan

2.2.3. Strategi, Arah Kebijakan Daerah, Program dan Indikator Kinerja Dalam RPJMD 2012-2017

Pencapaian visi dan misi yang dioperasionalkan dengan tujuan serta sasaran pembangunan membutuhkan strategi dan arah kebijakan yang harus dilakukan. Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Arah kebijakan sendiri merupakan kondisi yang dibutuhkan agar strategi yang telah ditentukan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pembangunan maka penting untuk memahami strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai pencapaian sasaran dan tujuan yang merupakan implementasi atas Visi Misi Pembangunan Daerah. Adapun strategi, arah kebijakan dan perwujudan atas program pada RPJMD DIY 2017-2022 dalam rangka implementasi dari strategi untuk mencapai sasaran yang ada adalah sebagai berikut:

Strategi

Strategi yang dijalankan dalam mendukung pencapaian misi, adalah sebagaimana di bawah ini:

VISI <i>Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja</i>		
MISI 1 <i>Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Berkeadaban</i>		
Tujuan	Sasaran :	Strategi :
Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta	1. Meningkatkan derajat kualitas SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas manajemen dan layanan pendidikan di DIY yang inklusif dan berkeadilan 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 3. Internalisasi nilai-nilai budaya yang berorientasi pada ketahanan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan
	2. Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuhkan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan 2. Pemenuhan layanan dasar masyarakat miskin. 3. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat 4. Memperluas kesempatan kerja, perlindungan pekerja, dan proporsi angkatan kerja dan lulusan pendidikan tinggi.
	3. Meningkatkan derajat kualitas hidup sosial masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat implementasi dan advokasi pengarusutamaan gender 2. Mengendalikan pertumbuhan penduduk 3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat 4. Pengembangan keterlindungan warga, keamanan dan ketertiban umum
	4. Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemeliharaan (pelindungan secara hukum dan fisik) dan pengembangan (penguatan dan pemanfaatan) kebudayaan untuk mewujudkan pemukiman yang inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DIY

	5. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	1. Mengoptimalkan kinerja sektor dominan dengan fokus ekonomi berkelanjutan dan ekonomi kreatif 2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar yang berketahanan dan berkelanjutan khususnya pada kawasan yang belum maju, maju tertekan, dan potensi cepat tumbuh 3. Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan 4. Pengurangan resiko bencana 5. Mencari alternatif pembiayaan non pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha/swasta
	6. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	1. Penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru 2. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

MISI 2 <i>Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis</i>		
Tujuan	Sasaran :	Strategi :
Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	1. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparansi, akuntabel, dan partisipatif 2. Optimalisasi aset-aset pemerintah daerah 3. Meningkatkan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan publik
	2. Meningkatnya kapasitas pengelolaan urusan keistimewaan	1. Mewujudkan sinergitas kelembagaan pemerintah provinsi kabupaten kota sampai dengan desa 2. Penguatan keistimewaan dalam perangkat daerah, kabupaten/kota, kecamatan, desa
	3. Meningkatnya fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa	1. Peningkatan kapasitas badan hukum (kasultanan dan kadipaten) dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten, desa 2. Pengembangan struktur dan pola ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten

Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan daerah ditetapkan untuk memperjelas strategi yang harus dioperasionalkan sebagai penjabaran dari misi, melalui serangkaian kebijakan dibawah ini:

MISI 1 <i>Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Berkeadaban</i>		
Sasaran :	Strategi :	Arah Kebijakan :
1. Meningkatkan derajat kualitas SDM	1. Meningkatkan kualitas manajemen dan layanan pendidikan di DIY yang inklusif dan berkeadilan 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. 2. Peningkatan kualitas pendidik dan sarana pendukung pendidikan. 3. Peningkatan layanan pendidikan di DIY. 4. Memperkuat dan mengembangkan pendidikan karakter.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

	<ol style="list-style-type: none"> Internalisasi nilai-nilai budaya yang berorientasi pada ketahanan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Peningkatan penganekaragaman dan keamanan pangan (termasuk olahan). Peningkatan pelayanan medis, rehab medis, rehab sosial dan dukungan dari masyarakat bagi penderita gangguan jiwa. Peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
<p>2. Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menumbuhkan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan Pemenuhan layanan dasar masyarakat miskin. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Memperluas kesempatan kerja, perlindungan pekerja, dan proporsi angkatan kerja dan lulusan pendidikan tinggi. 	<ol style="list-style-type: none"> Penumbuhan wirausaha baru yang mandiri Pemenuhan ketercukupan pangan dan gizi masyarakat Pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat miskin Peningkatan penduduk berakses air bersih layak Peningkatan penduduk berakses energi Penyediaan tempat tinggal yang layak dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah Peningkatan kapasitas dan akses usaha bagi rumah tangga miskin Meningkatkan peluang kesempatan kerja, memperbanyak penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas pekerja dan calon pekerja, pengawasan dan hubungan industrial.
<p>3. Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> Memperkuat implementasi dan advokasi pengarusutamaan gender Mengendalikan pertumbuhan penduduk Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Pengembangan keterlindungan warga, keamanan dan ketertiban umum 	<ol style="list-style-type: none"> Perencanaan dan penganggaran responsif gender Pengendalian usia perkawinan pertama penduduk Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Peningkatan ketertiban masyarakat dan ketaatan pada hukum Peningkatan akses dan kualitas Keluarga Berencana
<p>4. Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan</p>	<p>Meningkatkan pemeliharaan (pelindungan secara hukum dan fisik) dan pengembangan (penguatan dan pemanfaatan) kebudayaan untuk mewujudkan pemukiman yang inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menumbuhkembangkan kesadaran multi <i>stakeholder</i> pembangunan budaya benda dan tak benda. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan dan pengelolaan fasilitas kebudayaan Memperkuat lembaga pelestari budaya dan mengembangkan budaya di kawasan cagar budaya, saujana budaya, desa dan kelurahan budaya



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

<p>6. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan kinerja sektor Dominan dengan fokus ekonomi berkelanjutan dan ekonomi kreatif 2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar yang berketahanan dan berkelanjutan khususnya pada kawasan yang belum maju, maju tertekan, dan potensi cepat tumbuh 3. Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan 4. Pengurangan resiko bencana 5. Mencari alternatif pembiayaan non pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha/swasta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi, kualitas, inovasi dan nilai tambah produk-produk unggulan terutama pada sektor pertanian, perikanan, kehutanan, industri, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif 2. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian (PLP2B) 3. Penyediaan ruang dan infrastuktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 4. Memperkuat daya saing dan perlindungan tenaga kerja 5. Penyiapan regulasi yang kondusif untuk perekonomian 6. Mengembangkan sosial-ekonomi masyarakat dengan memberdayakan lembaga-lembaga organik lokal, mendayagunakan potensi wisata, budaya dan kearifan lokal untuk meningkatkan kemandirian masyarakat 7. Memperkuat partisipasi warga dan kelembagaan lokal dalam industri wisata 8. Memperkuat peran pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dalam kegiatan perekonomian daerah 9. Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan 10. Pengurangan resiko bencana secara komprehensif. 11. Menyediakan regulasi yang memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan usaha/swasta 12. Pembentukan lembaga yang khusus menangani KPBU dan investasi masyarakat lainnya 13. Melakukan <i>capacity building</i> terkait pembiayaan non APBD dengan intensif
<p>6. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru 2. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan transportasi dan infrastruktur pendukung Bandara <i>New Yogyakarta International Airport</i> (NYIA) 2. Pengembangan kawasan selatan sebagai pusat pertumbuhan 3. Pengembangan sektor pariwisata di kawasan prioritas yang terintegrasi dengan sektor lainnya. 4. Penyiapan potensi dan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong realisasi dan pemerataan investasi



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦏꦂꦠ

Adapun arah kebijakan terkait dengan Misi ke dua yakni Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis yang telah disesuaikan dengan sasaran dan strategi sebagaimana tertuang dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

MISI 2 <i>Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis</i>		
Sasaran :	Strategi :	Arah Kebijakan :
1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparansi, akuntabel, dan partisipatif 2. Optimalisasi aset-aset pemerintah daerah 3. Meningkatkan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi potensi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah 2. Menyusun regulasi pengelolaan keuangan 3. Membuat/mengembangkan sistem keuangan daerah yang terintegrasi 4. Peningkatan efektivitas pengelolaan aset deaerah melalui pemanfaatan dan kerjasama pihak ketiga.
2. Meningkatnya kapasitas pengelolaan urusan keistimewaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan sinergitas kelembagaan pemerintah provinsi kabupaten kota sampai dengan desa 2. Penguatan keistimewaan dalam perangkat daerah, kabupaten/kota, kecamatan, desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan regulasi sebagai acuan pelaksanaan urusan keistimewaan di tingkat kabupaten/kota sampai dengan desa 2. Internalisasi budaya pemerintahan pada pemda dan kabupaten/kota
3. Meningkatnya fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas badan hukum (kasultanan dan kadipaten) dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten, desa 2. Pengembangan struktur dan pola ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan fasilitasi penata usahaan, pemeliharaan dokumen dan pengawasan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan tanah desa. 2. Melakukan fasilitasi perlindungan, pemanfaatan dan pelepasan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan tanah desa

Program

Berikut kami sampaikan Program Pemerintah Daerah (Program Pemda) yang merupakan program yang menaungi program perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan.

Adapun program Pemda yang terdapat dalam misi pertama yakni meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban dengan 5 sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦺꦴꦩꦶꦠꦺꦤ꧀ꦪꦺꦴꦏꦿꦏꦂꦠ

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)
MISI Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban		
SASARAN Meningkatnya Derajat Kualitas SDM		
PROGRAM Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
	2. Harapan Lama Sekolah	
	3. Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif	
	4. Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju	
PROGRAM Program Peningkatan Usia Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
PROGRAM Program Pembangunan Sosial Masyarakat	1. Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak Berkategori Nindya ke Atas	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
	2. Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif	
	3. <i>Total Fertility Rate</i>	
	4. Perkembangan desa/kelurahan kategori cepat berkembang	
	5. Angka kejahatan per 100.000 penduduk (<i>crime rate</i>)	
SASARAN Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat.		
PROGRAM Program Penanggulangan Kemiskinan	1. Persentase peningkatan penumbuhan wirausaha baru	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
	2. Jumlah penduduk miskin (jumlah penduduk miskin (pada tahun n)	
	3. Pengeluaran per kapita masyarakat	
SASARAN Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan		
PROGRAM Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda	1. Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan
	2. Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan	
SASARAN Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan		
PROGRAM Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)	1. Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
	2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிய காவலாக காவலாக காவலாக காவலாக காவலாக

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)
	3. Jumlah desa mandiri budaya * (desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima): Target 2022 : 1 Desa mandiri budaya	
PROGRAM Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	1.Indeks Kualitas Air 2.Indeks Kualitas Udara 3.Indeks Kualitas Tutupan Lahan 4.Indeks Resiko Bencana	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
PROGRAM Peningkatan Keterpaduan program pemanfaatan Ruang	Persentase dukungan program pemda terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan
SASARAN Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah		
PROGRAM Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan	1. Persentase peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul) 2. Persentase penyediaan sarana dan prasarana transportasi	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Adapun program Pemda yang terdapat dalam misi kedua yakni Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis, dimana terdapat 3 sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Misi/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3
MISI Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis		
SASARAN Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan		
PROGRAM Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1.Kemampuan keuangan daerah 2. Optimalisasi aset-aset pemda DIY (satuanRp) 3.Nilai eksternal pelayanan publik 4.Nilai internal integritas organisasi 5.Nilai eksternal persepsi korupsi	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum
SASARAN Meningkatnya kapasitas pengelolaan keistimewaan		
PROGRAM Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah	1. Terwujudnya penetapan kepala daerah sesuai UU Keistimewaan. 2. Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdis kelembagaan	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan
SASARAN Meningkatnya fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa		
PROGRAM	Persentase tertib administrasi tanah kasultanan,kadipaten, dan tanah desa	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Wibisono
ꦮꦶꦧꦶꦱꦺꦤ꧀
ꦮꦶꦧꦶꦱꦺꦤ꧀
ꦮꦶꦧꦶꦱꦺꦤ꧀
ꦮꦶꦧꦶꦱꦺꦤ꧀
ꦮꦶꦧꦶꦱꦺꦤ꧀

Program Fasilitasi Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	Capaian pengelolaan (persen) ditambah capaian pemanfaatan (persen)	
---	--	--

Indikator

Indikator sasaran dan Indikator Kinerja Program Pemerintah Daerah (Pemda) tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022. Indikator capaian tersebut merupakan target yang akan dicapai dalam pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-1 (2018)	
			Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MISI				
Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban				
SASARAN Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,38	80,29	Gubernur dan Wakil Gubernur
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,80	69,91	
PROGRAM Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1.Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);	N/A	11,00	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
	2.Harapan Lama Sekolah	15,23	15,51	
	3.Peningkatan jumlah pemuda kader aktif	N/A	200	
	4.Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju	N/A	5,96	
PROGRAM Program Peningkatan Usia Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	74,71	75,06	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
PROGRAM Program Pembangunan Sosial Masyarakat	1. Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas	N/A	2	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
	2. Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif	N/A	20,72	
	3. <i>Total Fertility Rate</i>	N/A	2,1	
	4. Perkembangan desa/kelurahan kategori cepat berkembang	24	36	
	5. Angka kejahatan per 100.000 penduduk (<i>crime rate</i>)	N/A	12,59	
SASARAN	1.Indeks Gini	0,4400	0,3917	



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-1 (2018)	
			Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat.	2.Persentase angka kemiskinan	12,36	11,23	Gubernur dan Wakil Gubernur
PROGRAM Program penanggulangan Kemiskinan	1. Persentase peningkatan penumbuhan wirausaha baru	0,2	0,2	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
	2. Jumlah penduduk miskin (jumlah penduduk miskin (pada tahun n)	466.330	484.947	
	3. Pengeluaran per kapita masyarakat	13.229	13.552	
SASARAN Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase peningkatan jumlah budaya benda dan tak benda yang diapresiasi	10,98	11,46	Gubernur dan Wakil Gubernur
PROGRAM Program Pelestarian budaya benda dan tak benda	1. Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan	10,23%	11,22%	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan
	2. Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan	N/A	12,99	
SASARAN Meningkatnya perekonomian berkelanjutan	1.Pertumbuhan Ekonomi.	5,21	5,24	Gubernur dan Wakil Gubernur
	2.IKLH(Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	56,65	58,58	
	3. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	75	76,5	
	4. Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	11,11	21,11	
PROGRAM Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)	1. Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY	42,32	42,32	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
	2. Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	2,72	2,78	
	3. Jumlah desa mandiri budaya * (desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima): Target 2022 : 1 Desa mandiri budaya	N/A	0	
PROGRAM Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	1. Indeks Kualitas Air	29,17	34,20	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
	2. Indeks kualitas Udara	86,39	87,06	
	3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	52,84	55,50	
	4. Indeks Resiko Bencana	165 (tinggi)	155 (tinggi)	



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦺꦠꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦏꦂꦠ

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-1 (2018)	
			Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROGRAM Peningkatan Keterpaduan program pemanfaatan Ruang	Persentase dukungan program pemda terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang	N/A	74,7	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan
SASARAN Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	Indeks Williamson	0,4662	0,4559	Gubernur dan Wakil Gubernur
PROGRAM Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan	1. Persentase peningkatan PDRB pada kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul)	40,15	40,21	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
	2. Persentase penyediaan sarana dan prasarana transportasi	N/A	61	
MISI Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis				
SASARAN Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	1. Opini BPK	N/A	WTP	Gubernur dan Wakil Gubernur
	2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)	N/A	A	
PROGRAM Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1. Kemampuan keuangan daerah	Sedang	Sedang	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum
	2. Optimalisasi aset-aset Pemda DIY (satuan Rp)	N/A	9.424.672.744	
	3. Nilai eksternal pelayanan publik	N/A	8,50	
	4. Nilai internal integritas organisasi	4,16	4,20	
	5. Nilai eksternal persepsi korupsi	5,21	5,40	
SASARAN Meningkatnya kapasitas pengelolaan keistimewaan	Persentase capaian program urusan keistimewaan	N/A	N/A	Gubernur dan Wakil Gubernur
PROGRAM Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah	1. Terwujudnya penetapan kepala daerah sesuai UU Keistimewaan.	100	100	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan
	2. Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan Perdais kelembagaan	N/A	N/A	
SASARAN Meningkatnya fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa	Bidang tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	5.369	7.919	Gubernur dan Wakil Gubernur



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦼꦂꦶꦠꦺꦫꦠꦺꦩꦼꦂꦠꦺꦩꦼꦫꦺꦴꦢꦭꦏꦠꦼꦩꦼꦂꦠꦺꦩꦼꦫꦺꦴꦩꦿꦶꦥꦺꦤ꧀

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-1 (2018)	
			Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROGRAM Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	Persentase tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa.	19,83%	31,57%	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan

2.3. Tema Pembangunan Daerah Tahun 2019

Tema Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Internalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah dengan Tema RKPJMD Tahun 2019

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 merupakan bagian dari tahapan Lima Tahun III (2015–2019) Jangka Panjang Daerah DIY Tahun 2005-2025. Penekanan tahapan Lima Tahun III (2015–2019) adalah "*pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah.*"

2. Internalisasi dari pelaksanaan RPJMD DIY 2017-2022 yang merupakan tahun ke-2.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 disusun sebagai penjabaran dan pewujudan visi pembangunan jangka menengah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022 yaitu *Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja* (RPJMD DIY 2017-2022). Dari aspek kewilayahan mengindikasikan upaya Daerah Istimewa Yogyakarta untuk lebih memperhatikan pengembangan wilayah selatan termasuk terkait dengan angka kemiskinannya dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada, sehingga terjadinya pengurangan ketimpangan wilayah di DIY. Harapannya potensi-potensi tersebut dapat menjawab tantangan untuk pemeratakan kesejahteraan masyarakat DIY pada umumnya dan kawasan selatan khususnya.

3. Internalisasi Tema Rencana Kerja Pemerintah 2019 dengan Tema RKPJMD DIY tahun 2019

Rencana Kerja Pemerintah 2019 (RKP 2019) memiliki tema "*Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas.*" Tema Rencana Kerja Pemerintah 2019 tersebut memiliki *mainstreaming/* pengarusutamaan pada isu-isu terkait Revolusi Mental, Kesenjangan gender, lingkungan, *governance*. Adapun prioritas nasional yang mengikuti tema tersebut antara lain:

- Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar. Prioritas ini memiliki sasaran untuk mencapai Tingkat kemiskinan pada kisaran 7–8 persen; IPM menjadi 71,98 dan gini rasio menjadi 0,36 pada tahun 2019
- Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman.
- Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif.
- Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air
- Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦁꦢꦶꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦏꦂꦠ

Rencana Kerja Pembangunan Daerah DIY tahun 2019 mengusung Tema Pembangunan yaitu:

“Pemerataan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.” Tema RKPD DIY 2019 merupakan sub tema dari tema RKP 2019 dengan tautan kata kunci “Pemerataan Pembangunan.” Kelima prioritas nasional tersebut selaras dengan pendekatan tematik yang digunakan oleh Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2019 mendatang ialah sebagai berikut:

1. Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan
2. Mengatasi Ketimpangan Wilayah
3. Tindak Lanjut/Antisipasi Pembangunan *New Yogyakarta International Airport*
4. Pembiayaan Pembangunan

Dengan kebijakan yang diarahkan pemerataan pembangunan sebagai pernyataan pembuka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dimana pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan merupakan beberapa upaya untuk menuju pada kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut ditopang dengan asumsi kondisi regional DIY yang dijadikan asumsi dalam RAPBD DIY tahun 2018 adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,51 persen;
2. Tingkat Inflasi berkisar pada angka 2,57 persen;
3. Tingkat ICOR sebesar 5,34.

2.4. Kebijakan Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Daerah

2.4.1. Kebijakan Pendapatan

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah DIY, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD DIY.

Kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY Tahun Anggaran 2019 adalah:

1. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
2. Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungut pajak dan retribusi
3. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar pajak dan retribusi daerah;
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
5. Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke bank/lembaga keuangan;
6. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar SKPD yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
7. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
8. Meningkatkan partisipasi dan peranan Pihak Ketiga penyediaan biaya pembangunan daerah;
9. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
 - a. meningkatkan intensitas dan efektifitas penagihan tunggakan pajak;



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦫꦺꦁꦢꦼꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦼꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

- b. meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui: Peningkatan kapasitas sistem *on line* pembayaran pajak, *one-stop service*, *samsat keliling*, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan system dan prosedur pembayaran pajak.
- c. meningkatkan informasi dan komunikasi perpajakan daerah;
- d. meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah.
- e. membentuk sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment (e-payment)* dan secara bertahap menghapuskan system pembayaran pajak yang *face to face*.
- f. Pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah

Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2019 maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk:

- a. Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- c. Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan. Diharapkan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan retribusi daerah dapat menjadi sumber pendapatan yang bisa diandalkan. Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan difokuskan pada langkahlangkah sebagai berikut:
 - a. Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
 - b. Meningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan sasaran meningkatnya jumlah aset daerah yang dapat dikelola secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah
 - c. Mengoptimalkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan sasaran penguatan modal dan pengembangan usaha BUMD, perusahaan milik swasta dan lembaga keuangan non bank, dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi penyertaan modal.
 - d. Peningkatan kualitas Pelayanan Perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah, seperti bus *samsat keliling* dan sistem online kesamsatan yang telah dioperasikan saat ini. Selain itu, perlu pengembangan aplikasi STS online berbasis *accrual* pada SIPKD untuk memudahkan penatausahaan pendapatan daerah
 - e. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur terkait perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur terkait perpajakan sehingga animo masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi, dan aparatur dapat lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

- f. Peningkatan pengawasan pengelolaan PAD, dengan sasaran meningkatnya pengawasan pengelolaan PAD di DIY sehingga dapat diketahui permasalahan sejak dini, dan melaksanakan reward and punishment
- g. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitasi kepada masyarakat
- h. Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah
- i. Memperbaiki basis pajak dan kepatuhan Wajib Pajak melalui penguatan database pajak, optimalisasi penggunaan IT dan konfirmasi status Wajib Pajak

2. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil

Adapun yang menjadi dasar adanya perubahan kebijakan peningkatan anggaran transfer ke daerah dan dana desa adalah beberapa hal di bawah ini:

- a. Perlunya memperkuat ciri Indonesia sebagai negara Desentralisasi Fiskal.
- b. Adanya kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan telah diserahkan dari Pusat ke Daerah (sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).
- c. Perlunya peningkatan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung implementasi Nawacita. Yaitu cita:
 - 1) Ketiga: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI;
 - 2) Kelima: meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
 - 3) Keenam: meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
 - 4) Ketujuh: kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector domestik.
- d. Adanya UU Desa yang telah memberikan kewenangan dan sumber keuangan kepada desa antara lain berupa Dana Desa dari APBN. Pemerintah pusat juga melakukan reformulasi kebijakan DTU untuk Dana Alokasi Umum. Baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.
 - 1) Jangka Pendek
 - a) Perbaikan Formula khususnya perhitungan Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal sesuai dengan variabel yang sudah ditentukan di Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b) Perbaikan transparansi perhitungan DAU dengan mempertimbangkan bobot variabel dalam jangka menengah (tidak berubah tiap tahun).
 - c) Masa transisi penerapan revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. (dengan menghilangkan AD) bobot atau peranan AD secara bertahap terus dikurangi sehingga jika perubahan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 disepakati untuk menghilangkan AD maka formula baru akan lebih mudah dirancang tanpa AD.
 - 2) Jangka Menengah
Revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa formulasi DAU diubah dengan menghilangkan AD dan menerapkan konsep Celah Fiskal.
 - 3) Jangka Panjang
 - a) Formula DAU berdasarkan *cluster*. Misalnya berdasarkan kepadatan penduduk untuk Kab./Kota atau luas wilayah untuk Kabupaten dan jumlah penduduk untuk Kota.
 - b) Kebutuhan daerah diukur dari kebutuhan riil daerah yang dikaitkan dengan kinerjanya dari estimasi menurut fungsi dan cakupan pelayanan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

- c) Pengukuran Kapasitas Fiskal menggunakan variabel potensi berdasarkan rasio agregat (PAD + DBH Pajak) dan DBH SDA dengan basis terkait (*average effective taxes/revenue rate*).

Selain itu juga dilakukan reformulasi kebijakan DTU yang mencakup Dana Bagi Hasil. Adapun reformulasi yang dilakukan adalah:

- a. Memperbaiki cakupan DBH melalui: (a). menghapus DBH PBB P2 karena telah menjadi pajak daerah dan DBH SDA Perikanan karena akan dijadikan sebagai pungutan daerah (retribusi daerah). Dan (b). Menambah cakupan DBH PBB termasuk PBB sektor lainnya diluar sektor pertambangan. Perkebunan. Dan perhutanan.
- b. Memperbaiki porsi pembagian DBH kepada daerah penghasil berdasarkan prinsip *by origin*.
- c. Memperbaiki pola penyaluran DBH untuk memberi kepastian bagi penerimaan kas daerah. Dana Alokasi Khusus juga mengalami reformulasi. Dimana ini ditujukan untuk:
 - a. Memperbaiki ruang lingkup DAK hingga mencakup DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
 - b. Meningkatkan anggaran DAK. Termasuk dari pengalihan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang sudah menjadi kewenangan daerah ke DAK.
 - c. Mempertajam fokus DAK Fisik untuk mendanai bidang/sub bidang infrastruktur publik dan sarana/prasarana pelayanan dasar berdasarkan prioritas nasional dan kewilayahan (daerah perbatasan. Tertinggal. Dan kepulauan).
 - d. Melakukan revolusi sistem pengalokasian DAK dari semula bersifat top down menjadi bottom up untuk mengakomodasi kebutuhan daerah guna memenuhi pencapaian standar pelayanan nasional.
 - e. Tidak ada kewajiban menyediakan dana pendamping DAK.

Dana Insentif Daerah (DID) yang merupakan dana yang dialokasikan kepada Provinsi. Kabupaten. Dan Kota berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja juga mengalami reformulasi. Tujuan dari DID adalah memberikan penghargaan (*reward*) kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam beberapa bidang. Yaitu (i) Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan daerah (termasuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). (ii) Pelayanan Dasar Publik. Serta (iii) Perekonomian dan kesejahteraan (termasuk pengendalian tingkat inflasi). Reformulasi yang dilakukan meliputi anggaran. Dimana pagu diperbesar agar besaran alokasi yang diterima masing-masing daerah lebih signifikan sebagai instrumen fiskal untuk menstimulasi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal daerah. Kinerja pelayanan dasar. Dan kinerja ekonomi serta kesejahteraan daerah. Selain itu. Reformulasi juga dilakukan terhadap penggunaan dana yang tidak terikat pada fungsi pendidikan saja.

Perubahan mendasar yang lain adalah adanya peningkatan Anggaran Dana Desa. Adapun dasar kebijakan tersebut adalah:

- a. Mempercepat perwujudan kesejahteraan umum masyarakat desa melalui peningkatan pelayanan publik desa dan peningkatan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
- b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Pasal 72 ayat (2) dan Penjelasan: Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Pasal 30 A ayat (1): Pengalokasian anggaran Dana Desa dalam APBN dilakukan secara bertahap. Yang dilaksanakan sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦫꦤ꧀ꦢꦂꦺꦫꦲꦢꦂꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦼꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

- 1) Tahun Anggaran 2015 paling sedikit sebesar 3% (tiga per seratus) dari anggaran Transfer ke Daerah;
- 2) Tahun Anggaran 2016 paling sedikit sebesar 6% (enam per seratus) dari anggaran Transfer ke Daerah; dan
- 3) Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari anggaran Transfer ke Daerah.

3. Peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam jangka waktu 2011 – 2015 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 166.7 persen per tahun. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya Dana Keistimewaan yang berlaku sejak tahun 2013 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan Dana Keistimewaan untuk dialokasikan pada empat urusan keistimewaan yakni Kelembagaan. Kebudayaan. Pertanahan dan Tata Ruang. Selama tiga tahun pelaksanaan. Dana Keistimewaan mengalami kenaikan signifikan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 86 persen per tahun.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Hibah. Dana Darurat. DBH Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya. Dana Penyesuaian dan Otsus. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemda Lainnya. Serta Lain-Lain. Untuk DIY selama 2009-2016 hanya ada 2 sumber yang termasuk dalam kelompok ini. Yaitu Hibah dan Dana Penyesuaian dan Otsus. Persentase Dana Penyesuaian dan Otsus terhadap Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2009 hanya sebesar 40 persen. Namun sejak tahun 2012 secara signifikan. Rata-rata menjadi sekitar 98 persen.

2.4.2. Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan mengedepankan *money follow program priority* yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat (gaji pegawai, air minum, listrik, air bersih, dsb.), kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, penanggulangan kemiskinan, dan penurunan ketimpangan wilayah. Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi. Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan focus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan kewilayahan khususnya pada masing-masing kabupaten/kota secara administratif.

Belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga harus memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerjasama pemerintah dan swasta, peran CSR, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi.

Struktur belanja dalam APBD Tahun 2019 masih mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dibagi atas kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦗꦸꦫꦠꦤ꧀ꦢꦼꦫꦤ꧀ꦢꦼꦫꦤ꧀ꦠꦶꦩꦼꦮꦪꦏꦂꦠ

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, DIY tidak melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman.
- c. Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
- d. Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.
- e. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
- f. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundangundangan yang terkait.
- g. Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦗꦸꦢꦸꦫꦺꦤꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦏꦂꦠ

- b. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/ pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- c. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
- d. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:
 - 1) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
 - 2) Prioritas
Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Tematik pembangunan tahun 2019 terdiri dari penanggulangan kemiskinan, ketimpangan wilayah, pembiayaan pembangunan dan pembangunan bandara NYIA.
 - 3) Tolok ukur dan target kinerja
Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
 - 4) Optimalisasi belanja langsung
Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 5) Transparansi dan Akuntabel
Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

2.4.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. Arah kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit. Lebih lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan pembangunan daerah.

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SiLPA).



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிய கௌரவம் கௌரவம் கௌரவம் கௌரவம் கௌரவம்

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2019 sebesar Rp5.713.924.265.502,71 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.015.621.583.744,71, Pendapatan Transfer sebesar Rp3.689.782.581.758,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp8.520.100.000,00. Sedangkan realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 adalah sebesar Rp5.699.357.232.440,50 yang terdiri dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.082.795.334.434,50, Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp3.608.013.435.006,00 dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp8.548.463.000,00.

Anggaran Belanja dan Transfer Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2019 sebesar Rp5.978.131.574.404,65 yang terdiri dari: Belanja Operasi sebesar Rp3.825.401.501.504,45, Belanja Modal sebesar Rp1.119.929.210.575,00, Belanja Tak Terduga sebesar Rp4.319.672.244,00 dan Transfer sebesar Rp1.028.481.190.081,20.

Sedangkan Realisasi Belanja dan Transfer Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp5.544.650.430.330,02 terdiri dari: Belanja Operasi sebesar Rp3.488.668.163.097,46, Belanja Modal sebesar Rp1.035.203.185.484,85, Belanja Tak Terduga sebesar Rp0,00 dan Transfer sebesar Rp1.020.779.081.747,71.

Dengan demikian terjadi Surplus sebesar Rp154.706.802.110,48 sedangkan Pembiayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penerimaan sebesar Rp474.458.156.884,94 dan pengeluaran sebesar Rp208.597.000.000,00 sehingga Pembiayaan netto sebesar Rp265.861.156.884,94. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp420.567.958.995,42 secara rinci realisasi APBD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berkurang	
	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
URUSAN KONKUREN WAJIB				
PENDIDIKAN				
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA				
PENDAPATAN DISDIKPORA	4.172.172.275,00	5.105.401.742,00	933.229.467,00	122,37 %
Pendapatan Asli Daerah	4.172.172.275,00	5.105.401.742,00	933.229.467,00	122,37 %
Hasil Retribusi Daerah	1.245.000.000,00	1.637.082.000,00	392.082.000,00	131,49 %
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.927.172.275,00	3.468.319.742,00	541.147.467,00	118,49 %



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

BELANJA DISDIKORA	1.377.200.694.422,00	1.272.820.910.035,00	(104.379.784.387,00)	92,42	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	781.006.363.973,00	729.047.120.074,00	(51.959.243.899,00)	93,35	%
Belanja Pegawai	781.006.363.973,00	729.047.120.074,00	(51.959.243.899,00)	93,35	%
BELANJA LANGSUNG	596.194.330.449,00	543.773.789.961,00	(52.420.540.488,00)	91,21	%
Program Administrasi Perkantoran	13.153.715.700,00	11.274.077.057,00	(1.879.638.643,00)	85,71	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.469.485.900,00	5.995.803.708,00	(473.682.192,00)	92,68	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	1.376.529.000,00	1.142.060.000,00	(234.469.000,00)	82,97	%
Program Pendidikan Menengah	442.387.974.187,00	410.320.117.768,00	(32.067.856.419,00)	92,75	%
Program Layanan Pendidikan Khusus	25.227.791.300,00	23.445.540.984,00	(1.782.250.316,00)	92,94	%
Program Peningkatan Pelayanan Pelatihan Pendidikan Teknik	10.203.913.462,00	7.580.778.221,00	(2.623.135.241,00)	74,29	%
Program Peningkatan Mutu Pendidikan	14.047.891.000,00	12.515.582.196,00	(1.532.308.804,00)	89,09	%
Program Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	4.113.655.500,00	3.899.545.950,00	(214.109.550,00)	94,80	%
Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	52.036.210.400,00	46.570.869.854,00	(5.465.340.546,00)	89,50	%
Program Layanan Pendidikan Menengah Bantul	1.263.069.000,00	1.150.092.500,00	(112.976.500,00)	91,06	%
Program Layanan Pendidikan Menengah Sleman	1.218.045.000,00	915.488.589,00	(302.556.411,00)	75,16	%
Program Layanan Pendidikan Menengah Kulon Progo	1.376.160.000,00	1.271.259.800,00	(104.900.200,00)	92,38	%
Program Layanan Pendidikan Menengah Gunung Kidul	1.214.725.000,00	876.699.700,00	(338.025.300,00)	72,17	%
Program Layanan Pendidikan Menengah Kota	1.443.234.000,00	1.299.383.600,00	(143.850.400,00)	90,03	%
Program Pembinaan Kepemudaan	9.124.421.000,00	8.699.534.674,00	(424.886.326,00)	95,34	%
Program Pembinaan Olahraga	11.537.510.000,00	6.816.955.360,00	(4.720.554.640,00)	59,09	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
KESEHATAN					
DINAS KESEHATAN					
PENDAPATAN DINAS KESEHATAN	37.697.800.000,00	40.391.634.056,22	2.693.834.056,22	107,15	%
Pendapatan Asli Daerah	37.697.800.000,00	40.391.634.056,22	2.693.834.056,22	107,15	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	37.697.800.000,00	40.391.634.056,22	2.693.834.056,22	107,15	%
BELANJA DINAS KESEHATAN	187.957.215.609,84	153.068.648.116,00	(34.888.567.493,84)	81,44	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	43.302.839.243,00	41.704.050.246,00	(1.598.788.997,00)	96,31	%
Belanja Pegawai	43.302.839.243,00	41.704.050.246,00	(1.598.788.997,00)	96,31	%
BELANJA LANGSUNG	144.654.376.366,84	111.364.597.870,00	(33.289.778.496,84)	76,99	%
Program Administrasi Perkantoran	2.116.126.500,00	1.651.993.827,00	(464.132.673,00)	78,07	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	817.293.050,00	572.005.746,00	(245.287.304,00)	69,99	%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	52.960.000,00	49.206.950,00	(3.753.050,00)	92,91	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	407.147.000,00	385.084.750,00	(22.062.250,00)	94,58	%
Program Pelayanan Kesehatan	3.601.123.440,00	3.195.555.800,00	(405.567.640,00)	88,74	%
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	3.157.232.600,00	2.838.323.604,00	(318.908.996,00)	89,90	%
Program Kesehatan Masyarakat	4.280.023.650,00	3.973.949.090,00	(306.074.560,00)	92,85	%
Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD BALABKES	11.502.800.208,00	10.058.140.074,00	(1.444.660.134,00)	87,44	%



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Program Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSJ GRHASIA	32.317.948.662,55	21.743.182.892,00	(10.574.765.770,55)	67,28	%
Program Pelayanan Kesehatan pada BLUD RS PARU RESPIRA	22.890.475.897,00	16.559.702.144,00	(6.330.773.753,00)	72,34	%
Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	744.752.000,00	696.096.481,00	(48.655.519,00)	93,47	%
Program Pelayanan Pelatihan Kesehatan Pada BLUD BAPELKES	20.765.309.256,00	16.973.295.897,00	(3.792.013.359,00)	81,74	%
Program Pelayanan Pada BLUD BAPELJAMKESSOS	42.001.184.103,29	32.668.060.615,00	(9.333.123.488,29)	77,78	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL					
PENDAPATAN DINAS PUP-ESDM	5.343.978.630,00	6.764.586.695,00	1.420.608.065,00	126,58	%
Pendapatan Asli Daerah	5.343.978.630,00	6.764.586.695,00	1.420.608.065,00	126,58	%
Hasil Retribusi Daerah	875.124.630,00	1.038.563.700,00	163.439.070,00	118,68	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4.468.854.000,00	5.726.022.995,00	1.257.168.995,00	128,13	%
BELANJA DINAS PUP-ESDM	425.841.667.543,00	348.234.671.608,68	(77.606.995.934,32)	81,78	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.816.849.206,00	17.079.415.209,00	(737.433.997,00)	95,86	%
Belanja Pegawai	17.816.849.206,00	17.079.415.209,00	(737.433.997,00)	95,86	%
BELANJA LANGSUNG	408.024.818.337,00	331.155.256.399,68	(76.869.561.937,32)	81,16	%
Program Administrasi Perkantoran	15.146.538.400,00	12.454.335.930,00	(2.692.202.470,00)	82,23	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.883.535.150,00	7.352.213.907,00	(531.321.243,00)	93,26	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	976.844.000,00	971.540.300,00	(5.303.700,00)	99,46	%
Program Penyelenggaraan Jalan	146.376.509.025,00	125.277.409.850,00	(21.099.099.175,00)	85,59	%
Program Pelayanan Jasa Pengujian dan Pembinaan Jasa Konstruksi	3.748.580.000,00	2.282.557.097,00	(1.466.022.903,00)	60,89	%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Sanitasi	23.270.373.700,00	20.010.152.722,68	(3.260.220.977,32)	85,99	%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	11.716.560.500,00	10.141.712.905,00	(1.574.847.595,00)	86,56	%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Baku	28.205.994.500,00	17.788.296.734,00	(10.417.697.766,00)	63,07	%
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	21.641.291.969,00	19.341.946.028,00	(2.299.345.941,00)	89,38	%
Program Penyelenggaraan Perumahan	69.930.728.160,00	53.700.840.870,00	(16.229.887.290,00)	76,79	%
Program Penyelenggaraan PSU Kawasan	54.298.850.000,00	42.924.110.134,00	(11.374.739.866,00)	79,05	%
Program Penyelenggaraan Energi dan Ketenagalistrikan	12.620.051.433,00	7.487.799.064,00	(5.132.252.369,00)	59,33	%
Program Pengelolaan Air Tanah dan Geologi	9.105.620.000,00	8.592.943.344,00	(512.676.656,00)	94,37	%
Program Pengelolaan Pertambangan	3.103.341.500,00	2.829.397.514,00	(273.943.986,00)	91,17	%
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG					
BELANJA	522.898.892.062,00	516.796.766.512,83	(6.102.125.549,17)	98,83	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.942.018.396,00	2.833.908.277,00	(108.110.119,00)	96,33	%
Belanja Pegawai	2.942.018.396,00	2.833.908.277,00	(108.110.119,00)	96,33	%
BELANJA LANGSUNG	519.956.873.666,00	513.962.858.235,83	(5.994.015.430,17)	98,85	%
Program Administrasi Perkantoran	1.455.480.280,00	1.220.538.839,00	(234.941.441,00)	83,86	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.170.890.000,00	915.400.553,00	(255.489.447,00)	78,18	%



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	231.712.000,00	224.019.625,00	(7.692.375,00)	96,68	%
Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	850.554.500,00	775.614.445,00	(74.940.055,00)	91,19	%
Program Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang	1.856.497.700,00	1.715.481.101,00	(141.016.599,00)	92,40	%
Program Tertib Administrasi Pertanahan	249.203.500,00	239.671.100,00	(9.532.400,00)	96,17	%
Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	15.240.451.450,00	14.480.080.999,00	(760.370.451,00)	95,01	%
Program Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	3.440.625.900,00	3.315.497.350,00	(125.128.550,00)	96,36	%
Program Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Pertanahan	300.000.000,00	283.000.000,00	(17.000.000,00)	94,33	%
Program Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	6.276.735.650,00	5.903.975.705,00	(372.759.945,00)	94,06	%
Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	487.148.265.086,00	483.318.340.790,83	(3.829.924.295,17)	99,21	%
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	1.251.207.600,00	1.133.137.728,00	(118.069.872,00)	90,56	%
Program Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	485.250.000,00	438.100.000,00	(47.150.000,00)	90,28	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
BELANJA	11.381.950.614,00	10.709.403.207,00	(847.967.617,00)	94,09	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.510.333.014,00	3.342.327.350,00	(168.005.664,00)	95,21	%
Belanja Pegawai	3.510.333.014,00	3.342.327.350,00	(168.005.664,00)	95,21	%
BELANJA LANGSUNG	7.871.617.600,00	7.367.075.857,00	(679.961.953,00)	93,59	%
Program Administrasi Perkantoran	1.412.283.000,00	1.311.656.428,00	(100.626.572,00)	92,87	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	797.961.000,00	691.620.429,00	(106.340.571,00)	86,67	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	374.672.000,00	354.120.460,00	(20.551.540,00)	94,51	%
Program Pendidikan Politik Masyarakat	1.117.198.600,00	993.827.350,00	(123.371.250,00)	88,96	%
Program Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	3.337.977.000,00	3.217.378.600,00	(120.598.400,00)	96,39	%
Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi	831.526.000,00	798.472.590,00	(33.053.410,00)	96,02	%
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
BELANJA	18.368.742.773,00	17.575.183.677,00	(793.559.096,00)	95,68	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.573.804.373,00	7.297.168.501,00	(276.635.872,00)	96,35	%
Belanja Pegawai	7.573.804.373,00	7.297.168.501,00	(276.635.872,00)	96,35	%
BELANJA LANGSUNG	10.794.938.400,00	10.278.015.176,00	(516.923.224,00)	95,21	%
Program Administrasi Perkantoran	1.170.588.000,00	1.093.707.168,00	(76.880.832,00)	93,43	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.621.307.000,00	1.566.877.736,00	(54.429.264,00)	96,64	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	336.208.900,00	292.080.250,00	(44.128.650,00)	86,87	%
Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1.255.547.500,00	1.136.506.816,00	(119.040.684,00)	90,52	%
Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	4.119.538.000,00	4.022.637.026,00	(96.900.974,00)	97,65	%



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦏꦸꦫꦏꦠꦫ

Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan	5.557.207.750,00	5.377.459.997,00	(179.747.753,00)	96,77	%
Program Penanganan Fakir Miskin	4.889.739.000,00	4.843.471.050,00	(46.267.950,00)	99,05	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
TENAGA KERJA					
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
PENDAPATAN	2.113.944.000,00	2.835.118.500,00	721.174.500,00	134,12	%
Pendapatan Asli Daerah	2.113.944.000,00	2.835.118.500,00	721.174.500,00	134,12	%
Retribusi Daerah	1.376.744.000,00	1.809.262.000,00	432.518.000,00	131,42	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	737.200.000,00	1.025.856.500,00	288.656.500,00	139,16	%
BELANJA DISNAKERTRANS	37.816.155.997,00	35.881.196.303,00	(1.934.959.694,00)	94,88	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.573.968.185,00	13.069.511.453,00	(504.456.732,00)	96,28	%
Belanja Pegawai	13.573.968.185,00	13.069.511.453,00	(504.456.732,00)	96,28	%
BELANJA LANGSUNG	24.242.187.812,00	22.811.684.850,00	(1.430.502.962,00)	94,10	%
Program Administrasi Perkantoran	3.359.081.662,00	3.058.888.028,00	(300.193.634,00)	91,06	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.020.531.450,00	2.893.811.600,00	(126.719.850,00)	95,80	%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	301.467.000,00	292.242.170,00	(9.224.830,00)	96,94	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	589.105.200,00	544.537.180,00	(44.568.020,00)	92,43	%
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	8.063.994.000,00	7.558.449.162,00	(505.544.838,00)	93,73	%
Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	1.128.790.000,00	1.102.266.900,00	(26.523.100,00)	97,65	%
Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	812.136.000,00	804.986.800,00	(7.149.200,00)	99,12	%
Program Pembinaan Pelatihan Stadarisasi dan Pemagangan	1.781.305.000,00	1.735.530.550,00	(45.774.450,00)	97,43	%
Program Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi	4.187.696.500,00	3.858.782.600,00	(328.913.900,00)	92,15	%
Program Pengujian Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja	998.081.000,00	962.189.860,00	(35.891.140,00)	96,40	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK					
BELANJA	12.772.504.753,00	11.880.800.554,00	(891.704.199,00)	93,02	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.204.096.559,00	3.097.025.478,00	(107.071.081,00)	96,66	%
Belanja Pegawai	3.204.096.559,00	3.097.025.478,00	(107.071.081,00)	96,66	%
BELANJA LANGSUNG	9.568.408.194,00	8.783.775.076,00	(784.633.118,00)	91,80	%
Program Administrasi Perkantoran	1.396.259.014,00	1.313.156.449,00	(83.102.565,00)	94,05	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	842.068.980,00	837.334.948,00	(4.734.032,00)	99,44	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	256.926.500,00	243.960.944,00	(12.965.556,00)	94,95	%
Program Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	3.642.557.250,00	3.233.141.006,00	(409.416.244,00)	88,76	%
Program Perlindungan Perempuan dan Anak	872.650.950,00	773.818.373,00	(98.832.577,00)	88,67	%
Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	768.573.500,00	697.742.350,00	(70.831.150,00)	90,78	%



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா குடிமகனா குடிமகனா குடிமகனா குடிமகனா குடிமகனா

Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.789.372.000,00	1.684.621.006,00	(104.750.994,00)	94,15	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
LINGKUNGAN HIDUP					
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN					
PENDAPATAN	17.607.172.662,00	18.536.311.883,08	929.139.221,08	105,28	%
Pendapatan Asli Daerah	17.607.172.662,00	18.536.311.883,08	929.139.221,08	105,28	%
Retribusi Daerah	15.487.088.537,00	16.008.978.633,08	521.890.096,08	103,37	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.120.084.125,00	2.527.333.250,00	407.249.125,00	119,21	%
BELANJA DLHK	71.158.490.830,00	57.042.253.228,00	(14.116.237.602,00)	80,16	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	21.426.406.970,00	20.627.321.201,00	(799.085.769,00)	96,27	%
Belanja Pegawai	21.426.406.970,00	20.627.321.201,00	(799.085.769,00)	96,27	%
BELANJA LANGSUNG	49.732.083.860,00	36.414.932.027,00	(13.317.151.833,00)	73,22	%
Program Administrasi Perkantoran	5.267.044.120,00	4.639.520.168,00	(627.523.952,00)	88,09	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.052.801.500,00	3.229.303.256,00	(823.498.244,00)	79,68	%
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	26.364.000,00	26.344.000,00	(20.000,00)	99,92	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	532.773.700,00	319.257.000,00	(213.516.700,00)	59,92	%
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	2.213.360.600,00	2.031.866.900,00	(181.493.700,00)	91,80	%
Program Pengkajian dan Penataan Lingkungan Hidup	1.585.290.200,00	1.156.241.060,00	(429.049.140,00)	72,94	%
Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	2.546.713.870,00	2.112.417.841,00	(434.296.029,00)	82,95	%
Program Pengelolaan Tutupan Vegetasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	13.282.964.170,00	4.147.584.958,00	(9.135.379.212,00)	31,22	%
Program Pengelolaan Persampahan Regional	8.736.996.000,00	8.395.964.760,00	(341.031.240,00)	96,10	%
Program Perencanaan dan Bina Usaha Kehutanan	751.573.000,00	704.239.720,00	(47.333.280,00)	93,70	%
Program Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	8.600.780.200,00	7.770.444.964,00	(830.335.236,00)	90,35	%
Program Pengelolaan Hutan Konversi	1.573.274.500,00	1.332.739.400,00	(240.535.100,00)	84,71	%
Program Pengembangan Pembibitan Kehutanan	562.148.000,00	549.008.000,00	(13.140.000,00)	97,66	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
PERHUBUNGAN					
DINAS PERHUBUNGAN					
PENDAPATAN DINAS PERHUBUNGAN	2.142.059.000,00	2.307.568.600,00	165.509.600,00	107,73	%
Pendapatan Asli Daerah	2.142.059.000,00	2.307.568.600,00	165.509.600,00	107,73	%
Hasil Retribusi Daerah	1.511.988.000,00	1.618.707.000,00	106.719.000,00	107,06	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	630.071.000,00	688.861.600,00	58.790.600,00	109,33	%
BELANJA	37.934.053.616,00	34.599.872.064,00	(3.334.181.552,00)	91,21	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.738.129.446,00	7.430.797.886,00	(307.331.560,00)	96,03	%
Belanja Pegawai	7.738.129.446,00	7.430.797.886,00	(307.331.560,00)	96,03	%
BELANJA LANGSUNG	30.195.924.170,00	27.169.074.178,00	(3.026.849.992,00)	89,98	%
Program Admnistrasi Perkantoran	4.327.668.640,00	3.794.154.438,00	(533.514.202,00)	87,67	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.197.910.000,00	1.163.145.490,00	(34.764.510,00)	97,10	%



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦏ꧀ꦢꦶꦠꦶꦩꦺꦴꦏꦫꦠ

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	627.800.000,00	620.767.852,00	(7.032.148,00)	98,88	%
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	4.502.353.510,00	4.151.615.876,00	(350.737.634,00)	92,21	%
Program Pengembangan Keselamatan Transportasi	14.191.077.940,00	12.388.421.352,00	(1.802.656.588,00)	87,30	%
Program Pengembangan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	3.564.580.000,00	3.436.714.710,00	(127.865.290,00)	96,41	%
Program Pengembangan dan Pengelolaan Simpul Transportasi dan Perparkiran	1.784.534.080,00	1.614.254.460,00	(170.279.620,00)	90,46	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
PENDAPATAN DINAS KOMINFO	2.800.000,00	4.800.000,00	2.000.000,00	171,43	%
Pendapatan Asli Daerah	2.800.000,00	4.800.000,00	2.000.000,00	171,43	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.800.000,00	4.800.000,00	2.000.000,00	171,43	%
BELANJA	22.818.715.139,00	21.563.930.125,00	(1.254.785.014,00)	94,50	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.635.430.521,00	3.528.060.016,00	(107.370.505,00)	97,05	%
Belanja Pegawai	3.635.430.521,00	3.528.060.016,00	(107.370.505,00)	97,05	%
BELANJA LANGSUNG	19.183.284.618,00	18.035.870.109,00	(1.147.414.509,00)	94,02	%
Program Administrasi Perkantoran	1.636.201.878,00	1.393.603.643,00	(242.598.235,00)	85,17	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.151.409.000,00	942.809.567,00	(208.599.433,00)	81,88	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	332.803.000,00	326.300.110,00	(6.502.890,00)	98,05	%
Program Informasi dan Komunikasi Publik	3.689.860.360,00	3.405.640.250,00	(284.220.110,00)	92,30	%
Program Layanan Teknologi Informasi	7.471.532.000,00	7.323.345.150,00	(148.186.850,00)	98,02	%
Program Pengembangan Aplikasi Informatika dan Persandian	4.901.478.380,00	4.644.171.389,00	(257.306.991,00)	94,75	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH					
PENDAPATAN DINAS KOPERASI DAN UKM	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	%
Pendapatan Asli Daerah	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	%
BELANJA	17.549.757.832,00	16.662.266.097,00	(887.491.735,00)	94,94	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.876.494.624,00	2.786.488.116,00	(90.006.508,00)	96,87	%
Belanja Pegawai	2.876.494.624,00	2.786.488.116,00	(90.006.508,00)	96,87	%
BELANJA LANGSUNG	14.673.263.208,00	13.875.777.981,00	(797.485.227,00)	94,57	%
Program Administrasi Perkantoran	1.035.598.188,00	968.573.900,00	(67.024.288,00)	93,53	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.281.223.000,00	3.093.109.995,00	(188.113.005,00)	94,27	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	206.131.220,00	194.308.226,00	(11.822.994,00)	94,26	%
Program Pengembangan UKM	4.857.372.940,00	4.622.797.704,00	(234.575.236,00)	95,17	%
Program Peningkatan Akses Pembiayaan	428.979.440,00	392.336.388,00	(36.643.052,00)	91,46	%
Program Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru	1.487.438.760,00	1.362.741.000,00	(124.697.760,00)	91,62	%



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

Program Pengembangan Perkoperasian	3.376.519.660,00	3.241.910.768,00	(134.608.892,00)	96,01	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
PENANAMAN MODAL					
DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL					
PENDAPATAN	310.295.920,00	226.090.000,00	(84.205.920,00)	72,86	%
Pendapatan Asli Daerah	310.295.920,00	226.090.000,00	(84.205.920,00)	72,86	%
Hasil Retribusi Daerah	310.295.920,00	224.890.000,00	(85.405.920,00)	72,48	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-	%
BELANJA	10.978.828.423,00	9.812.580.624,00	(1.166.247.799,00)	89,38	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.244.389.783,00	3.044.201.260,00	(200.188.523,00)	93,83	%
Belanja Pegawai	3.244.389.783,00	3.044.201.260,00	(200.188.523,00)	93,83	%
BELANJA LANGSUNG	7.734.438.640,00	6.768.379.364,00	(966.059.276,00)	87,51	%
Program Administrasi Perkantoran	1.395.053.880,00	1.168.052.873,00	(227.001.007,00)	83,73	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	756.732.140,00	669.296.796,00	(87.435.344,00)	88,45	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	404.745.840,00	379.979.620,00	(24.766.220,00)	93,88	%
Program Promosi Investasi	1.588.524.420,00	1.361.789.439,00	(226.734.981,00)	85,73	%
Program Pelayanan Perijinan	1.401.116.040,00	1.188.037.155,00	(213.078.885,00)	84,79	%
Program Peningkatan Iklim Investasi	1.203.395.320,00	1.095.746.613,00	(107.648.707,00)	91,05	%
Program Kemudahan Berusaha dan Pelayanan Pengaduan	984.871.000,00	905.476.868,00	(79.394.132,00)	91,94	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
KEBUDAYAAN					
DINAS KEBUDAYAAN					
PENDAPATAN DINAS KEBUDAYAAN	761.800.000,00	986.235.500,00	224.435.500,00	129,46	%
Pendapatan Asli Daerah	761.800.000,00	986.235.500,00	224.435.500,00	129,46	%
Hasil Retribusi Daerah	755.800.000,00	961.735.500,00	205.935.500,00	127,25	%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	6.000.000,00	24.500.000,00	18.500.000,00	408,33	%
BELANJA DINAS KEBUDAYAAN	398.563.951.120,00	376.162.231.367,46	(22.401.719.752,54)	94,38	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.302.013.389,00	8.038.351.657,00	(263.661.732,00)	96,82	%
Belanja Pegawai	8.302.013.389,00	8.038.351.657,00	(263.661.732,00)	96,82	%
BELANJA LANGSUNG	390.261.937.731,00	368.123.879.710,46	(22.138.058.020,54)	94,33	%
Program Administrasi Perkantoran	5.805.289.405,00	5.330.079.228,00	(475.210.177,00)	91,81	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	994.129.900,00	807.600.136,00	(186.529.764,00)	81,24	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	260.536.500,00	181.116.150,00	(79.420.350,00)	69,52	%
Program Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	21.992.154.875,00	19.938.862.974,00	(2.053.291.901,00)	90,66	%
Program Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	2.893.294.900,00	2.803.795.489,00	(89.499.411,00)	96,91	%
Program Penguatan Museum Sonobudoyo	41.447.889.723,00	40.544.639.173,00	(903.250.550,00)	97,82	%
Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	96.507.544.486,00	94.329.867.135,00	(2.177.677.351,00)	97,74	%
Program Pengelolaan Taman Budaya	16.079.000.580,00	15.770.634.337,00	(308.366.243,00)	98,08	%
Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	23.309.450.710,00	23.036.393.515,00	(273.057.195,00)	98,83	%



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

Program Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	8.729.734.000,00	6.625.174.626,00	(2.104.559.374,00)	75,89	%
Program Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	42.589.098.758,00	40.721.543.834,46	(1.867.554.923,54)	95,61	%
Program Pendidikan Berbasis Budaya	16.178.586.000,00	14.090.335.651,00	(2.088.250.349,00)	87,09	%
Program Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	113.475.227.894,00	103.943.837.462,00	(9.531.390.432,00)	91,60	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
PERPUSTAKAAN					
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH					
PENDAPATAN	400.000.000,00	483.040.800,00	83.040.800,00	120,76	%
Pendapatan Asli Daerah	400.000.000,00	483.040.800,00	83.040.800,00	120,76	%
Hasil Retribusi Daerah	400.000.000,00	483.040.800,00	83.040.800,00	120,76	%
BELANJA	32.731.940.879,00	29.588.663.934,00	(3.143.276.945,00)	90,40	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.539.484.933,00	7.251.365.226,00	(288.119.707,00)	96,18	%
Belanja pegawai	7.539.484.933,00	7.251.365.226,00	(288.119.707,00)	96,18	%
BELANJA LANGSUNG	25.192.455.946,00	22.337.298.708,00	(2.855.157.238,00)	88,67	%
Program Administrasi Perkantoran	6.849.403.196,00	6.120.375.413,00	(729.027.783,00)	89,36	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.804.281.000,00	6.014.722.970,00	(789.558.030,00)	88,40	%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	220.028.000,00	183.500.236,00	(36.527.764,00)	83,40	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	540.412.750,00	531.305.500,00	(9.107.250,00)	98,31	%
Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	2.477.062.000,00	2.398.201.650,00	(78.860.350,00)	96,82	%
Program Pengembangan Bahan Pustaka dan Informasi	2.625.000.000,00	2.328.273.892,00	(296.726.108,00)	88,70	%
Program Layanan Perpustakaan	4.112.353.000,00	3.259.834.348,00	(852.518.652,00)	79,27	%
Program Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan	713.976.000,00	662.587.849,00	(51.388.151,00)	92,80	%
Program Pelestarian dan Layanan Arsip	849.940.000,00	838.496.850,00	(11.443.150,00)	98,65	%
URUSAN KONKUREN PILIHAN					
KELAUTAN DAN PERIKANAN					
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					
PENDAPATAN	1.579.205.000,00	1.615.078.500,00	35.873.500,00	102,27	%
Pendapatan Asli Daerah	1.579.205.000,00	1.615.078.500,00	35.873.500,00	102,27	%
Hasil Retrebusi Daerah	1.540.205.000,00	1.569.734.500,00	29.529.500,00	101,92	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	39.000.000,00	45.344.000,00	6.344.000,00	116,27	%
BELANJA	31.929.614.519,00	29.681.303.942,00	(2.248.310.577,00)	92,96	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.378.165.899,00	7.079.404.601,00	(298.761.298,00)	95,95	%
Belanja Pegawai	7.378.165.899,00	7.079.404.601,00	(298.761.298,00)	95,95	%
BELANJA LANGSUNG	24.551.448.620,00	22.601.899.341,00	(1.949.549.279,00)	92,06	%
Program Administrasi Perkantoran	4.209.772.427,00	3.944.000.673,00	(265.771.754,00)	93,69	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.933.928.496,00	4.524.312.141,00	(409.616.355,00)	91,70	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	441.722.200,00	439.010.800,00	(2.711.400,00)	99,39	%
Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3.956.016.000,00	3.734.617.800,00	(221.398.200,00)	94,40	%



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Program Pengelolaan Pelabuhan	178.000.000,00	166.264.294,00	(11.735.706,00)	93,41	%
Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1.718.546.500,00	1.586.008.550,00	(132.537.950,00)	92,29	%
Program Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	4.565.336.600,00	3.987.939.342,00	(577.397.258,00)	87,35	%
Program Konservasi Ekosistem dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	985.792.500,00	791.335.548,00	(194.456.952,00)	80,27	%
Program Pengembangan Perbenihan Perikanan Budidaya	3.562.333.897,00	3.428.410.193,00	(133.923.704,00)	96,24	%
URUSAN KONKUREN PILIHAN					
PARIWISATA					
DINAS PARIWISATA					
PENDAPATAN DINAS PARIWISATA	111.500.000,00	88.212.890,00	(23.287.110,00)	79,11	%
Pendapatan Asli Daerah	111.500.000,00	88.212.890,00	(23.287.110,00)	79,11	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	111.500.000,00	88.212.890,00	(23.287.110,00)	79,11	%
BELANJA DINAS PARIWISATA	36.252.002.717,00	32.193.961.638,00	(4.058.041.079,00)	88,81	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.756.960.217,00	3.569.442.601,00	(187.517.616,00)	95,01	%
Belanja Pegawai	3.756.960.217,00	3.569.442.601,00	(187.517.616,00)	95,01	%
BELANJA LANGSUNG	32.495.042.500,00	28.624.519.037,00	(3.870.523.463,00)	88,09	%
Program Administrasi Perkantoran	1.356.991.520,00	1.131.469.631,00	(225.521.889,00)	83,38	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	744.200.000,00	695.987.600,00	(48.212.400,00)	93,52	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	271.967.220,00	229.421.603,00	(42.545.617,00)	84,36	%
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3.929.040.000,00	3.353.026.992,00	(576.013.008,00)	85,34	%
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	22.347.763.760,00	19.606.236.011,00	(2.741.527.749,00)	87,73	%
Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Pariwisata	3.189.060.000,00	2.992.591.100,00	(196.468.900,00)	93,84	%
Program Pengembangan Industri Pariwisata	656.020.000,00	615.786.100,00	(40.233.900,00)	93,87	%
URUSAN KONKUREN PILIHAN					
PERTANIAN					
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN					
PENDAPATAN	1.505.740.500,00	1.886.976.458,00	381.235.958,00	125,32	%
Pendapatan Asli Daerah	1.505.740.500,00	1.886.976.458,00	381.235.958,00	125,32	%
Hasil Retribusi Daerah	1.467.675.500,00	1.641.340.458,00	173.664.958,00	111,83	%
Lain-Lain PAD Yang Sah	38.065.000,00	245.636.000,00	207.571.000,00	645,31	%
BELANJA	65.721.418.297,00	59.391.886.853,34	(6.329.531.443,66)	90,37	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	24.522.969.872,00	23.447.065.497,00	(1.075.904.375,00)	95,61	%
Belanja Pegawai	24.522.969.872,00	23.447.065.497,00	(1.075.904.375,00)	95,61	%
BELANJA LANGSUNG	41.198.448.425,00	35.944.821.356,34	(5.253.627.068,66)	87,25	%
Program Administrasi Perkantoran	4.479.162.172,00	4.033.706.668,00	(445.455.504,00)	90,05	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	13.011.096.500,00	11.302.374.005,34	(1.708.722.494,66)	86,87	%
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	44.770.000,00	44.728.404,00	(41.596,00)	99,91	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	467.078.440,00	444.881.588,00	(22.196.852,00)	95,25	%



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	6.543.053.860,00	4.812.217.657,00	(1.730.836.203,00)	73,55	%
Program Peningkatan Produksi Hortikultura	1.786.193.000,00	1.555.124.773,00	(231.068.227,00)	87,06	%
Program Peningkatan Produksi Perkebunan	1.584.262.000,00	1.501.618.065,00	(82.643.935,00)	94,78	
Program Peningkatan Populasi Peternakan	2.789.979.000,00	2.322.271.550,00	(467.707.450,00)	83,24	%
Program Pengembangan Pembibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan	4.250.179.060,00	4.038.960.487,00	(211.218.573,00)	95,03	%
Program Pengembangan SDM Pertanian dan Penyuluhan	728.010.520,00	648.690.750,00	(79.319.770,00)	89,10	%
Program Perlindungan Tanaman Pertanian	477.884.580,00	431.204.100,00	(46.680.480,00)	90,23	%
Program Pengembangan Perbenihan Pertanian	1.981.810.328,00	1.905.059.653,00	(76.750.675,00)	96,13	%
Program Pengawasan dan Sertifikasi Benih	393.646.365,00	373.886.400,00	(19.759.965,00)	94,98	%
Program Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan	2.136.336.100,00	2.038.067.856,00	(98.268.244,00)	95,40	%
Program Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	524.986.500,00	492.029.400,00	(32.957.100,00)	93,72	%
URUSAN KONKUREN PILIHAN					
PERDAGANGAN					
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					
PENDAPATAN	180.400.000,00	205.816.692,00	25.416.692,00	114,09	%
Pendapatan Asli Daerah	180.400.000,00	205.816.692,00	25.416.692,00	114,09	%
Hasil Retrebusi Daerah	165.000.000,00	190.416.692,00	25.416.692,00	115,40	%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	100,00	%
BELANJA	22.480.135.936,00	20.959.483.012,00	(1.520.652.924,00)	93,24	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.919.406.346,00	7.452.117.454,00	(467.288.892,00)	94,10	%
Belanja Pegawai	7.919.406.346,00	7.452.117.454,00	(467.288.892,00)	94,10	%
BELANJA LANGSUNG	14.560.729.590,00	13.507.365.558,00	(1.053.364.032,00)	92,77	%
Program Administrasi Perkantoran	2.110.398.450,00	1.890.795.875,00	(219.602.575,00)	89,59	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.048.779.680,00	1.003.361.500,00	(45.418.180,00)	95,67	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	333.463.000,00	322.219.700,00	(11.243.300,00)	96,63	%
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	1.263.945.500,00	1.243.373.164,00	(20.572.336,00)	98,37	%
Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri	3.430.058.340,00	3.036.706.726,00	(393.351.614,00)	88,53	%
Program Perlindungan dan Pengamanan Konsumen	553.396.000,00	541.142.456,00	(12.253.544,00)	97,79	%
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	4.511.240.500,00	4.193.178.480,00	(318.062.020,00)	92,95	%
Program Peningkatan Teknologi Industri	1.009.448.120,00	977.321.760,00	(32.126.360,00)	96,82	%
Program Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual	300.000.000,00	299.265.897,00	(734.103,00)	99,76	%
URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN					
OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM					
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					
BELANJA GUBERNUR DAN WAGUB	3.255.267.927,00	3.248.890.330,00	(6.377.597,00)	99,80	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.255.267.927,00	3.248.890.330,00	(6.377.597,00)	99,80	%
Belanja Pegawai	3.255.267.927,00	3.248.890.330,00	(6.377.597,00)	99,80	%



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா குடிமகனா குடிமகனா குடிமகனா குடிமகனா குடிமகனா

SEKRETARIAT DAERAH					
PENDAPATAN	107.241.985,00	107.241.985,00	0,00	100,00	%
Pendapatan Asli Daerah	107.241.985,00	107.241.985,00	0,00	100,00	%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	107.241.985,00	107.241.985,00	0,00	100,00	%
BELANJA SETDA	99.760.413.354,00	91.033.378.236,00	(8.727.035.118,00)	91,25	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	24.634.153.774,00	23.592.736.695,00	(1.041.417.079,00)	95,77	%
Belanja Pegawai	24.634.153.774,00	23.592.736.695,00	(1.041.417.079,00)	95,77	%
BELANJA LANGSUNG	75.126.259.580,00	67.440.641.541,00	(7.685.618.039,00)	89,77	%
Program Administrasi Perkantoran	13.742.795.490,00	11.651.807.310,00	(2.090.988.180,00)	84,78	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.585.156.720,00	4.262.672.420,00	(322.484.300,00)	92,97	%
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	193.750.000,00	177.637.500,00	(16.112.500,00)	91,68	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	778.419.660,00	703.634.800,00	(74.784.860,00)	90,39	%
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.434.805.220,00	1.320.238.010,00	(114.567.210,00)	92,02	%
Program Bantuan dan Layanan Hukum	2.395.904.220,00	2.284.935.436,00	(110.968.784,00)	95,37	%
Program Pengawasan Produk Hukum	765.182.220,00	734.016.672,00	(31.165.548,00)	95,93	%
Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	3.537.490.650,00	3.311.770.979,00	(225.719.671,00)	93,62	%
Program Pelayanan Kerumahtanggaan	3.211.835.950,00	3.065.607.616,00	(146.228.334,00)	95,45	%
Program Pelayanan Keprotokolan	3.116.648.850,00	2.922.114.929,00	(194.533.921,00)	93,76	%
Program Pengelolaan Hubungan Masyarakat	2.315.683.500,00	2.121.312.135,00	(194.371.365,00)	91,61	%
Program Dokumentasi Hukum	1.162.275.000,00	1.136.871.343,00	(25.403.657,00)	97,81	%
Program Pengelolaan Kebijakan Perlindungan Sumberdaya Daerah Perekonomian	237.000.000,00	208.725.080,00	(28.274.920,00)	88,07	%
Program Pengelolaan Kebijakan Infrastruktur Daerah	903.169.000,00	790.428.700,00	(112.740.300,00)	87,52	%
Program Pengelolaan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	500.000.000,00	475.859.750,00	(24.140.250,00)	95,17	%
Program Pengelolaan Kebijakan Stabilitas Perekonomian Daerah	810.094.660,00	791.674.250,00	(18.420.410,00)	97,73	%
Program Pengelolaan Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian Berkeadilan	1.573.443.440,00	1.465.285.314,00	(108.158.126,00)	93,13	%
Program Pembinaan Otonomi Daerah dan Kerjasama	1.377.195.000,00	1.019.907.700,00	(357.287.300,00)	74,06	%
Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, dan Kecamatan	941.200.000,00	856.547.625,00	(84.652.375,00)	91,01	%
Program Pembinaan Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah	893.655.000,00	757.367.448,00	(136.287.552,00)	84,75	%
Program Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	763.090.000,00	693.800.427,00	(69.289.573,00)	90,92	%
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengembangan Standarisasi	1.867.325.000,00	1.522.212.046,00	(345.112.954,00)	81,52	%
Program Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Pembinaan Sarana Keagamaan	7.172.422.500,00	6.188.260.600,00	(984.161.900,00)	86,28	%
Program Pengelolaan dan Penguatan Kebijakan Kesehatan Masyarakat	464.793.000,00	403.442.100,00	(61.350.900,00)	86,80	%
Program Pengelolaan dan Penguatan Kebijakan Sumber Daya Manusia	242.496.000,00	222.181.600,00	(20.314.400,00)	91,62	%
Program Pengelolaan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah	676.651.000,00	578.017.486,00	(98.633.514,00)	85,42	%



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	2.393.369.680,00	2.105.756.496,00	(287.613.184,00)	87,98	%
Program Pengelolaan Rekayasa Sosial Masyarakat	377.262.000,00	355.776.000,00	(21.486.000,00)	94,30	%
Program Perumusan Kebijakan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat	957.362.000,00	899.735.300,00	(57.626.700,00)	93,98	%
Program Pengelolaan dan Penguatan Kelembagaan Sumber Daya Masyarakat	1.388.250.600,00	1.329.071.000,00	(59.179.600,00)	95,74	%
Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	3.266.806.000,00	2.843.835.800,00	(422.970.200,00)	87,05	%
Program Peningkatan Pelayanan Parampara Praja	1.368.447.000,00	1.277.647.910,00	(90.799.090,00)	93,36	%
Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata cara	374.995.000,00	302.936.500,00	(72.058.500,00)	80,78	%
Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	798.824.220,00	680.099.100,00	(118.725.120,00)	85,14	%
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	5.020.522.000,00	4.614.933.316,00	(405.588.684,00)	91,92	%
Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan	424.063.000,00	401.239.210,00	(22.823.790,00)	94,62	%
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	990.728.000,00	963.676.200,00	(27.051.800,00)	97,27	%
Program Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksanan Urusan Keistimewaan Bidang Kelembagaan	335.176.000,00	333.824.300,00	(1.351.700,00)	99,60	%
Program Peningkatan Budaya Pemerintahan	1.767.972.000,00	1.665.781.133,00	(102.190.867,00)	94,22	%
BADAN PENGHUBUNG DAERAH					
PENDAPATAN BAHUBDA	500.000.000,00	533.845.000,00	33.845.000,00	106,77	%
Pendapatan Asli Daerah	500.000.000,00	533.845.000,00	33.845.000,00	106,77	%
Hasil Retribusi Daerah	500.000.000,00	533.845.000,00	33.845.000,00	106,77	%
BELANJA	5.888.827.406,00	5.605.000.848,00	(283.826.558,00)	95,18	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.138.150.762,00	1.090.055.081,00	(48.095.681,00)	95,77	%
Belanja Pegawai	1.138.150.762,00	1.090.055.081,00	(48.095.681,00)	95,77	%
BELANJA LANGSUNG	4.750.676.644,00	4.514.945.767,00	(235.730.877,00)	95,04	%
Program Administrasi Perkantoran	2.183.863.505,00	2.089.864.854,00	(93.998.651,00)	95,70	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	535.471.000,00	508.103.305,00	(27.367.695,00)	94,89	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	118.600.000,00	118.600.000,00	0,00	100,00	%
Program Peningkatan Kualitas Layanan Tamu Kantor Perwakilan Daerah	599.159.139,00	588.940.133,00	(10.219.006,00)	98,29	%
Program Peningkatan Kualitas Layanan Promosi Potensi dan Seni Budaya	1.313.583.000,00	1.209.437.475,00	(104.145.525,00)	92,07	%
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH					
BELANJA DPRD	36.754.606.353,00	36.455.579.794,00	(299.026.559,00)	99,19	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	36.754.606.353,00	36.455.579.794,00	(299.026.559,00)	99,19	%
Belanja Pegawai	36.754.606.353,00	36.455.579.794,00	(299.026.559,00)	99,19	%
SEKRETARIAT DPRD					
BELANJA SEKRETARIAT DPRD	93.533.383.293,00	64.978.316.650,00	(28.555.066.643,00)	69,47	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.065.143.559,00	4.870.065.668,00	(195.077.891,00)	96,15	%



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

Belanja Pegawai	5.065.143.559,00	4.870.065.668,00	(195.077.891,00)	96,15	%
BELANJA LANGSUNG	88.468.239.734,00	60.108.250.982,00	(28.359.988.752,00)	67,94	%
Program Administrasi Perkantoran	4.289.542.000,00	3.679.333.143,00	(610.208.857,00)	85,77	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.199.768.000,00	3.636.723.760,00	(563.044.240,00)	86,59	%
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	83.340.000,00	74.175.000,00	(9.165.000,00)	89,00	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	238.375.000,00	207.043.600,00	(31.331.400,00)	86,86	%
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	44.938.040.850,00	24.204.798.431,00	(20.733.242.419,00)	53,86	%
Program Pengembangan Regulasi Daerah	13.865.111.000,00	11.750.324.734,00	(2.114.786.266,00)	84,75	%
Program Peningkatan Kehumasan dan Keprotokolan	20.854.062.884,00	16.555.852.314,00	(4.298.210.570,00)	79,39	%
INSPEKTORAT					
BELANJA INSPEKTORAT	34.185.032.293,00	28.316.950.651,00	(5.868.081.642,00)	82,83	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.736.941.642,00	5.590.262.980,00	(146.678.662,00)	97,44	%
Belanja Pegawai	5.736.941.642,00	5.590.262.980,00	(146.678.662,00)	97,44	%
BELANJA LANGSUNG	28.448.090.651,00	22.726.687.671,00	(5.721.402.980,00)	79,89	%
Program Administrasi Perkantoran	1.566.656.651,00	1.264.060.488,00	(302.596.163,00)	80,69	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	18.560.410.000,00	13.648.665.500,00	(4.911.744.500,00)	73,54	%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	125.660.000,00	89.111.037,00	(36.548.963,00)	70,91	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	86.263.000,00	85.541.500,00	(721.500,00)	99,16	%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	8.109.101.000,00	7.639.309.146,00	(469.791.854,00)	94,21	%
PANIRADYA KAISTIMEWAN					
BELANJA PANIRADYA KAISTIMEWAN	3.291.872.722,00	3.079.749.592,00	(212.123.130,00)	93,56	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.177.267.742,00	2.062.513.735,00	(114.754.007,00)	94,73	%
Belanja Pegawai	2.177.267.742,00	2.062.513.735,00	(114.754.007,00)	94,73	%
BELANJA LANGSUNG	1.114.604.980,00	1.017.235.857,00	(97.369.123,00)	91,26	%
Program Administrasi Perkantoran	726.564.980,00	676.618.357,00	(49.946.623,00)	93,13	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	354.540.000,00	307.182.500,00	(47.357.500,00)	86,64	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	33.500.000,00	33.435.000,00	(65.000,00)	99,81	%
PERENCANAAN PEMBANGUNAN					
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
BELANJA	21.924.352.621,00	20.164.998.679,00	(1.759.353.942,00)	91,98	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.801.021.651,00	6.561.897.483,00	(239.124.168,00)	96,48	%
Belanja Pegawai	6.801.021.651,00	6.561.897.483,00	(239.124.168,00)	96,48	%
BELANJA LANGSUNG	15.123.330.970,00	13.603.101.196,00	(1.520.229.774,00)	89,95	%
Program Administrasi Perkantoran	2.297.997.010,00	1.710.726.101,00	(587.270.909,00)	74,44	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.106.689.000,00	970.526.256,00	(136.162.744,00)	87,70	%



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா குடிமகனா குடிமகனா குடிமகனா குடிமகனா குடிமகனா

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	184.360.000,00	154.393.780,00	(29.966.220,00)	83,75	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	460.473.700,00	454.394.250,00	(6.079.450,00)	98,68	%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.309.219.200,00	2.110.602.603,00	(198.616.597,00)	91,40	%
Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	1.118.661.000,00	1.078.689.220,00	(39.971.780,00)	96,43	%
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	1.457.159.000,00	1.364.328.826,00	(92.830.174,00)	93,63	%
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana	856.030.000,00	815.498.635,00	(40.531.365,00)	95,27	%
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	686.925.060,00	625.222.068,00	(61.702.992,00)	91,02	%
Program Pengendalian Pembangunan Daerah	1.928.582.500,00	1.782.126.520,00	(146.455.980,00)	92,41	%
Program Pengembangan Statistik Daerah	2.217.234.500,00	2.101.458.497,00	(115.776.003,00)	94,78	%
Program Penelitian dan Pengembangan	500.000.000,00	435.134.440,00	(64.865.560,00)	87,03	%
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH					
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET					
PENDAPATAN BPKA	1.934.073.885.772,71	1.993.435.291.133,20	59.361.405.360,49	103,07	%
Pajak Daerah	1.750.611.839.616,00	1.773.940.604.572,00	23.328.764.956,00	101,33	%
Hasil Retribusi Daerah	7.342.607.690,00	7.432.218.400,00	89.610.710,00	101,22	%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	85.997.899.680,29	85.960.824.196,14	(37.075.484,15)	99,96	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	90.121.538.786,42	126.101.643.965,06	35.980.105.178,64	139,92	%
BELANJA BPKA	155.153.103.130,81	145.356.161.571,00	(9.796.941.559,81)	93,69	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	102.932.963.263,81	97.105.307.502,00	(5.827.655.761,81)	94,34	%
Belanja Pegawai	102.932.963.263,81	97.105.307.502,00	(5.827.655.761,81)	94,34	%
BELANJA LANGSUNG	52.220.139.867,00	48.250.854.069,00	(3.969.285.798,00)	92,40	%
Pogram Administrasi Perkantoran	10.539.512.970,00	9.650.424.840,00	(889.088.130,00)	91,56	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	13.852.546.520,00	12.564.696.758,00	(1.287.849.762,00)	90,70	%
Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	428.682.000,00	402.137.000,00	(26.545.000,00)	93,81	%
Program Peningkatan Pendapatan Daerah	3.371.473.000,00	3.137.017.557,00	(234.455.443,00)	93,05	%
Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	2.095.344.000,00	1.984.079.208,00	(111.264.792,00)	94,69	%
Program Penatausahaan Keuangan Daerah	872.945.000,00	833.947.592,00	(38.997.408,00)	95,53	%
Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.005.146.500,00	1.901.021.705,00	(104.124.795,00)	94,81	%
Program Peningkatan Pendapatan KPPD	10.035.555.520,00	9.688.825.051,00	(346.730.469,00)	96,54	%
Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah	4.167.764.000,00	3.587.532.197,00	(580.231.803,00)	86,08	
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.118.195.607,00	2.895.705.551,00	(222.490.056,00)	92,86	%
Program Pendayagunaan Barang Milik Daerah	1.732.974.750,00	1.605.466.610,00	(127.508.140,00)	92,64	%
PPKD/BUD					
PENDAPATAN	3.698.302.681.758,00	3.616.561.898.006,00	(81.740.783.752,00)	97,79	%
Dana Perimbangan	2.467.472.059.005,00	2.385.702.912.253,00	(81.769.146.752,00)	96,69	%
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	1.230.830.622.753,00	1.230.858.985.753,00	28.363.000,00	100,00	%
BELANJA	1.802.802.303.122,20	1.736.529.375.454,71	(66.272.927.667,49)	96,32	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.802.802.303.122,20	1.736.529.375.454,71	(66.272.927.667,49)	96,32	%



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦠꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Belanja Subsidi	81.100.523.951,00	76.067.609.352,00	(5.032.914.599,00)	93,79	
Belanja Hibah	687.498.916.846,00	638.980.684.355,00	(48.518.232.491,00)	92,94	%
Belanja Bantuan Sosial	1.402.000.000,00	702.000.000,00	(700.000.000,00)	50,07	%
Belanja Bagi Hsl kpd Prov /kab/kota/ dan Pemdes	736.967.513.631,20	735.341.757.826,71	(1.625.755.804,49)	99,78	%
Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/kab/kota dan Pem Des	291.513.676.450,00	285.437.323.921,00	(6.076.352.529,00)	97,92	%
Belanja Tak Terduga	4.319.672.244,00	0,00	(4.319.672.244,00)	-	%
Pembiayaan Netto	264.207.308.901,94	265.861.156.884,94	1.653.847.983,00	100,63	%
Penerimaan Pembiayaan	472.804.308.901,94	474.458.156.884,94	1.653.847.983,00	100,35	%
Pengeluaran Pembiayaan	208.597.000.000,00	208.597.000.000,00	0,00	100,00	%
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH					
PENDAPATAN	2.340.250.000,00	2.493.800.000,00	153.550.000,00	106,56	%
Hasil Retribusi Daerah	2.335.200.000,00	2.488.750.000,00	153.550.000,00	106,58	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	100,00	%
BELANJA	202.684.157.683,00	199.411.590.183,00	(3.272.567.500,00)	98,39	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	181.024.187.673,00	180.616.121.021,00	(408.066.652,00)	99,77	%
Belanja Pegawai	181.024.187.673,00	180.616.121.021,00	(408.066.652,00)	99,77	%
BELANJA LANGSUNG	21.659.970.010,00	18.795.469.162,00	(2.864.500.848,00)	86,78	%
Program Administrasi Perkantoran	2.005.415.150,00	1.864.767.443,00	(140.647.707,00)	92,99	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.874.495.000,00	1.840.184.230,00	(34.310.770,00)	98,17	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan Keuangan	207.000.000,00	206.894.550,00	(105.450,00)	99,95	%
Program Perencanaan, Pengadaan Pegawai dan Pengelolaan Data Kepegawaian	4.218.825.800,00	2.518.137.420,00	(1.700.688.380,00)	59,69	%
Program Peningkatan Kualitas SDM dan Pembinaan Karir Pegawai	6.073.843.000,00	5.721.678.435,00	(352.164.565,00)	94,20	%
Program Pembinaan Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai	2.732.682.000,00	2.535.000.704,00	(197.681.296,00)	92,77	%
Program Peningkatan Penatausahaan Kepegawaian Daerah	1.433.302.560,00	1.259.080.000,00	(174.222.560,00)	87,84	%
Program Pengelolaan Pengukuran Kompetensi Pegawai	3.114.406.500,00	2.849.726.380,00	(264.680.120,00)	91,50	%
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
PENDAPATAN BANDIKLAT	3.944.538.000,00	4.061.484.000,00	116.946.000,00	102,96	%
Pendapatan Asli Daerah	3.944.538.000,00	4.061.484.000,00	116.946.000,00	102,96	%
Hasil Retribusi Daerah	3.944.538.000,00	4.061.484.000,00	116.946.000,00	102,96	%
BELANJA	20.667.970.744,00	18.461.485.783,00	(2.206.484.961,00)	89,32	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.477.757.564,00	4.358.106.732,00	(119.650.832,00)	97,33	%
Belanja Pegawai	4.477.757.564,00	4.358.106.732,00	(119.650.832,00)	97,33	%
BELANJA LANGSUNG	16.190.213.180,00	14.103.379.051,00	(2.086.834.129,00)	87,11	%
Program Administrasi Perkantoran	1.927.057.260,00	1.877.257.879,00	(49.799.381,00)	97,42	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	911.252.000,00	856.079.189,00	(55.172.811,00)	93,95	%
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	174.027.000,00	172.139.750,00	(1.887.250,00)	98,92	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	375.757.660,00	316.506.421,00	(59.251.239,00)	84,23	%



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா குடா கௌதா கௌதா கௌதா கௌதா கௌதா கௌதா

Program Pendidikan Penjurangan	9.028.801.160,00	7.698.220.003,00	(1.330.581.157,00)	85,26	%
Program Pendidikan Teknis Fungsional	2.064.411.660,00	1.773.029.118,00	(291.382.542,00)	85,89	%
Program Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Kediklatan	663.739.220,00	484.057.800,00	(179.681.420,00)	72,93	%
Program Peningkatan Standarisasi dan Penjaminan Mutu	1.045.167.220,00	926.088.891,00	(119.078.329,00)	88,61	%



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah

- a. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah DIY atau suatu organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah DIY atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
- b. Penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY.
- c. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pada Pemerintah Daerah DIY terdapat 30 SKPD yang merupakan entitas akuntansi.

Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- a. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas.
- b. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan pada basis kas yaitu Pendapatan-LRA dan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Daerah atau entitas pemerintah daerah sedangkan Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan oleh Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- 2) Pendapatan LRA menggunakan basis kas dan diakui pada saat:
 - a) Diterima oleh BUD di rekening Kas Daerah
 - b) Diterima oleh Bendahara Penerimaan di SKPD
 - c) Diterima oleh entitas lain di luar Pemda DIY atas nama BUD.
 - d) Pengakuan Pendapatan Pengelolaan BLUD dalam Laporan Realisasi Anggaran mendasarkan pada SP2D Nihil yang telah disahkan oleh BUD atas realisasi Pendapatan Pengelolaan BLUD pada periode berjalan.
- 3) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 4) Pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦫꦺꦃꦠꦤ꧀ꦢꦶꦫꦺꦤ꧀ꦠꦶꦩꦼꦮꦠꦶꦪꦏꦂꦠ

b. Belanja

- 1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 2) Belanja diakui pada saat:
 - a) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah untuk seluruh transaksi baik di SKPD maupun PPKD setelah dilakukan pengesahan secara definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi.
 - b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD.
 - c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- 3) Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.
- 4) Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.

c. Transfer

- 1) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 2) Transfer masuk diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah dan Transfer keluar diakui pada saat direalisasikan yaitu saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.
- 3) Transfer Masuk diukur berdasarkan azas bruto dan dicatat berdasarkan penerimaan kas di Rekening Kas Daerah dan Transfer keluar diukur berdasarkan azas bruto dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas dari Rekening Kas Daerah.
- 4) Transfer disajikan berdasarkan jenis Transfer masuk dan jenis Transfer Keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Pembiayaan

- 1) Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran
- 2) Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada Pihak Ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- 3) Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Daerah antara lain untuk pemberian pinjaman kepada Pihak Ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

- 4) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah dan Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat direalisasikan yaitu saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.
- 5) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan sedangkan pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tegen Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.
- 6) Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Pendapatan-LO

- 1) Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- 3) Pengukuran Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 4) Pendapatan-LO disajikan berdasarkan jenis Pendapatan-LO dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Beban

- 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) Beban diakui pada saat:
 - a) Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik.
 - b) Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
 - c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.
- 3) Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.
- 4) Beban disajikan berdasarkan jenis Beban dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Kas dan Setara Kas

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas memiliki sifat sangat likuid dan bebas dari perubahan nilai. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan dan wajib dilaporkan dalam neraca dan Laporan Arus Kas. Kas



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦤ꧀ꦢꦭꦫꦢꦶꦪꦠꦺꦩꦠꦯꦶꦁꦏꦂꦠ

tersebut meliputi Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di BLUD.

- 2) Setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.
- 3) Kas diakui pada saat kas diterima oleh bendahara /Rekening Kas Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh bendahara/Rekening Kas Daerah.
- 4) Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

h. Piutang

- 1) Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- 2) Piutang timbul karena adanya aktivitas pemungutan, perikatan, dan tuntutan ganti kerugian daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari aktivitas pemungutan meliputi Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, dan Piutang Lain-lain PAD yang sah.
 - b) Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan meliputi pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas.
 - c) Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah terdiri dari piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.
- 3) Piutang diklasifikasikan menjadi Piutang Pendapatan Daerah, Piutang Lainnya dan Biaya Dibayar Dimuka.
- 4) Piutang Pendapatan terdiri dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain PAD Yang Sah dan Piutang Pendapatan Lainnya.
- 5) Piutang Lainnya terdiri dari Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Uang Muka.
- 6) Piutang diakui pada saat munculnya hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
- 7) Pengukuran piutang sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan dengan SKPD/SKRD/SK Pembebanan/SKTJM/Surat Penagihan/Dokumen yang dipersamakan atau disajikan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ديايرتاس لڤورا ديستيوا يوغياكارتا

- sebesar manfaat atas barang atau jasa yang belum dikonsumsi sampai dengan akhir periode pelaporan (Biaya Dibayar Dimuka).
- 8) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
 - 9) Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.
 - 10) Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan saat jatuh tempo piutang dan upaya penagihan yang telah dilakukan. Penilaian kualitas piutang ditetapkan berdasarkan jenis piutang dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kualitas Piutang Pajak:

Lancar	<ol style="list-style-type: none"> a. Umur piutang kurang dari 1 tahun, dan/atau b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan/atau c. Wajib pajak kooperatif, dan/atau d. Wajib pajak likuid, dan/atau e. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
Kurang Lancar	<ol style="list-style-type: none"> a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun, dan/atau b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau d. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
Diragukan	<ol style="list-style-type: none"> a. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun, dan/atau b. Wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Wajib pajak tidak kooperatif, dan/atau d. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
Macet	<ol style="list-style-type: none"> a. Umur piutang lebih dari 5 tahun, dan/atau b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Wajib pajak diketahui keberadaannya, dan/atau d. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia, dan/atau e. Wajib pajak mengalami musibah (<i>force majeure</i>).



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦺꦴꦩꦶꦠꦺꦩꦺꦴꦪꦏꦂꦠ

b) Kualitas Piutang Retribusi:

Lancar	a. Umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan, dan/atau b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
Kurang Lancar	a. Umur piutang 1 bulan sampai dengan 3 bulan, dan atau b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
Diragukan	a. Umur piutang 3 bulan sampai dengan 12 bulan, dan atau b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
Macet	a. Umur piutang lebih 12 bulan, dan atau b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

c) Kualitas Piutang Lainnya:

Lancar	Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
Kurang Lancar	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
Diragukan	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
Macet	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

11) Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir periode pelaporan ditentukan sebagai berikut:

No	Kualitas Piutang	Persentase Penyisihan Piutang
1.	Lancar	0,5% (nol koma lima persen)
2.	Kurang Lancar	10% (sepuluh persen)
3.	Diragukan	50% (lima puluh persen)
4.	Macet	100% (seratus persen)

12) Penyajian penyisihan piutang tidak tertagih di neraca merupakan unsur pengurangan dari piutang yang bersangkutan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

پیمەرته داەرہ ڈاکترہ یوگیاکرتا

i. Persediaan

- 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah, mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pengakuan persediaan dicatat pada saat direalisasikan obyek belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Bahan Pakai Habis
 - b) Belanja Bahan/Material
 - c) Belanja Cetak dan Penggandaan
 - d) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
 - e) Belanja Pakaian Kerja
 - f) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
 - g) Belanja Barang Dana BOS
 - h) Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
 - i) Belanja Barang Dan Jasa BLUD
 - j) Belanja Hibah Barang/Jasa
 - k) Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa
- 3) Pada akhir periode akuntansi dilakukan inventarisasi fisik dan dibuat Berita Acara Opname Persediaan. Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir periode pelaporan. Hasil inventarisasi persediaan akhir periode pelaporan sebagai dasar untuk menguji saldo persediaan pada catatan apakah sesuai dengan kuantitas fisik persediaan. Selisih persediaan yang disebabkan karena persediaan usang, daluwarsa atau rusak diperlakukan sebagai beban, sedangkan selisih persediaan yang disebabkan hilang dan kelalaian Penyimpan/Pengurus Barang maka diperlakukan sebagai kerugian daerah. Persediaan yang sudah rusak dan daluwarsa dapat dimusnahkan dan selanjutnya dihapuskan dengan persetujuan Pengelola Barang.
- 4) Pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan aset yaitu beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi.
- 5) Persediaan dicatat secara *perpetual*, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode FIFO (*First In First Out*).
- 6) Persediaan diukur sebagai berikut:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
 - b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
 - d) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara dikembangkan
 - e) Harga Jual yang ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur tentang penetapan Tarif Harga Jual untuk produk/ hewan/ tanaman yang dijual kepada masyarakat.
- 7) Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

- tentang Penyertaan Modal terkait. Tata cara dan teknis pelaksanaan Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- 10) Pengukuran Investasi untuk beberapa jenis investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
 - 11) Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metoda yaitu Metoda Biaya, Metoda Ekuitas dan Metoda nilai bersih yang direalisasikan.
 - a) Penilaian Investasi menggunakan metode biaya apabila kepemilikan investasi pemerintah daerah kurang dari 20% dan investasi dicatat sebesar biaya perolehan.
 - b) Penilaian investasi menggunakan metode ekuitas jika kepemilikan investasi pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, atau kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metoda ekuitas. Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - c) Penilaian investasi dengan metode nilai bersih yang direalisasikan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat nonpermanen. Metoda nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
 - 12) Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu harga perolehan dana bergulir dikurangi penerimaan pelunasan dana bergulir pada tahun yang bersangkutan dikurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih.
 - 13) Mekanisme Pengelolaan dana bergulir dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dikelola sendiri/langsung, *executing agency* dan *chanelling agency* dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) Dana bergulir dikelola sendiri/langsung adalah mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah melalui SKPD Teknis yang ditunjuk mulai dari proses menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko ketidaktertagihan dana bergulir.
 - b) Dana bergulir dengan *executing agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya) yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெர்தாபுரம் காவல் காவல் காவல் காவல் காவல் காவல் காவல்

- 17) Pencatatan dana bergulir diragukan tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada akhir periode pelaporan.
- 18) Penilaian investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan yang nilai perolehannya di atas atau di bawah nilai nominalnya maka premium atau diskonto yang terjadi harus diamortisasi selama umur obligasi yang bersangkutan. Pada akhir periode pelaporan amortisasi premium atau diskonto tersebut akan menambah atau mengurangi nilai investasi dan akan menambah atau mengurangi Pendapatan Bunga Obligasi pada periode pelaporan.
- 19) Pengakuan hasil investasi ditentukan sebagai berikut:
 - a) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
 - b) Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metoda biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Pendapatan Investasi dalam periode pelaporan dicatat sebesar realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang diterima oleh rekening Kas Daerah baik dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun dalam Laporan Operasional.
 - c) Untuk investasi yang penilaiannya menggunakan metode ekuitas maka pengakuan Pendapatan/Rugi Investasi dicatat sebagai berikut:
 - Pada akhir periode pelaporan Pendapatan Investasi dicatat sebesar bagian laba/rugi pemerintah daerah sesuai dengan prosentase kepemilikan (berdasarkan Laporan Keuangan BUMD Tahun Berjalan) yang menambah/mengurangi nilai Investasi di sisi debit dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO di sisi kredit.
 - Pada saat bagian laba dibayarkan kepada Pemerintah Daerah tahun berikutnya maka dicatat sebesar kas yang diterima di sisi debit dan mengurangi investasi di sisi kredit.
 - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dicatat sebesar realisasi kas yang diterima oleh rekening kas daerah.
- 20) Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.
- 21) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.

k. Aset Tetap

- 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH Istimewa Yogyakarta

ပဝိသေသနသေသနသေသနသေသနသေသနသေသနသေသန

- 2) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya/ nilai buku. Sebagai contoh adalah jika terdapat aset tetap yang dalam kondisi rusak dan belum dihapus maka aset tetap tersebut disajikan sebagai Aset Lainnya.
- 3) Aset Tetap-Renovasi yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
- 4) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 5) Kriteria pengakuan aset tetap yaitu:
 - a) Berwujud.
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal SKPD.
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan oleh SKPD.
 - f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
 - g) Harga perolehan aset tetap atau pengeluaran untuk pembelian aset tetap tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan yaitu:

Jenis Aset Tetap	Batas Minimal Kapitalisasi
Tanah	Tidak ada
Peralatan dan Mesin	Rp500.000,00 / unit
Gedung dan Bangunan	Rp10.000.000,00 / unit
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Tidak ada
Aset Tetap Lainnya	Tidak ada

- 6) Aset Tetap dengan harga perolehan di bawah batas minimal kapitalisasi yang ditetapkan dicatat sebagai aset tetap ekstrakomtabel.
- 7) Pengeluaran Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap tersebut, maka tidak dapat dikapitalisasi atau dicatat sebagai aset tetap dengan rincian antara lain sebagai berikut:
 - a) Belanja Modal yang menghasilkan aset tetap yang peruntukannya akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat maka aset tetap tersebut dicatat sebagai persediaan sampai dengan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat.
 - b) Belanja Modal yang menghasilkan dokumen perencanaan (DED) dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila Belanja Modal tersebut telah dianggarkan keseluruhan aktivitas yang meliputi biaya perencanaan, pengawasan, konstruksi dan penunjang namun sampai dengan akhir tahun anggaran baru terealisasi dokumen perencanaannya saja.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாழ்வானகாவகாழிநிலையலயலயலயலயலயலயல

- 8) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 9) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- 10) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 11) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a) Biaya persiapan tempat.
 - b) Biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat.
 - c) Biaya pemasangan.
 - d) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.
 - e) Biaya konstruksi.
- 12) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan/dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- 13) Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- 14) Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah
- 15) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
- 16) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).
- 17) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- 18) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus



PEMERINTAH DAERAH DAERAH Istimewa Yogyakarta

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦢꦺꦗꦪꦩꦼꦫꦶꦁꦲꦏꦸꦗꦏꦂꦠ

dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Tata cara dan mekanisme penghapusan diatur dalam peraturan kepala daerah tersendiri.

- 19) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- 20) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- 21) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun Ekuitas.
- 22) Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:
 - a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
 - b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
 - c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
 - d) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

I. Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 1) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.
- 2) Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika memenuhi kriteria:
 - a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh.
 - b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.
 - c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- 3) Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- 4) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah, peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

- 5) Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
 - b) Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
 - c) Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan dan diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - d) Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
 - e) Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset, dalam hal ini Pengguna Anggaran membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f) Apabila Berita Acara Serah Terima sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, maka diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
 - g) Apabila dalam konstruksi aset tetap, pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan seperti biaya perencanaan maka biaya tersebut harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan aset yang bersangkutan.
 - h) Apabila dalam konstruksi aset tetap, biaya penunjang untuk kegiatan pengadaan (lelang) sudah dilaksanakan, namun proses pengadaan (lelang) gagal maka biaya penunjang tersebut diakui sebagai beban tahun anggaran berjalan dan disajikan dalam Laporan Operasional.
 - i) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
 - j) Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan Konstruksi Dalam Pengerjaan diniatkan untuk dihentikan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dihapuskan dari neraca sesuai ketentuan yang berlaku dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

m. Dana Cadangan

- 1) Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:
 - a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
 - d) Sumber dana cadangan; dan
 - e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- 2) Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.
- 3) Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.
- 4) Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bunga dapat diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan atau dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- 5) Pengukuran Dana Cadangan sebesar nilai nominal Dana Cadangan ditambah dengan pendapatan jasa giro rekening Dana Cadangan.

n. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- 2) Aset Lainnya meliputi Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- 3) Pengakuan Aset Lainnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Tagihan Penjualan Angsuran diakui pada saat kontrak penjualan angsuran antara pemerintah daerah dengan pegawai daerah ditandatangani. Penurunan tagihan penjualan angsuran diakui saat pemerintah daerah menerima angsuran dari pegawai.
 - b) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan/Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak/dokumen yang



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦗꦼꦝꦏꦸꦫꦠꦤ꧀ꦢꦼꦫꦁꦢꦼꦫꦁꦶꦠꦶꦩꦼꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

- dipersamakan untuk penyelesaian yang dilakukan secara damai (di luar pengadilan). Untuk penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang dilakukan melalui jalur pengadilan, pengakuan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan setelah ada surat ketetapan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- c) Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
 - d) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk pinjam pakai diakui saat disetujuinya permohonan pinjam pakai yang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai dan diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan aset tetap menjadi Aset Lainnya-Pinjam Pakai.
 - e) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan adanya penetapan perubahan status penggunaan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).
 - f) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) diakui pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah antara Pemerintah Daerah dengan pihak investor yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga (BGS). BGS dicatat sebesar nilai perolehan aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
 - g) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Serah Guna (BSG) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
 - h) Penyerahan kembali aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang, selanjutnya Pengelola Barang membuat status penetapan penggunaan aset tetap yang disahkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar mereklasifikasi dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diserahkan kembali.
 - i) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain berdasarkan Surat



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA

پيمړنتھ ڈايرھ ڈايرھ ايسټيمهوا يوجياكارتا

Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya dan ditambah nilai Hasil Kajian/Pengembangan yang telah dikapitalisasi, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

- g) Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan diakui apabila sampai dengan tanggal pelaporan ATB belum selesai sebesar pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.

7) Pengukuran Aset Tak Berwujud

- a) ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apabila ATB diperoleh secara gabungan, maka harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitudengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajarmasing-masing aset yang bersangkutan. Biaya perolehan tersebut terdiri dari harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat serta setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
- Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- b) ATB yang diperoleh melalui pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.
- c) ATB yang diperoleh dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.
- d) ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya naskah perjanjian hibah.
- e) ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan. Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu periode tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB periode berikutnya.
- f) ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிம்தர் டாஃரஹ் டாஃரஹ் டிஸ்திமேவா யோக்யாகர்டா

Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

- 8) Secara umum sifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Sebagian besar pengeluaran setelah perolehan ATB dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB sehingga sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas. Namun apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* computer harus memenuhi salah satu kriteria yaitu meningkatkan fungsi *software* dan meningkatkan efisiensi *software*.
- 9) Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) **Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Terbatas**

Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dalam hal ini meliputi lisensi dan franchise, hak cipta dan paten) selama masa manfaat. Umur masa manfaat tersebut tertuang dalam surat perjanjian perolehan ATB yang bersangkutan. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas bernilai nihil.
 - b) **Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Tak Terbatas**

ATB dengan masa manfaat tidak terbatas dalam hal ini goodwill, software dan hasil kajian yang memiliki manfaat dalam jangka panjang tidak boleh diamortisasi. Nilai ATB yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah ATB tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka ATB tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai ATB harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- 10) Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus, Amortisasi setiap periode akan diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun ATB. Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional. Penyesuaian akun ATB dilakukan dengan membentuk akun lawan akumulasi amortisasi ATB.
- 11) ATB dapat mengalami penurunan nilai jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦿꦠ

perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

- 2) Kewajiban diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dengan ketentuan:
 - a) Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang meliputi Utang Dalam Negeri dan Utang Jangka Panjang Lainnya.
- 3) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu yang harus dipungut potongan Taspen, Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Wajib Pegawai, Uang Jaminan dan pajak.
 - b) Utang Bunga diakui berdasarkan akumulasi berjalannya waktu, dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
 - c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi.
 - d) Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima pemerintah daerah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.
 - e) Utang Belanja diakui pada saat terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
 - f) Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain Utang Jamkessos diakui saat tagihan klaim dari pihak penyedia layanan kesehatan diterima dan diverifikasi.
 - g) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
 - h) Utang Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
 - i) Utang Dalam Negeri – Obligasi Daerah diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan obligasi.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦺꦫꦺꦢꦶꦱꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦏꦂꦠ

- j) Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman
 - k) Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
 - l) Utang Dalam Negeri Lainnya diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
 - m) Utang Jangka Panjang Lainnya seperti Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
- 4) Pengukuran kewajiban sesuai dengan klasifikasi utang ditentukan sebagai berikut:
- a) Utang PFK diukur sebesar PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD dan belum disetorkan kepada yang pihak berkepentingan.
 - b) Utang Bunga diukur sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.
 - c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diukur jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.
 - d) Pendapatan Diterima Dimuka diukur sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.
 - e) Utang Belanja diukur sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan tanggal neraca.
 - f) Utang Jangka Pendek Lainnya berupa Utang Jamkessos diukur sebesar nilai tagihan klaim yang diajukan oleh pihak pemberi layanan kesehatan dan telah diverifikasi oleh SKPD.
 - g) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan diukur sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
 - h) Utang Dalam Negeri Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank diukur sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
 - i) Utang Dalam Negeri – Obligasi Daerah diukur sebesar nilai nominal/pari, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi Daerah tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo. Dalam hal utang obligasi yang pelunasannya diangsur, aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut. Apabila surat utang obligasi dijual di bawah nilai



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦏ꧀ꦢꦤꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦏꦂꦠ

- pari (dengan diskon), maupun di atas nilai pari (dengan premium), maka nilai pokok utang tersebut adalah sebesar nilai nominalnya atau nilai jatuh temponya, sedangkan diskon atau premium dikapitalisasi untuk diamortisasi sepanjang masa berlakunya surat utang obligasi.
- j) Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat diukur sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
 - k) Utang Dalam Negeri Pemerintah Daerah Lainnya diukur jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
 - l) Utang Dalam Negeri Lainnya diukur jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
 - m) Utang Jangka Panjang Lainnya dalam bentuk Utang Kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
- 5) Amortisasi Utang adalah alokasi sistematis dari premium diskonto selama umur utang pemerintah daerah. Premiun adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif. Amortisasi atas premium atau diskonto menggunakan metode garis lurus.
- 6) Utang Dalam Negeri dalam bentuk obligasi daerah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo maka selisih antara harga perolehan kembali dengan nilai bukunya harus disajikan pada Laporan Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai buku maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan aset yang berhubungan.
 - b) Apabila harga perolehan kembali adalah tidak sama dengan nilai buku maka penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional pada Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- q. Koreksi Kesalahan**
- 1) Koreksi merupakan tindakan pembedulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan peyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Koreksi kesalahan meliputi koreksi atas kesalahan yang sifatnya tidak berulang dan koreksi kesalahan berulang.

- 2) Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis yaitu kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- 3) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.
- 4) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya maka perlakuan akuntansi ditetapkan sebagai berikut:

a) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

b) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

- Koreksi kesalahan yang menambah posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain Lain-LRA dalam hal mengurangi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan atas perolehan asset selain kas yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun asset yang bersangkutan.
- Koreksi kesalahan atas beban yang mengakibatkan adanya pengurangan beban dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi asset selain kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-lain LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun Ekuitas.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LRA yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LO yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Ekuitas.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan Kewajiban yang bersangkutan.
- Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi kas pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦫꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦢꦫꦤ꧀ꦢꦶꦱꦠꦶꦩꦼꦮꦠꦶꦪꦏꦂꦠ

- Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
- 5) Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya antara lain penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak dan Piutang Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kesehatan seringkali penerimaan klaim berbeda dengan nilai piutang yang dicatat. Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

r. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (trend) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya;
- 2) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

s. Perubahan Estimasi Akuntansi

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan.

Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா குடா கௌகா கௌகா கௌகா கௌகா கௌகா கௌகா கௌகா

t. Operasi Tidak Dilanjutkan

Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

u. Laporan Keuangan Konsolidasian

- 1) Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
- 2) Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut disajikan oleh entitas pelaporan kecuali Laporan Arus Kas disajikan oleh unit kerja yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- 3) Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan yaitu triwulanan, semesteran dan tahunan serta berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
- 4) Konsolidasi di tingkat Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas pelaporan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh semua entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain akun Piutang dan Hutang antar entitas akuntansi serta RK PPKD dan RK SKPD. Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 5) Konsolidasi di tingkat SKPD bagi SKPD yang mempunyai beberapa Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) dilaksanakan oleh Unit Kerja (Induk) dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh semua entitas akuntansi (KPA/KPB).
- 6) Konsolidasi untuk SKPD atau Unit Kerja yang ditetapkan sebagai BLUD dilakukan dengan cara mencari menggabungkan semua realisasi pendapatan dan belanja BLUD dengan belanja yang dibiayai dari rekening Kas Daerah (APBD). Konsolidasi realisasi pendapatan dan belanja BLUD dilakukan berdasarkan SP2D Pengesahan/Nihil yang



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

ditetapkan secara periodik sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan yang terkait.

Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah

a. Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah

- 1) Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- 2) Pengeluaran Belanja Modal yang nilainya melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual, harus dikapitalisasi.
- 3) Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap hingga siap pakai, peningkatan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknis barang milik daerah harus dilakukan kapitalisasi.
- 4) Pengeluaran yang dikapitalisasi terdiri atas:
 - a) Pengeluaran belanja modal yang nilainya sama atau melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual yang meliputi:
 - Pembelian/pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan.
 - Pembelian/pembangunan gedung dan bangunan.
 - b) Pengeluaran belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/atau umur aset yang telah dimiliki.
 - Nilainya sama dengan/melebihi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
 - c) Pengeluaran yang digunakan untuk:
 - Pengadaan tanah
 - Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan
 - Pembelian/pembuatan Aset Tetap Lainnya
- 5) Pengeluaran yang dikapitalisasi adalah sebagai berikut:
 - a) Pembelian peralatan dan mesin meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan belanja yang terkait dengan pengadaan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
 - b) Pembuatan peralatan, mesin serta bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan jasa konsultan serta biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - c) Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perijinan serta biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - d) Pembelian gedung dan bangunan sampai siap pakai.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦠꦩꦥꦏꦺꦩꦶꦠꦸꦤ꧀ꦠꦶꦩꦼꦮꦫꦠ

- e) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- f) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama serta biaya yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
- g) Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- h) Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- i) Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan pengurangan dan biaya yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
- j) Pembelian jaringan sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- k) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
- l) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan dengan swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
- m) Pembelian Aset Tetap lainnya meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, biaya asuransi dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

- n) Pembuatan/Pembangunan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - o) Pembuatan/Pembangunan aset tetap lainnya yang dilaksanakan dengan swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan dan belanja yang terkait dengan pembuatan/pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- 6) Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri dari:
- a) Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
 - b) Pengeluaran Belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
 - c) Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
- 7) Batas minimum Kapitalisasi Aset Tetap ditetapkan sebagai berikut:
- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00.
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 kecuali pekerjaan pengecatan.
- 8) Batas minimum kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk:
- a) Pengadaan/pembelian tanah
 - b) Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan
 - c) Pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak dan tumbuhan.
- b. Pedoman Pencatatan Barang Milik Daerah**
- 1) Barang Milik Daerah dicatat dalam buku persediaan dan buku inventaris.
 - 2) Pencatatan Barang Milik Daerah meliputi barang tidak bergerak dan barang bergerak.
 - 3) Barang Persediaan merupakan Aset Lancar yang dicatat dalam buku persediaan meliputi barang pakai habis, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual, barang



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦤꦼꦢꦼꦫꦤ꧀ꦢꦼꦫꦤ꧀ꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

bekas pakai yang sudah direklasifikasi dan Barang Milik Daerah yang akan diserahkan kepada pihak lain.

- 4) Pencatatan dalam buku inventaris terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan (intrakomptabel) dan pencatatan di luar pembukuan (ekstrakomptabel).
- 5) Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intra komptabel).
- 6) Barang Milik Daerah yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstra komptabel).

c. Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap

- 1) Penyusutan BMD berupa Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap yang berada dalam penguasaan Pengelola dan Pengguna. Penyusutan ditetapkan atas aset tetap berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya berupa alat olah raga, alat musik/band dan aset renovasi serta aset tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.
- 2) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014 disusutkan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan secara merata setiap tahun selama masa manfaat.
 - b) Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap triwulan selama masa manfaat.
- 3) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 maka nilai yang disusutkan merupakan biaya perolehan. Dalam hal biaya perolehan tidak diketahui maka digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai sisa.
- 4) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- 5) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut. Penyesuaian tersebut meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.
- 6) Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦼꦂꦶꦠꦗꦏꦩꦠꦤ꧀ꦢꦫꦺꦃꦢꦫꦺꦃꦢꦶꦱꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦒꦶꦪꦏꦂꦠ

- 7) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- 8) Nilai buku adalah biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- 9) Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

پيمريته دايره ايسيموا يوجياكارتا

b. Retribusi Daerah Rp42.420.048.683,08 Rp43.625.223.035,16

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp39.977.267.277,00 dan realisasi sebesar Rp42.420.048.683,08 atau 106,11%. Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp1.205.174.352,08 atau 2,76% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp43.625.223.035,16. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah

No	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2018 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
2	Retribusi Daerah				
a.	Retribusi Jasa Umum	10.922.027.000,00	11.378.624.745,08	104,18	13.103.746.066,16
b.	Retribusi Jasa Usaha	28.744.944.357,00	30.816.533.938,00	107,21	30.136.708.969,00
c.	Retribusi Perijinan Tertentu	310.295.920,00	224.890.000,00	72,48	384.768.000,00
	Jumlah	39.977.267.277,00	42.420.048.683,08	106,11	43.625.223.035,16

Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum dianggarkan sebesar Rp10.922.027.000,00 dan realisasi sebesar Rp11.378.624.745,08 atau 104,18% terdiri dari Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum

No	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2018 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Retribusi Jasa Umum				
a.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.462.089.000,00	4.726.190.745,08	105,92	4.485.946.066,16
b.	Retribusi Pelayanan Pendidikan	6.459.938.000,00	6.652.434.000,00	102,98	8.617.800.000,00
	Jumlah	10.922.027.000,00	11.378.624.745,08	104,18	13.103.746.066,16

Penjelasan:

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dianggarkan sebesar Rp4.462.089.000,00 dan realisasi sebesar 4.726.190.745,08 atau 105,92% merupakan pendapatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp240.244.678,92 atau 5,36% dibandingkan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp4.485.946.066,16.

Retribusi Pelayanan Pendidikan dianggarkan sebesar Rp6.459.938.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.652.434.000,00 atau 102,98%. Walaupun Retribusi Pelayanan Pendidikan mencapai target, namun realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1.965.366.000,00 atau 22,81% dibandingkan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp8.617.800.000,00. Penurunan realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan disebabkan realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Badan Diklat mengalami penurunan sebesar Rp3.104.216.000,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 yaitu sebesar Rp6.857.000.000,00. Menurunnya realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan disebabkan karena adanya



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

pengurangan jumlah angkatan diklat kepemimpinan. Retribusi Pelayanan Pendidikan direalisasikan pada:

- 1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KPA Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja) sebesar Rp410.900.000,00 atau 102,01% dari anggaran sebesar Rp402.800.000,00.
- 2) Badan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp3.752.784.000,00 atau 100,83% dari anggaran sebesar Rp3.721.938.000,00.
- 3) Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp2.488.750.000,00 atau 106,58% dari anggaran sebesar Rp2.335.200.000,00.

Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha dianggarkan sebesar Rp28.744.944.357,00 dan realisasi sebesar Rp30.816.533.938,00 atau 107,21% terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Khusus Parkir, Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Pelayanan Kepelabuhan, Tempat Rekreasi dan Olah Raga serta Penjualan Produksi Usaha Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4
Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha

No	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2018 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Retribusi Jasa Usaha				
a.	Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah	13.918.113.820,00	15.418.152.858,00	110,78	14.418.069.299,00
b.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	155.488.000,00	238.167.000,00	153,17	100.408.000,00
c.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	676.330.000,00	739.835.000,00	109,39	708.205.000,00
d.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	43.775.000,00	47.652.500,00	108,86	31.580.000,00
e.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	249.800.000,00	320.135.500,00	128,16	235.730.500,00
f.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	13.701.437.537,00	14.052.591.080,00	102,56	14.642.716.170,00
	Jumlah	28.744.944.357,00	30.816.533.938,00	107,21	30.136.708.969,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp13.918.113.820,00 dan realisasi sebesar Rp15.418.152.858,00 atau 110,78%. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp1.000.083.559,00 atau 6,94% dibandingkan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp14.418.069.299,00.

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp15.418.152.858,00 berada pada beberapa OPD sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.637.082.000,00 atau 131,49% dari anggaran sebesar Rp1.245.000.000,00.
- 2) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM sebesar Rp960.913.700,00 atau 118,94% dari anggaran sebesar Rp807.924.630,00.
- 3) Dinas Sosial sebesar Rp720.000.000,00 atau 100% dari anggaran.
- 4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp1.141.722.000,00 atau 158,70% dari anggaran sebesar Rp719.414.000,00.
- 5) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp386.757.500,00 atau 109,87% dari anggaran sebesar Rp352.000.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦃꦢꦤꦫꦺꦢꦫꦺꦤ꧀ꦢꦶꦱꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

- 6) Dinas Perhubungan sebesar Rp1.484.160.000,00 atau 102,13 % dari anggaran sebesar Rp1.453.200.000,00.
- 7) Dinas Kebudayaan sebesar Rp641.600.000,00 atau 126,80 % dari anggaran sebesar Rp506.000.000,00.
- 8) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp483.040.800,00 atau 120,76 % dari anggaran sebesar Rp400.000.000,00.
- 9) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp39.705.000,00 atau 164,21 % dari anggaran sebesar Rp24.180.000,00.
- 10) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp148.873.458,00 atau 204,25 % dari anggaran sebesar Rp72.887.500,00.
- 11) Badan Penghubung Daerah sebesar Rp137.000.000,00 atau 91,95% dari anggaran sebesar Rp149.000.000,00. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Penghubung Daerah tidak mencapai target karena penggunaan pendopo sebagian besar merupakan kegiatan internal Pemda DIY sehingga tidak dipungut retribusi.
- 12) Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp7.328.598.400,00 atau 101,14 % dari anggaran sebesar Rp7.245.907.690,00.
- 13) Badan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp308.700.000,00 atau 138,68 % dari anggaran sebesar Rp222.600.000,00.

Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut atas setiap pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemda DIY. Retribusi Tempat Khusus Parkir dianggarkan sebesar Rp155.488.000,00 dan realisasi sebesar Rp238.167.000,00 atau 153,17%. Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp137.759.000,00 atau 137,20% dibandingkan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp100.408.000,00. Rincian penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp238.167.000,00 terdapat pada 2 (dua) OPD yaitu :

- 1) Dinas Perhubungan sebesar Rp134.547.000,00 atau 228,87% dari anggaran sebesar Rp58.788.000,00.
- 2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp103.620.000,00 atau 107,16% dari anggaran sebesar Rp96.700.000,00. Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp103.620.000,00 meliputi penerimaan retribusi dari tempat penitipan kendaraan bermotor pada KPPD Kota Yogyakarta sebesar Rp25.000.000,00, KPPD Kabupaten Bantul sebesar Rp26.100.000,00, KPPD Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp15.520.000,00, KPPD Kabupaten Gunung Kidul sebesar Rp14.000.000,00 dan KPPD Kabupaten Sleman sebesar Rp23.000.000,00.

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dianggarkan sebesar Rp676.330.000,00 dan realisasi sebesar Rp739.835.000,00 atau 109,39%. Realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp31.630.000,00 atau 4,47% dibandingkan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp708.205.000,00. Rincian penerimaan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebesar Rp739.835.000,00 terdiri dari beberapa OPD sebagai berikut:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM sebesar Rp77.650.000,00 atau 115,55% dari anggaran sebesar Rp67.200.000,00.
- 2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp256.640.000,00 atau 100,83% dari anggaran sebesar Rp254.530.000,00.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

- 3) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp8.700.000,00 atau 241,67% dari anggaran sebesar Rp3.600.000,00
- 4) Badan Penghubung Daerah sebesar Rp396.845.000,00 atau 113,06% dari anggaran sebesar Rp351.000.000,00.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dianggarkan sebesar Rp43.775.000,00 dan realisasi sebesar Rp47.652.500,00 atau 108,86% merupakan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan pada Dinas Kelautan dan Perikanan KPA Pelabuhan Perikanan Pantai. Realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp16.072.500,00 atau 50,89% dibandingkan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp31.580.000,00.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp249.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp320.135.500,00 atau 128,16% merupakan Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Kebudayaan KPA Museum Sonobudoyo. Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp84.405.000,00 atau 35,81% dibandingkan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp235.730.500,00.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dianggarkan sebesar Rp13.701.437.537,00 dan realisasi sebesar Rp14.052.591.080,00 atau 102,56% terdiri dari:

- 1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp10.887.330.388,00 atau 102,04% dari anggaran sebesar Rp10.669.399.537,00.
- 2) Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp1.482.377.000,00 atau 100,69% dari anggaran sebesar Rp1.472.250.000,00.
- 3) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp1.492.467.000,00 atau 107,00% dari anggaran sebesar Rp1.394.788.000,00.
- 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp190.416.692,00 atau 115,40% dari anggaran sebesar Rp165.000.000,00.

Retribusi Perijinan Tertentu

Retribusi Perijinan Tertentu dianggarkan sebesar Rp310.295.920,00 dan realisasi sebesar Rp224.890.000,00 atau 72,48% terdiri dari Retribusi Izin Trayek, Izin Usaha Perikanan dan Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5
Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu

No	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2018 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Retribusi Perijinan Tertentu				
a.	Retribusi Izin Trayek	33.000.000,00	55.530.000,00	168,27	62.964.000,00
b.	Retribusi Izin Perikanan	1.950.000,00	1.250.000,00	64,10	600.000,00
c.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	275.345.920,00	168.110.000,00	61,05	321.204.000,00
	Jumlah	310.295.920,00	224.890.000,00	72,48	384.768.000,00

Rincian penerimaan Retribusi Perijinan Tertentu lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Retribusi Izin Trayek dianggarkan sebesar Rp33.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp55.530.000,00 atau 168,27%. Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Trayek Tahun 2019



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிநதா குவாசு குவாசு குவாசு குவாசு குவாசு குவாசு குவாசு

mengalami penurunan sebesar Rp7.434.000,00 atau sebesar 11,81% dibanding tahun 2018 sebesar Rp62.964.000,00. Walaupun mengalami penurunan Retribusi Izin Trayek dapat melampaui target karena a) Ada Pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor 118 Tahun 2018 , yang mana semua Angkutan Sewa Khusus (angkutan sewa berbasis aplikasi/Online) diwajibkan memiliki izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus; dan b) Banyak angkutan dalam trayek yang masa berlakunya izinnya jatuh tempo/habis di tahun 2019.

- 2) Retribusi Izin Usaha Perikanan dianggarkan sebesar Rp1.950.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.250.000,00 atau sebesar 64,10%. Walaupun tidak mencapai target namun realisasi tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp650.000,00 atau 108,33% dibanding realisasi Tahun 2018 sebesar Rp600.000,00. Retribusi Izin Usaha Perikanan tidak mencapai target karena Sesuai dengan Peraturan Daerah DIY nomor 13 tahun 2011 tanggal 6 Desember 2011 untuk Kapal dengan berat 11 – 30 GT untuk SIUP, SIPI, SIKPI berlaku 1 Tahun dan karena Izin Usaha Budidaya ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi adalah yang Lintas Kabupaten Kota sedangkan pada Tahun 2019 tidak ada yang mengajukan Izin.
- 3) Retribusi Perpanjangan IMTA dianggarkan sebesar Rp275.345.920,00 dan realisasi sebesar Rp168.110.000,00 atau 61,05%. Realisasi Perpanjangan IMTA Tahun 2019 tidak mencapai target adanya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang mengatur bahwa WNA Pemegang Saham yang bekerja sebagai Direksi atau Dewan Komisaris tidak wajib memiliki izin.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan **Rp85.960.824.196,14** **Rp85.097.737.606,37**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp85.997.899.680,29 dan realisasi sebesar Rp85.960.824.196,14 atau 99,96% meliputi Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD, dan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta. Realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp863.086.589,77 atau 1,01% dari realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp85.097.737.606,37. Adapun rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6
Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

No	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
a.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	85.749.159.349,29	85.712.083.865,14	99,96	84.882.872.466,37
	- Bagian laba atas penyertaan pada Perusahaan Daerah	80.408.690.666,59	80.408.690.416,59	99,99	80.291.032.277,80
	- Bagian laba atas penyertaan modal pada LKNB BUKP	5.340.468.682,70	5.303.393.448,55	99,31	4.591.840.188,57
b.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	248.740.331,00	248.740.331,00	100,00	214.865.140,00
	Jumlah	85.997.899.680,29	85.960.824.196,14	99,96	85.097.737.606,37



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦼꦂꦶꦠꦫꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦢꦶꦩꦼꦮꦪꦏꦂꦠ

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp85.749.159.349,29 dan realisasi sebesar Rp85.712.083.865,14 atau 99,96%. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah dianggarkan sebesar Rp80.408.690.666,59 dan terealisasi sebesar Rp80.408.690.416,59 atau 99,99% meliputi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Tarumartani, PT. Bank BPD DIY dan PT. Anindya Mitra Internasional, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.7
Rincian Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah**

No	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2018 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Perusahaan Daerah Taru Martani (PD Taru Martani)	925.083.150,00	925.083.150,00	100,00	-
2.	Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah (PD BPD)	78.265.128.516,59	78.265.128.516,59	100,00	79.201.315.077,80
3.	Perusahaan Daerah Anindya Mitra Internasional (PT.AMI)	1.218.479.000,00	1.218.478.750,00	100,00	1.089.717.200,00
Jumlah		80.408.690.666,59	80.408.690.416,59	99,99	80.291.032.277,80

Realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Tahun Anggaran 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp117.658.138,79 atau 0,15% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 yaitu sebesar Rp80.291.032.277,80.

2. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Lembaga Keuangan Non Bank Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) dianggarkan sebesar Rp5.340.468.682,70 dan terealisasi sebesar Rp5.303.393.448,55 atau 99,31% merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada 75 BUKP yang ada di setiap kecamatan. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Lembaga Keuangan Non Bank Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) sebesar Rp5.303.393.448,55 mengalami kenaikan sebesar Rp711.553.259,98 atau 15,50% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 yaitu sebesar Rp4.591.840.188,57.

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp248.740.331,00 dan realisasi sebesar 100% merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA).

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp180.473.856.983,28 Rp194.708.669.451,40

Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp139.034.577.171,42 dan realisasi sebesar Rp180.473.856.983,28 atau 129,81%. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp14.234.812.468,12 atau 7,31% dibandingkan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2018 sebesar Rp194.708.669.451,40. Adapun rincian anggaran dan realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2019 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

پيمرنتاه دايراه ايسيمهوا يوجيكرتا

Tabel 5.8
Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

No	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2018 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah				
a.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	2.123.339.000,00	3.174.920.651,00	149,52	1.959.302.600,00
b.	Hasil Penjualan Aset Lainnya	22.250.000,00	178.100.000,00	800,45	548.007.447,00
c.	Penerimaan Jasa Giro	8.000.000.000,00	9.006.551.720,00	112,58	12.974.277.154,00
d.	Pendapatan Bunga	25.312.875.000,00	39.722.801.016,36	156,93	31.006.085.967,84
e.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	16.000.000,00		15.260.000,00
f.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	183.070.041,00	642.117.279,00	350,75	438.595.654,47
g.	Pendapatan Denda Pajak	51.400.000.000,00	65.004.005.050,00	126,47	62.117.042.060,00
h.	Pendapatan Denda Retribusi	1.901.470,00	4.781.310,00	251,45	29.172.830,00
i.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda	-	7.396.500,00		71.190.000,00
j.	Pendapatan dari Pengembalian	287.547.666,00	405.626.222,00	141,06	1.062.611.141,00
k.	Pendapatan dari Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat	-			690.575.000,00
l.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	2.526.349.635,00	3.007.830.893,00	119,06	1.278.730.827,00
m.	Pendapatan BLUD	39.879.397.275,00	42.977.401.298,22	107,77	41.989.877.800,19
n.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	9.297.847.084,42	16.326.325.043,70	175,59	40.527.940.969,90
	Jumlah	139.034.577.171,42	180.473.856.983,28	129,81	194.708.669.451,40

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp2.123.339.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.174.920.651,00 atau 149,52% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.9
Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

No	Uraian	Tahun 2019		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan			
a.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	841.000.000,00	809.386.651,00	96,24
b.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	1.245.720.000,00	2.115.355.000,00	169,81
c.	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	36.619.000,00	250.179.000,00	683,19
	Jumlah	2.123.339.000,00	3.174.920.651,00	149,52

Penjelasan:

Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp841.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp809.386.651,00 atau 96,24% dari target, merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin semua SKPD yang tidak terpakai lagi karena dalam kondisi rusak berat atau usang. Lelang tersebut dilakukan oleh BPKA.

Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp1.245.720.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.115.355.000,00 atau 169,81% merupakan hasil lelang bekas bongkaran bangunan semua SKPD yang tidak terpakai lagi karena dalam kondisi rusak berat. Lelang tersebut dilakukan oleh BPKA.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாழ்வானகாவகாழிபுறமாவட்டம்

Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp36.619.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 250.179.000,00 atau 683,19% merupakan hasil lelang penjualan drum bekas, hasil pertanian dan hasil kehutanan.

Hasil Penjualan Aset Lainnya

Hasil Penjualan Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp22.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp178.100.000,00 atau 800,45% merupakan hasil Penjualan Alat Tepat Guna sebesar Rp10.000.000,00, Penjualan penebangan pohon sebesar Rp168.100.000,00.

Pendapatan Jasa Giro

Pendapatan dari Jasa Giro dianggarkan sebesar Rp8.000.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp9.006.551.720,00 atau 112,58% meliputi penerimaan jasa giro Rekening Kas Daerah pada Bank BPD DIY sebesar Rp8.313.756.044,00 dan jasa giro Rekening Bendahara Pengeluaran OPD yang sudah dilimpahkan ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp692.795.676,00.

Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga Deposito dianggarkan sebesar Rp25.312.875.000,00 realisasi sebesar Rp39.722.801.016,36 atau 156,93% meliputi Pendapatan bunga deposito sebesar Rp39.512.801.016,36 dan Pendapatan Bunga Dana Bergulir sebesar Rp210.000.000,00. Rincian Pendapatan Bunga Deposito sebesar Rp39.512.801.016,36 adalah sebagai berikut:

- 1) Bank BPD sebesar Rp5.343.750.000,00.
- 2) Bank BNI sebesar Rp3.995.068.493,00.
- 3) Bank Mandiri sebesar Rp612.465.753,40
- 4) Bank BTN sebesar Rp16.172.191.779,46.
- 5) Bank BRI sebesar Rp11.635.055.086,08.
- 6) Bank Mandiri Syariah sebesar Rp1.754.269.904,42

Tuntutan Ganti Rugi Daerah

Tuntutan Ganti Rugi Daerah Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terdapat realisasi sebesar Rp16.000.000,00 merupakan penerimaan Tuntutan Ganti Rugi Daerah yang telah ditetapkan dengan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak atau Surat Pembebanan kepada Pegawai Negeri Sipil atas kelalaian yang dilakukan.

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dianggarkan sebesar Rp183.070.041,00 dan direalisasikan sebesar Rp642.117.279,00 atau 350,75%. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan direalisasikan pada BPKA dan merupakan penerimaan dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada semua OPD baik berupa pekerjaan fisik maupun non fisik.

Pendapatan Denda Pajak

Pendapatan Denda Pajak Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp51.400.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp65.004.005.050,00 atau 126,47%. Penerimaan tersebut merupakan penerimaan denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp62.211.794.900,00 dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.792.210.150,00. Pendapatan Denda Pajak Tahun 2019



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதே குடிமகன்களின் நலனை கருவியாகக் கொள்ளும்

mengalami kenaikan sebesar Rp2.886.962.990,00 atau 4,65% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 yaitu sebesar Rp62.117.042.060,00.

Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan Denda Retribusi Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp1.901.470,00 dan realisasi sebesar Rp4.781.310,00 atau 251,45%. Pendapatan Denda Retribusi direalisasikan pada BPKA. Pendapatan Denda Retribusi Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp24.391.520,00 atau 83,61% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 yaitu sebesar Rp29.172.830,00.

Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda

Pendapatan Denda atas pelanggaran Perda Tahun 2019 tidak dianggarkan, namun terdapat realisasi sebesar Rp7.396.500,00 berupa Denda Dana Bergulir.

Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian merupakan penerimaan pengembalian belanja periode tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan pendapatan.

Pendapatan dari Pengembalian dianggarkan sebesar Rp287.547.666,00 dan direalisasikan sebesar Rp405.626.222,00 atau 141,06%. Pendapatan dari Pengembalian meliputi:

- 1) Pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp226.652.740,00.
- 2) Pengembalian Dana Penyesuaian sebesar Rp139.324.494,00.
- 3) Pengembalian Dana Hibah dan Bantuan Sosial sebesar Rp6.546.653,00.
- 4) Pengembalian kelebihan honorarium Rp1.316.500,00
- 5) Pengembalian Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp31.785.835,00.

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp2.526.349.635,00 dan realisasi sebesar Rp3.007.830.893,00 atau 119,06%. Pemanfaatan kekayaan daerah tersebut dalam bentuk sewa dengan rincian:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Tabel 5.10

Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

No	Uraian	Tahun 2019		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Sewa Tanah dan Bangunan	26.631.375,00	26.631.375,00	100,00
2.	Sewa Lahan	263.746.900,00	337.990.408,00	128,15
3.	Pengelolaan Terminal	603.471.000,00	647.252.000,00	107,25
4.	Penggunaan Asrama	-	8.662.000,00	
5.	Penggunaan Aula	62.500.000,00	94.700.000,00	151,52
6.	Sewa Tempat/Ruangan	120.000.000,00	166.036.000,00	138,36
7.	Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan di Komplek Kepatihan	107.241.985,00	107.241.985,00	100,00
8.	Sewa Bangunan dan Sebagian Tanah Park and Ride	18.600.000,00	23.600.000,00	126,88
9.	Sewa Bangunan Untuk Kantin	490.650.000,00	461.725.000,00	94,10
10.	Sewa Bangunan Untuk Fotocopy	9.200.000,00	10.400.000,00	113,04
11.	Sewa Bangunan Untuk Koperasi	500.000,00	500.000,00	100,00
12.	Jasa Pemeriksaan dan pengujian peralatan K3	731.800.000,00	1.017.200.000,00	139,00
13.	Sewa Ruang Usaha Fotocopi dan Koperasi	7.750.000,00	10.750.000,00	138,71
14.	Sewa Ruang Usaha Fotocopi, Koperasi dan Kantin	17.600.000,00	12.200.000,00	69,32
15.	Sewa Sebagian Tanah (Untuk Usaha Warung di Karang Duwet, Paliyan, GK)	-	868.000,00	
16.	Pengelolaan hutan produksi klayar kenet	21.814.375,00	21.874.375,00	100,28
17.	Pengelolaan hutan produksi ngingrong mulo	14.719.000,00	21.365.750,00	145,16
18.	Sewa Fasilitas Pendingin Hasil Perikanan (Cold Storage)	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
19.	Sewa GOR	125.000,00	125.000,00	100,00
20.	Sewa sebagian tanah untuk pertanian di Karang Duwet, Paliyan, GK)	-	1.309.000,00	
21.	Sewa komplek Lapangan Kenari	-	7.400.000,00	
	Jumlah	2.526.349.635,00	3.007.830.893,00	119,06

Pendapatan dari Pengelolaan BLUD

Pendapatan dari Pengelolaan BLUD dianggarkan sebesar Rp39.879.397.275,00 dan realisasi sebesar Rp 42.977.401.298,22 atau 107,77%. Pendapatan dari Pengelolaan BLUD Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp987.523.498,03 atau 2,35% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pengelolaan BLUD Tahun 2018 yaitu sebesar Rp41.989.877.800,19. Adapun penerimaan Pendapatan dari Pengelolaan BLUD Tahun 2019 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Ngayogyakarta

Tabel 5.11

Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengelolaan BLUD

No	Uraian	Tahun 2019		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	RS Ghrasia	19.250.000.000,00	17.065.819.465,60	88,65
2.	RS Paru Respira	9.900.000.000,00	12.247.520.943,00	123,71
3.	Balai Latihan Pendidikan dan Teknik	2.181.597.275,00	2.587.083.742,00	118,59
4.	Bapel Jamkesos	37.800.000,00	58.884.202,00	155,78
5.	Balai Pelatihan Kesehatan	4.000.000.000,00	4.648.696.951,00	116,22
6.	Balai Laboratorium Kesehatan	4.510.000.000,00	6.369.395.994,62	141,23
	Jumlah	39.879.397.275,00	42.977.401.298,22	107,77

Pendapatan dari Pengelolaan BLUD pada RS Ghrasia dianggarkan sebesar Rp19.250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp17.065.819.465,60 atau sebesar 88,65% dari anggaran, tidak mencapai target karena adanya klaim BPJS yang tidak terbayar karena terlambat akreditasi.

Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya

Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya dianggarkan sebesar Rp9.297.847.084,42 dan direalisasikan sebesar Rp16.326.325.043,70 atau 175,59% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.12

Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain

No	Uraian	Tahun 2019		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Lain-lain PAD yang sah lainnya	9.201.847.084,42	16.126.275.043,70	175,25
2.	Sewa GOR Amongrogo	20.000.000,00	78.700.000,00	393,50
3.	Sewa Youth Center	5.000.000,00	10.905.000,00	218,10
4.	Sewa Mandala Krda	60.000.000,00	105.495.000,00	175,83
5.	Sewa Halaman Parkir GOR Amongrogo	2.000.000,00	-	-
6.	Sewa Kamar	3.500.000,00	-	-
7.	Sewa Aula	500.000,00	-	-
8.	Sewa Lapangan Tennis	5.000.000,00	4.950.000,00	99,00
	Jumlah	9.297.847.084,42	16.326.325.043,70	175,59

Penjelasan:

- 1) Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya dianggarkan sebesar Rp9.201.847.084,42 dan direalisasikan sebesar Rp16.126.275.043,70 atau 175,25% merupakan penerimaan dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Tabel 5.13

Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya

No	Uraian	Tahun 2019		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan dari pengelolaan BUKP	489.767.126,42	486.347.522,09	99,30
2.	Tindak lanjut Hasil Temuan	2.154.359.583,00	7.200.957.390,70	334,25
3.	Surat Keterangan Asal Ikan	5.000.000,00	4.332.000,00	86,64
4.	Padi Konsumsi (non benih)	-	16.500.000,00	
5.	Pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Baru	34.301.000,00	44.625.000,00	130,10
6.	Sapi Potong Paksa	-	6.000.000,00	
7.	Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor di Laboratorium	2.500.000,00	3.650.000,00	146,00
8.	Lain-lain	-	240.559.385,91	
9.	Pengelolaan Hutan Lindung Mangunan	2.060.919.375,00	2.411.134.750,00	116,99
10.	Penjualan Air Curah	4.455.000.000,00	5.712.168.995,00	128,22
	Jumlah	9.201.847.084,42	16.126.275.043,70	175,25

Realisasi penerimaan "Lain-lain" pada Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya sebesar Rp240.559.385,91 berasal dari penerimaan yang tidak bisa masuk ke dalam salah satu kategori rekening pendapatan yang ada. Diantaranya adalah penerimaan dari Yulia Lediani, Gatut Pramono, setoran pengembalian sisa dana DAK Reguler SMA tahun 2018, setoran dari RS Panembahan Senopati, setoran PT Artha Kreasi Utama Prima, setoran dari PT Merapi Adikari Pratama, setoran dari PT Taspen, dan pengembalian pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan jasa pengelola arsip.

- 2) Pendapatan Sewa GOR Amongrogo dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp78.700.000,00 atau 393,50%. Pendapatan Sewa GOR Amongrogo dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Balai BPO).
- 3) Pendapatan Sewa Youth Center dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp10.905.000,00 atau 218,10%. Pendapatan Sewa Youth Center dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Balai BPO).
- 4) Pendapatan Sewa Mandala Krida dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp105.495.000,00 atau 175,83%. Pendapatan Sewa Mandala Krida dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Balai BPO).
- 5) Pendapatan sewa Halaman Parkir GOR Amongrogo dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00 dan tahun ini tidak ada realisasi. Pendapatan sewa ini dianggarkan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Balai BPO). Pendapatan sewa Halaman Parkir GOR Amongrogo tidak terealisasi karena untuk latihan sepatu roda sudah dipusatkan di halaman parkir Stadion Mandala Krida.
- 6) Pendapatan sewa kamar dianggarkan Rp3.500.000,00 dan tidak ada realisasi. Pendapatan sewa kamar ini dianggarkan pada OPD Dinas Perikanan dan Kelautan. Pendapatan sewa kamar yang sebelumnya dianggarkan di rekening lain-lain dipindah ke rekening



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah-Penggunaan Asrama. Realisasi pendapatan Penggunaan Asrama Tahun 2019 adalah sebesar Rp3.712.000,00.

- 7) Pendapatan sewa aula dianggarkan sebesar Rp500.000,00 dan tidak terealisasi. Pendapatan sewa aula dianggarkan pada OPD Dinas Perikanan dan Kelautan. Pendapatan sewa aula yang sebelumnya dianggarkan di rekening lain-lain dipindah ke rekening Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah-Penggunaan Aula. Realisasi pendapatan Penggunaan Aula Tahun 2019 adalah sebesar Rp700.000,00.
- 8) Pendapatan sewa lapangan tenis dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.950.000,00 atau 99,00%. Pendapatan Sewa lapangan tenis dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer Rp3.608.013.435.006,00 Rp3.328.773.835.982,00

Anggaran Pendapatan Transfer Tahun 2019 sebesar Rp3.689.782.581.758,00 dan realisasi yang diterima secara kas sebesar Rp3.608.013.435.006,00 atau 97,78%. Meskipun tidak mencapai target tetapi realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2019 sebesar Rp3.608.013.435.006,00 mengalami kenaikan sebesar 279.239.599.024,00 atau sebesar 8,39% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2018 sebesar Rp3.328.773.835.982,00. Rincian Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

Tabel 5.14
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

No	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
a.	Bagi Hasil Pajak	89.517.133.300,00	56.035.674.200,00	62,60	93.097.809.176,00
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	36.431.000,00	24.907.600,00	68,37	44.756.323,00
c.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.351.102.020.000,00	1.351.102.020.000,00	100,00	1.314.262.108.053,00
d.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.026.816.474.705,00	978.540.310.453,00	95,30	910.032.137.851,00
	Jumlah	2.467.472.059.005,00	2.385.702.912.253,00	96,69	2.317.436.811.403,00
2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
a.	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
b.	Dana Keistimewaan	1.162.772.688.443,00	1.162.772.688.443,00	100,00	973.435.532.429,00
c.	Dana Penyesuaian	58.831.799.000,00	58.831.799.000,00	100,00	37.250.000.000,00
	Jumlah	1.221.604.487.443,00	1.221.604.487.443,00	100,00	1.010.685.532.429,00
3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Atau Daerah - Lainnya				
	Bantuan Keuangan	706.035.310,00	706.035.310,00	100,00	651.492.150,00
	Jumlah	706.035.310,00	706.035.310,00	100,00	651.492.150,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	3.689.782.581.758,00	3.608.013.435.006,00	97,78	3.328.773.835.982,00

Dana Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp89.517.133.300,00 dan realisasi sebesar Rp56.035.674.200,00 atau 62,60%. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp37.062.134.976,00 atau 39,81% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2018 yaitu sebesar Rp93.097.809.176,00. Rincian Anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிந்தா டாஐரா டாஐரா இஸ்திமௌ யோக்யாஐர்டா

Tabel 5.15

Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak

No	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2018 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
a.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	81.832.547.000,00	49.099.528.200,00	60,00	85.634.891.641,00
b.	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	5.210.616.300,00	5.210.616.000,00	100,00	4.903.054.000,00
c.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi Dan Bangunan	2.473.970.000,00	1.725.530.000,00	69,75	2.559.863.535,00
	Jumlah	89.517.133.300,00	56.035.674.200,00	62,60	93.097.809.176,00

Pendapatan dari Bagi Hasil Pajak tidak mencapai target anggaran dan telah dicatat sesuai dengan transfer dari pusat.

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dianggarkan sebesar Rp36.431.000,00 dan realisasi sebesar Rp24.907.600,00 atau 68,37% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.16

Rincian Anggaran dan Realisasi

Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

No	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2018 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
a.	Bagi Hasil dari Prov Sumber Daya Hutan	5.941.000,00	3.564.600,00	60,00	21.775.632,00
b.	Bagi Hasil dari Iuran tetap (Land Rent)	30.490.000,00	21.343.000,00	70,00	22.980.691,00
	Jumlah	36.431.000,00	24.907.600,00	68,37	44.756.323,00

Pendapatan Bagi Hasil dari Provisi SDH dianggarkan sebesar Rp5.941.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.564.600,00 atau 60,00%. Realisasi penerimaan tersebut sesuai dengan transfer dari pusat.

Pendapatan dari Bagi Hasil dari Iuran Tetap (*Land Rent*) dianggarkan sebesar Rp30.490.000,00 dan realisasi sebesar Rp21.343.000,00 atau sebesar 70,00% dari anggaran, realisasi telah sesuai transfer dari pusat.

Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp1.351.102.020.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.351.102.020.000,00 atau 100,00%. Penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp36.839.911.947,00 atau 2,80% dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2018 yaitu sebesar Rp1.314.262.108.053,00.

Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp1.026.816.474.705,00 dan realisasi Rp978.540.310.453,00 atau 95,30%. Penerimaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp68.508.172.602,00 atau 7,53% dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2018 yaitu sebesar Rp910.032.137.851,00. Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik hanya mencapai 90,94% karena penyalurannya sebesar nilai kontrak yang dilakukan oleh satuan kerja teknis terkait. Adapun rincian anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2019 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

Tabel 5.17
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus

No	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
I.	DAK Fisik				
a.	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	38.546.899.000,00	32.602.401.800,00	84,58	19.955.456.700,00
b.	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	3.798.751.000,00	3.191.700.000,00	84,02	4.534.071.000,00
c.	DAK Bidang Kehutanan	1.992.218.000,00	1.839.973.253,00	92,36	3.148.632.380,00
d.	DAK Bidang Kesehatan	15.044.783.000,00	13.851.677.824,00	92,07	166.674.360,00
e.	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	2.137.863.000,00	1.862.375.634,00	87,11	718.331.500,00
f.	DAK Bidang Pertanian	8.000.000.000,00	6.816.793.248,00	85,21	2.797.284.000,00
g.	DAK Bidang Pendidikan	44.537.424.000,00	43.877.738.533,00	98,52	25.304.240.230,00
h.	Dana Alokasi Khusus Pariwisata	5.944.814.000,00	5.088.876.000,00	85,60	-
i.	Dana Alokasi Khusus Energi Skala Kecil	-	-		2.848.135.275,00
	Jumlah	120.002.752.000,00	109.131.536.292,00	90,94	59.472.825.445,00
II.	DAK Non Fisik				
a.	Bantuan Operasional Sekolah	631.564.788.384,00	613.489.389.988,00	97,14	578.172.872.800,00
b.	Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi dan UKM	3.499.929.176,00	3.499.929.176,00	100,00	2.469.565.605,00
c.	Dana Peningkatan Pengelolaan Ketenagakerjaan	1.187.151.950,00	1.187.151.950,00	100,00	1.192.603.001,00
d.	Dana Tunjangan Profesi Guru	268.436.525.000,00	249.106.974.852,00	92,80	266.678.431.000,00
e.	Dana Tambahan Penghasilan Guru	-	-		27.900.000,00
f.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	2.125.328.195,00	2.125.328.195,00	100,00	2.017.940.000,00
	Jumlah	906.813.722.705,00	869.408.774.161,00	95,88	850.559.312.406,00
	Jumlah Total	1.026.816.474.705,00	978.540.310.453,00	95,30	910.032.137.851,00

Dana Keistimewaan Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp1.162.772.688.443,00 berasal dari alokasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 Lampiran V sebesar Rp1.200.000.000.000,00 dikurangi dengan sisa Dana Keistimewaan Tahun 2018 sebesar Rp37.227.311.557,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.162.772.688.443,00. Adapun realisasi penerimaan Dana Keistimewaan Tahun 2019 adalah sebesar Rp1.162.772.688.443,00 atau sebesar 100% dari anggaran.

Dana Penyesuaian dianggarkan sebesar Rp58.831.799.000,00 dan realisasi sebesar Rp58.831.799.000,00 atau 100% merupakan penerimaan Dana Insentif Daerah (DID). Penerimaan Dana Penyesuaian Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp21.581.799.000,00 atau 57,94% dibandingkan dengan realisasi Dana Penyesuaian Tahun 2018 yaitu sebesar Rp37.250.000.000,00.

Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp706.035.310,00 dan realisasi Rp706.035.310,00 atau 100%. Bantuan Keuangan tersebut berasal dari Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta dengan peruntukkan sharing Biaya Pengelolaan IPAL sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 5/PERJ/GUB/IV/2015 atau 16.1/PK/Bt/2015 atau 17.1/PK.KDH/A/2015 atau 39/Perj.YK/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Sistem Terpusat beserta addendumnya. Realisasi penerimaan Bantuan Keuangan sebesar Rp706.035.310,00 terdiri dari Bantuan Keuangan dari Pemda Kabupaten Bantul sebesar Rp84.852.930,00 (100%), Pemda Kabupaten Sleman sebesar Rp92.971.390,00 (100%) dan Pemda Kota Yogyakarta sebesar Rp528.210.990,00 (100%).



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

پيمرنتاه دايراه ايسيمهوا يوجياكارتا

a. Belanja Pegawai Rp1.553.763.754.881,00 Rp1.512.793.109.461,00

Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp1.650.664.046.997,61 terdiri dari Belanja Pegawai Tidak Langsung sebesar Rp1.364.441.675.404,81 dan Belanja Pegawai Langsung sebesar Rp286.222.371.592,80. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 sebesar Rp1.553.763.754.881,00 terdiri dari realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung sebesar Rp1.295.701.930.292,00 dan Belanja Pegawai Langsung sebesar Rp258.061.824.589,00. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp40.970.645.420,00 atau 2,71% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018 yaitu sebesar Rp1.512.793.109.461,00.

Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung sebesar Rp1.295.701.930.292,00 atau 94,96% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.19
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung
Sesuai Dengan Rincian Obyek Belanja

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
I.	Gaji dan Tunjangan				
a.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	639.704.282.585,00	606.384.854.205,00	(33.319.428.380,00)	94,79
b.	Tunjangan Keluarga	58.186.922.303,00	55.689.715.999,00	(2.497.206.304,00)	95,71
c.	Tunjangan Jabatan	13.282.121.145,00	13.017.941.830,00	(264.179.315,00)	98,01
d.	Tunjangan Fungsional	37.080.238.687,00	36.315.814.100,00	(764.424.587,00)	97,94
e.	Tunjangan Fungsional Umum	10.413.366.564,00	9.989.225.000,00	(424.141.564,00)	95,93
f.	Tunjangan Beras	27.977.579.616,50	26.916.310.940,00	(1.061.268.676,50)	96,21
g.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.516.623.039,50	2.309.298.943,00	(207.324.096,50)	91,76
h.	Pembulatan Gaji	13.168.218,81	8.211.823,00	(4.956.395,81)	62,36
i.	Uang Paket	149.940.000,00	149.595.000,00	(345.000,00)	99,77
j.	Tunjangan Badan Musyawarah	47.763.000,00	39.541.500,00	(8.221.500,00)	82,79
k.	Tunjangan Komisi	95.526.000,00	79.605.000,00	(15.921.000,00)	83,33
l.	Tunjangan Badan Anggaran	49.851.000,00	41.803.500,00	(8.047.500,00)	83,86
m.	Tunjangan Badan Kehormatan	11.223.000,00	9.352.500,00	(1.870.500,00)	83,33
n.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	56.006.250,00	40.781.250,00	(15.225.000,00)	72,82
o.	Tunjangan Perumahan	10.680.000.000,00	10.527.600.000,00	(152.400.000,00)	98,57
p.	Uang Jasa Pengabdian	730.350.000,00	720.450.000,00	(9.900.000,00)	98,64
q.	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan	360.000.000,00	330.000.000,00	(30.000.000,00)	91,67
r.	Tunjangan Badan Pembentukan Perda dan/atau perdais	26.883.000,00	22.663.500,00	(4.219.500,00)	84,30
s.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian	5.100.730.986,00	4.970.035.778,00	(130.695.208,00)	97,44
t.	Iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	19.209.334.560,00	17.062.712.013,00	(2.146.622.547,00)	88,83
u.	Tunjangan Bahaya Radiasi	165.050.000,00	124.200.000,00	(40.850.000,00)	75,25
v.	Tunjangan Reses	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	0	100,00
v.	Tunjangan Transportasi	8.698.600.000,00	8.684.570.000,00	(14.030.000,00)	99,84
	Jumlah	836.205.559.954,81	795.084.282.881,00	(41.121.277.073,81)	95,08



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
II.	Tambahan Penghasilan PNS				
a.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.173.714.500,00	265.875.000,00	(1.907.839.500,00)	12,23
b.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	290.456.495.048,00	265.171.981.785,00	(25.284.513.263,00)	91,29
c.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	174.586.000.000,00	174.484.569.972,00	(101.430.028,00)	99,94
d.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Biaya Hidup	691.200.000,00	644.770.000,00	(46.430.000,00)	93,28
	Jumlah	467.907.409.548,00	440.567.196.757,00	(27.340.212.791,00)	94,16
III.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH				
a.	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	9.900.000.000,00	9.885.000.000,00	(15.000.000,00)	99,85
b.	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	3.020.294.694,00	3.020.294.694,00	0	100,00
	Jumlah	12.920.294.694,00	12.905.294.694,00	(15.000.000,00)	99,88
IV.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah				
	Insentif Pajak Daerah	46.207.746.840,00	46.176.714.841,00	(31.031.999,00)	99,93
	Jumlah	46.207.746.840,00	46.176.714.841,00	(31.031.999,00)	99,93
V.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				
	Insentif Retribusi Jasa Umum	554.392.041,00	334.108.140,00	(220.283.901,00)	60,27
	Insentif Retribusi Jasa Usaha	636.963.449,00	633.822.979,00	(3.140.470,00)	99,51
	Insentif Retribusi Jasa Perijinan Tertentu	9.308.878,00	510.000,00	(8.798.878,00)	5,48
	Jumlah	1.200.664.368,00	968.441.119,00	(232.223.249,00)	80,66
	Jumlah Total	1.364.441.675.404,81	1.295.701.930.292,00	(68.739.745.112,81)	94,96

Belanja Pegawai Tidak Langsung Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp1.364.441.675.404,81 dan realisasi sebesar Rp1.295.701.930.292,00 atau 94,96%. Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Tahun 2019 sebesar Rp1.295.701.930.292,00 mengalami kenaikan sebesar Rp10.736.445.499,00 atau 0,84% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Tahun 2018 yaitu sebesar Rp1.284.965.484.793,00.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Tahun 2019 per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.20
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Per SKPD

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	781.006.363.973,00	729.047.120.074,00	(51.959.243.899,00)	93,35
2	Dinas Kesehatan	43.302.839.243,00	41.704.050.246,00	(1.598.788.997,00)	96,31
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	17.816.849.206,00	17.079.415.209,00	(737.433.997,00)	95,86
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	2.942.018.396,00	2.833.908.277,00	(108.110.119,00)	96,33
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.510.333.014,00	3.342.327.350,00	(168.005.664,00)	95,21
6	Satuan Polisi Pamong Praja	7.573.804.373,00	7.297.168.501,00	(276.635.872,00)	96,35
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.253.988.182,00	3.148.984.324,00	(105.003.858,00)	96,77
8	Dinas Sosial	15.920.100.363,00	15.276.266.844,00	(643.833.519,00)	95,96
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13.573.968.185,00	13.069.511.453,00	(504.456.732,00)	96,28
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	3.204.096.559,00	3.097.025.478,00	(107.071.081,00)	96,66



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦁꦠꦤ꧀ꦢꦫꦺꦃꦢꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦏꦸꦫꦏꦠꦫ

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	21.426.406.970,00	20.627.321.201,00	(799.085.769,00)	96,27
12	Dinas Perhubungan	7.738.129.446,00	7.430.797.886,00	(307.331.560,00)	96,03
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.635.430.521,00	3.528.060.016,00	(107.370.505,00)	97,05
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.876.494.624,00	2.786.488.116,00	(90.006.508,00)	96,87
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	3.244.389.783,00	3.044.201.260,00	(200.188.523,00)	93,83
16	Dinas Kebudayaan	8.302.013.389,00	8.038.351.657,00	(263.661.732,00)	96,82
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	7.539.484.933,00	7.251.365.226,00	(288.119.707,00)	96,18
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.378.165.899,00	7.079.404.601,00	(298.761.298,00)	95,95
19	Dinas Pariwisata	3.756.960.217,00	3.569.442.601,00	(187.517.616,00)	95,01
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	24.522.969.872,00	23.447.065.497,00	(1.075.904.375,00)	95,61
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.919.406.346,00	7.452.117.454,00	(467.288.892,00)	94,10
22	Gubernur dan Wakil Gubernur	3.255.267.927,00	3.248.890.330,00	(6.377.597,00)	99,80
23	Sekretariat Daerah	24.634.153.774,00	23.592.736.695,00	(1.041.417.079,00)	95,77
24	Badan Penghubung Daerah	1.138.150.762,00	1.090.055.081,00	(48.095.681,00)	95,77
25	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	36.754.606.353,00	36.455.579.794,00	(299.026.559,00)	99,19
26	Sekretariat DPRD	5.065.143.559,00	4.870.065.668,00	(195.077.891,00)	96,15
27	Inspektorat	5.736.941.642,00	5.590.262.980,00	(146.678.662,00)	97,44
28	Paniradya Kaistimewan	2.177.267.742,00	2.062.513.735,00	(114.754.007,00)	94,73
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.801.021.651,00	6.561.897.483,00	(239.124.168,00)	96,48
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	102.932.963.263,81	97.105.307.502,00	(5.827.655.761,81)	94,34
31	PPKD/BUD	-	-	0	-
32	Badan Kepegawaian Daerah	181.024.187.673,00	180.616.121.021,00	(408.066.652,00)	99,77
33	Badan Pendidikan dan Pelatihan	4.477.757.564,00	4.358.106.732,00	(119.650.832,00)	97,33
	Jumlah	1.364.441.675.404,81	1.295.701.930.292,00	(68.739.745.112,81)	94,96

Realisasi Belanja Pegawai Langsung Tahun 2019 sebesar Rp258.061.824.589,00 mengalami kenaikan sebesar Rp30.234.199.921,00 atau 13,27% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Langsung Tahun 2018 yaitu sebesar Rp227.827.624.668,00.

Realisasi Belanja Pegawai Langsung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp258.061.824.589,00 atau 90,16% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.21
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Langsung Sesuai Obyek Belanja

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
a.	Uang Lembur	598.375.000,00	391.793.500,00	(206.581.500,00)	65,48
b.	Honorarium PNS	88.809.012.500,00	81.792.760.875,00	(7.016.251.625,00)	92,10
c.	Honorarium Non PNS	176.071.344.437,80	158.231.102.146,00	(17.840.242.291,80)	89,87
d.	Belanja Pegawai BLUD	17.145.134.905,00	15.067.959.218,00	(2.077.175.687,00)	87,88
e.	Belanja Pegawai BOS	3.598.504.750,00	2.578.208.850,00	(1.020.295.900,00)	71,65
	Jumlah	286.222.371.592,80	258.061.824.589,00	(28.160.547.003,80)	90,16

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Langsung Tahun 2019 per OPD adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Tabel 5.22
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Langsung Per SKPD

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	96.490.807.908,00	84.610.064.231,00	(11.880.743.677,00)	87,69
2	Dinas Kesehatan	17.769.370.337,00	15.503.261.439,00	(2.266.108.898,00)	87,25
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	26.505.994.000,00	24.419.030.159,00	(2.086.963.841,00)	92,13
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	11.851.031.000,00	11.370.240.984,00	(480.790.016,00)	95,94
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.730.321.000,00	2.618.615.000,00	(111.706.000,00)	95,91
6	Satuan Polisi Pamong Praja	5.237.021.600,00	4.981.270.000,00	(255.751.600,00)	95,12
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.457.211.120,00	4.171.103.400,00	(286.107.720,00)	93,58
8	Dinas Sosial	10.444.438.260,80	9.948.899.600,00	(495.538.660,80)	95,26
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.049.381.900,00	3.788.130.620,00	(261.251.280,00)	93,55
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	1.730.255.000,00	1.616.140.000,00	(114.115.000,00)	93,40
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9.508.545.450,00	8.178.844.550,00	(1.329.700.900,00)	86,02
12	Dinas Perhubungan	3.072.795.560,00	2.953.029.000,00	(119.766.560,00)	96,10
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.692.628.240,00	1.571.682.000,00	(120.946.240,00)	92,85
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.758.769.208,00	2.670.628.200,00	(88.141.008,00)	96,81
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	1.291.359.160,00	1.028.930.000,00	(262.429.160,00)	79,68
16	Dinas Kebudayaan	21.108.970.000,00	19.169.551.700,00	(1.939.418.300,00)	90,81
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.277.367.852,00	1.141.317.700,00	(136.050.152,00)	89,35
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.896.768.360,00	2.701.480.980,00	(195.287.380,00)	93,26
19	Dinas Pariwisata	1.376.264.600,00	1.182.392.000,00	(193.872.600,00)	85,91
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	7.264.477.200,00	6.612.818.900,00	(651.658.300,00)	91,03
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.126.066.010,00	2.046.086.500,00	(79.979.510,00)	96,24
22	Gubernur dan Wakil Gubernur	-	-	0	0,00
23	Sekretariat Daerah	16.377.919.140,00	14.758.330.400,00	(1.619.588.740,00)	90,11
24	Badan Penghubung Daerah	1.603.052.337,00	1.582.718.341,00	(20.333.996,00)	98,73
25	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	0	0,00
26	Sekretariat DPRD	4.843.332.200,00	4.394.287.500,00	(449.044.700,00)	90,73
27	Inspektorat	6.528.268.520,00	6.225.068.875,00	(303.199.645,00)	95,36
28	Paniradya Kaistimewan	301.608.480,00	297.600.000,00	(4.008.480,00)	98,67
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.438.261.950,00	3.052.030.000,00	(386.231.950,00)	88,77
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	11.385.967.840,00	10.876.045.010,00	(509.922.830,00)	95,52
31	PPKD/BUD	-	-	0	0,00
32	Badan Kepegawaian Daerah	4.664.883.840,00	3.621.575.000,00	(1.043.308.840,00)	77,63
33	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1.439.233.520,00	970.652.500,00	(468.581.020,00)	67,44
	Jumlah	286.222.371.592,80	258.061.824.589,00	(28.160.547.003,80)	90,16

b. Belanja Barang dan Jasa Rp1.072.294.764.575,00 Rp1.122.418.868.628,08

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.072.294.764.575,00 merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.219.154.114.509,46 dikurangi dengan realisasi Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp96.417.920.031,46 dan Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp50.441.429.903,00 dengan perhitungan sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Tabel 5.23
Konversi Belanja Hibah Barang Ke Belanja Hibah

No	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2018 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Barang dan Jasa	1.404.736.013.709,84	1.219.154.114.509,46	86,79	1.290.914.911.884,05
2	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	(174.693.715.790,00)	(146.859.349.934,46)	84,07	(168.496.043.255,97)
a.	Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	(106.594.289.490,00)	(96.417.920.031,46)	90,45	(131.904.619.931,57)
b.	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa Yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	(68.099.426.300,00)	(50.441.429.903,00)	74,07	(36.591.423.324,40)
	Jumlah	1.230.042.297.919,84	1.072.294.764.575,00	87,18	1.122.418.868.628,08

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD maka Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang dikonversi menambah Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Selanjutnya penyajian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar anggaran dan Belanja Barang dan Jasa sebelum konversi dikurangi dengan anggaran dan realisasi Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat dan anggaran serta realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga.

Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2019 sebelum dikonversi dianggarkan sebesar Rp1.404.736.013.709,84 dan realisasi sebesar Rp1.219.154.114.509,46 atau 86,79%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp71.760.797.374,59 atau 5,56% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018 yaitu sebesar Rp1.290.914.911.884,05. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.24
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sesuai Dengan Obyek Belanja

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	24.160.808.704,00	22.738.749.409,00	(1.422.059.295,00)	94,11
2	Belanja Bahan/Material	86.355.833.038,00	74.927.196.072,00	(11.428.636.966,00)	86,77
3	Belanja Jasa Kantor	241.129.734.968,00	216.996.636.786,00	(24.133.098.182,00)	89,99
4	Belanja Premi Asuransi	3.193.974.557,00	2.525.510.979,00	(668.463.578,00)	79,07
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.523.043.760,00	20.562.397.713,00	(2.960.646.047,00)	87,41
6	Belanja Cetak dan Peggandaan	31.007.347.828,00	28.641.542.106,00	(2.365.805.722,00)	92,37
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.758.070.100,00	16.184.757.660,00	(2.573.312.440,00)	86,28
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.177.651.000,00	8.054.697.636,00	(1.122.953.364,00)	87,76
9	Belanja Sewa Alat Berat	292.000.000,00	283.178.500,00	(8.821.500,00)	96,98
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	38.546.112.090,00	34.205.454.846,00	(4.340.657.244,00)	88,74



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
11	Belanja Makanan dan Minuman	92.629.493.500,00	84.248.403.212,00	(8.381.090.288,00)	90,95
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	708.860.000,00	179.965.000,00	(528.895.000,00)	25,39
13	Belanja Pakaian Kerja	4.875.226.000,00	4.576.359.475,00	(298.866.525,00)	93,87
14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari	5.611.997.500,00	5.364.558.300,00	(247.439.200,00)	95,59
15	Belanja Perjalanan Dinas	131.382.252.894,00	93.158.196.186,00	(38.224.056.708,00)	70,91
16	Belanja Pemeliharaan	69.444.420.263,00	65.717.867.996,00	(3.726.552.267,00)	94,63
17	Belanja Jasa Konsultansi	62.281.010.540,00	58.563.723.325,00	(3.717.287.215,00)	94,03
18	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	42.383.909.000,00	36.215.330.000,00	(6.168.579.000,00)	85,45
19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.103.394.475,00	4.687.623.650,00	(415.770.825,00)	91,85
20	Honorarium PNS (Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber)	127.058.727.800,00	117.155.764.525,00	(9.902.963.275,00)	92,21
21	Belanja Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	15.689.575.000,00	15.416.175.000,00	(273.400.000,00)	98,26
22	Belanja Barang dan Jasa BLUD	97.423.828.366,84	69.281.449.706,00	(28.142.378.660,84)	71,11
23	Belanja Barang dan Jasa BOS	99.305.026.536,00	92.609.226.493,00	(6.695.800.043,00)	93,26
	Jumlah	1.230.042.297.919,84	1.072.294.764.575,00	(157.747.533.344,84)	87,18

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.25
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per OPD

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	356.428.215.373,00	322.476.608.015,00	(33.951.607.358,00)	90,47
2	Dinas Kesehatan	106.084.338.349,84	76.700.162.012,00	(29.384.176.337,84)	72,30
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	191.956.901.993,00	157.554.581.999,00	(34.402.319.994,00)	82,08
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	36.297.107.075,00	33.397.612.778,00	(2.899.494.297,00)	92,01
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.979.046.600,00	4.587.723.357,00	(391.323.243,00)	92,14
6	Satuan Polisi Pamong Praja	4.339.426.800,00	4.119.608.905,00	(219.817.895,00)	94,93
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.147.537.830,00	16.701.064.804,00	(2.446.473.026,00)	87,22
8	Dinas Sosial	36.178.581.418,00	33.294.657.492,00	(2.883.923.926,00)	92,03
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	19.342.060.912,00	18.175.402.230,00	(1.166.658.682,00)	93,97
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	7.438.953.194,00	6.768.904.642,00	(670.048.552,00)	90,99
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	28.043.133.440,00	23.271.393.499,00	(4.771.739.941,00)	82,98
12	Dinas Perhubungan	18.584.264.110,00	16.477.360.576,00	(2.106.903.534,00)	88,66
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.674.678.678,00	11.797.292.759,00	(877.385.919,00)	93,08
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	8.707.195.000,00	8.224.265.481,00	(482.929.519,00)	94,45
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	5.962.399.340,00	5.324.238.364,00	(638.160.976,00)	89,30
16	Dinas Kebudayaan	247.670.305.505,00	228.510.438.360,46	(19.159.867.144,54)	92,26
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	18.168.163.594,00	16.302.122.288,00	(1.866.041.306,00)	89,73
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	17.508.646.764,00	16.163.478.102,00	(1.345.168.662,00)	92,32
19	Dinas Pariwisata	16.585.128.900,00	15.515.650.126,00	(1.069.478.774,00)	93,55
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	20.596.350.865,00	17.649.736.182,00	(2.946.614.683,00)	85,69
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.173.952.900,00	11.214.439.058,00	(959.513.842,00)	92,12
22	Gubernur dan Wakil Gubernur	-	-	0	
23	Sekretariat Daerah	56.749.164.720,00	50.847.851.541,00	(5.901.313.179,00)	89,60
24	Badan Penghubung Daerah	2.978.221.307,00	2.764.727.426,00	(213.493.881,00)	92,83
25	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	0	



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦺꦠꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
26	Sekretariat DPRD	80.767.425.534,00	53.170.173.532,00	(27.597.252.002,00)	65,83
27	Inspektorat	3.486.751.131,00	2.980.089.796,00	(506.661.335,00)	85,47
28	Paniradya Kaistimewan	745.996.500,00	653.499.857,00	(92.496.643,00)	87,60
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.194.829.020,00	10.096.417.896,00	(1.098.411.124,00)	90,19
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	29.660.381.027,00	27.392.265.219,00	(2.268.115.808,00)	92,35
31	PPKD/BUD	-	-	0	
32	Badan Kepegawaian Daerah	15.718.876.170,00	14.067.531.662,00	(1.651.344.508,00)	89,49
33	Badan Pendidikan dan Pelatihan	14.567.979.660,00	12.954.816.551,00	(1.613.163.109,00)	88,93
	Jumlah	1.404.736.013.709,84	1.219.154.114.509,46	(185.581.899.200,38)	86,79

c. **Belanja Bunga** **Rp0,00** **Rp 0,00**
 Belanja Bunga pada Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00.

d. **Belanja Subsidi** **Rp76.067.609.352,00** **Rp0,00**

Belanja Subsidi pada Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp81.100.523.951,00 dan realisasi sebesar Rp76.067.609.352,00 atau sebesar 93,79%. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 41 ayat (1) Belanja Subsidi adalah belanja yang digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Perusahaan/lembaga tersebut merupakan perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk/jasa pelayanan umum masyarakat. Belanja Subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi. Belanja Subsidi pada Pemda DIY merupakan bantuan biaya produksi yang diberikan kepada PT. Anindya Mitra Internasional yang merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang diberi hak pengelolaan dan pengoperasian angkutan perkotaan bersubsidi Trans Jogja sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penugasan Pengelolaan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan Sistem Buy The Service kepada PT. Anindya Mitra Internasional. Dalam melaksanakan pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja PT. AMI berhak atas subsidi, pendapatan dari tiket dan pendapatan lain-lain, dan mengusulkan tarif layanan angkutan. Secara rinci ketentuan tentang Subsidi diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2018 tentang Subsidi Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem *Buy The Service*.

e. **Belanja Hibah** **Rp735.398.604.386,46** **Rp718.940.165.615,57**

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2019 sebesar Rp735.398.604.386,46 terdiri dari Belanja Hibah dalam bentuk uang sebesar Rp638.980.684.355,00 dan Belanja Hibah dalam bentuk barang/jasa sebesar Rp96.417.920.031,46. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp16.458.438.770,89 atau 2,29% dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun 2018 yaitu sebesar Rp718.940.165.615,57.

Belanja Hibah dalam bentuk uang dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung PPKD dan Belanja Hibah dalam bentuk barang direalisasikan melalui Belanja Hibah Barang/Jasa obyek Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada SKPD.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Belanja Hibah dalam bentuk uang pada Tahun Anggaran 2019 dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung PPKD sebesar Rp687.498.916.846,00 dan realisasi sebesar Rp638.980.684.355,00 atau 92,94% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.26
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
1	Hibah Urusan Pendidikan	566.572.998.000,00	534.434.895.000,00	(32.138.103.000,00)	94,33
2	Hibah Urusan Kesehatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0	100,00
3	Hibah Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	150.000.000,00	110.000.000,00	(40.000.000,00)	73,33
4	Hibah Urusan Sosial	287.500.000,00	287.500.000,00	0	100,00
5	Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.126.458.500,00	1.101.973.024,00	(24.485.476,00)	97,83
6	Hibah Urusan Pangan	575.000.000,00	575.000.000,00	0	100,00
7	Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.005.000.000,00	2.005.000.000,00	0	100,00
8	Hibah Urusan Komunikasi dan Informatika	1.200.000.000,00	1.152.800.540,00	(47.199.460,00)	96,07
9	Hibah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.725.778.128,00	537.533.573,00	(1.188.244.555,00)	31,15
10	Hibah Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	6.550.000.000,00	5.930.000.000,00	(620.000.000,00)	90,53
11	Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur	15.000.000.000,00	5.950.000.000,00	(9.050.000.000,00)	39,67
12	Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi	5.410.200.000,00	-	(5.410.200.000,00)	0,00
13	1312 Hibah Urusan Keistimewaan	85.895.982.218,00	85.895.982.218,00	0	100,00
	Jumlah	687.498.916.846,00	638.980.684.355,00	(48.518.232.491,00)	92,94

Penjelasan Belanja Hibah (uang) Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) Hibah Urusan Pendidikan

Hibah Urusan Pendidikan dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai SKPD Teknis dengan anggaran sebesar Rp566.572.998.000,00 dan realisasi sebesar Rp534.434.895.000,00 atau 94,33% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.27
Rincian Hibah Urusan Pendidikan

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
1	Layanan Pendidikan Menengah				
	Penyediaan BOS/BOSDA	542.975.254.000,00	511.084.355.000,00	(31.890.899.000,00)	94,13
2	Layanan Pendidikan Khusus				
	BOS SLB	4.837.604.000,00	4.625.400.000,00	(212.204.000,00)	95,61
3	Peningkatan Mutu Pendidikan				
	Pembinaan Kelembagaan Bidang Pendidikan	400.000.000,00	365.000.000,00	(35.000.000,00)	91,25
4	Pembinaan Kepemudaan				
	Pembinaan Kepribadian Generasi Muda	1.410.140.000,00	1.410.140.000,00	0	100,00
5	Pembinaan Olahraga				
	Pengiriman Kompetisi Olahraga Nasional	16.950.000.000,00	16.950.000.000,00	0	100,00
	Jumlah	566.572.998.000,00	534.434.895.000,00	(32.138.103.000,00)	94,33

Penjelasan:

Hibah Penyediaan BOS/BOSDA merupakan gabungan dari BOSNAS DIKDAS/SM dan BOSDA SM SWASTA. Hibah Penyediaan BOS/BOSDA dianggarkan sebesar Rp542.975.254.000,00 dan realisasi sebesar Rp511.084.355.000,00 atau 94,13% diberikan untuk BOSNAS dan untuk



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DIY
D I Y
D I Y

Sekolah Menengah Atas yang diselenggarakan oleh swasta di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sisa anggaran disebabkan karena data siswa yang digunakan pada saat perencanaan dan pencairan berbeda. Perbedaan data siswa disebabkan adanya perbedaan tahun ajaran sekolah dan tahun anggaran.

Hibah BOS SLB dianggarkan sebesar Rp4.837.604.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.625.400.000,00 atau 95,61% diberikan kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) yang diselenggarakan oleh swasta. Sisa anggaran disebabkan karena data siswa yang digunakan pada saat perencanaan dan pencairan berbeda. Perbedaan data siswa disebabkan adanya perbedaan tahun ajaran sekolah dan tahun anggaran.

Hibah untuk Pembinaan Kelembagaan Bidang Pendidikan, Pembinaan Kepemudaan dan Pembinaan Olahraga dianggarkan sebesar Rp18.760.140.000,00 dan realisasi sebesar Rp18.725.140.000,00 atau 99,81% diberikan kepada lembaga-lembaga sebagaimana tersebut pada Tabel 5.28.

Tabel 5.28
Rincian Hibah Pembinaan Kelembagaan Bidang Pendidikan, Pembinaan Kepemudaan dan Pembinaan Olahraga

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
I.	Pembinaan Kelembagaan Bidang Pendidikan				
a.	Dewan Pendidikan DIY	300.000.000,00	300.000.000,00	0	100
b.	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) DIY	25.000.000,00	25.000.000,00	0	100
c.	Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) DIY	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	0
d.	Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak Kanak (TK) Indonesia (GOPTK) DIY	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	0
e.	Lembaga Orang Tua Asuh (LOTA) DIY	40.000.000,00	40.000.000,00	0	100
	Jumlah	400.000.000,00	365.000.000,00	(35.000.000,00)	91,25
II.	Pembinaan Kepribadian Generasi Muda				
a.	Kwarda DIY	1.160.140.000,00	1.160.140.000,00	0	100
b.	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DIY	250.000.000,00	250.000.000,00	0	100
	Jumlah	1.410.140.000,00	1.410.140.000,00	0	100
III.	Pengiriman Kompetisi Olahraga Nasional				
a.	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DIY	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0	100
b.	National Paralympic Committee (NPC) DIY	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0	100
c.	Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) DIY	450.000.000,00	450.000.000,00	0	100
	Jumlah	16.950.000.000,00	16.950.000.000,00	0	100
	Jumlah Total	18.760.140.000,00	18.725.140.000,00	(35.000.000,00)	99,81

2) Hibah Urusan Kesehatan

Hibah Urusan Kesehatan dikelola oleh Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis. Dari anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦿꦏꦠ

Tabel 5.29
Rincian Penerima Hibah Urusan Kesehatan

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
1	Palang Merah Indonesia (PMI) DIY	500.000.000,00	500.000.000,00	-	100
2	Komisi Penanggulangan AIDS DIY	500.000.000,00	500.000.000,00	-	100
	Jumlah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	100

3) Hibah Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Hibah Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Politik dengan anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp110.000.000,00 atau 73,33% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.30
Rincian Penerima Hibah Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
1	Paguyuban Wehrkreis III Yogyakarta	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	0
2	Legiun Veteran Republik Indonesia DIY	75.000.000,00	75.000.000,00	0	100
3	Persatuan Wedhatama Republik Indonesia DIY	35.000.000,00	35.000.000,00	0	100
	Jumlah	150.000.000,00	110.000.000,00	(40.000.000,00)	73,33

4) Hibah Urusan Sosial

Hibah Urusan Sosial dikelola oleh Dinas Sosial dengan anggaran sebesar Rp287.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp287.500.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.31
Rincian Penerima Hibah Urusan Sosial

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
I.	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial				
a.	Bantuan Sosial Yayasan Lembaga Perlindungan Anak DIY	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100
b.	Bantuan Operasional Yayasan Sayap Ibu DIY	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100
c.	Rumah Singgah dan Belajar (RSB) Diponegoro	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100
d.	Rumah Singgah Rumah Impian	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100
e.	Rumah Singgah HAFARA	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100
f.	Rumah Singgah Ahmad Dahlan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100
g.	Rumah Singgah Anak Mandiri	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100
	Jumlah	87.500.000,00	87.500.000,00	-	100



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Yogyakarta

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
II.	Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar serta Keluarga Rentan dan Miskin				
	Bantuan Operasional Komda Lanjut Usia DIY	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100
	Jumlah	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100
III.	Pembinaan dan Jejaring Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)				
a.	IPSM DIY	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100
b.	Karang Taruna DIY	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100
c.	LKKS BKKKS DIY	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100
	Jumlah	125.000.000,00	125.000.000,00	-	100
	Jumlah Total	287.500.000,00	287.500.000,00	-	100

5) Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Hibah Urusan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebagai SKPD Teknis dengan anggaran sebesar Rp1.126.458.500,00 dan realisasi sebesar Rp1.101.973.024,00 atau 97,83% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.32
Rincian Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
I.	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan				
a.	Desa PRIMA Wanudyotomo	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100
b.	Desa PRIMA Murti Mandiri	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100
c.	Desa PRIMA Optimis	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100
d.	Desa PRIMA Maju Mulyo	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100
e.	Desa PRIMA PRIMA Boga Lestari	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100
f.	Desa PRIMA Maya Sejahtera	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100
g.	Desa PRIMA Agung Mandiri	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100
h.	Desa PRIMA Karang Kemuning	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100
i.	Desa PRIMA Sumber Rejeki	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100
j.	Desa PRIMA Roso Manunggal	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100
k.	Desa PRIMA Arum Mandiri	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100
l.	Desa PRIMA Sambu Manunggal	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100
m.	Desa PRIMA Khotijah	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100
n.	Desa PRIMA Pelita Sosro Mandiri	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100
o.	Desa PRIMA Mandiri Jaya	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100
	Jumlah	555.000.000,00	555.000.000,00	-	100
II.	Perlindungan Perempuan dan Anak				
	Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Integrasi P2TPAKK "RUD" DIY	571.458.500,00	546.973.024,00	(24.485.476,00)	95,72
	Jumlah	571.458.500,00	546.973.024,00	(24.485.476,00)	95,72
	Jumlah Total	1.126.458.500,00	1.101.973.024,00	(24.485.476,00)	97,83



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦺꦫꦺꦢꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦏꦂꦠ

6) Hibah Urusan Pangan

Hibah Urusan Pangan dikelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp575.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp575.000.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.33
Rincian Hibah Urusan Pangan

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
I.	Distribusi Pangan Masyarakat				
a.	Gapoktan Pandowo Mulyo, Pandowoharjo, Sleman, Sleman	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100
b.	Gapoktan Sedyo Makmur Kadisoro, Gilangharjo, Pandak, Bantul	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100
c.	Ngudi makmur, Samiran, Parangtritis, Kretek, Bantul	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100
d.	Bangun Karyo, Pedukuhan I, Garongan, Panjatan, Kulonprogo	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100
	Jumlah	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100
II.	Penanganan Desa Rawan Pangan				
a.	Kel Tani Afinitas Manunggal Lestari	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100
b.	Ngudi Makmur	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100
c.	KWT Tunas Asri	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100
d.	Sumber Makmur	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100
e.	Sidomulyo	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100
f.	KWT Simpang Tiga	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100
g.	Dadi Subur	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100
h.	KWT Rahayu	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100
i.	Gapoktan Ngudi Rahayu	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100
j.	Gapoktan Karto Manunggal	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100
	Jumlah	375.000.000,00	375.000.000,00	-	100
	Jumlah Total	575.000.000,00	575.000.000,00	-	100

7) Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dikelola oleh Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan. Hibah dianggarkan sebesar Rp2.005.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.005.000.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.34
Rincian Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
1	LPMK Kel Purbayan	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100
2	LPMK Kel Sorosutan	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100
3	LPMK Kel Bener	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100
4	LPMD Desa Girisekar	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100
5	LPMD Desa Banaran	125.000.000,00	125.000.000,00	-	100
6	LPMD Desa Songbanyu	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100
7	LPMD Desa Hargotirto	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100
8	LPMD Desa Ngargosari	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100
9	LPMD Desa Gulurejo	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100
10	LPMD Desa Jogotirto	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
11	LPMD Desa Purwobinangun	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100
12	LPMD Desa Mororejo	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100
13	LPMD Desa Bawuran	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100
14	LPMD Desa Murtigading	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100
15	LPMD Desa Panjangrejo	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100
16	Penguatan TP PKK DIY	830.000.000,00	830.000.000,00	-	100
	Jumlah	2.005.000.000,00	2.005.000.000,00	-	100

8) Hibah Urusan Komunikasi dan Informatika

Hibah Urusan Komunikasi dan Informatika dikelola oleh OPD Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika. Hibah dianggarkan sebesar Rp1.200.000.000,00 dan realisasi sebesar 1.152.800.540,00 atau 96,07% diberikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY.

9) Hibah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Hibah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dikelola oleh OPD Teknis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Hibah dianggarkan sebesar Rp1.725.778.128,00 dan realisasi sebesar Rp537.533.573,00 atau 31,15%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.35
Rincian Hibah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
1	KOPDIT Marsudi Mulyo	10.951.000,00	10.951.000,00	-	100,00
2	KSP BMT Dana Insani	9.500.000,00	9.500.000,00	-	100,00
3	KSPPD BMT Artha Amanah	33.211.718,00	-	(33.211.718,00)	0,00
4	KOPDIT Amrih Makmur	250.100.200,00	131.087.000,00	(119.013.200,00)	52,41
5	KSP Setia Kawan	58.547.000,00	25.080.000,00	(33.467.000,00)	42,84
6	KSP Mendasar	3.300.000,00	-	(3.300.000,00)	0,00
7	DPD Perbarindo	1.360.168.210,00	360.915.573,00	(999.252.637,00)	26,53
	Jumlah	1.725.778.128,00	537.533.573,00	(1.188.244.555,00)	31,15

Realisasi hibah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar 31,15% disebabkan karena pada saat verifikasi ulang tidak semua sesuai dengan Petunjuk Teknis. Untuk DPD Perbarindo yang digunakan untuk kredit macet koperasi dan UKM pasca gempa, dianggarkan Rp1.360.168.210,00 setelah verifikasi ulang hanya terealisasi sebesar Rp360.915.573,00 atau 26,53%.

10) Hibah Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

Hibah Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum dikelola oleh OPD Biro Bina Mental dan Spiritual dan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol. Hibah dianggarkan sebesar Rp6.550.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.930.000.000,00 atau 90,53% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Yogyakarta

Tabel 5.36
Rincian Hibah Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
1	Bantuan Tempat Ibadah	5.500.000.000,00	5.280.000.000,00	(220.000.000,00)	96,00
2	MUI DIY	200.000.000,00	200.000.000,00	0	100,00
3	Badan Koordinasi Gereja-gereja Kristen DIY	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	0,00
4	Kevikepan DIY	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	0,00
5	PHDI DIY	100.000.000,00	100.000.000,00	0	100,00
6	Walubi DIY	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	0,00
7	PW NU DIY	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	0,00
8	PW Muhammadiyah DIY	100.000.000,00	100.000.000,00	0	100,00
9	BAZNAS DIY	200.000.000,00	200.000.000,00	0	100,00
10	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	50.000.000,00	50.000.000,00	0	100,00
	Jumlah	6.550.000.000,00	5.930.000.000,00	(620.000.000,00)	90,53

11) Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur

Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur dianggarkan sebesar Rp15.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.950.000.000,00 atau 39,67%. Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur direalisasikan sesuai dengan permohonan yang ada dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.37
Rincian Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur

No	Penerima Hibah	Besaran Hibah (Rp)
1	Pemerintah Desa Wirokerten, Wirokerten, Banguntapan, Bantul (Pembangunan kawasan perikanan dusun Grojogan)	1.500.000.000,00
2	Pemerintah Desa Bojong, Bojong, Panjatan, Kulon Progo (Pembinaan Usaha Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Terintegrasi dengan Perkebunan Kelapa Bojang Bulat)	500.000.000,00
3	Pemerintah Desa Girikerto, Girikerto, Turi, Sleman (Pengembangan Pariwisata)	250.000.000,00
4	Pemerintah Desa Bejiharjo, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul (Pengembangan Pariwisata)	250.000.000,00
5	Pemerintah Desa Sendangtirto, Sendangtirto, Berbah, Sleman (Optimalisasi Pemasaran Ikan Hias)	500.000.000,00
6	Pemerintah Desa Pacarejo, Pacarejo, Semanu, Gunungkidul (Pengembangan Pariwisata : Stimulan Toilet, Bangunan Reservasi, Furniture dan Perangkat Komputer)	250.000.000,00
7	Pemerintah Desa Tirtomartani, Tirtomartani, Kalasan, Sleman (Pengembangan Pariwisata : Toilet, Paving, Landscape)	500.000.000,00
8	Pemerintah Desa Bokoharjo, Bokoharjo, Prambanan, Sleman (Pengembangan Pariwisata : akses jalan dan landscape)	1.000.000.000,00
9	Pemerintah Desa Margodadi, Margodadi, Seyegan, Sleman (Pengembangan Pariwisata : Pembangunan kamar mandi (16), Papan Nama Homestay (16))	250.000.000,00
10	Pemerintah Desa Gading, Gading IV, Gading, Playen, Gunungkidul (Pengembangan Wisata di Tahura Bunder)	500.000.000,00
11	Pemerintah Desa Jatimulyo, Desa Jatimulyo, Dlingo, Bantul (Pembangunan Pendopo di KPHK Tahura Bunder)	200.000.000,00
12	Pemerintah Desa Bunder, Desa Bunder, Patuk, Gunungkidul (Pengembangan Wahana di Tahura Bunder)	250.000.000,00
	Jumlah	5.950.000.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Rincian Hibah Barang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga				
No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1.	DAK Reguler Bidang Pendidikan (SMA)	1.842.949.850,00	1.836.041.210,00	Belanja bahan bangunan untuk pembangunan ruang lab IPA, rehabilitasi ruang guru, rehabilitasi ruang kelas, pengadaan peralatan pendidikan
2.	DAK Penugasan Bidang Pendidikan (SMK)	5.767.786.210,00	5.761.427.863,00	Belanja pembangunan ruang praktek siswa (RPS), pengadaan alat praktek utama
3.	DAK Reguler Bidang Pendidikan (SLB)	506.878.000,00	506.528.000,00	Belanja pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi sekolah, pengadaan alat-alat peraga/praktek
4.	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	1.640.000.000,00	1.614.125.000,00	belanja laptop dan printer untuk pelatihan ketrampilan pemuda bagi kantong kemiskinan, belanja komputer untuk pelatihan keterampilan pemuda bidang pemasaran online
Jumlah		9.757.614.060,00	9.718.122.073,00	

Rincian Hibah Barang pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumber Daya Mineral				
No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1.	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.888.850.000,00	3.305.154.000,00	Belanja pengadaan pipa dan accessories SPAMDES untuk Forum PAMASKARTA DIY
2.	Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Kumuh	10.360.300.000,00	8.249.655.459,00	Biaya Penanganan PSU Permukiman Kumuh Kec. Pengasih, Kab. Kulon Progo (11,93 Ha), dan Biaya Penanganan PSU Permukiman Kumuh di Kel. Notoprajan Kec. Ngampilan, Kel. Ngampilan Kec. Ngampilan dan Kel. Prawirodirjan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta (14,61 Ha)
3.	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	27.200.000.000,00	25.380.746.054,00	Belanja Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman (186 Lokasi)
4.	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (P S U) Kawasan Strategis	13.000.000.000,00	9.662.932.500,00	Belanja Penyediaan Infrastruktur PSU di daerah relokasi bandara baru : Palihan, Glagah dan Janten, dan Belanja PSU KSP 8 (62 Desa),
5.	Pengembangan Energi Skala Kecil (D A K)	2.578.662.433,00	2.075.349.426,00	Belanja Pembangunan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga 4 m3 (200 unit)
6.	Peningkatan Perlindungan Air Tanah dan Geologi	404.464.000,00	319.819.000,00	Belanja Pembuatan sumur resapan untuk imbuhan air tanah (100 unit)
7.	Pendayagunaan Air Tanah	4.528.195.000,00	4.358.971.000,00	Belanja Pembuatan sumur bor air tanah dalam (10 unit)
Jumlah		61.960.471.433,00	53.352.627.439,00	



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਬਦ ਕ੍ਰਮ ਕ੍ਰਮ ਕ੍ਰਮ ਕ੍ਰਮ ਕ੍ਰਮ ਕ੍ਰਮ ਕ੍ਰਮ ਕ੍ਰਮ ਕ੍ਰਮ ਕ੍ਰਮ ਕ੍ਰਮ

Rincian Hibah Barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1.	Pelatihan Keterampilan Pencari Kerja	1.499.100.000,00	1.474.924.000,00	Belanja Toolkit Pelatihan Menjahit Pakaian Dasar untuk 11 kelompok, Belanja Toolkit Pelatihan Pengolahan Makanan untuk 19 kelompok, Belanja Toolkit Pelatihan Meubelair untuk 2 kelompok, Belanja Toolkit Pelatihan Mekanik Junior Sepeda Motor untuk 3 kelompok, Belanja Toolkit Pelatihan Salon Kecantikan untuk 2 kelompok, Belanja Toolkit Pelatihan Las Listrik untuk 3 kelompok.
2.	Pembentukan Kesempatan Kerja	200.000.000,00	199.700.000,00	Belanja kompor gas, regulatro, tabung, mixer, blender, sealer, kulkas dan oven untuk 10 Kelompok Pengolahan Makanan.
3.	Pembentukan Usaha Mandiri Bagi Penyandang Disabilitas	285.555.000,00	258.819.000,00	Belanja spiner, sealer manual, blender, oven, kulkas, wajan besar, kompor gas, selang regulator, tabung gas 12 kg dan etalase makanan untuk 6 Kelompok usaha pengolahan makanan
4.	Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	182.760.000,00	182.100.000,00	Belanja spinner, blender, oven, kulkas, wajan besar, kompor gas 2 tungku, selang regulator, tabung gas 12 kg, etalase makanan, sealer manual, mesin pembuat mei pangsit untuk pemberdayaan purna PMI pada 6 Kelompok Usaha Pengolahan Makanan
	Jumlah	2.167.415.000,00	2.115.543.000,00	

Rincian Hibah Barang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK)	920.240.750,00	886.327.000,00	Belanja pengadaan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif pada 4 kelompok, Belanja Pengadaan Gully Plug untuk 8 kelompok dan Belanja Pembuatan Tanaman (Pola Pengayaan) untuk 20 kelompok.
	Jumlah	920.240.750,00	886.327.000,00	

Rincian Hibah Barang pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1.	Pelatihan Kelembagaan dan Pelatihan UKM	201.950.000,00	179.968.000,00	Pengembangan Desa Preneur 4 Desa (4 akt @ 30 org) : Desa Ngentakrejo Lendah, Desa Terong Dlingo, Desa Sumberwungu Tepus, Desa Triwidadi Pajangan Belanja alat alat Batik, alat jahit menjahit baju dan alat alat bengkel
	Jumlah	201.950.000,00	179.968.000,00	



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிமகழவக நழவக நழவகழபவகழவகழவகழவகழவகழவகழவக

Rincian Hibah Barang pada Dinas Perikanan dan Kelautan				
No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1.	Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya	618.200.000,00	598.722.000,00	Belanja sarana dan prasarana perikanan budidaya Budidaya Ikan Nila, Budidaya Ikan Lele, Budidaya Ikan Gurami, Budidaya Ikan Hias)
2.	Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Budidaya	2.584.800.000,00	2.411.177.200,00	Belanja sarana dan prasarana untuk sektor Budidaya Pembesaran Ikan Lele untuk 75 kelompok, Belanja sarana dan prasarana untuk sektor Budidaya Pembesaran Ikan Gurami untuk 17 kelompok, Belanja sarana dan prasarana sektor Budidaya Pembesaran Ikan Nila untuk 21 kelompok, Belanja sarana dan prasarana untuk sektor Budidaya Minapadi untuk 3 kelompok, Belanja sarana dan prasarana untuk sektor Budidaya Perbenihan Ikan (Induk Gurami) untuk 3 kelompok, Belanja Sarana dan prasarana untuk sektor budidaya perbenihan ikan (Induk Lele) untuk 2 kelompok, Belanja Sarana dan prasarana untuk sektor budidaya perbenihan ikan (induk nila) untuk 1 kelompok, Belanja sarana dan prasarana untuk budidaya ikan hias untuk 1 kelompok dan Belanja Sarana dan prasarana budidaya Lele
3.	Pelatihan Teknis Perikanan Tangkap	246.612.500,00	208.450.000,00	Belanja alat penangkap ikan untuk 4 KUB (KUB Mino Rahayu, Sadeng, Songbanyu, Girisubo, Gunung Kidul, KUB Ngupoyo Mino IV, Ngrenehan, Kanigoro, Saptosari, Gunung Kidul, KUB Ngupoyo Mino VII, Ngrenehan, Kanigoro, Saptosari, Gunung Kidul, KUB Mino Tirtohargo, Baros, Tirtohargo, Kretek, Bantul)
4.	Pengolahan Hasil Perikanan	230.190.000,00	175.305.000,00	Belanja pelatihan dan fasilitasi olahan ikan tingkat pemula untuk 15 kelompok dan Pelatihan dan fasilitasi Olahan Ikan Tingkat Madya untuk 6 kelompok.
5.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan (DAK)	900.000.000,00	888.676.000,00	Belanja rehabilitasi UPI skala kecil untuk 9 kelompok dan Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi UPI skala kecil untuk 5 kelompok
6.	Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Prasarana di Pulau-pulau kecil (DAK)	100.495.000,00	99.153.500,00	Belanja Sarana Pemeliharaan Pengembangbiakan Penyu Wana Tirta, Pasir Mendit, RT 27 RW 10, Jangkarán, Temon, Kulon Progo
	Jumlah	4.680.297.500,00	4.381.483.700,00	



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

Rincian Hibah Barang pada Dinas Pertanian dan Ketanahan Pangan				
No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1.	Budidaya Tanaman Pangan	1.181.750.000,00	1.109.558.475,00	Belanja rehabilitasi jaringan irigasi tersier untuk 4 P3A, Belanja pupuk NPK untuk pendampingan Ubikayu untuk 4 kelompok, Belanja pembangunan JUT untuk 3 kelompok, belanja Power Thresher untuk 8 kelompok, Belanja Hand Traktor untuk 25 kelompok, Belanja Hand Sprayer Elektrik untuk 8 kelompok, Belanja Pompa air 2 inch untuk 10 kelompok dan belanja cultivator sebanyak 1 unit untuk 1 kelompok.
2.	Budidaya Tanaman Holtikultura	806.800.000,00	721.331.733,00	Belanja sarana dan prasarana budidaya holtikultura dilahan pekarangan untuk 30 kelompok tani, Belanja sarana dan prasarana produksi untuk budidaya di lahan surjan dan Belanja jaringan irigasi Durian dan Alsintan untuk Gapoktan Kumpul Makaryo, Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul
3.	Standarisasi Mutu Produk Pertanian dan Pemasaran Hasil Holtikultura	29.370.000,00	28.556.000,00	Belanja Perbaikan Rumah Kemas di KT Gemilang, Balangan, Wukirsari, Cangkringan, Sleman
4.	Budidaya Tanaman Perkebunan	21.500.000,00	21.158.000,00	Belanja alat petik daun teh (6 unit) untuk 3 kelompok tani yaitu KT. Arum Sari (Tritis, Ngargosari, Samigaluh, Kulon Progo), KT. Tegal Subur (Nglinggo Timur, Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo), KT. Sari Mulyo (Tegalsari, Purwosari, Girimulyo, Kulon Progo)
5.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan	101.100.000,00	100.023.500,00	Belanja Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Petani Perkebunan untuk 4 LEM Desa yaitu LEM Desa Umbulrejo, Ponjong, Gunung Kidul, LEM Desa Bendung, Semin, Gunung Kidul, LEM Desa Purwosari, Girimulyo, Kulon Progo, LEM Desa Bojong, Panjatan, Kulon Progo.
6.	Budidaya Tanaman Tembakau (cukai)	84.600.000,00	84.305.375,00	Belanja kultivator untuk 3 kelompok tani dalam rangka bimbingan teknis pengelolaan alsintan dan Belanja Pompa dan perpipaan untuk 2 kelompok tani dalam rangka bimbingan teknis pengelolaan lahan dan air.
7.	Budidaya Peternakan	2.152.700.000,00	1.710.352.000,00	Belanja bantuan itik dan stimulan pakan untuk 1 kelompok tani, Belanja bantuan budidaya kambing/domba untuk 9 kelompok tani, belanja bantuan budidaya hijauan pakan ternak untuk 2 kelompok tani dan belanja bantuan budidaya sapi untuk 21 kelompok tani.
8.	Penyediaan Cadangan Pangan	196.100.000,00	195.987.950,00	Belanja hibah pemanfaatan lahan di bawah Tegakan untuk 3 kelompok dan belanja hibah peningkatan cadangan pangan masyarakat untuk 10 kelompok.
	Jumlah	4.573.920.000,00	3.971.273.033,00	



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DIYOGYAKARTA

Rincian Hibah Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1.	Pelatihan dan Kemitraan Perdagangan Dalam Negeri	1.193.250.000,00	1.119.850.000,00	Belanja Pengadaan Bantuan Peralatan sebanyak 19 paket untuk 19 kelompok dan belanja hibah untuk paguyuban perempuan kreatif Keluarga Sarinah.
2.	Pelatihan Industri Kecil Menengah Agro	75.000.000,00	74.290.000,00	Belanja pelatihan olahan pangan untuk 2 kelompok yaitu Kel. Sekar, Gambiran UH V No 348 RW 11 Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta, Kel. Gendis Manis, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta.
3.	Pelatihan Industri Kecil Menengah Logam, Sandang dan Aneka	575.160.000,00	548.748.836,00	Belanja pengadaan peralatan (al mesin jahit lurus, mesin jahit otomatis, mesin wolsum) damlam rangka pendampingan IKM Sandang dan kulit, Belanja pengadaan peralatan (al: mesin jahit high speed, mesin jahit bumbung, mesin postbed singgle needle, mesin seset, mesin embos, kompresor dan spray gun dalam rangka pelatihan IKM Produk Kulit dan Belanja pengadaan peralatan (al: mini genset, compressor, bor duduk dan mata bor, gergaji potong, gerinda, mesin irat bambu, tabung gas dan regulator) untuk 4 kelompok.
Jumlah		1.843.410.000,00	1.742.888.836,00	

Sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD maka Belanja Hibah dalam bentuk barang dikonversi menambah Belanja Hibah. Selanjutnya Realisasi Belanja Hibah dan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2019 digabung menjadi:

Tabel 5.39
Konversi Belanja Hibah

No	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2018 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Belanja Hibah Uang	687.498.916.846,00	638.980.684.355,00	92,94	587.035.545.684,00
2.	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	106.594.289.490,00	96.417.920.031,46	90,45	131.904.619.931,57
Jumlah		794.093.206.336,00	735.398.604.386,46	92,61	718.940.165.615,57

f. Belanja Bantuan Sosial Rp51.143.429.903,00 Rp37.041.423.324,40

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2019 sebesar Rp51.143.429.903,00 merupakan Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang sebesar Rp702.000.000,00 pada PPKD dan Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa pada OPD sebesar Rp50.441.429.903,00.

Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang pada Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp1.402.000.000,00 terdiri dari Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Direncanakan sebesar Rp702.000.000,00 dan Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Direncanakan sebesar Rp700.000.000,00.

Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Direncanakan sebesar Rp702.000.000,00 telah direalisasikan 100% untuk program Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial sebesar Rp252.000.000,00 sebanyak 32 penerima dan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦼꦂꦶꦠꦤ꧀ꦢꦫꦺꦃꦢꦫꦺꦃꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

untuk program pelayanan dan perlindungan lanjut usia terlantar serta keluarga rentan dan miskin sebesar Rp450.000.000,00 sebanyak 15 penerima.

Untuk Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Direncanakan dianggarkan sebesar Rp700.000.000,00 namun tidak direalisasikan.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang pada Tahun Anggaran 2019 dianggarkan pada SKPD sebesar Rp68.099.426.300,00 dan direalisasikan sebesar Rp50.441.429.903,00 atau 74,07% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.40
Rincian Belanja Bantuan Sosial Barang

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumber Daya Mineral	64.295.414.000,00	46.729.353.638,00	(17.566.060.362,00)	72,68
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.804.012.300,00	3.712.076.265,00	(91.936.035,00)	97,58
	Jumlah	68.099.426.300,00	50.441.429.903,00	(17.657.996.397,00)	74,07

Penjelasan:

Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral dianggarkan sebesar Rp64.295.414.000,00 dan realisasi sebesar Rp46.729.353.638,00 atau 72,68% merupakan Bantuan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni dan bantuan pengadaan instalasi dan sambungan listrik untuk rumah tangga.

Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dianggarkan sebesar Rp3.804.012.300,00 dan realisasi sebesar Rp3.712.076.265,00 atau 97,58% merupakan pembangunan hunian untuk kelompok Warga Korban Erupsi Merapi 2010 di Huntap Batur, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan sebanyak 44 unit dan pemberian bantuan bahan baku bangunan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD maka Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang dikonversi menambah Belanja Bantuan Sosial. Selanjutnya Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang dan barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2019 digabung menjadi:

Tabel 5.41
Konversi Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Bantuan Sosial Uang	1.402.000.000,00	702.000.000,00	50,07	450.000.000,00
2.	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	68.099.426.300,00	50.441.429.903,00	74,07	36.591.423.324,40
	Jumlah	69.501.426.300,00	51.143.429.903,00	73,59	37.041.423.324,40



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦺꦫꦺꦢꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦿꦏꦂꦠ

5.1.2.2 Belanja Modal

Rp1.035.203.185.484,85

Rp1.132.827.726.327,74

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp1.035.203.185.484,85 atau 92,43% dari anggaran sebesar Rp1.119.929.210.575,00. Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp97.624.540.842,89 atau 8,62% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun 2018 yaitu sebesar Rp1.132.827.726.327,74.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. **Belanja Modal Tanah**

Rp469.142.424.222,00

Rp362.819.024.678,00

Belanja Modal Tanah pada Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp470.369.713.386,00 dan realisasi sebesar Rp469.142.424.222,00 atau 99,74% dengan rincian SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.42

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	405.516.713.480,00	404.389.719.340,00	(1.126.994.140,00)	99,72
2	Dinas Kebudayaan	64.834.749.906,00	64.748.694.682,00	(86.055.224,00)	99,87
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	18.250.000,00	4.010.200,00	(14.239.800,00)	21,97
	Jumlah	470.369.713.386,00	469.142.424.222,00	(1.227.289.164,00)	99,74

Penjelasan:

Belanja Modal Tanah pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dianggarkan sebesar Rp405.516.713.480,00 dan realisasi sebesar Rp404.389.719.340,00 atau 99,72%. Belanja Modal Tanah pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang direalisasikan dengan sumber Dana Keistimewaan pada beberapa KPA berikut:

- KPA Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp397.769.713.480,00 dan realisasi sebesar Rp396.710.827.380,00 atau sebesar 99,73% untuk pembebasan tanah Segmen Planjan-Tepus, pembebasan tanah Segmen Tepus-Jerukwudel, Segmen Tepus-Jerukwudel dan pembebasan tanah segmen oprit underpass bandara.
- KPA Biro Umum, Humas dan Protokol menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp7.597.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp7.589.849.720,00 untuk pembebasan tanah dan bangunan di Jalan Suryatmajan Yogyakarta seluas 277 m².
- KPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset menganggarkan Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp89.042.240,00 untuk biaya penunjang/operasional pembebasan tanah di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 221 Yogyakarta seluas 3.914 m².

Belanja Modal Tanah pada Dinas Kebudayaan dianggarkan sebesar Rp64.834.749.906,00 dan realisasi sebesar Rp64.748.694.682,00 atau 99,72%. Pengadaan tanah tersebut menggunakan sumber Dana Keistimewaan yang dilaksanakan oleh:

- Dinas Kebudayaan (Induk) dengan anggaran sebesar Rp17.101.800.000,00 dan realisasi sebesar 17.052.825.200,00 untuk pembayaran biaya pendukung pembebasan lahan Situs Kedulan (penilaian), Situs Sumurbandung (Kawasan Candi Ijo) dan pembebasan lahan dan Bangunan Joglo Panembahan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦸꦂꦠꦶꦁꦠꦤ꧀ꦢꦂꦺꦫꦤ꧀ꦢꦂꦺꦫꦤ꧀ꦢꦶꦩꦺꦴꦏꦠꦫ

- KPA Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman menganggarkan sebesar Rp40.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp39.915.882,00 untuk biaya pendukung pengadaan lahan Taman Budaya Sleman.
- KPA Dinas Pertanahan dan Tataruang DIY dengan anggaran sebesar Rp47.692.949.906,00 dan realisasi sebesar Rp47.655.953.600,00 digunakan untuk biaya pengadaan tanah untuk bangunan bersejarah di Pojok Beteng Lor Wetan.

Belanja Modal Tanah pada BPKA dianggarkan sebesar Rp18.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.010.200,00 atau 21,97% merupakan Belanja Modal Sertifikasi Tanah atas nama Pemda DIY yang belum didukung dengan sertifikat. Meskipun realisasi keuangan hanya mencapai 21,97% namun realisasi fisik telah terealisasi 100%. Pensertifikatan dilakukan atas tanah sekolah SMAN 5 Yogyakarta (3 bidang), tanah sekolah SMAN 1 Patuk (2 bidang) dan tanah SMAN 1 Semin (2 bidang).

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp159.857.330.876,00 Rp147.918.637.501,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp171.545.493.571,00 dan realisasi sebesar Rp159.857.330.876,00 atau 93,19%. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp11.938.693.375,00 atau 8,07% dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2018 yaitu sebesar Rp147.918.637.501,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.43
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2019		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pengadaan Alat-alat Besar Darat	3.312.619.000,00	3.273.009.500,00	98,80
2	Pengadaan Alat-alat Bantu	3.561.595.832,00	3.344.517.378,00	93,91
3	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	718.438.000,00	668.810.060,00	93,09
4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	172.883.000,00	169.397.784,00	97,98
5	Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	1.724.633.280,00	1.714.881.750,00	99,43
6	Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	810.835.000,00	807.446.700,00	99,58
7	Pengadaan Alat Ukur	624.648.300,00	603.175.000,00	96,56
8	Pengadaan Alat Pengolahan	1.045.419.750,00	1.025.552.000,00	98,10
9	Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
10	Pengadaan Alat Kantor	36.677.550.597,00	31.866.173.367,00	86,88
11	Pengadaan Alat Rumah Tangga	22.375.421.861,00	21.185.409.239,00	94,68
12	Pengadaan Komputer	30.617.332.742,00	30.003.846.788,00	98,00
13	Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	926.141.500,00	876.149.500,00	94,60
14	Pengadaan Alat Studio	6.024.548.484,00	5.808.739.090,00	96,42
15	Pengadaan Alat Komunikasi	3.310.775.600,00	3.182.309.235,00	96,12



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦩꦺꦤ꧀ꦢꦫꦺꦝꦠꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦏꦿꦠ

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	260.710.680,00	246.840.000,00	(13.870.680,00)	94,68
22	Sekretariat Daerah	1.844.732.720,00	1.681.355.600,00	(163.377.120,00)	91,14
23	Badan Penghubung Daerah	169.403.000,00	167.500.000,00	(1.903.000,00)	98,88
24	Sekretariat DPRD	1.006.682.000,00	977.524.000,00	(29.158.000,00)	97,10
25	Paniradya Kaistimewan	62.000.000,00	61.136.000,00	(864.000,00)	98,61
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	485.840.000,00	451.993.500,00	(33.846.500,00)	93,03
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	6.568.621.000,00	6.069.422.640,00	(499.198.360,00)	92,40
28	Badan Kepegawaian Daerah	1.232.710.000,00	1.063.050.500,00	(169.659.500,00)	86,24
29	Badan Pendidikan dan Pelatihan	123.000.000,00	118.050.000,00	(4.950.000,00)	95,98
	Jumlah	171.545.493.571,00	159.857.330.876,00	(11.688.162.695,00)	93,19

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Rp138.986.381.949,17 Rp280.823.210.093,93

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp154.555.485.159,00 dan realisasi sebesar Rp138.986.381.949,17 atau 89,93%. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp141.836.828.144,76 atau 50,51% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp280.823.210.093,93. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.45
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2019		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	131.317.759.486,00	117.526.028.577,17	89,50
2	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	15.364.076.840,00	14.465.071.530,00	94,15
3	Pengadaan Bangunan Menara	294.223.833,00	294.223.833,00	100,00
4	Pengadaan Bangunan Bersejarah	4.209.800.000,00	3.807.416.000,00	90,44
5	Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah	58.651.000,00	58.651.000,00	100,00
6	Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	199.000.000,00	193.344.000,00	97,16
7	Pengadaan Rambu-Rambu	2.947.994.000,00	2.479.421.009,00	84,11
8	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	163.980.000,00	162.226.000,00	98,93
	Jumlah	154.555.485.159,00	138.986.381.949,17	89,93

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.46
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	23.048.992.400,00	22.879.588.261,00	(169.404.139,00)	99,27
2	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	12.333.343.800,00	9.600.452.082,00	(2.732.891.718,00)	77,84
3	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	17.419.804.170,00	16.507.777.711,83	(912.026.458,17)	94,76
4	Satuan Polisi Pamong Praja	636.640.000,00	625.373.771,00	(11.266.229,00)	98,23
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	999.513.000,00	825.104.000,00	(174.409.000,00)	82,55



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
6	Dinas Sosial	132.398.000,00	126.439.900,00	(5.958.100,00)	95,50
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.796.254.250,00	1.537.868.653,00	(258.385.597,00)	85,62
8	Dinas Perhubungan	2.944.494.000,00	2.475.921.009,00	(468.572.991,00)	84,09
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	326.342.000,00	312.164.800,00	(14.177.200,00)	95,66
10	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.398.378.000,00	1.371.485.000,00	(26.893.000,00)	98,08
11	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	335.094.000,00	275.745.000,00	(59.349.000,00)	82,29
12	Dinas Kebudayaan	41.383.201.183,00	40.647.288.798,00	(735.912.385,00)	98,22
13	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	4.766.869.000,00	4.015.313.450,00	(751.555.550,00)	84,23
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.110.389.496,00	1.839.197.336,00	(271.192.160,00)	87,15
15	Dinas Pariwisata	11.944.649.000,00	9.945.874.911,00	(1.998.774.089,00)	83,27
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	8.711.931.860,00	7.590.433.516,34	(1.121.498.343,66)	87,13
17	Sekretariat DPRD	1.800.800.000,00	1.516.495.750,00	(284.304.250,00)	84,21
18	Inspektorat	18.383.071.000,00	13.472.249.000,00	(4.910.822.000,00)	73,29
19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	4.027.320.000,00	3.365.749.000,00	(661.571.000,00)	83,57
20	Badan Pendidikan dan Pelatihan	56.000.000,00	55.860.000,00	(140.000,00)	99,75
	Jumlah	154.555.485.159,00	138.986.381.949,17	(15.569.103.209,83)	89,93

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi Rp242.118.840.886,68 Rp309.525.083.527,81 dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp297.636.253.024,00 dan realisasi sebesar Rp242.118.840.886,68 atau 81,35%. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp67.406.242.641,13 atau 21,78% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp309.525.083.527,81. Adapun rincian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.47
Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2019		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pengadaan Jalan	196.954.921.801,25	162.654.053.120,00	82,58
2	Pengadaan Jembatan	26.638.971.607,75	24.401.001.700,00	91,60
3	Pengadaan Bangunan Air Irigasi	28.990.120.039,00	12.409.690.600,00	42,81
4	Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	6.977.140.000,00	5.518.758.000,00	79,10
5	Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	5.944.769.000,00	5.637.751.000,00	94,84
6	Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
7	Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	1.532.187.000,00	1.492.782.650,00	97,43
8	Pengadaan Bangunan Air Kotor	19.649.649.476,00	19.389.923.780,68	98,68
9	Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
10	Pengadaan Instalasi Air Kotor	314.870.000,00	313.358.000,00	99,52
11	Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	129.540.000,00	128.725.000,00	99,37
12	Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	1.059.643.600,00	1.048.262.300,00	98,93
13	Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	86.025.000,00	83.435.000,00	96,99
14	Pengadaan Instalasi Pengaman	149.472.000,00	146.718.500,00	98,16
15	Pengadaan Jaringan Air	606.348.000,00	604.864.993,00	99,76
16	Pengadaan Jaringan Listrik	8.270.770.500,00	7.971.698.593,00	96,38
17	Pengadaan Jaringan Telepon	286.825.000,00	272.817.650,00	95,12
	Jumlah	297.636.253.024,00	242.118.840.886,68	81,35



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦼꦩꦸꦠꦺꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦢꦺꦭꦪꦁꦸꦏꦺꦴꦛꦏꦂꦠ

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.48

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.682.395.600,00	2.439.870.500,00	(242.525.100,00)	90,96
2	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	166.696.941.094,00	131.033.228.954,68	(35.663.712.139,32)	78,61
3	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	46.417.022.360,00	45.932.297.293,00	(484.725.067,00)	98,96
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	63.297.794.500,00	51.964.137.396,00	(11.333.657.104,00)	82,09
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	727.985.000,00	726.912.000,00	(1.073.000,00)	99,85
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8.389.130.970,00	1.620.288.100,00	(6.768.842.870,00)	19,31
7	Dinas Perhubungan	5.260.770.500,00	4.967.218.593,00	(293.551.907,00)	94,42
8	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	32.000.000,00	32.000.000,00	0	100,00
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.181.118.000,00	1.053.229.000,00	(127.889.000,00)	89,17
10	Dinas Pariwisata	2.500.000.000,00	1.906.531.000,00	(593.469.000,00)	76,26
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	438.095.000,00	430.128.050,00	(7.966.950,00)	98,18
12	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	13.000.000,00	13.000.000,00	0	100,00
	Jumlah	297.636.253.024,00	242.118.840.886,68	(55.517.412.137,32)	81,35

e. Belanja Modal Aset Tetap Rp23.907.706.051,00 Rp29.185.301.667,00 Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp24.609.930.435,00 dan realisasi sebesar Rp23.907.706.051,00 atau 97,15%. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp5.277.595.616,00 atau 18,08% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2018 yaitu sebesar Rp29.185.301.667,00. Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.49

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2019		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pengadaan Buku	957.876.315,00	858.055.875,00	89,58
2	Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	71.200.000,00	27.087.000,00	38,04
3	Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	5.939.565.550,00	5.820.570.590,00	98,00
4	Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	42.313.400,00	41.941.000,00	99,12
5	Pengadaan Hewan	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
6	Pengadaan Tanaman	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	17.584.975.170,00	17.146.051.586,00	97,50
	Jumlah	24.609.930.435,00	23.907.706.051,00	97,15

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦿꦏꦠ

Tabel 5.50

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	21.805.006.170,00	21.255.329.191,00	(549.676.979,00)	97,48
2	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	1.000.000,00	993.300,00	(6.700,00)	99,33
3	Satuan Polisi Pamong Praja	600.000,00	600.000,00	0	100,00
4	Dinas Sosial	9.500.000,00	9.500.000,00	0	100,00
5	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	39.500.000,00	-	(39.500.000,00)	-
6	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	1.200.000,00	1.200.000,00	0	100,00
7	Dinas Kebudayaan	1.942.000.765,00	1.919.587.790,00	(22.412.975,00)	98,85
8	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	727.915.500,00	639.399.770,00	(88.515.730,00)	87,84
9	Sekretariat Daerah	14.208.000,00	14.204.000,00	(4.000,00)	99,97
10	Sekretariat DPRD	50.000.000,00	49.770.200,00	(229.800,00)	99,54
11	Paniradya Kaistimewan	5.000.000,00	5.000.000,00	0	100,00
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.400.000,00	2.659.800,00	(1.740.200,00)	60,45
13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	5.600.000,00	5.462.000,00	(138.000,00)	97,54
14	Badan Pendidikan dan Pelatihan	4.000.000,00	4.000.000,00	0	100,00
	Jumlah	24.609.930.435,00	23.907.706.051,00	(702.224.384,00)	97,15

f. Belanja Modal Aset Lainnya Rp1.190.501.500,00 Rp2.556.468.860,00

Belanja Modal Aset Lainnya pada Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp1.212.335.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.190.501.500,00 atau 98,20%. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp1.365.967.360,00 atau 53,43% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2018 yaitu sebesar Rp2.556.468.860,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2019 per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.51

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	318.600.000,00	316.400.000,00	(2.200.000,00)	99,31
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	48.000.000,00	47.937.500,00	(62.500,00)	99,87
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	71.000.000,00	69.772.000,00	(1.228.000,00)	98,27
4	Sekretariat Daerah	140.235.000,00	138.900.000,00	(1.335.000,00)	99,05
5	Inspektorat	50.000.000,00	49.280.000,00	(720.000,00)	98,56
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	541.000.000,00	524.900.000,00	(16.100.000,00)	97,02
7	Badan Kepegawaian Daerah	43.500.000,00	43.312.000,00	(188.000,00)	99,57
	Jumlah	1.212.335.000,00	1.190.501.500,00	(21.833.500,00)	98,20

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga Rp0,00 Rp0,00

Anggaran Belanja Tak Terduga Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp4.319.672.244,00 dan tidak ada realisasi penggunaan Belanja Tak Terduga selama Tahun 2019 karena tidak ada kondisi darurat yang harus dibiayai dari Pos Belanja Tak Terduga.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா குடிமகனா குடிமகனா குடிமகனா குடிமகனா குடிமகனா

Dari Total Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp4.949.650.384.323,45 dan realisasi sebesar Rp4.524.097.380.282,31 tersebut, di dalamnya termasuk anggaran dan realisasi belanja yang sumber dananya dari Dana Keistimewaan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Alokasi Dana Keistimewaan Tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 (Lampiran V) ditetapkan sebesar Rp1.200.000.000.000,00. Alokasi sebesar Rp1.200.000.000.000,00 tersebut berasal dari Penerimaan Dana Keistimewaan Tahun 2019 sebesar Rp1.162.772.688.443,00 dan sisa Dana Keistimewaan Tahun 2018 sebesar Rp37.227.311.557,00

Anggaran Belanja Dana Keistimewaan sebesar Rp1.200.000.000.000,00 sampai dengan akhir tahun anggaran telah terserap sebesar Rp1.166.576.228.221,39 atau 97,21% sesuai dengan Berita Acara yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Adapun rincian anggaran dan realisasi kegiatan yang didanai dari Dana Keistimewaan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.52
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Keistimewaan Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
I	URUSAN KELEMBAGAAN	15.347.533.220,00	14.065.366.122,00	(1.282.167.098,00)	91,65
1	Biro Hukum Setda DIY	401.686.000,00	373.992.823,00	(27.693.177,00)	93,11
2	Biro Organisasi Setda DIY	4.831.522.000,00	4.501.454.969,00	(330.067.031,00)	93,17
3	Paniradya Kaistimewaan	7.223.863.220,00	6.469.434.720,00	(754.428.500,00)	89,56
4	Badan Pendidikan dan Pelatihan	280.852.000,00	250.938.000,00	(29.914.000,00)	89,35
5	Bagian Organisasi Setda Kota	448.050.000,00	426.425.022,00	(21.624.978,00)	95,17
6	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	479.900.000,00	461.740.900,00	(18.159.100,00)	96,22
7	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sleman	445.110.000,00	368.602.035,00	(76.507.965,00)	82,81
8	Badan Kepegawaian Daerah	236.550.000,00	231.385.000,00	(5.165.000,00)	97,82
9	BKK KULONPROGO	500.000.000,00	495.904.544,00	(4.095.456,00)	99,18
10	BKK GUNUNGKIDUL	500.000.000,00	485.488.109,00	(14.511.891,00)	97,10
II	URUSAN KEBUDAYAAN	554.102.132.984,00	530.796.413.632,56	(23.305.719.351,44)	95,79
1	Dinas Kebudayaan DIY	145.929.348.934,00	132.570.565.753,00	(13.358.783.181,00)	90,85
2	BKK KULONPROGO	18.624.838.500,00	17.436.199.573,00	(1.188.638.927,00)	93,62
3	BKK GUNUNGKIDUL	66.379.330.340,00	65.639.090.924,56	(740.239.415,44)	98,88
4	Museum Negeri Sonobudoyo DIY	41.447.889.723,00	40.544.639.173,00	(903.250.550,00)	97,82
5	Taman Budaya Yogyakarta	15.899.000.580,00	15.621.517.415,00	(277.483.165,00)	98,25
6	Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul	12.848.342.400,00	11.932.315.136,00	(916.027.264,00)	92,87
7	Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman	16.451.687.600,00	16.248.035.322,00	(203.652.278,00)	98,76
8	Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta	13.747.606.075,00	12.426.840.254,00	(1.320.765.821,00)	90,39
9	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY	16.178.586.000,00	14.090.335.651,00	(2.088.250.349,00)	87,09
10	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	17.749.700.050,00	17.602.236.135,00	(147.463.915,00)	99,17
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	16.957.655.458,00	16.694.377.283,00	(263.278.175,00)	98,45
12	Badan Penghubung Daerah	1.964.277.000,00	1.910.243.534,00	(54.033.466,00)	97,25
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	2.700.000.000,00	2.648.235.500,00	(51.764.500,00)	98,08



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
14	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	2.893.294.900,00	2.807.531.729,00	(85.763.171,00)	97,04
15	Dinas Pariwisata DIY	23.697.681.300,00	22.247.686.460,00	(1.449.994.840,00)	93,88
16	Dinas kesehatan	703.324.000,00	594.756.100,00	(108.567.900,00)	84,56
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	184.200.000,00	176.191.900,00	(8.008.100,00)	95,65
18	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	696.000.000,00	684.950.000,00	(11.050.000,00)	98,41
19	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	1.095.438.000,00	1.031.547.300,00	(63.890.700,00)	94,17
20	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	635.000.000,00	609.509.900,00	(25.490.100,00)	95,99
21	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	51.422.949.906,00	51.383.626.372,00	(39.323.534,00)	99,92
22	PPKD (Hibah)	85.895.982.218,00	85.895.982.218,00	0	100,00
III	URUSAN PERTANAHAN	24.230.505.050,00	22.883.145.849,00	(1.347.359.201,00)	94,44
1	BKK KULONPROGO	2.687.536.700,00	2.605.805.500,00	(81.731.200,00)	96,96
2	BKK GUNUNGKIDUL	2.561.891.000,00	2.198.762.000,00	(363.129.000,00)	85,83
3	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	10.660.021.600,00	10.158.411.119,00	(501.610.481,00)	95,29
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	1.056.788.500,00	1.009.631.950,00	(47.156.550,00)	95,54
5	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	2.103.961.000,00	2.041.012.740,00	(62.948.260,00)	97,01
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman	4.919.314.250,00	4.639.341.900,00	(279.972.350,00)	94,31
7	Biro Hukum Setda DIY	240.992.000,00	230.180.640,00	(10.811.360,00)	95,51
IV	URUSAN TATA RUANG	606.319.828.746,00	598.831.302.617,83	(7.488.526.128,17)	98,76
1	BKK KULONPROGO	5.083.473.710,00	4.940.410.900,00	(143.062.810,00)	97,19
2	BKK GUNUNGKIDUL	106.074.896.700,00	103.091.502.870,00	(2.983.393.830,00)	97,19
3	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	5.906.901.250,00	5.434.058.513,00	(472.842.737,00)	92,00
4	Dinas Perhubungan DIY	3.078.849.146,00	2.896.787.900,00	(182.061.246,00)	94,09
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral DIY	421.086.981.252,00	418.914.732.590,00	(2.172.248.662,00)	99,48
6	Biro Umum dan Protokol Setda DIY	20.212.624.991,00	19.360.930.294,83	(851.694.696,17)	95,79
7	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	487.086.000,00	459.503.800,00	(27.582.200,00)	94,34
8	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	693.756.500,00	666.215.500,00	(27.541.000,00)	96,03
9	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman	2.285.343.728,00	2.265.110.053,00	(20.233.675,00)	99,11
10	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	2.366.643.609,00	2.260.509.307,00	(106.134.302,00)	95,52
11	Biro Pengembangan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan	819.000.000,00	815.082.000,00	(3.918.000,00)	99,52
12	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta	30.769.233.360,00	30.457.979.150,00	(311.254.210,00)	98,99
13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	150.000.000,00	89.042.240,00	(60.957.760,00)	59,36
14	Satuan Polisi Pamong Praja	299.967.000,00	294.016.000,00	(5.951.000,00)	98,02
15	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	6.349.500.000,00	6.229.980.000,00	(119.520.000,00)	98,12
16	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY	655.571.500,00	655.441.500,00	(130.000,00)	99,98
	Jumlah Total	1.200.000.000.000,00	1.166.576.228.221,39	(33.423.771.778,61)	97,21

5.1.3 Transfer

Rp1.020.779.081.747,71

Rp772.382.237.357,38

Transfer Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp1.028.481.190.081,20 dan realisasi sebesar Rp1.020.779.081.747,71 atau 99,25%, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil

Rp735.341.757.826,71

Rp692.463.991.157,38

Pendapatan

Transfer Bagi Hasil Pendapatan dianggarkan sebesar Rp736.967.513.631,20 dan realisasi sebesar Rp735.341.757.826,71 atau 99,78%. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp42.877.766.669,33 atau 6,19% dibandingkan realisasi Tahun 2018 yaitu sebesar Rp692.463.991.157,38. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2019 merupakan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.53

Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota

No	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota Yogyakarta	133.595.760.087,00	133.393.876.281,00	99,85	126.437.432.637,38
2.	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Bantul	165.335.251.113,00	164.965.839.463,00	99,78	155.587.029.264,22
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	91.295.702.628,00	91.295.702.627,99	100,00	84.339.593.814,49
4.	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	102.146.921.169,20	102.025.720.182,72	99,88	95.691.354.387,93
5.	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Sleman	244.593.878.634,00	243.660.619.272,00	99,62	230.408.581.053,36
	Jumlah	736.967.513.631,20	735.341.757.826,71	99,78	692.463.991.157,38

Berkaitan dengan pembayaran Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota, pada Tahun 2019 Pemda DIY memiliki kekurangan pembayaran Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota sebagai dampak adanya penerimaan Pajak Daerah melebihi target yang telah ditetapkan. Kekurangan pembayaran Bagi Hasil Pajak Tahun 2019 telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 05/KEP/2020 tanggal 13 Januari 2020 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah (Rp)
1.	Kota Yogyakarta	2.049.012.238,00
2.	Kabupaten Bantul	4.565.313.667,00
3.	Kabupaten Kulon Progo	2.565.368.440,00
4.	Kabupaten Gunungkidul	3.670.342.866,00
5.	Kabupaten Sleman	5.110.319.191,00
	Jumlah	17.960.356.402,00

Kekurangan pembayaran Bagi Hasil Pajak tersebut telah dicatat sebagai Utang Transfer Bagi Hasil Pajak sebesar Rp17.960.356.402,00.

5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan

Rp285.437.323.921,00

Rp79.918.246.200,00

Transfer Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp291.513.676.450,00 dan realisasi sebesar Rp285.437.323.921,00 atau 97,92%. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp205.519.077.721,00 atau 257,16% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 yaitu sebesar Rp79.918.246.200,00. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan meliputi Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp281.452.614.421,00, Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp1.560.062.700,00 dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya sebesar Rp2.424.646.800,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

5.1.3.2.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya **Rp281.452.614.421,00** **Rp75.991.545.000,00**

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp287.528.966.950,00 dan realisasi sebesar Rp281.452.614.421,00 atau 97,89%. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp205.461.069.421,00 atau 270,37% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 yaitu sebesar Rp75.991.545.000,00 hal ini disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2019 ini untuk Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menerapkan mekanisme Bantuan Keuangan Khusus untuk Dana Keistimewaan. Rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.54
Rincian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota

No	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2018 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Bantuan Keuangan Ke Kota Yogyakarta	1.236.000.000,00	1.236.000.000,00	100,00	531.242.000,00
2.	Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Bantul	4.598.000.000,00	4.356.000.000,00	94,74	1.387.173.000,00
3.	Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Kulon Progo	101.827.848.910,00	100.162.270.517,00	98,36	71.556.531.000,00
4.	Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Gunungkidul	177.548.118.040,00	173.379.343.904,00	97,65	1.729.852.000,00
5.	Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Sleman	2.319.000.000,00	2.319.000.000,00	100,00	786.747.000,00
	Jumlah	287.528.966.950,00	281.452.614.421,00	97,89	75.991.545.000,00

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya tersebut merupakan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat khusus dengan peruntukkan masing-masing adalah sebagai berikut:

Tabel 5.55
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
1	Modal Usaha untuk UEP PKH (150 orang)	450.000.000,00	450.000.000,00	-	100,00
2	Padat Karya Infrastruktur (4 Lokasi)	516.000.000,00	516.000.000,00	-	100,00
3	Jambanisasi (30 penerima)	270.000.000,00	270.000.000,00	-	100,00
	Jumlah	1.236.000.000,00	1.236.000.000,00	-	100,00

Tabel 5.56
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
1	Modal Usaha untuk UEP PKH (165 orang)	495.000.000,00	495.000.000,00	-	100,00
2	Padat Karya Infrastruktur (26 lokasi)	3.354.000.000,00	3.354.000.000,00	-	100,00
3	Jambanisasi (296 penerima)	592.000.000,00	350.000.000,00	(242.000.000,00)	59,12
4	Pengadaan dan pemasangan APJ Listrik 10 unit (jalan menuju TPS Piyungan)	157.000.000,00	157.000.000,00	-	100,00
	Jumlah	4.598.000.000,00	4.356.000.000,00	(242.000.000,00)	94,74



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Yogyakarta

Tabel 5.57

Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo Yang Bersifat Khusus

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
1	Modal usaha untuk UEP PKH (180 orang)	540.000.000,00	540.000.000,00	-	100,00
2	Padat Karya Infrastruktur (16 lokasi)	2.064.000.000,00	2.064.000.000,00	-	100,00
3	Jambanisasi (152 penerima)	228.000.000,00	228.000.000,00	-	100,00
4	Pembangunan RSUD Wates	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	-	100,00
5	Pembangunan Pasar Percontohan Pasar Hewan Pengasih	600.000.000,00	600.000.000,00	-	100,00
6	Pembangunan Jaringan Listrik untuk Operasional SPAM Hargowilis	1.500.000.000,00	1.251.950.000,00	(248.050.000,00)	83,46
7	BKK Dana Keistimewaan (Urusan Kebudayaan, Urusan Tata Ruang, Urusan Pertanahan dan Urusan Kelembagaan)	26.895.848.910,00	25.478.320.517,00	(1.417.528.393,00)	94,73
	Jumlah	101.827.848.910,00	100.162.270.517,00	(1.665.578.393,00)	98,36

Tabel 5.58

Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul Yang Bersifat Khusus

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
1	Modal usaha untuk UEP PKH (180 orang)	540.000.000,00	540.000.000,00	-	100,00
2	Padat Karya Infrastruktur (8 lokasi)	1.032.000.000,00	1.032.000.000,00	-	100,00
3	Jambanisasi (150 penerima)	460.000.000,00	392.500.000,00	(67.500.000,00)	85,33
4	BKK Dana Keistimewaan (Urusan Kebudayaan, Urusan Tata Ruang, Urusan Pertanahan dan Urusan Kelembagaan)	175.516.118.040,00	171.414.843.904,00	(4.101.274.136,00)	97,66
	Jumlah	177.548.118.040,00	173.379.343.904,00	(4.168.774.136,00)	97,65

Tabel 5.59

Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
1	Modal Usaha untuk UEP PKH (150 orang)	450.000.000,00	450.000.000,00	-	100,00
2	Padat Karya Infrastruktur (11 lokas)	1.419.000.000,00	1.419.000.000,00	-	100,00
3	Jambanisasi (150 penerima)	450.000.000,00	450.000.000,00	-	100,00
	Jumlah	2.319.000.000,00	2.319.000.000,00	-	100,00

5.1.3.2.2 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Rp1.560.062.700,00 Rp1.530.000.000,00

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp1.560.062.700,00 dan realisasi sebesar 100%. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp30.062.700,00 atau sebesar 1,96% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 yaitu sebesar Rp1.530.000.000,00. Rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Desa adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Tabel 5.60
Rincian Bantuan Keuangan ke Desa

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
1	Pemerintah Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul (Kompensasi Lingkungan Sekitar TPA)	193.750.000,00	193.750.000,00	-	100,00
2	Pemerintah Desa Bawuran, Pleret, Bantul (Kompensasi Lingkungan Sekitar TPA)	66.250.000,00	66.250.000,00	-	100,00
3	Pemerintah Desa Kepuharjo, Cangkringan, Sleman (Pembangunan Sarana Lingkungan : jalan lingkungan, drainase dan talud di Huntap Batur Kepuharjo, Cangkringan, Sleman)	400.062.700,00	400.062.700,00	-	100,00
4	Pemerintah Desa Wonokerto, Turi, Sleman (Barak Pengungsian)	900.000.000,00	900.000.000,00	-	100,00
	Jumlah	1.560.062.700,00	1.560.062.700,00	-	100,00

5.1.3.2.2 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Rp2.424.646.800,00

Rp2.396.701.200,00

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp2.424.646.800,00 dan realisasi 100% merupakan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.61
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
1	Partai Kebangkitan Bangsa	253.938.400,00	253.938.400,00	-	100,00
2	Partai Nasional Demokrat	145.994.000,00	145.994.000,00	-	100,00
3	Partai Keadilan Sejahtera	233.274.400,00	233.274.400,00	-	100,00
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	671.204.400,00	671.204.400,00	-	100,00
5	Partai Golongan Karya	230.756.800,00	230.756.800,00	-	100,00
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	294.800.400,00	294.800.400,00	-	100,00
7	Partai Demokrat	140.978.400,00	140.978.400,00	-	100,00
8	Partai Amanat Nasional	319.092.000,00	319.092.000,00	-	100,00
9	Partai Persatuan Pembangunan	117.540.400,00	117.540.400,00	-	100,00
10	Partai Solidaritas Indonesia	17.067.600,00	17.067.600,00	-	100,00
	Jumlah	2.424.646.800,00	2.424.646.800,00	-	100,00

5.1.4. Surplus (Defisit)

Rp154.706.802.110,48

Rp146.775.613.798,76

Surplus sebesar Rp154.706.802.110,48 merupakan selisih antara total realisasi pendapatan dan total realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2019. Surplus Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp7.931.188.311,72 atau 5,40% dibandingkan dengan Surplus Tahun 2018 yaitu sebesar Rp146.775.613.798,76. Surplus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦿꦏꦠꦫ

Tabel 5.62
Surplus/Defisit

No	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2018 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pendapatan	5.713.924.265.502,71	5.699.357.232.440,50	99,75	5.443.179.144.512,93
2	Belanja dan Transfer	5.978.131.574.404,65	5.544.650.430.330,02	92,75	5.296.403.530.714,17
3	Surplus/Defisit	(264.207.308.901,94)	154.706.802.110,48	58,56	146.775.613.798,76

5.1.5 Pembiayaan Netto Rp265.861.156.884,94 Rp325.018.633.070,18

Realisasi Pembiayaan Netto Pemerintah DaerahDIY Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp265.861.156.884,94 yang terdiri atas:

5.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan Rp474.458.156.884,94 Rp347.018.633.070,18

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp474.458.156.884,94. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp127.439.523.814,76 atau 36,72% dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp347.018.633.070,18. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp474.458.156.884,94 berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya (Penarikan Dana Bergulir) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.63
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2018 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	471.794.246.868,94	471.794.246.868,94	100,00	344.066.436.138,18
2	Penerimaan Kembali Investasi Dana Non Permanen Lainnya	1.010.062.033,00	2.663.910.016,00	263,74	2.952.196.932,00
	Jumlah	472.804.308.901,94	474.458.156.884,94	100,35	347.018.633.070,18

- Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp471.794.246.868,94 merupakan SiLPA Tahun 2018 yang merupakan salah satu sumber pembiayaan penerimaan Tahun Anggaran 2019.
- Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dianggarkan sebesar Rp1.010.062.033,00 dan realisasi sebesar Rp2.663.910.016,00 terdiri dari penerimaan pembayaran dana bergulir pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp229.846.750,00, dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp2.434.063.266,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Tabel 5.64
Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Kembali Investasi Daerah

No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	38.666.700,00	229.846.750,00	191.180.050,00	594,43
	Program DPM PHP	-	109.000.000,00	109.000.000,00	
	Program DPM LDPM	-	2.500.000,00	2.500.000,00	
	DPM LUEP	38.666.700,00	118.346.750,00	79.680.050,00	306,07
2	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	971.395.333,00	2.434.063.266,00	1.462.667.933,00	250,57
	Program Bantuan Modal Koperasi setelah Gempa	-	64.077.467,00	64.077.467,00	
	Program Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	970.395.333,00	2.324.235.799,00	1.353.840.466,00	239,51
No	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
	Program Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi (2011)	-	800.000,00	800.000,00	
	Program Ketahanan Pangan	-	41.550.000,00	41.550.000,00	
	Program Ketahanan Pangan 14 Kecamatan (Koperasi)	1.000.000,00	2.400.000,00	1.400.000,00	240,00
	Program Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi (erupsi)	-	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Jumlah	1.010.062.033,00	2.663.910.016,00	1.653.847.983,00	263,74

5.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan Rp208.597.000.000,00 Rp22.000.000.000,00

Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp208.597.000.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp186.597.000.000,00 atau 848,17% dibandingkan dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp22.000.000.000,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp208.597.000.000,00 terdiri dari:

- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemda DIY dianggarkan sebesar Rp198.597.000.000,00 dan realisasi 100% diberikan kepada:
 - 1) PT. Bank BPD DIY dianggarkan sebesar Rp164.440.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp164.440.000.000,00 atau 100%; dan
 - 2) PT Tarumartani dianggarkan sebesar Rp34.157.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp34.157.000.000,00 atau 100%.
- b. Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir) dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 dan realisasi sebesar 100% melalui BUKP.

5.1.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp420.567.958.995,42 Rp471.794.246.868,94

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp420.567.958.995,42, mengalami penurunan sebesar Rp51.226.287.873,52 atau 10,86% dibandingkan dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2018 yaitu sebesar Rp471.794.246.868,94. Jumlah tersebut merupakan selisih antara total realisasi pendapatan dan total realisasi belanja dan transfer ditambah dengan pembiayaan netto Tahun Anggaran 2019, dengan perhitungan sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel 5.65
Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

No	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2018 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Jumlah Pendapatan	5.713.924.265.502,71	5.699.357.232.440,50	99,75	5.443.179.144.512,93
2	Jumlah Belanja dan Transfer	5.978.131.574.404,65	5.544.650.430.330,02	92,75	5.296.403.530.714,17
3	Surplus/Defisit	(264.207.308.901,94)	154.706.802.110,48	58,56	146.775.613.798,76
4	Pembiayaan Netto	264.207.308.901,94	265.861.156.884,94	100,63	325.018.633.070,18
5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	420.567.958.995,42		471.794.246.868,94

SILPA sebesar Rp420.567.958.995,42 tersebut terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Kas di Kas Daerah	385.653.593.288,36
	Giro BPD	385.653.593.288,36
2	Kas di Bendahara Penerimaan	54.694.388,00
	Bendahara Penerima DPUPESDM	996.000,00
	Bendahara Penerima Dinas Perhubungan	1.279.000,00
	Bendahara Penerima Dinas DIKPORA	23.610.000,00
	Bendahara Penerima DLHK	509.388,00
	Bendahara Penerima BPO pada Dinas DIKPORA	28.300.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.145.501.321,00
	Bendahara Pengeluaran PPKD	212.411.977,00
	Bendahara Pengeluaran Dinas DIKPORA Induk-BOS SEKOLAH 2018	474.194.489,00
	Bendahara Pengeluaran Dinas DIKPORA Induk-BOS SEKOLAH 2019	6.304.394.855,00
	Bendahara Pengeluaran TBY pada Dinas Kebudayaan	12.000.000,00
	Bendahara Pengeluaran Dinas DIKPORA-Kartu Cerdas	142.500.000,00
4	Kas di BLUD	27.714.169.998,06
	SILPA di BLUD RS Ghrasia	8.052.144.460,15
	SILPA di BLUD BLPT	2.653.578.243,00
	SILPA di BLUD BAPEL JAMKESOS	2.060.068.305,29
	SILPA di BLUD Balai Pelatihan Kesehatan	3.066.421.643,00
	SILPA di BLUD RS Paru Respira	8.512.709.497,00
	SILPA di Balai Laboratorium Kesehatan	3.369.247.849,62
	Jumlah	420.567.958.995,42

Penjelasan:

1. SILPA di BUD sebesar Rp385.653.593.288,36 merupakan saldo kas pada Rekening Giro Kas Daerah pada Bank BPD DIY nomor 001.111.000059.
2. Pendapatan belum disetor di Bendahara Penerimaan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp54.694.388,00 meliputi Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாழ்வானகாவகாழிபுறமாவட்டம்

5. 2. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Penjelasan rincian Laporan Perubahan SAL adalah sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal **Rp471.794.246.868,94** **Rp344.066.436.138,18**

Saldo Anggaran Lebih awal Tahun 2019 sebesar Rp471.794.246.868,94 mengalami peningkatan sebesar Rp127.727.810.730,76 atau 37,12% dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih awal Tahun 2018 yaitu sebesar Rp344.066.436.138,18. Saldo Anggaran Lebih awal merupakan salah satu sumber penerimaan pembiayaan APBD Tahun 2019.

5.2.2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran **Rp420.567.958.995,42** **Rp471.794.246.868,94**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp420.567.958.995,42 berasal dari:

Tabel 5.67
Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Pendapatan	5.699.357.232.440,50
2	Belanja dan Transfer	(5.544.650.430.330,02)
	Surplus (Defisit)	154.706.802.110,48
3	Penerimaan Pembiayaan	474.458.156.884,94
4	Pengeluaran Pembiayaan	(208.597.000.000,00)
	Pembiayaan Netto	265.861.156.884,94
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	420.567.958.995,42

5.2.3 Sisa Anggaran Lebih Akhir **Rp420.567.958.995,42** **Rp471.794.246.868,94**

Sisa Anggaran Lebih akhir Tahun 2019 sebesar Rp420.567.958.995,42 mengalami penurunan sebesar Rp51.226.287.873,52 atau 10,86% dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2018 yaitu sebesar Rp471.794.246.868,94. Penurunan Sisa Anggaran Lebih Akhir disebabkan realisasi penerimaan pendapatan Tahun 2019 tidak mencapai target yang ditetapkan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ولاية Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

5.3. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Neraca

5.3.1	<u>Aset</u>	<u>Rp10.384.581.587.538,70</u>	<u>Rp9.135.260.144.513,79</u>
5.3.1.1.	<u>Aset Lancar</u>	<u>Rp565.036.388.454,07</u>	<u>Rp660.001.855.845,06</u>
5.3.1.1.1	<u>Kas dan Setara Kas</u>	<u>Rp433.555.460.454,42</u>	<u>Rp 474.856.235.612,94</u>

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp433.555.460.454,42 merupakan Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2019 meliputi Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD dan Kas Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.1.1.1	<u>Kas di Kas Daerah</u>	<u>Rp385.653.593.288,36</u>	<u>Rp434.745.158.077,68</u>
--------------------	---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp385.653.593.288,36 terdiri dari kas yang berada dalam penguasaan BUD yang berupa saldo rekening giro di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp385.582.061.588,36, dan Pengembalian Belanja SP2D LS masih di Pihak Ketiga sebesar Rp71.531.700,00.

Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp385.582.061.588,36 merupakan kas dalam penguasaan BUD di Rekening Giro Kas Daerah pada Bank BPD DIY nomor 001.111.000059 dengan rincian saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp384.574.069.424,36 dan Jasa Giro bulan Desember sebesar Rp1.007.992.164,00, sedangkan untuk deposito penempatan Tahun 2019 pada akhir tahun telah dilimpahkan kembali ke rekening giro Kas Daerah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 131 ayat 2.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp385.653.593.288,36 mengalami penurunan sebesar Rp49.091.564.789,32 atau 11,29% dibandingkan dengan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp434.745.158.077,68.

Rincian Kas di Kas Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.68
Rincian Rekening Giro

No	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1	Rekening Giro BPD DIY	385.582.061.588,36	162.625.255.299,39
2	Deposito pada Bank BRI	-	50.000.000.000,00
3	Deposito pada Bank BTN	-	100.000.000.000,00
4	Deposito pada Bank BNI	-	50.000.000.000,00
5	Deposito pada Bank BPD DIY	-	50.000.000.000,00
6.	Deposito pada Bank Mandiri	-	10.000.000.000,00
7.	Deposito pada Bank Syariah Mandiri	-	10.000.000.000,00
8.	Pengembalian Belanja SP2D LS masih di Pihak Ketiga	71.531.700,00	2.119.902.778,29
	Jumlah	385.653.593.288,36	434.745.158.077,68



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Rp54.694.388,00

Rp31.101.900,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp54.694.388,00 merupakan penerimaan pendapatan yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke rekening Kas Daerah. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp54.694.388,00 mengalami kenaikan sebesar Rp23.592.488,00 atau 75,85% dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp31.101.900,00.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut:

- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp23.610.000,00.
- Dinas Perhubungan sebesar Rp1.279.000,00.
- Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM sebesar Rp996.000,00.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp509.388,00.
- Dinas Kebudayaan sebesar Rp28.300.000,00.

Kas di Bendahara Penerimaan tersebut telah diakui sebagai penerimaan pendapatan Tahun 2019.

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp7.145.501.321,00

Rp11.380.663.802,42

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.145.501.321,00 merupakan Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran PPKD sebesar Rp212.411.977,00, kelebihan Sisa Beasiswa Kartu Cerdas Pendidikan Menengah yang disetor ke Kasda sebesar Rp142.500.000,00 dan Sisa Dana BOS yang berada di rekening sekolah SMA/SMK/SLB Negeri sebesar Rp6.778.589.344,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.145.501.321,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.235.162.481,42 atau 37,21% dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp11.380.663.802,42.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 5.69
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Nama SKPD	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	6.921.089.344,00	6.520.047.241,00
	a. Setor Kas Daerah	142.500.000,00	839.719.485,00
	b. Rekening SMA/SMK/SLB Negeri (Sisa BOS 2018)	474.194.489,00	5.680.327.756,00
	c. Rekening SMA/SMK/SLB Negeri (Sisa BOS 2019)	6.304.394.855,00	-
2.	Dinas Perhubungan	-	1.178.692.100,42
3.	Sekretariat Daerah	-	99.501.408,00
4.	Dinas Kebudayaan (Taman Budaya)	12.000.000,00	0,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	-	306.167.792,00
6.	Sekretariat DPRD	-	3.276.255.261,00
7.	PPKD	212.411.977,00	-
	Jumlah	7.145.501.321,00	11.380.663.802,42



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran PPKD sebesar Rp212.411.977,00 terdiri dari sisa belanja Subsidi ke PT AMI sebesar Rp211.476.977,00, sisa belanja Bantuan Keuangan Khusus Urusan Keistimewaan ke Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp565.000,00 dan sisa belanja Bantuan Keuangan Khusus Urusan Keistimewaan ke Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp370.000,00. Mekanisme pencairan pembayaran Belanja Subsidi dan Bantuan Keuangan Khusus Urusan Keistimewaan tahap terakhir dilakukan dengan mekanisme SP2D TU, sehingga ketika pengembalian sisa SP2D TU melampui tahun anggaran sebelum laporan keuangan diterbitkan maka dicatat sebagai Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran PPKD.

Sisa Dana BOS yang berada di rekening SMA/SMK/SLB Negeri sebesar Rp6.778.589.344,00 terdiri dari Sisa Dana BOS Tahun 2018 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.70
Rincian Sisa Dana BOS Tahun 2018 di SMA/SMK/SLB Negeri

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO BOS 2018	REALISASI	SISA DANA BOS
1	SMA Negeri 1 Yogyakarta	5.910.723,00	5.910.723,00	-
2	SMA Negeri 2 Yogyakarta	49.647.649,00	49.647.649,00	-
3	SMA Negeri 3 Yogyakarta	74.443.163,00	74.443.163,00	-
4	SMA Negeri 4 Yogyakarta	51.809.512,00	51.809.512,00	-
5	SMA Negeri 5 Yogyakarta	120.151.054,00	120.151.054,00	-
7	SMA Negeri 7 Yogyakarta	34.120.006,00	34.120.006,00	-
8	SMA Negeri 8 Yogyakarta	19.194.261,00	19.194.261,00	-
9	SMA Negeri 9 Yogyakarta	13.719.014,00	13.719.014,00	-
10	SMA Negeri 10 Yogyakarta	60.954.556,00	60.954.556,00	-
11	SMA Negeri 11 Yogyakarta	293.902.365,00	293.902.365,00	-
12	SMA Negeri 1 Bambanglipuro	800.000,00	800.000,00	-
13	SMA Negeri 1 Banguntapan	926.991,00	926.900,00	91,00
14	SMA Negeri 2 Banguntapan	173.651,00	173.651,00	-
15	SMA Negeri 2 Bantul	80,00	-	80,00
16	SMA Negeri 3 Bantul	18.164,00	18.164,00	-
17	SMA Negeri 1 Jetis	516.607,00	516.607,00	-
18	SMA Negeri 1 Kasihan	13.000,00	13.000,00	-
19	SMA Negeri 1 Sewon	100.409,00	409,00	100.000,00
20	SMA Negeri 1 Srandakan	1.650,00	1.650,00	-
21	SMA Negeri 1 Galur	2.913.578,00	2.913.578,00	-
22	SMA Negeri 1 Kalibawang	1.751.335,00	1.751.335,00	-
23	SMA Negeri 1 Kokap	5.610.418,00	5.610.418,00	-
24	SMA Negeri 1 Pengasih	38.543.825,00	38.543.825,00	-
25	SMA Negeri 1 Sentolo	3.340.000,00	3.340.000,00	-
26	SMA Negeri 1 Temon	32.904.690,00	32.904.690,00	-
27	SMA Negeri 2 Wates	4.435.529,00	4.435.529,00	-
28	SMA Negeri 1 Karangmojo	21.132.266,00	21.132.266,00	-
29	SMA Negeri 1 Playen	38.376.725,00	38.376.725,00	-
30	SMA Negeri 1 Rongkop	2.513.760,00	2.513.760,00	-
31	SMA Negeri 1 Semin	19.139.400,00	19.139.400,00	-
32	SMA Negeri 1 Cangkringan	159.122,00	159.122,00	-
33	SMA Negeri 1 Depok	7.568.420,00	7.568.420,00	-
34	SMA Negeri 1 Minggir	1.880.000,00	1.880.000,00	-
35	SMA Negeri 1 Mlati	28.451.631,00	28.451.631,00	-
36	SMA Negeri 1 Ngaglik	100.000,00	100.000,00	-
37	SMA Negeri 2 Ngaglik	400.000,00	400.000,00	-
38	SMA Negeri 1 Pakem	9.358.042,00	9.358.000,00	42,00
39	SMA Negeri 1 Prambanan	18.491,00	18.491,00	-



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

*Di bawah bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Persatuan dan Persahabatan*

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO BOS 2018	REALISASI	SISA DANA BOS
40	SMK Negeri 1 Yogyakarta	14.040.280,00	14.040.280,00	-
41	SMK Negeri 2 Yogyakarta	1.649.546.000,00	1.468.270.150,00	181.275.850,00
42	SMK Negeri 3 Yogyakarta	147.162.574,00	147.162.574,00	-
43	SMK Negeri 4 Yogyakarta	196.239.150,00	196.239.150,00	-
44	SMK Negeri 5 Yogyakarta	129.761.350,00	129.761.350,00	-
45	SMK Negeri 6 Yogyakarta	306.254.250,00	306.254.250,00	-
46	SMK Negeri 1 Bantul	20.389.510,00	20.389.510,00	-
47	SMK Negeri 1 Dlingo	1.411.000,00	1.411.000,00	-
48	SMK Negeri 2 Kasihan	160.346.135,00	108.302.000,00	52.044.135,00
49	SMK Negeri 3 Kasihan	67.049.726,00	67.049.726,00	-
50	SMK Negeri 1 Pajangan	32.322.100,00	32.322.100,00	-
51	SMK Negeri 1 Pandak	80.000,00	80.000,00	-
52	SMK Negeri 1 Pundong	1.161.900,00	1.161.900,00	-
53	SMK Negeri 1 Sanden	214.059.938,00	-	214.059.938,00
54	SMK Negeri 1 Sedayu	117.729.312,00	117.729.312,00	-
55	SMK Negeri 1 Sewon	195.939.643,00	195.939.643,00	-
56	SMK Negeri 2 Sewon	54.385.200,00	54.385.200,00	-
57	SMK Negeri 1 Kokap	4.000,00	4.000,00	-
58	SMK Negeri 1 Nanggulan	26.557.643,00	-	26.557.643,00
59	SMK Negeri 1 Panjatan	1.311.146,00	1.311.146,00	-
60	SMK Negeri 1 Pengasih	18.046.050,00	18.046.050,00	-
61	SMK Negeri 2 Pengasih	135.699.117,00	135.699.117,00	-
62	SMK Negeri 1 Samigaluh	17.500.000,00	17.500.000,00	-
63	SMK Negeri 1 Temon	62.095.050,00	62.095.000,00	50,00
64	SMK Negeri 1 Gedangsari	45.493.500,00	45.493.500,00	-
65	SMK Negeri 2 Gedangsari	6.598.800,00	6.598.800,00	-
66	SMK Negeri 1 Girisubo	12.700.200,00	12.700.200,00	-
67	SMK Negeri 1 Ngawen	5.318.212,00	5.318.212,00	-
68	SMK Negeri 1 Nglipar	21.281.808,00	21.281.808,00	-
69	SMK Negeri 1 Ponjong	30.677.725,00	30.677.725,00	-
70	SMK Negeri 1 Purwosari	56.419.470,00	56.419.470,00	-
71	SMK Negeri 1 Tanjungsari	4.418.985,00	4.418.985,00	-
72	SMK Negeri 1 Tepus	15.904.758,00	15.904.758,00	-
73	SMK Negeri 2 Wonosari	56.185.250,00	56.185.250,00	-
74	SMK Negeri 1 Cangkringan	140.345.783,00	140.345.783,00	-
75	SMK Negeri 1 Depok	90.209.195,00	90.209.195,00	-
76	SMK Negeri 2 Depok	330.079.130,00	330.079.130,00	-
77	SMK Negeri 1 Godean	59.368.583,00	59.368.583,00	-
78	SMK Negeri 2 Godean	24.437.550,00	24.437.550,00	-
79	SMK Negeri 1 Kalasan	3.306.250,00	3.306.250,00	-
80	SMK Negeri 1 Seyegan	103.506.660,00	103.350.000,00	156.660,00
81	SMK Negeri 1 Tempel	22.012.116,00	22.012.116,00	-
82	SLB/C N 2 Yogyakarta	2.450.945,00	2.450.945,00	-
83	SLB N 1 Bantul	96.556.275,00	96.556.275,00	-
84	SLB N 2 Bantul	2.508.000,00	2.508.000,00	-
85	SLB N 1 Gunungkidul	36.457.400,00	36.457.400,00	-
JUMLAH		5.680.327.756,00	5.206.133.267,00	474.194.489,00

Tabel 5.71

Rincian Sisa Dana BOS Tahun 2019 di SMA/SMK/SLB Negeri

NO	NAMA SEKOLAH	PENCAIRAN	REALISASI	SISA DANA BOS
1	SMA Negeri 1 Yogyakarta	1.231.440.000,00	1.221.389.425,00	10.050.575,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

NO	NAMA SEKOLAH	PENCAIRAN	REALISASI	SISA DANA BOS
2	SMA Negeri 2 Yogyakarta	1.220.520.000,00	1.157.567.299,00	62.952.701,00
3	SMA Negeri 3 Yogyakarta	949.480.000,00	946.008.022,00	3.471.978,00
4	SMA Negeri 4 Yogyakarta	1.081.920.000,00	1.060.958.465,00	20.961.535,00
5	SMA Negeri 5 Yogyakarta	1.099.280.000,00	1.091.731.999,00	7.548.001,00
6	SMA Negeri 6 Yogyakarta	1.614.840.000,00	1.612.076.937,00	2.763.063,00
7	SMA Negeri 7 Yogyakarta	1.073.240.000,00	998.383.009,00	74.856.991,00
8	SMA Negeri 8 Yogyakarta	1.076.600.000,00	1.065.515.680,00	11.084.320,00
9	SMA Negeri 9 Yogyakarta	835.240.000,00	794.446.906,00	40.793.094,00
10	SMA Negeri 10 Yogyakarta	1.149.800.000,00	1.148.876.000,00	924.000,00
11	SMA Negeri 11 Yogyakarta	1.192.520.000,00	1.096.699.000,00	95.821.000,00
12	SMA Negeri 1 Banglilipuro	747.600.000,00	747.244.000,00	356.000,00
13	SMA Negeri 1 Banguntapan	935.200.000,00	929.352.508,00	5.847.492,00
14	SMA Negeri 2 Banguntapan	963.760.000,00	962.659.856,00	1.100.144,00
15	SMA Negeri 1 Bantul	1.926.000.000,00	1.924.363.920,00	1.636.080,00
16	SMA Negeri 2 Bantul	1.072.400.000,00	1.072.400.000,00	-
17	SMA Negeri 3 Bantul	819.000.000,00	816.836.600,00	2.163.400,00
18	SMA Negeri 1 Dlingo	519.400.000,00	519.400.000,00	-
19	SMA Negeri 1 Imogiri	804.160.000,00	803.229.700,00	930.300,00
20	SMA Negeri 1 Jetis	1.076.600.000,00	1.076.251.294,00	348.706,00
21	SMA Negeri 1 Kasihan	1.013.600.000,00	1.013.200.000,00	400.000,00
22	SMA Negeri 1 Kretek	501.200.000,00	500.775.000,00	425.000,00
23	SMA Negeri 1 Pajangan	648.200.000,00	635.400.000,00	12.800.000,00
24	SMA Negeri 1 Piyungan	665.000.000,00	627.818.680,00	37.181.320,00
25	SMA Negeri 1 Pleret	659.400.000,00	653.424.600,00	5.975.400,00
26	SMA Negeri 1 Pundong	831.600.000,00	831.600.000,00	-
27	SMA Negeri 1 Sanden	809.760.000,00	797.760.000,00	12.000.000,00
28	SMA Negeri 1 Sedayu	1.233.120.000,00	1.233.120.000,00	-
29	SMA Negeri 1 Sewon	1.286.600.000,00	1.283.025.375,00	3.574.625,00
30	SMA Negeri 1 Srandakan	455.000.000,00	453.200.000,00	1.800.000,00
31	SMA Negeri 1 Galur	387.800.000,00	387.332.700,00	467.300,00
32	SMA Negeri 1 Girimulyo	377.440.000,00	372.773.003,00	4.666.997,00
33	SMA Negeri 1 Kalibawang	445.200.000,00	439.071.554,00	6.128.446,00
34	SMA Negeri 1 Kokap	248.920.000,00	246.655.825,00	2.264.175,00
35	SMA Negeri 1 Lendah	780.360.000,00	780.360.000,00	-
36	SMA Negeri 1 Pengasih	826.000.000,00	824.459.450,00	1.540.550,00
37	SMA Negeri 1 Samigaluh	211.400.000,00	211.400.000,00	-
38	SMA Negeri 1 Sentolo	994.080.000,00	959.512.300,00	34.567.700,00
39	SMA Negeri 1 Temon	519.960.000,00	496.873.400,00	23.086.600,00
40	SMA Negeri 1 Wates	1.419.600.000,00	1.368.533.727,00	51.066.273,00
41	SMA Negeri 2 Wates	676.200.000,00	676.200.000,00	-
42	SMA Negeri 1 Karangmojo	813.400.000,00	788.547.789,00	24.852.211,00
43	SMA Negeri 1 Panggang	498.400.000,00	476.660.875,00	21.739.125,00
44	SMA Negeri 1 Patuk	516.600.000,00	516.600.000,00	-
45	SMA Negeri 1 Playen	489.160.000,00	443.259.300,00	45.900.700,00
46	SMA Negeri 2 Playen	800.800.000,00	753.791.960,00	47.008.040,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦏ꧀ꦢꦤꦤꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦏꦸꦫꦏꦠꦫ

NO	NAMA SEKOLAH	PENCAIRAN	REALISASI	SISA DANA BOS
47	SMA Negeri 1 Rongkop	442.960.000,00	439.760.000,00	3.200.000,00
48	SMA Negeri 1 Semanu	391.720.000,00	388.510.920,00	3.209.080,00
49	SMA Negeri 1 Semin	819.280.000,00	811.508.000,00	7.772.000,00
50	SMA Negeri 1 Tanjungsari	575.960.000,00	575.960.000,00	-
51	SMA Negeri 1 Wonosari	1.392.600.000,00	1.352.205.198,00	40.394.802,00
52	SMA Negeri 2 Wonosari	1.218.600.000,00	1.216.265.500,00	2.334.500,00
53	SMA Negeri 1 Cangkringan	488.600.000,00	488.600.000,00	-
54	SMA Negeri 1 Depok	1.232.600.000,00	1.230.683.000,00	1.917.000,00
55	SMA Negeri 1 Gamping	526.120.000,00	526.120.000,00	-
56	SMA Negeri 1 Godean	803.600.000,00	803.600.000,00	-
57	SMA Negeri 1 Kalasan	940.800.000,00	940.637.600,00	162.400,00
58	SMA Negeri 1 Minggir	527.520.000,00	526.300.000,00	1.220.000,00
59	SMA Negeri 1 Mlati	531.160.000,00	531.160.000,00	-
60	SMA Negeri 1 Ngaglik	775.600.000,00	774.563.000,00	1.037.000,00
61	SMA Negeri 2 Ngaglik	947.240.000,00	942.271.131,00	4.968.869,00
62	SMA Negeri 1 Ngemplak	529.200.000,00	464.204.400,00	64.995.600,00
63	SMA Negeri 1 Pakem	1.009.840.000,00	1.005.051.050,00	4.788.950,00
64	SMA Negeri 1 Prambanan	810.600.000,00	806.400.000,00	4.200.000,00
65	SMA Negeri 1 Seyegan	954.800.000,00	954.800.000,00	-
66	SMA Negeri 1 Sleman	799.400.000,00	799.400.000,00	-
67	SMA Negeri 2 Sleman	524.440.000,00	524.440.000,00	-
68	SMA Negeri 1 Tempel	499.520.000,00	499.490.000,00	30.000,00
69	SMA Negeri 1 Turi	499.800.000,00	367.103.200,00	132.696.800,00
70	SMK Negeri 1 Yogyakarta	904.320.000,00	904.320.000,00	-
71	SMK Negeri 2 Yogyakarta	3.366.720.000,00	2.836.263.204,00	530.456.796,00
72	SMK Negeri 3 Yogyakarta	2.794.240.000,00	1.455.852.818,00	1.338.387.182,00
73	SMK Negeri 4 Yogyakarta	2.661.440.000,00	2.655.352.242,00	6.087.758,00
74	SMK Negeri 5 Yogyakarta	1.999.680.000,00	1.755.651.500,00	244.028.500,00
75	SMK Negeri 6 Yogyakarta	1.934.080.000,00	1.811.920.650,00	122.159.350,00
76	SMK Negeri 7 Yogyakarta	2.150.600.000,00	2.150.600.000,00	-
77	SMK Negeri 1 Bantul	2.462.720.000,00	2.078.921.729,00	383.798.271,00
78	SMK Negeri 1 Dlingo	665.600.000,00	665.390.000,00	210.000,00
79	SMK Negeri 1 Kasihan	984.000.000,00	825.528.650,00	158.471.350,00
80	SMK Negeri 2 Kasihan	1.068.360.000,00	1.024.012.430,00	44.347.570,00
81	SMK Negeri 3 Kasihan	1.368.000.000,00	1.310.652.194,00	57.347.806,00
82	SMK Negeri 1 Pajangan	692.160.000,00	684.426.630,00	7.733.370,00
83	SMK Negeri 1 Pandak	1.211.200.000,00	1.116.600.900,00	94.599.100,00
84	SMK Negeri 1 Pleret	1.177.920.000,00	1.099.869.446,00	78.050.554,00
85	SMK Negeri 1 Pundong	1.215.040.000,00	1.213.920.000,00	1.120.000,00
86	SMK Negeri 1 Sanden	757.760.000,00	687.355.062,00	70.404.938,00
87	SMK Negeri 1 Sedayu	1.860.800.000,00	1.754.017.050,00	106.782.950,00
88	SMK Negeri 1 Sewon	2.843.200.000,00	2.461.522.000,00	381.678.000,00
89	SMK Negeri 2 Sewon	1.075.200.000,00	998.732.500,00	76.467.500,00
90	SMK Negeri 1 Girimulyo	350.080.000,00	350.080.000,00	-
91	SMK Negeri 1 Kokap	425.600.000,00	425.600.000,00	-



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

di BLUD per 31 Desember 2019 sebesar Rp27.714.169.998,06 mengalami peningkatan sebesar Rp2.076.846.909,22 atau 8,10% dibandingkan dengan saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp25.637.323.088,84. Rincian Kas di BLUD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.72
Rincian Kas di BLUD

No	Uraian	2019 (Rp)	2018(Rp)
1	RS Grhasia	8.052.144.460,15	9.357.171.662,55
2	RS Paru Respira	8.512.709.497,00	8.101.676.897,00
3	Balai Pelayanan Jamkesos	2.060.068.305,29	2.001.184.103,29
4.	Balai Pelatihan Kesehatan	3.066.421.643,00	2.270.947.256,00
5.	Balai Laboratorium Kesehatan	3.369.247.849,62	1.419.738.208,00
6.	BLPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.653.578.243,00	2.486.604.962,00
	Jumlah	27.714.169.998,06	25.637.323.088,84

Penjelasan:

Saldo Kas BLUD pada RS Grhasia sebesar Rp8.052.144.460,15 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY No. 041.111.000043 sebesar Rp8.052.144.460,15 terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2019 Rp8.050.637.168,15 dan Jasa Giro bulan Desember 2019 sebesar Rp1.507.292,00

Kas di BLUD pada RS Paru Respira sebesar Rp8.512.709.497,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 001.111.001427. Saldo giro per 31 Desember 2019 Rp8.498.691.402,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2019 sebesar Rp14.018.095,00.

Kas di BLUD pada Balai Pelayanan Jamkesos sebesar Rp2.060.068.305,29 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 001.111.000055. Saldo giro per 31 Desember 2019 Rp2.056.640.821,29 dan Jasa Giro bulan Desember 2019 sebesar Rp3.427.484,00.

Kas di BLUD pada Balai Pelatihan Kesehatan sebesar Rp3.066.421.643,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 040.111.000050. Saldo giro per 31 Desember 2019 Rp3.059.265.645,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2019 sebesar Rp7.155.998,00.

Kas di BLUD pada Balai Laboratorium Kesehatan sebesar Rp3.369.247.849,62 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 060.111.000004 sebesar Rp3.368.044.347,62 dan rekening giro BPD DIY Nomor 060.111.000003 sebesar Rp1.203.502,00. Saldo giro per 31 Desember 2019 Rp3.363.711.344,62 dan Jasa Giro bulan Desember 2019 sebesar Rp5.536.505,00.

Kas di BLUD pada BLPT sebesar Rp2.653.578.243,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 001.111.001065 sebesar Rp2.651.506.243,00 dan masih di Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke rekening BLUD sebesar Rp2.072.000,00. Saldo giro per 31 Desember 2019 Rp2.647.482.487,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2019 sebesar Rp6.095.756,00.

5.3.1.1.1.6 Kas Lainnya **Rp12.987.501.459,00** **Rp3.061.988.744,00**

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp12.987.501.459,00 terdiri Kas di Rekening SMA/SMK yang berasal dari serah terima P3D sebesar Rp1.967.403.459,00, Beasiswa Pendidikan Menengah pada Sekolah Negeri sebesar Rp8.399.331.000,00 dan Beasiswa Pendidikan Menengah pada Sekolah Swasta sebesar Rp2.620.767.000,00.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DIYOGYAKARTA

Rincian Kas Lainnya dari sisa P3D, Beasiswa Pendidikan Menengah pada Sekolah Negeri dan Swasta adalah sebagai berikut:

Tabel 5.73
Rincian Kas Lainnya di SMA/SMK

NO	SEKOLAH	SALDO REK KORAN			
		P3D	Bunga	Beasiswa dll	Jumlah
1	SMAN 1 Yogyakarta	26.288.369,00	7.289.990,00	20.560.000,00	54.138.359,00
2	SMAN 2 Yogyakarta	-	-	78.385,00	78.385,00
3	SMAN 3 Yogyakarta	34,00	1.444.302,00	-	1.444.336,00
4	SMAN 4 Yogyakarta	-	-	58.510.037,00	58.510.037,00
5	SMAN 7 Yogyakarta	23.649,00	118.465,00	5.000.000,00	5.342.114,00
6	SMAN 8 Yogyakarta	-	409.106,00	-	409.106,00
7	SMAN 9 Yogyakarta	-	-	862.683,00	862.683,00
8	SMAN 10 Yogyakarta	6.592.470,00	-	-	6.592.470,00
9	SMAN 1 Dlingo	-	694.755,00	-	694.755,00
10	SMAN 1 Imogiri	90.000,00	-	2.107.969,00	2.197.969,00
11	SMAN 1 Jetis	13.337,00	683.198,00	-	696.535,00
12	SMAN 1 Sedayu	-	-	21.967.149,00	21.967.149,00
13	SMAN 1 Sewon	-	2.510.235,00	-	2.510.235,00
14	SMAN 1 Srandakan	-	298.472,00	-	298.472,00
15	SMAN 2 Bantul	49.357,00	-	4.797.792,00	4.847.149,00
16	SMAN 1 Galur	895.699,00	164.774,00	8.540.000,00	9.600.473,00
17	SMAN 1 Girimulyo	-	934.811,00	-	934.811,00
18	SMAN 1 Kalibawang	-	89.943,00	9.000.000,00	9.089.943,00
19	SMAN 1 Pengasih	250.064,00	-	-	250.064,00
20	SMAN 1 Samigaluh	6.500.000,00	1.789.203,00	700.000,00	8.989.203,00
21	SMAN 1 Karangmojo	146.157,00	29.093,00	3.522.390,00	53.697.640,00
22	SMAN 1 Patuk	1.260.123,00	-	1.658.771,00	2.918.894,00
23	SMAN 1 Semin	700.000,00	-	2.225.260,00	2.925.260,00
24	SMAN 2 Playen	-	443.542,00	-	443.542,00
25	SMAN 1 Cangkringan	96,00	111.877,00	-	111.973,00
26	SMAN 1 Godean	5.086.463,00	-	-	5.086.463,00
27	SMAN 1 Kalasan	3.342.837,00	-	-	3.342.837,00
28	SMAN 1 Minggir	-	1.809.209,00	-	1.809.209,00
29	SMAN 1 Ngaglik	-	-	4.730.123,00	4.730.123,00
30	SMAN 1 Ngeplak	-	-	907.685,00	907.685,00
31	SMAN 1 Seyegan	-	-	890.142.737,00	890.142.737,00
32	SMAN 2 Sleman	-	532.401,00	-	532.401,00
33	SMKN 1 Yogyakarta	-	1.134.179,00	-	1.134.179,00
34	SMKN 2 Yogyakarta	97.293.075,00	63.930.812,00	-	161.223.887,00
35	SMKN 4 Yogyakarta	245.035.954,00	226.432,00	84.534.498,00	329.796.884,00
36	SMKN 6 Yogyakarta	246.981.253,00	-	12.637.216,00	259.618.469,00
37	SMKN 1 Dlingo	-	412.861,00	-	412.861,00
38	SMKN 1 Pleret	3.100.000,00	7.460.557,00	-	10.560.557,00
39	SMKN 1 Sanden	110.000,00	420.716,00	-	530.716,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦿꦏꦠ

40	SMKN 1 Kokap	-	128.342,00	-	128.342,00
41	SMKN 1 Nanggulan	-	6.881.756,00	-	6.881.756,00
42	SMKN 1 Pengasih	-	669.279,00	-	669.279,00
43	SMKN 1 Girisubo	-	2.079.414,00	-	2.079.414,00
44	SMKN 1 Tanjungsari	-	759.587,00	-	759.587,00
45	SMKN 1 Wonosari	9,00	1.345.512,00	-	1.345.521,00
46	SMKN 1 Cangkringan	-	55.265,00	32.157.489,00	32.212.754,00
47	SMKN 2 Depok	-	10.794,00	-	10.794,00
48	SMKN 2 Godean	-	3.935.447,00	-	3.935.447,00
	JUMLAH	643.958.946,00	108.804.329,00	1.214.640.184,00	1.967.403.459,00

Tabel 5.74
Daftar Saldo Beasiswa Dikmen
Pada Sekolah Negeri

NO	SEKOLAH	Saldo Beasiswa Kartu Cerdas (Rp)	Saldo Beasiswa Prestasi (Rp)	Jumlah
1	SMAN 1 Bambanglipuro	141.000.000,00	-	141.000.000,00
2	SMAN 1 Banguntapan	102.000.000,00	-	102.000.000,00
3	SMAN 1 Bantul	-	180.000.000,00	180.000.000,00
4	SMAN 1 Dlingo	171.000.000,00	-	171.000.000,00
5	SMAN 1 Imogiri	157.500.000,00	-	157.500.000,00
6	SMAN 1 Jetis	102.500.000,00	-	102.500.000,00
7	SMAN 1 Kasihan	121.500.000,00	-	121.500.000,00
8	SMAN 1 Kretek	171.000.000,00	-	171.000.000,00
9	SMAN 1 Pajangan	147.000.000,00	-	147.000.000,00
10	SMAN 1 Pleret	94.500.000,00	-	94.500.000,00
11	SMAN 1 Sanden	199.500.000,00	-	199.500.000,00
12	SMAN 1 Sedayu	141.000.000,00	-	141.000.000,00
13	SMAN 1 Sewon	141.000.000,00	108.000.000,00	249.000.000,00
14	SMAN 1 Srandakan	10.000,00	-	10.000,00
15	SMAN 2 Banguntapan	126.000.000,00	-	126.000.000,00
16	SMAN 2 Bantul	153.000.000,00	120.000.000,00	273.000.000,00
17	SMKN 1 Bantul	113.000.000,00	-	113.000.000,00
18	SMKN 1 Kasihan	99.000.000,00	96.000.000,00	195.000.000,00
19	SMKN 1 Pajangan	163.500.000,00	-	163.500.000,00
20	SMKN 1 Sedayu	46.500.000,00	-	46.500.000,00
21	SMKN 1 Sewon	150.000.000,00	-	150.000.000,00
22	SMKN 2 Sewon	136.500.000,00	-	136.500.000,00
23	SMAN 1 Galur	132.000.000,00	-	132.000.000,00
24	SMAN 1 Girimulyo	139.500.000,00	-	139.500.000,00
25	SMAN 1 Kalibawang	37.771.000,00	-	37.771.000,00
26	SMAN 1 Kokap	37.500.000,00	-	37.500.000,00
27	SMAN 1 Lendah	171.000.000,00	-	171.000.000,00
28	SMAN 1 Pengasih	500.000,00	-	500.000,00
29	SMAN 1 Samigaluh	121.500.000,00	-	121.500.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦁꦠꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦢꦶꦱꦠꦼꦩꦮꦪꦒꦏꦂꦠꦏꦠ

30	SMAN 1 Sentolo	60.000.000,00	-	60.000.000,00
31	SMAN 1 Wates	46.500.000,00	-	46.500.000,00
32	SMKN 1 Nanggulan	184.500.000,00	-	184.500.000,00
33	SMKN 1 Samigaluh	60.000.000,00	-	60.000.000,00
34	SMAN 1 Karangmojo	108.000.000,00	-	108.000.000,00
35	SMAN 1 Panggang	180.000.000,00	-	180.000.000,00
36	SMAN 1 Patuk	154.500.000,00	-	154.500.000,00
37	SMAN 1 Playen	1.550.000,00	-	1.550.000,00
38	SMAN 1 Wonosari	127.500.000,00	180.000.000,00	307.500.000,00
39	SMAN 2 Playen	77.000.000,00	-	77.000.000,00
40	SMAN 2 Wonosari	52.500.000,00	-	52.500.000,00
41	SMKN 1 Girisubo	187.500.000,00	-	187.500.000,00
42	SMKN 1 Nglipar	157.500.000,00	96.000.000,00	253.500.000,00
43	SMKN 1 Ponjong	135.000.000,00	-	135.000.000,00
44	SMKN 1 Purwosari	90.000.000,00	-	90.000.000,00
45	SMKN 1 Saptosari	75.000.000,00	-	75.000.000,00
46	SMKN 2 Gedangsari	118.500.000,00	-	118.500.000,00
47	SMKN 3 Wonosari	220.500.000,00	72.000.000,00	292.500.000,00
48	SMA N 1 Minggir	55.500.000,00	-	55.500.000,00
49	SMAN 1 Depok	6.000.000,00	-	6.000.000,00
50	SMAN 1 Gamping	25.500.000,00	-	25.500.000,00
51	SMAN 1 Godean	36.000.000,00	-	36.000.000,00
52	SMAN 1 Kalasan	90.000.000,00	-	90.000.000,00
53	SMAN 1 Pakem	1.500.000,00	-	1.500.000,00
54	SMAN 1 Prambanan	82.500.000,00	-	82.500.000,00
55	SMAN 1 Seyegan	24.000.000,00	108.000.000,00	132.000.000,00
56	SMAN 1 Sleman	90.000.000,00	-	90.000.000,00
57	SMAN 1 Turi	19.500.000,00	120.000.000,00	139.500.000,00
58	SMAN 2 Ngaglik	34.500.000,00	-	34.500.000,00
59	SMKN 1 Depok	97.500.000,00	96.000.000,00	193.500.000,00
60	SMKN 1 Seyegan	165.000.000,00	-	165.000.000,00
61	SMKN 2 Depok	72.000.000,00	-	72.000.000,00
62	SMAN 1 Yogyakarta	13.500.000,00	-	13.500.000,00
63	SMAN 10 Yogyakarta	24.000.000,00	-	24.000.000,00
64	SMAN 11 Yogyakarta	87.000.000,00	-	87.000.000,00
65	SMAN 4 Yogyakarta	75.000.000,00	108.000.000,00	183.000.000,00
66	SMAN 6 Yogyakarta	36.000.000,00	-	36.000.000,00
67	SMAN 7 Yogyakarta	36.000.000,00	-	36.000.000,00
68	SMAN 8 Yogyakarta	87.000.000,00	-	87.000.000,00
69	SMAN 9 Yogyakarta	22.500.000,00	120.000.000,00	142.500.000,00
70	SMAN 3 Yogyakarta	3.000.000,00	-	3.000.000,00
71	SMKN 3 Yogyakarta	1.500.000,00	-	1.500.000,00
72	SMKN 4 Yogyakarta	360.000.000,00	-	360.000.000,00
73	SMKN 7 Yogyakarta	97.500.000,00	-	97.500.000,00
	JUMLAH	6.995.331.000,00	1.404.000.000,00	8.399.331.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Tabel 5.75
Daftar Saldo Beasiswa Dikmen
Pada Sekolah Swasta

NO	SEKOLAH	Saldo Beasiswa Kartu Cerdas (Rp)
1	SMA Patria	16.000.000,00
2	SMA 17 Bantul	9.000.000,00
3	SMA Darma Amiluhur	13.500.000,00
4	SMA Muh. Imogiri	31.000.000,00
5	SMA Muh. Kasihan	10.000.000,00
6	SMA Muh. Piyungan	10.000,00
7	SMA Muh. Pleret	9.500.000,00
8	SMA Pangudiluhur Sedayu	57.000.000,00
9	SMA PGRI Kasihan	24.000.000,00
10	SMA Stella Duce Bantul	42.000.000,00
11	SMA BOPKRI Banguntapan	9.000.000,00
12	SMK 17 Bantul	500.000,00
13	SMK Bina Wiyata Srandakan	27.000.000,00
14	SMK Budhi Dharma Piyungan	4.500.000,00
15	SMK Darma Bhakti Bantul	7.500.000,00
16	SMK Ma'arif 1 Piyungan	6.000.000,00
17	SMK Ma'arif 1 Kretek	50.000,00
18	SMK Muhammadiyah Bambanglipuro	1.500.000,00
19	SMK Muhammadiyah Imogiri	46.500.000,00
20	SMK Muhammadiyah Kretek	156.000.000,00
21	SMK Pembangunan Dlingo	500.000,00
22	SMK Santo Paulus 1 Sedayu	1.600.000,00
23	SMK Kesehatan Amanah Husada	21.000.000,00
24	SMK Ma'arif Al-Munawwir	21.000.000,00
25	SMK Nurul Iman	7.000.000,00
26	SMK Teknologi Bantul	10.000.000,00
27	SMK Muh. Bangunjiwo	22.500.000,00
28	SMK Taman Siswa Imogiri	25.500.000,00
29	SMA Muh. Wates	500.000,00
30	SMA Sanjaya Nanggulan	36.000.000,00
31	SMK BOPKRI 1 Sentolo	100.000,00
32	SMK Ma'arif 2 Temon	19.500.000,00
33	SMK Ma'arif Kalibawang	52.500.000,00
34	SMK Muhammadiyah 1 Wates	1.500.000,00
35	SMK Muhammadiyah 3 Wates	30.000.000,00
36	SMK Nurul Haromain Sentolo	100.000,00
37	SMK Du Muh. Galur	12.000.000,00
38	SMK Kesehatan Citra Semesta Indonesia	30.000.000,00
39	SMA Dominikus	16.500.000,00
40	SMA Gotro Semin	500.000,00
41	SMA IKIP Veteran III Tambakromo Ponjong	27.000.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦼꦂꦶꦠꦤꦏꦺꦴꦩꦤ꧀ꦠꦺꦩꦶꦩꦮꦪꦏꦿꦠ

42	SMA Muh. Ngawen	154.500.000,00
43	SMA Muh. Wonosari	20.000.000,00
44	SMA Pemb. 1 Wonosari	9.000.000,00
45	SMA Pemb. 2 Karangmojo	25.500.000,00
46	SMK Al Hikmah Gubukrubuh	73.500.000,00
47	SMK Al Hikmah Karangmojo	28.000.000,00
48	SMK Bina Karya Rongkop	114.000.000,00
49	SMK Darul Qur'an Wonosari	36.000.000,00
50	SMK Dominikus	9.000.000,00
51	SMK Gotro Semin	500.000,00
52	SMK Ma'arif Ponjong	54.000.000,00
53	SMK Ma'arif Wonosari	100.000,00
54	SMK Muh. Ngawen	500.000,00
55	SMK Muh. Semin	73.000.000,00
56	SMK Muh. Wonosari	1.500.000,00
57	SMK PP Mardhatullah	18.000.000,00
58	SMK Taman Karya Madya Songbanyu	42.000.000,00
59	SMK Teruna Jaya Nglipar	114.000.000,00
60	SMK YAPPI Wonosari	2.500.000,00
61	SMK Giri Handayani	84.000.000,00
62	SMK Mahisa Agni	9.000.000,00
63	SMA DR. Wahidin Mlati	7.500.000,00
64	SMA GAMA Yogyakarta	1.500.000,00
65	SMA Immanuel Kalasan	1.500.000,00
66	SMA Inst. Ind. Berbah	6.000.000,00
67	SMA Islam 3 Pakem	16.500.000,00
68	SMA Islam Gamping	82.500.000,00
69	SMA Islam Prambanan	30.000.000,00
70	SMA Kolese De Britto	9.000.000,00
71	SMA Muh. 1 Sleman	3.000.000,00
72	SMA Muh. Kalasan	6.000.000,00
73	SMA Muh. Mlati	12.000.000,00
74	SMA IKIP Veteran Ngemplak	9.000.000,00
75	SMK Hamong Putera Pakem	7.500.000,00
76	SMK Insan Cendikia Yogyakarta	3.000.000,00
77	SMK Karya Rini Sleman	100.000,00
78	SMK Ma'arif 2 Sleman	24.000.000,00
79	SMK Muhammadiyah 2 Moyudan	81.000.000,00
80	SMK Muhammadiyah 2 Tempel	9.000.000,00
81	SMK Muhammadiyah 2 Turi	52.000,00
82	SMK Muhammadiyah Cangkringan	110.000.000,00
83	SMK Muhammadiyah Minggir	500.000,00
84	SMK Muhammadiyah Seyegan	21.500.000,00
85	SMK Muhammadiyah Gamping	15.000.000,00
86	SMK PIRI Sleman	13.500.000,00
87	SMK Putra Samodera Gamping	1.500.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிநாது அடா அயு தியே திணா அயு தியே திணா

88	SMK Sanjaya Pakem	100.000,00
89	SMK YAPENDA 1 Sleman	5.000,00
90	SMK Muda Patria	1.500.000,00
91	SMK Sadewa	12.000.000,00
92	SMK Pembaharuan Indonesia Sleman	22.500.000,00
93	SMK Muhammadiyah 1 Kalasan	3.000.000,00
94	SMK Dirgantara Putra Bangsa	28.500.000,00
95	SMK Taman Karya Madya Ngemplak	6.000.000,00
66	SMA 17 Yogyakarta	4.500.000,00
97	SMA Berbudi Yogyakarta	6.000.000,00
98	SMA Gajah Mada	9.000.000,00
99	SMA Ma'arif Yogyakarta	1.500.000,00
100	SMA Muh. 5 Yogyakarta	19.500.000,00
101	SMA Muh. 6 Yogyakarta	1.500.000,00
102	SMA Sang Timur	10.500.000,00
103	SMA Stella Duce 2 Yogyakarta	33.000.000,00
104	SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan	9.000.000,00
105	SMA Muh. 1 Yogyakarta	16.500.000,00
106	SMA Pangudiluhur Yogyakarta	1.500.000,00
107	SMA Perak	3.000.000,00
108	SMK Taman Siswa IP Yogyakarta	34.500.000,00
109	SMK "Indonesia" Yogyakarta	33.000.000,00
110	SMK Islam Yogyakarta	15.000.000,00
111	SMK Marsudi Luhur I Yogyakarta	13.500.000,00
112	SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta	51.500.000,00
113	SMK PIRI 2 Yogyakarta	50.000,00
114	SMK PIRI 3 Yogyakarta	43.500.000,00
115	SMTI Yogyakarta	31.500.000,00
116	SMK Berbudi Yogyakarta	12.000.000,00
117	SMK Pembangunan	17.000.000,00
118	SMK Kesehatan Insan Mulia Yogyakarta	34.500.000,00
	JUMLAH	2.620.767.000,00

5.3.1.1.2 Piutang Pendapatan

Rp8.814.302.709,12

Rp9.660.448.641,76

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.814.302.709,12 terdiri dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain PAD Yang Sah, dan Piutang Pendapatan Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

Rp222.791.500,00

Rp206.956.500,00

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp222.791.500,00 merupakan Piutang Pajak Daerah pada BPKA terdiri dari Piutang Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp173.130.500,00 dan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp49.661.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.76

Rincian Mutasi Piutang Pajak Daerah



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦃꦢꦤ꧀ꦢꦫꦺꦃꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

No	UPTD	Saldo Akhir 31-12-2018	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir 31-12-2019
1.	Piutang PKB				
	KPPD di Kota Yogyakarta	35.005.900,00	172.500,00	3.214.400,00	31.964.000,00
	KPPD di Kab. Bantul	48.281.700,00	3.498.000,00	17.843.500,00	33.936.200,00
	KPPD di Kab. Gunungkidul	5.813.000,00	5.575.800,00	3.122.000,00	8.266.800,00
	KPPD di Kab. Kulon Progo	5.559.000,00	11.070.000,00	-	16.629.000,00
	KPPD di Kab. Sleman	63.802.900,00	27.957.600,00	9.426.000,00	82.334.500,00
	Jumlah	158.462.500,00	48.273.900,00	33.605.900,00	173.130.500,00
2.	Piutang BBNKB				
	KPPD di Kota Yogyakarta	2.055.000,00	-	-	2.055.000,00
	KPPD di Kab. Bantul	9.595.000,00	-	37.000,00	9.558.000,00
	KPPD di Kab. Gunungkidul	1.490.000,00	950.000,00	1.490.000,00	950.000,00
	KPPD di Kab. Kulon Progo	-	-	-	-
	KPPD di Kab. Sleman	35.354.000,00	2.880.000,00	1.136.000,00	37.098.000,00
	Jumlah	48.494.000,00	3.830.000,00	2.663.000,00	49.661.000,00
	Jumlah Total	206.956.500,00	52.103.900,00	36.268.900,00	222.791.500,00

Kualitas Piutang Pajak Daerah tersebut ditentukan sebagai berikut:

Tabel 5.77
Kelompok Umur dan Kualitas Piutang

Umur Piutang	Kualitas Piutang	PKB (Rp)	(BBNKB)	Jumlah
0 – 1 Tahun	Lancar	48.273.900,00	3.830.000,00	52.103.900,00
1 - 2 Tahun	Kurang Lancar	24.982.500,00	-	24.982.500,00
2 – 5 Tahun	Diragukan	53.368.600,00	42.486.500,00	95.855.100,00
Lebih dari 5 Tahun	Macet	46.505.500,00	3.344.500,00	49.850.000,00
	Jumlah	173.130.500,00	49.661.000,00	222.791.500,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

Sesuai dengan kebijakan akuntansi, Piutang Pajak diakui ketika wajib pajak datang untuk mendaftar ulang dan ditetapkan dengan surat ketetapan pajak daerah. Selain itu terdapat potensi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak melakukan daftar ulang sebesar Rp55.490.355.500,00 sesuai dengan data pada masing-masing KPPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.78
Data Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang

No	Unit Kerja	Jumlah Kendaraan (Unit)	Nilai Tagihan (Rp)
1.	KPPD di Kota Yogyakarta	33.715	11.110.654.800
2.	KPPD di Kabupaten Bantul	44.225	15.129.800.500
3.	KPPD di Kabupaten Kulon Progo	13.692	3.518.953.600
4.	KPPD di Kabupaten Gunungkidul	21.907	4.986.239.300
5.	KPPD di Kabupaten Sleman	60.533	20.744.707.300
	Jumlah	174.072	55.490.355.500

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi **Rp442.993.902,66** **Rp322.737.873,21**

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 sebesar Rp442.993.902,66 merupakan:

- Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pariwisata dengan kondisi macet sebesar Rp5.250.000,00.
- Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp437.743.902,66 dalam kondisi lancar.

5.3.1.1.2.3 Piutang Hasil **Rp0,00** **Rp800.000.000,00**
Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 karena Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan per 31 Desember 2018 berupa Bagian Laba PT. Tarumartani sudah disetorkan ke rekening Kas Daerah pada Tahun 2019.

5.3.1.1.2.4 Piutang Lain-lain PAD **Rp8.148.517.306,46** **Rp8.330.754.268,55**
Yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.148.517.306,46 meliputi Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp229.568.281,55 , Piutang Denda Pajak sebesar Rp73.619.050,00, Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp2.050.000,00 , Piutang



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாழ்வானகாவகாழிபுறமாவட்டம்

BLUD sebesar Rp6.216.070.383,00 dan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah-Lainnya sebesar Rp1.627.209.592,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.79
Rincian Mutasi Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

No	SKPD	Saldo Awal 31-12-2018	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir 31-12-2019
1.	PPKD				
	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	235.568.281,55	-	6.000.000,00	229.568.281,55
	Jumlah	235.568.281,55			229.568.281,55
2.	BPKA				
	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	2.050.000,00	-	-	2.050.000,00
	Piutang Denda Pajak	64.383.150,00	25.237.000,00	16.001.100,00	73.619.050,00
	Jumlah	66.433.150,00			75.669.050,00
3.	RS Ghrasia				
	Piutang BLUD	3.524.788.191,00	12.260.507.330,00	11.992.597.716,00	3.792.697.805,00
	Jumlah	3.524.788.191,00			3.792.697.805,00
4.	BLPT				
	Piutang BLUD	118.915.479,00	-	36.835.120,00	82.080.359,00
	Jumlah	118.915.479,00			82.080.359,00
5.	RS RESPIRA				
	Piutang BLUD	3.154.848.831,00	2.339.205.260,00	3.152.761.872,00	2.341.292.219,00
	Jumlah	3.154.848.831,00			2.341.292.219,00
6.	DPUP ESDM (Balai PIALAM)				
	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	1.230.200.336,00	1.627.209.591,91	1.230.200.336,00	1.627.209.591,91
	Jumlah	1.230.200.336,00			1.627.209.591,91
	Jumlah Total	8.330.754.268,55			8.148.517.306,46

a. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp229.568.281,55



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா குயா கயாகர்டா ஸ்திமேவா யோக்யாகர்டா

Saldo Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp229.568.281,55 merupakan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi pada PPKD yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2019 dengan kondisi macet.

b. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp2.050.000,00

c. Saldo Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp2.050.000,00 merupakan piutang pada BPKA berupa Piutang Pendapatan Sewa Tanah di Jangkang, Wedomartani, Ngemplak, Sleman yang telah jatuh tempo per 31 Desember 2014 dan dalam kondisi macet.

d. Piutang Denda Pajak sebesar Rp73.619.050,00

Saldo Piutang Denda Pajak sebesar Rp73.619.050,00 merupakan Denda Pajak Daerah pada BPKA yang telah jatuh tempo dan belum dibayar oleh Wajib Pajak.

e. Piutang BLUD sebesar Rp6.216.070.383,00

Piutang BLUD sebesar Rp6.216.070.383,00 terdiri dari Piutang BLUD BLPT (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga) sebesar Rp82.080.359,00, Piutang BLUD RS Ghrasia (Dinas Kesehatan) sebesar Rp3.792.697.805,00, dan Piutang BLUD RS Respira (Dinas Kesehatan) sebesar Rp2.341.292.219,00.

Piutang BLUD RS Ghrasia sebesar Rp3.792.697.805,00 terdiri dari Piutang Pasien Umum sebesar Rp656.335.376,00, Piutang Diklat sebesar Rp65.345.000,00 dan Piutang Pasien Jamkes sebesar Rp3.071.017.429,00, dengan mutasi sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31-12-2018	Tambah	Kurang	Saldo 31-12-2019
Piutang Pasien Umum	600.241.807,00	56.093.569,00	-	656.335.376,00
Piutang Diklat	79.209.000,00	65.345.000,00	79.209.000,00	65.345.000,00
Piutang Jamkes	2.845.337.384,00	12.139.068.761,00	11.913.388.716,00	3.071.017.429,00
Jumlah	3.524.788.191,00	12.260.507.330,00	11.992.597.716,00	3.792.697.805,00

Adapun rincian kualitas piutang RS Ghrasia per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Jumlah (Rp)
Lancar	1.369.909.058,00
Kurang Lancar	1.729.713.033,00
Diragukan	52.258.343,00
Macet	640.817.371,00
Jumlah	3.792.697.805,00

f. Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya sebesar Rp1.627.209.591,91

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya sebesar Rp1.627.209.591,91 merupakan piutang tagihan penjualan air curah pada Balai PIALAM yang belum terbayar, dengan rincian kepada PDAM Bantul



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦫꦤ꧀ꦢꦫꦺꦴꦩꦫꦺꦴꦩꦏꦼꦛꦶꦩꦼꦮꦏꦸꦫꦏꦠꦫ

5.3.1.1.4.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Rp(100.536.319,50)

Rp(91.207.974,50)

Saldo Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp(100.536.319,50) terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp(75.929.419,50) dan Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp(24.606.900,00) pada BPKA.

**Tabel 5.81
Kelompok Umur dan Kualitas Piutang**

Umur Piutang	Kualitas Piutang	Nilai Penyisihan Piutang		Total
		PKB (Rp)	BBNKB (Rp)	
0 – 1 Tahun	Lancar	241.369,50	19.150,00	260.519,50
1 - 2 Tahun	Kurang Lancar	2.498.250,00	-	2.498.250,00
2 – 5 Tahun	Diragukan	26.684.300,00	21.243.250,00	47.927.550,00
Lebih dari 5 Tahun	Macet	46.505.500,00	3.344.500,00	49.850.000,00
Jumlah		75.929.419,50	24.606.900,00	100.536.319,50

5.3.1.1.4.2 Penyisihan Piutang Retribusi

Rp(7.438.719,51)

Rp(5.250.000,00)

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 sebesar Rp(7.438.719,51) merupakan Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pariwisata dengan kondisi macet sebesar Rp(5.250.000,00) dan Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp(2.188.719,51) dengan kondisi lancar.

5.3.1.1.4.2 Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Rp(0,00)

Rp(4.000.000,00)

Saldo Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp(0,00).

5.3.1.1.4.3 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

Rp(1.270.723.749,80)

Rp(1.206.795.115,32)

Saldo Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2019 sebesar Rp(1.270.723.749,80) terdiri dari:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi
DIY
DIY
DIY
DIY
DIY

	(Balai PIALAM)			
		522.532.914,77	Kurang Lancar	52.253.291,47
	Jumlah	1.627.209.591,91		57.776.674,86
	Total	8.148.517.306,46		1.270.723.749,80

5.3.1.1.5 Beban Dibayar Dimuka Rp680.855.777,20 Rp680.034.072,69

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp680.855.777,20 terdiri dari Beban Jasa Dibayar Dimuka sebesar Rp598.825.183,60 dan Beban Sewa Dibayar Dimuka sebesar Rp82.030.593,60 dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.1.5.1 Beban Jasa Dibayar Dimuka Rp598.825.183,60 Rp588.664.437,99

Saldo Beban Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp598.825.183,60 merupakan saldo Beban Jasa Dibayar Dimuka pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp589.225.183,60 dan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp9.600.000,00.

Saldo Beban Jasa Dibayar Dimuka pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp589.225.183,60 merupakan pembayaran Premi Asuransi Tahun 2019 sebesar Rp1.272.586.935,00 dikurangi dengan Beban Asuransi dan Jasa sebesar Rp683.361.751,40.

Premi Asuransi Tahun 2019 sebesar Rp1.272.586.935,00 merupakan:

- 1. Premi Asuransi Kebakaran dan Gempa Bumi yang dibayarkan kepada PT. Asuransi Sinar Mas sebesar Rp640.717.936,00 dengan masa pertanggungan mulai 18 Juni 2019 sampai dengan 18 Juni 2020.
- 2. Premi Asuransi Kendaraan Dinas yang dibayarkan kepada PT. Asuransi Bintang, Tbk Yogyakarta sebesar Rp631.868.999,00 dengan masa pertanggungan 18 Juni 2019 – 18 Juni 2020.

Rincian saldo Beban Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp589.225.183,60 adalah sebagai berikut:

- 1. Beban Jasa Dibayar Dimuka Asuransi Kebakaran dan Gempa Bumi kepada PT. Asuransi Sinar Mas sebesar Rp296.661.181,33 dengan masa masa manfaat mulai 1 Januari 2020 sampai dengan 18 Juni 2020.
- 2. Beban Jasa Dibayar Dimuka Asuransi Kendaraan Dinas kepada PT. Asuransi Bintang Tbk, Yogyakarta sebesar Rp292.564.002,28 dengan masa manfaat 1 Januari 2020 sampai dengan 18 Juni 2020.

Saldo Beban Jasa Dibayar Dimuka pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp9.600.000,00 merupakan pembayaran honor pembongkaran galeri UKM di YIA yang ditunda pelaksanaannya di Tahun 2020.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

5.3.1.1.5.1 Beban Sewa Dibayar Dimuka

Rp82.030.593,60

Rp91.369.634,70

Saldo Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp82.030.593,60 merupakan Saldo Beban Sewa Dibayar Dimuka pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset dan RS Ghrasia dengan rincian sebagai berikut:

1. **Badan Pengelola Keuangan dan Aset**

Saldo Beban Sewa Dibayar Dimuka merupakan pembayaran sewa ruangan kantor milik Pemdes Palihan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo untuk pelayanan SAMSAT Desa, yang belum dimanfaatkan sampai dengan 31 Desember 2019. Nilai sewa ruangan kantor tersebut sebesar Rp4.000.000,00 dengan periode sewa 1 April 2019 – 31 Maret 2020. Sewa periode 1 April 2019 – 31 Desember 2019 telah diakui sebagai Beban Sewa sebesar Rp3.002.739,73 sedangkan nilai sewa periode 1 Januari – 31 Maret 2020 merupakan Beban Sewa Dibayar Dimuka sebesar Rp997.260,27.

2. **RS Ghrasia**

Beban Sewa Dibayar Dimuka merupakan pembayaran sewa tanah magersari milik Sultan Ground sebesar Rp93.500.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun mulai 28 Agustus 2018 - 28 Agustus 2028. Berdasarkan pembayaran dan masa sewa maka nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp81.033.333,33.

5.3.1.1.6 Persediaan

Rp122.078.638.114,94

Rp174.973.101.442,49

Saldo Persediaan sebesar Rp122.078.638.114,94 terdiri dari persediaan barang pakai habis yang berada di 30 OPD dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.83
Rincian Persediaan per SKPD

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)	Nilai Per 31-12-2018 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	32.365.101.939,14	28.530.299.158,14
2	Dinas Kesehatan	9.314.778.141,00	7.096.872.651,00
	RS Ghrasia	-	1.704.547.569,50
	RS Respira	-	4.109.971.934,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	49.845.387.752,00	78.867.848.984,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	165.996.600,00	7.663.550,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.536.200,00	15.674.175,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	4.095.975,00	6.928.625,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	223.759.000,00	176.155.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦴꦢꦺꦴꦩꦶꦠꦺꦩꦠꦺꦴꦩꦲꦏꦂꦠ

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)	Nilai Per 31-12-2018 (Rp)
8	Dinas Sosial	324.504.439,00	256.216.480,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	298.723.250,00	346.119.710,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	19.695.000,00	21.432.300,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.674.035.300,00	-
	Badan Lingkungan Hidup	-	122.340.500,00
	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	-	239.465.330,00
12	Dinas Perhubungan	381.944.875,00	338.676.600,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	77.707.300,00	53.304.280,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	62.863.700,00	54.270.600,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	24.550.960,00	-
	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	-	5.588.200,00
	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	-	17.349.300,00
16	Dinas Kebudayaan	15.493.340.879,00	42.099.509.213,85
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	177.191.371,00	155.314.785,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	892.218.292,00	710.813.369,00
19	Dinas Pariwisata	50.654.000,00	67.188.000,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.671.190.146,80	-
	Dinas Pertanian	-	4.226.472.491,00
	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	-	694.169.700,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	857.207.743,00	836.629.248,00
22	Sekretariat Daerah	306.388.260,00	301.039.030,00
23	Badan Penghubung Daerah	322.541.057,00	257.917.246,00
24	Sekretariat DPRD	310.553.436,00	294.843.522,00
25	Inspektorat	27.566.953,00	151.712.992,00
26	Paniradya Kaistimewan	30.165.000,00	-
27	Badan Perencanaan Daerah	555.831.175,00	536.947.475,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	2.482.882.226,00	2.579.501.974,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	81.306.670,00	72.197.450,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	14.920.475,00	18.120.000,00
	Jumlah	122.078.638.114,94	174.973.101.442,49

Sesuai dengan klasifikasi persediaan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 22.2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan, telah dilakukan mapping klasifikasi persediaan menjadi:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாழ்வானகாவகாழிபுறமாவட்டம்

Sesuai dengan perjanjian antara Kepala DPKP dengan PT Taru Martani, atas penitipan cadangan beras pada Gudang PT Taru Martani, PT Taru Martani mempunyai kewajiban menyediakan persediaan beras di gudang minimal sebanyak 25% dari total cadangan beras yang dititipkan, sedangkan untuk BULOG mempunyai kewajiban menyediakan persediaan beras di gudang sebanyak 100%.

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Persediaan Untuk Strategis berupa cadangan pangan yang dititipkan tersebut disajikan sesuai dengan volume pada Berita Acara Opname Persediaan, sedangkan selisih antara volume Berita Acara Opname persediaan dengan total volume cadangan beras yang dititipkan pada pihak ketiga dicatat sebagai Piutang Lain-lain.

Perhitungan rincian nilai persediaan cadangan pangan beras per 31 Desember 2019 sebesar Rp726.960.124,80 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.86
Rincian Nilai Persediaan Cadangan Pangan Beras

No	Pihak Ketiga	Total Opname Persediaan (kg)	Harga Pembelian Terakhir (Rp)	Nilai Persediaan Beras (Rp)
1.	TARU MARTANI	45.791,68	9.360,00	428.610.124,80
2.	BULOG	31.875,00	9.360,00	298.350.000,00
	Jumlah	77.666,68		726.960.124,80

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp122.078.638.114,94 termasuk Persediaan Obat di RS Paru Respira yang sudah kedaluwarsa sebesar Rp148.188.951,00, Persediaan Bahan Pakai Habis Medis sebesar Rp49.904.350,00.

Selain Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp122.078.638.114,94 terdapat persediaan yang berupa Bongkaran Bangunan di Basecamp Sta 5+500 Desa Nglindur, Kecamatan Girisubo, Kab Gunungkidul sebesar Rp179.345.481,15, berupa pendapaKayu hasil penebangan pohon paket pembangunan JLS di Desa Nglindur sebesar Rp16.856.501,00 dan Kayu hasil penebangan pohon di Girisekar, Panggang, Kab Gunungkidul sebesar Rp921.510,00.

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang Rp1.353.575.720.335,44 Rp1.009.591.307.747,22

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.353.575.720.335,44 terdiri dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen-Dana Bergulir dan Investasi Jangka Panjang dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Rp18.030.207.564,00 Rp10.694.117.580,00 **Non Permanen – Dana** **Bergulir**

Investasi Non Permanen sebesar Rp18.030.207.564,00 merupakan saldo dana bergulir yang disalurkan Pemerintah DIY sampai dengan 31 Desember 2019 dan berasal dari saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp10.694.117.580,00 ditambah Dana Bergulir Tahun 2019 sebesar Rp10.000.000.000,00 dan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

dikurangi pelunasan sebesar Rp2.663.910.016,00. Rincian saldo awal, mutasi dan saldo akhir Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.87
Mutasi Dana Bergulir

No	SKPD Teknis>Nama Program	Tahun Perguliran	Nilai Awal Digulirkan (Rp)	Saldo 31/12/2018 (Rp)	Mutasi 2019 (Rp)		Saldo 31/12/2019 (Rp)	Keterangan
					Penambahan	Pengurangan		
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan							
-	DPM PHP Tahun Anggaran 2010	2010	2.630.000.000,00	-	-	-	-	Suku Bunga 3% ,
-	DPM PHP Tahun Anggaran 2011	2011	2.390.000.000,00	290.000.000,00	-	105.000.000,00	185.000.000,00	Suku Bunga 3% , Jangka Waktu 1 Tahun
-	Gapoktan Tahap Pra Penumbuhan	2011	3.569.417.900,00	-	-	-	-	
-	DPM LUEP (Pelimpahan dari Dinas Pertanian Serah terima per Oktober 2011)	2011	3.569.417.900,00	1.583.996.750,00	-	118.346.750,00	1.465.650.000,00	Suku Bunga 3% , Jangka Waktu 1 Tahun
-	DPM PHP Tahun Anggaran 2012	2012	3.400.000.000,00	245.000.000,00	-	4.000.000,00	241.000.000,00	
	Jumlah			2.268.996.750,00	-	229.846.750,00	2.039.150.000,00	
2	Dinas Koperasi dan UKM							
-	Ketahanan Pangan di 14 Kecamatan 2003	2003	455.000.000,00	95.422.098,00	-	2.400.000,00	93.022.098,00	Suku Bunga 9% , Jangka Waktu 3 Tahun
-	Fasilitasi Perkuatan Modal Usaha Koperasi (Pasca Koperasi 2007	2006	2.492.500.000,00	631.193.242,00	-	63.477.467,00	567.715.775,00	Suku Bunga 6% , Jangka Waktu 10 Tahun
-	Ketahanan Pangan 2007	2007	1.100.000.000,00	106.500.000,00	-	41.550.000,00	64.950.000,00	Suku Bunga 6% , Jangka Waktu 3 Tahun
-	Prospek Mandiri 2007	2007	110.000.000,00	55.000.000,00	-	-	55.000.000,00	Suku Bunga 6% , Jangka Waktu 3 Tahun
-	Bantuan Modal Usaha Koperasi (Setelah Gempa) 2007	2007	609.600.000,00	50.800.000,00	-	-	50.800.000,00	Suku Bunga 6% , Jangka Waktu 3 Tahun
-	Prospek Mandiri 2008	2008	160.000.000,00	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00	Suku Bunga 6% , Jangka Waktu 3 Tahun
-	Koperasi Karyawan 2008	2008	225.000.000,00	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	Suku Bunga 6% , Jangka Waktu 3 Tahun
-	Modal Bergulir Koperasi (Pasca Gempa) 2008	2008	630.000.000,00	169.334.227,00	-	600.000,00	168.734.227,00	Suku Bunga 6% , Jangka Waktu 3 Tahun
-	Prospek Mandiri Campus Enterpreneur 2009	2009	200.000.000,00	55.615.598,00	-	-	55.615.598,00	Suku Bunga 3% , Jangka Waktu 3 Tahun
-	Program Perkuatan Permodalan bagi KJKS/UJKS Kop 2010	2010	750.000.000,00	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	Suku Bunga 3% , Jangka Waktu 3 Tahun
-	Program Fasilitasi Pengembangan Koperasi 2010	2010	3.000.000.000,00	169.057.582,00	-	1.000.000,00	168.057.582,00	Suku Bunga 3% , Jangka Waktu 3 Tahun
-	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2011	2011	2.500.000.000,00	240.712.400,00	-	800.000,00	239.912.400,00	Suku Bunga 3% , Jangka Waktu 3 Tahun
-	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi (Pasca Erupsi) 2011	2011	2.500.000.000,00	402.736.502,00	-	1.000.000,00	401.736.502,00	Suku Bunga 1% , Jangka Waktu 3 Tahun
-	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2012	2012	4.600.000.000,00	184.909.300,00	-	-	184.909.300,00	Suku Bunga 1% , Jangka Waktu 3 Tahun
-	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2013	2013	4.200.000.000,00	113.876.478,00	-	26.316.300,00	87.560.178,00	Suku Bunga 3% , Jangka Waktu 3 Tahun
-	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2016	2016	3.500.000.000,00	876.146.703,00	-	837.494.499,00	38.652.204,00	Suku Bunga 3% , Jangka Waktu 3 Tahun
-	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2017	2017	3.175.000.000,00	1.868.712.300,00	-	1.001.029.800,00	867.682.500,00	Suku Bunga 9% , Jangka Waktu 3 Tahun
-	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2017 ABT	2017	1.525.000.000,00	1.016.604.400,00	-	458.395.200,00	558.209.200,00	Suku Bunga 9% , Jangka Waktu 3 Tahun
	Jumlah			6.291.620.830,00	-	2.434.063.266,00	3.857.557.564,00	



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Yogyakarta

3	BUKP					-		-
-	Tahun 2018	2018	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-	2.000.000.000,00	
-	Tahun 2019	2019	10.000.000.000,00	-	10.000.000.000,00	-	10.000.000.000,00	
	Jumlah			2.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	12.000.000.000,00	
4	Dinas Kelautan dan Perikanan					-		-
-	DPM 2013	2013	2.915.000.000,00	133.500.000,00			133.500.000,00	Suku Bunga 3 % , Jangka Waktu 1 Tahun
	Jumlah			133.500.000,00	-	-	133.500.000,00	
	JUMLAH			10.694.117.580,00	10.000.000.000,00	2.663.910.016,00	18.030.207.564,00	

Mutasi tambah sebesar Rp10.000.000.000,00 merupakan penambahan Dana Bergulir melalui BUKP. Mutasi kurang sebesar Rp2.663.910.016,00 merupakan pelunasan pokok dana bergulir, terdiri dari pelunasan pokok bergulir pada Dinas Pertanian sebesar Rp229.846.750,00, Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp2.434.063.266,00. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2019 sebesar Rp18.030.207.564,00 dikelompokkan umurnya berdasarkan jatuh temponya dikelompokkan menjadi:

Tabel 5.88
Kelompok Umur Dana Bergulir

No	Kelompok	Nilai (Rp)
1	Umur kurang dari 1 tahun dari tanggal jatuh tempo	13.464.543.904,00
2	Umur 1 – 3 Tahun dari tanggal jatuh tempo	655.275.953,00
3	Umur 3 – 5 tahun dari tanggal jatuh tempo	826.558.202,00
4	Lebih dari 5 tahun dari tanggal jatuh tempo	3.083.829.505,00
	Jumlah	18.030.207.564,00

Sesuai perhitungan berdasarkan kelompok umur, saldo Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.629.958.920,82 sehingga saldo NRV Dana Bergulir per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp14.400.248.643,18 (Rp18.030.207.564,00 – Rp3.629.958.920,82).

Pengelolaan Dana Bergulir yang disajikan pada Investasi Non Permanen Provinsi DIY mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 56.1 Tahun 2012, antara lain diatur sebagai berikut:

- Dana Bergulir adalah kekayaan daerah yang diinvestasikan dalam jangka panjang melalui investasi non permanen untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi kelompok masyarakat, koperasi dan Badan Usaha Kredit Pedesaan yang berada di bawah pembinaan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis.
- SKPD Teknis menyusun usulan anggaran dana bergulir, berdasarkan usulan dari Kelompok Kerja Teknis yang diajukan kepada PPKD.
- Dana Bergulir dialokasikan sebagai pengeluaran pembiayaan dalam APBD.
- Dana Bergulir yang telah diterima melalui rekening kelompok/koperasi/BUKP harus dipergunakan sesuai dengan proposal.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦿꦩꦠꦤ꧀ ꦢꦤꦼꦩꦸꦁꦶꦫꦶꦁꦠꦏꦠꦺꦂꦠꦒꦶꦗ

Tabel 5.90

Rincian Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tak Tertagih

No	SKPD Teknis>Nama Program	Tahun Pengguliran	Nilai Awal Pengguliran (Rp)	Saldo 31-12-2019 (Rp)	Keterangan	Jatuh Tempo	Usia Investasi	Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tak Tertagih	
								%	Rp.
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan								
	DPM PHP Tahun 2010	2010	2.630.000.000,00	-	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun	20-Dec-10	9 tahun	100%	-
	DPM PHP Tahun 2011	2011	2.390.000.000,00	185.000.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun	20-Dec-11	7 tahun	100%	185.000.000,00
	DPM LUEP	2011	3.569.417.900,00	1.465.650.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun	20 Des 2008 dan 20 Des 2009	10 - 11 tahun	100%	1.465.650.000,00
	DPM PHP Tahun 2012	2012	3.400.000.000,00	241.000.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun	20-Dec-12	6 tahun	100%	241.000.000,00
	DPM PHP Tahun 2013	2013	1.495.000.000,00	-		20-Dec-13			-
	LDPM	2013	10.870.000.000,00	147.500.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun	20-Dec-13	6 Tahun 11 Hari	100%	147.500.000,00
	Jumlah			2.039.150.000,00					2.039.150.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

No	SKPD Teknis>Nama Program	Tahun Pengguliran	Nilai Awal Pengguliran (Rp)	Saldo 31-12-2019 (Rp)	Keterangan	Jatuh Tempo	Usia Investasi	Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tak Tertagih	
								%	Rp.
2	Dinas Koperasi dan UKM								
	Program Ketahanan Pangan di 14 Kecamatan 2003	2003	455.000.000,00	93.022.098,00	Suku bunga 9%, jangka waktu 3 tahun		> 10 Tahun	100%	93.022.098,00
	Fasilitasi Perkuatan Modal Usaha Koperasi (Pasca Gempa)	2006	2.492.500.000,00	567.715.775,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 10 tahun	2016	3 Tahun	10%	56.771.577,50
	Program Ketahanan Pangan	2007	1.100.000.000,00	64.950.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun	2010	9 Tahun	100%	64.950.000,00
	Program Prospek Mandiri	2007	110.000.000,00	55.000.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun	2010	9 Tahun	100%	55.000.000,00
	Bantuan Modal Usaha Koperasi (Pasca Gempa)	2007	609.600.000,00	50.800.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun	2010	9 Tahun	100%	50.800.000,00
	Program Prospek Mandiri	2008	160.000.000,00	80.000.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun	2011	7 Tahun	100%	80.000.000,00
	Koperasi Karyawan	2008	225.000.000,00	25.000.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun	2011	8 Tahun	100%	25.000.000,00
	Modal Bergulir Koperasi (Pasca Gempa)	2008	630.000.000,00	168.734.227,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun	2011	8 Tahun	100%	168.734.227,00
	Prospek Mandiri Campus Entrepreneur	2009	200.000.000,00	55.615.598,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun	2012	7 tahun	100%	55.615.598,00
	Program Perkuatan Permodalan bagi KJK/UJKS Koperasi	2010	750.000.000,00	150.000.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun	2013	6 Tahun	100%	150.000.000,00
	Program Fasilitasi Pengembangan Koperasi	2010	3.000.000.000,00	168.057.582,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun	2013	6 Tahun	100%	168.057.582,00
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	2011	2.500.000.000,00	239.912.400,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun	2014	5 Tahun	50%	119.956.200,00
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi (Pasca Erupsi)	2011	2.500.000.000,00	401.736.502,00	Suku bunga 1%, jangka waktu 3 tahun	2014	5 Tahun	50%	200.868.251,00
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	2012	4.600.000.000,00	184.909.300,00	Suku bunga 1%, jangka waktu 3 tahun	2015	4 Tahun	50%	92.454.650,00
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	2013	4.200.000.000,00	87.560.178,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun	2016	3 Tahun	10%	8.756.017,80
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	2016	3.500.000.000,00	38.652.204,00		2019	< 1 Tahun	0,50%	193.261,02
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2017	2017	3.175.000.000,00	867.682.500,00		2020	< 1 Tahun	0,50%	4.338.412,50
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2017 ABT	2017	1.525.000.000,00	558.209.200,00		2020	< 1 Tahun	0,50%	2.791.046,00
	Jumlah			3.857.557.564,00					1.397.308.920,82
3	Dinas Kelautan dan Perikanan								
	DPM 2013	2013	2.915.000.000,00	133.500.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun	Des-13	6 Tahun	100%	133.500.000,00
	Jumlah			133.500.000,00					133.500.000,00
4	BUKP								
	BUKP	2018	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00			< 1 Tahun	0,50%	10.000.000,00
	BUKP	2019	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00			< 1 Tahun	0,50%	50.000.000,00
	Jumlah			12.000.000.000,00					60.000.000,00
	JUMLAH TOTAL			18.030.207.564,00					3.629.958.920,82



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

پڤمڤرنتھ داءڤرھ داءڤرھ ائسٽمءوا يوءڤاكارتا

5.3.1.2.3 Investasi Jangka Panjang

Rp1.339.175.471.692,26

Rp1.002.773.909.812,24

Permanen

Penyertaan Modal per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.339.175.471.692,26 diperoleh dari saldo awal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.002.773.909.812,24 ditambah penyesuaian perhitungan Ekuitas BUMD 2018 sebesar Rp70.600.079.029,15 sehingga Ekuitas BUMD Tahun 2018 Bagian Pemda DIY menjadi Rp1.073.373.988.841,39, ditambah penyertaan modal Tahun 2019 sebesar Rp198.597.000.000,00 dikurangi Deviden Tahun 2018 yang disetor ke BUD Tahun 2019 sebesar Rp85.960.824.196,14 ditambah Laba/Rugi BUMD Tahun 2019 Bagian Pemda DIY sebesar Rp152.916.566.716,01 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.91
Perhitungan Penyertaan Modal

No	Perusahaan Daerah	Penyertaan Modal per 31 Desember 2018	Perhitungan Penyertaan Modal 2018			Mutasi Tahun Anggaran 2019					Penyertaan Modal 2019 (Usudited)	
			% Saham Pemda DIY	Ekuitas BUMD Thn 2018 (LK BUMD)	Ekuitas BUMD 2018 Bagian Pemda DIY	Penyesuaian Perhitungan Berdasarkan LK Audited TA 2018	Tambahan Modal Disetor Tahun 2019	% Saham Pemda	Deviden Tahun 2018 yang Disetor ke BUD Tahun 2019	Laba/Rugi BUMD Tahun 2019		Laba/Rugi BUMD Tahun 2019 Bagian Pemda DIY
		1	2	3	4 = 2 x 3	5 = 4 - 1	6	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 4+6+8+10
METODE EKUITAS												
1	PT. Bank BPD DIY	894.511.010.159,01	51,000%	1.907.797.167.880,00	972.976.555.618,80	78.465.545.459,79	164.440.000.000,00	51,000%	78.265.128.516,59	268.845.000.000,00	137.110.950.000,00	1.196.262.377.102,21
2	PT. Anindya Mitra Internasional	44.976.163.999,35	99,951%	38.177.197.498,99	38.158.490.672,22	(6.817.673.327,14)	-	99,951%	1.218.478.750,00	5.860.098.782,21	5.857.227.333,81	42.797.239.256,02
3	PT. Tarumantani	19.186.849.574,32	99,996%	18.824.586.267,00	18.823.833.283,55	(363.016.290,77)	34.157.000.000,00	99,996%	925.083.150,00	371.744.079,00	371.729.209,24	52.427.479.342,79
4	BUKP	43.439.886.079,57	83,131%	51.431.005.601,79	42.755.109.266,83	(684.776.812,74)	-	83,140%	5.303.393.448,55	11.518.715.627,81	9.576.660.172,96	47.028.375.991,24
METODE HARGA PEROLEHAN												
5	PT. Asuransi Bangun Askrida	660.000.000,00	0,130%		660.000.000,00			0,223%	248.740.331,00			660.000.000,00
TOTAL SELURUHNYA		1.002.773.909.812,24			1.073.373.988.841,39	70.600.079.029,15	198.597.000.000,00		85.960.824.196,14	286.595.558.489,02	152.916.566.716,01	1.339.175.471.692,26

Perhitungan nilai penyertaan modal pada BPD DIY, PT. Anindya Mitra Internasional, PD. Taru Martani dan BUKP menggunakan metode ekuitas sedangkan perhitungan penyertaan modal pada PT. Askrida menggunakan harga perolehan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.196.262.377.102,21. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada Bank BPD DIY per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2019 Audited	Rp 894.511.010.159,01
Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2018 Audited	Rp 78.465.545.459,79
Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2018	Rp 972.976.555.618,80
Tambahan Modal	Rp 164.440.000.000,00
Deviden Tahun 2018 yang disetor ke Pemda DIY Tahun 2019	Rp (78.265.128.516,59)
Laba Tahun 2019	Rp268.845.000.000,00
Laba Tahun 2019 Bagian Pemda DIY	51,00% Rp 137.110.950.000,00
Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2019	Rp 1.196.262.377.102,21

- b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL Yogyakarta per 31 Desember 2019 sebesar Rp42.797.239.256,02. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada PT. AMI per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2018 Audited	Rp 44.976.163.999,35
---	-----------------------------



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிமாணம் பருவம் பருவம் பருவம் பருவம் பருவம் பருவம் பருவம் பருவம்

nilai investasi permanen pada PT. Asuransi Bangun Askrida menggunakan metode harga perolehan (*cost method*) karena nilainya relatif kecil.

5.3.1.3. Aset Tetap Rp7.818.952.071.539,11 Rp6.926.255.169.643,37

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.818.952.071.539,11 merupakan nilai buku aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp11.063.264.295.645,60 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp3.244.312.224.106,51, dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.3.1. Tanah Rp3.563.143.798.663,00 Rp3.088.902.649.956,00

Saldo Tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.563.143.798.663,00 dapat rincian sebagai berikut :

Saldo awal per 31 Desember 2018	3.088.902.649.956,00
Penambahan:	
Belanja Modal Tahun 2019	469.142.424.222,00
Kapitalisasi	99.378.482.588,00
Penyesuaian	1.956.000.001,00
Hibah	18.704.794.000,00
	589.181.700.811,00
Pengurangan:	
Reklas ke Bangunan Gedung	2.199.000.000,00
Reklas ke KDP	128.958.122,00
Reklas ke Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	92.018.000.682,00
Reklas ke Aset Lainnya-ALL	4.025.200.000,00
Penghapusan	46.300.000,00
Pelimpahan ke Pengelola (BPKA) dari Bakesbangpol	3.285.000.000,00
Pelimpahan ke Pengelola (BPKA) dari Disbud Induk	13.238.093.300,00
	114.940.552.104,00
Saldo akhir per 31 Desember 2019	3.563.143.798.663,00

Aset Tetap Tanah diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 5.92
Rincian Obyek Tanah

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Tanah Perkampungan	101.969.610.502,00
2.	Tanah Pertanian	47.637.590.000,00
3.	Tanah Perkebunan	3.322.000.000,00
4.	Kolam Ikan	5.298.702.000,00
5.	Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.267.912.278.007,00
6.	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	2.137.003.618.154,00
	Jumlah	3.563.143.798.663,00

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2019 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦿꦏꦠ

Tabel 5.93
Rincian Tanah per SKPD

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)	Nilai Per 31-12-2018 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	350.444.085.148,00	350.259.113.140,00
2	Dinas Kesehatan	9.948.249.262,00	9.755.699.262,00
	RS Ghrasia	-	150.000,00
	RS Respira	-	192.400.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	1.581.587.907.759,00	1.382.431.512.371,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	413.095.765.280,00	348.491.112.360,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.392.000.000,00	3.285.000.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
8	Dinas Sosial	18.720.829.406,00	18.369.094.406,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	923.281.000,00	923.281.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	254.810.000,00	254.810.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	38.501.670.972,00	-
	Badan Lingkungan Hidup	-	1.392.000.000,00
	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	-	33.733.333.080,00
12	Dinas Perhubungan	52.131.377.226,00	54.200.577.226,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.750.000.000,00	8.750.000.000,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	84.735.000,00	84.735.000,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	-	-
16	Dinas Kebudayaan	251.680.993.815,00	201.572.329.118,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2.096.500.000,00	2.096.500.000,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	13.892.166.000,00	13.892.166.000,00
19	Dinas Pariwisata	3.434.065.500,00	3.434.065.500,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	110.419.407.899,00	-
	Dinas Pertanian	-	103.962.567.899,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.939.772.000,00	4.939.772.000,00
22	Sekretariat Daerah	161.849.196.590,00	163.420.196.590,00
23	Badan Penghubung Daerah	12.984.000.000,00	12.984.000.000,00
24	Sekretariat DPRD	-	-
25	Inspektorat	1.217.500.000,00	1.217.500.000,00
26	Paniradya Kaistimewan	-	-
27	Badan Perencanaan Daerah	-	-
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	519.726.285.806,00	364.191.535.004,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	4.669.200.000,00	4.669.200.000,00
	Jumlah	3.563.143.798.663,00	3.088.902.649.956,00

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Rp1.257.965.724.234,31

Rp1.080.602.847.912,43



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦿꦶꦠꦫꦺꦃꦢꦤꦤꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦿꦏꦂꦠ

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.257.965.724.234,31 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.94
Rincian Obyek Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Alat-alat Besar Darat	36.357.497.496,49
2	Alat-alat Besar Apung	2.365.273,43
3	Alat-alat Bantu	48.486.589.324,99
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	147.517.303.312,04
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.686.576.164,70
6	Alat Angkut Apung Bermotor	546.875.000,00
7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	360.001.666,00
8	Alat Angkut Bermotor Udara	148.400.000,00
9	Alat Bengkel Bermesin	62.917.374.092,87
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	9.377.760.007,04
11	Alat Ukur	10.753.151.796,92
12	Alat Pengolahan	9.688.133.535,23
13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	4.200.543.030,00
14	Alat Kantor	74.896.199.632,18
15	Alat Rumah Tangga	241.850.298.029,31
16	Komputer	258.731.036.529,82
17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	18.772.323.745,56
18	Alat Studio	73.605.147.185,20
19	Alat Komunikasi	32.052.469.870,53
20	Peralatan Pemancar	4.144.383.903,00
21	Alat Kedokteran	41.484.211.964,67
22	Alat Kesehatan	3.109.649.763,33
23	Unit-Unit Laboratorium	111.880.149.410,38
24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	23.729.893.326,31
25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	9.218.132.796,85
26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	2.073.998.698,29
27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	1.628.814.492,00
28	Radioation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	7.714.977.170,25
29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7.983.882.854,87
30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	3.750.740.909,05
31	Senjata Api	5.353.336.000,00
32	Persenjataan Non Senjata Api	3.918.307.253,00
33	Senjata Sinar	12.000.000,00
34	Alat Keamanan dan Perlindungan	13.200.000,00
	Jumlah	1.257.965.724.234,31

Adapun rincian saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 untuk masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.95



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦿꦏꦠ

Rincian Saldo Peralatan dan Mesin pada SKPD

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)	Nilai Per 31-12-2018 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	419.108.648.161,68	313.079.505.214,20
2	Dinas Kesehatan	114.683.147.117,78	40.498.570.560,00
	RS Ghrasia	-	26.439.913.564,00
	RS Respira	-	38.751.079.632,60
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	61.987.876.669,00	73.015.968.022,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	14.916.806.921,00	12.826.187.386,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.216.575.335,98	3.570.417.635,98
6	Satuan Polisi Pamong Praja	7.933.854.388,00	7.566.724.388,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.437.267.583,00	25.357.189.633,00
8	Dinas Sosial	25.554.632.677,23	25.275.343.200,30
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	32.563.868.019,99	23.727.209.240,99
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	6.481.424.034,00	6.163.748.600,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	49.180.637.081,98	-
	Badan Lingkungan Hidup	-	7.454.891.500,00
	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	-	20.540.134.028,98
12	Dinas Perhubungan	32.469.725.704,75	30.464.632.607,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	44.741.827.091,77	34.655.863.111,75
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.400.863.600,00	1.931.298.500,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	4.571.820.314,91	-
	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	-	2.035.414.365,00
	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	-	2.518.214.950,00
16	Dinas Kebudayaan	67.721.154.042,76	66.066.925.474,78
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	49.197.055.506,90	48.266.097.548,90
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	18.671.866.674,18	17.664.865.185,18
19	Dinas Pariwisata	3.451.656.192,01	3.523.311.192,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	37.273.756.820,88	-
	Dinas Pertanian	-	27.543.536.718,00
	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	-	5.076.346.290,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15.958.938.892,00	15.081.832.372,00
22	Sekretariat Daerah	50.652.983.334,03	51.484.749.759,00
23	Badan Penghubung Daerah	6.460.497.007,00	6.194.598.507,00
24	Sekretariat DPRD	22.572.323.352,59	22.695.120.483,59
25	Inspektorat	3.573.190.733,00	3.611.760.933,00
26	Paniradya Kaistimewan	4.469.067.275,96	2.035.109.982,99
27	Badan Perencanaan Daerah	12.128.241.458,00	11.892.147.923,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	95.576.023.468,93	81.560.339.323,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	13.249.555.830,00	13.407.085.337,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	8.760.438.945,00	8.626.714.745,00
	Jumlah	1.257.965.724.234,31	1.080.602.847.914,24



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦿꦏꦂꦠ

Data mutasi Aset berupa Peralatan dan Mesin Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Saldo awal per 31 Desember 2018	1.080.602.847.914,24
Penambahan:	
Belanja Modal Tahun 2019	159.857.330.876,00
Mutasi antar SKPD	74.301.789.425,84
Penerimaan Hibah	37.162.712.958,69
Reklas dari persediaan	362.018.659,03
Reklas dari Aset Tetap di luar Peralatan Mesin	13.398.151.876,00
Koreksi dan penyesuaian	1.776.755.062,96
Reklas dari Beban	372.981.920,00
reklas dari ATB	156.373.000,00
	287.388.113.778,52
Pengurangan:	
Aset Extracomtabel	3.181.167.476,02
Mutasi antar SKPD	77.427.311.928,21
Reklas ke Aset Tetap non Peralatan Mesin	12.428.480.078,94
reklas ke Aset Lain-Lain	12.431.119.408,31
Reklas ke Persediaan	804.686.220,97
Reklas ke AT Lainnya	23.322.500,00
Reklas ke ATB	1.636.868.600,00
Reklas ke Beban	451.298.725,00
Penyesuaian	1.338.088.571,00
Koreksi BPK	302.893.950,00
	110.025.237.456,64
Saldo akhir per 31 Desember 2019	1.257.965.724.234,31

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan **Rp2.853.277.179.121,12** **Rp2.720.687.348.965,05**

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar sebesar Rp2.853.277.179.121,12 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.96
Rincian Obyek Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.662.471.433.210,03
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	70.039.308.503,99
3.	Bangunan Menara	721.228.000,00
4.	Bangunan Bersejarah	5.067.726.799,98
5.	Tugu Peringatan	2.514.277.301,00
6.	Monumen/Bangunan Bersejarah	11.638.973.608,00
7.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	9.017.855.871,84
8.	Rambu-Rambu	88.660.610.626,28
9.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	3.145.765.200,00
	Jumlah	2.853.277.179.121,12

Saldo rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 untuk masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pemerintahan Daerah Yogyakarta

Tabel 5.97
Rincian Saldo Gedung dan Bangunan pada SKPD

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)	Nilai Per 31-12-2018 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	894.132.203.275,15	838.221.263.127,44
2	Dinas Kesehatan	111.181.848.740,00	19.704.143.763,00
	RS Ghrasia	-	48.839.773.975,00
	RS Respira	-	25.399.451.085,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	128.064.123.684,30	71.285.337.737,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	21.320.160.229,83	82.008.245.211,98
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.853.306.893,00	279.052.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	4.470.115.429,00	3.844.741.658,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.388.974.350,00	9.339.974.350,00
8	Dinas Sosial	93.135.907.225,67	92.582.670.163,67
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	27.508.938.468,00	18.824.370.968,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	20.769.094.720,00	20.769.094.720,00
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	38.392.970.728,94	-
	Badan Lingkungan Hidup	-	2.900.567.824,00
11	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	-	35.415.035.321,00
12	Dinas Perhubungan	129.898.249.604,25	114.953.244.278,22
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.750.625.336,00	4.438.460.536,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	12.402.404.100,00	11.482.617.100,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	2.219.578.000,00	-
	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	-	1.994.553.000,00
	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	-	-
16	Dinas Kebudayaan	109.019.419.069,00	157.803.944.738,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	132.805.459.748,81	129.146.434.850,81
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	72.562.143.887,98	67.188.238.449,98
19	Dinas Pariwisata	38.399.222.341,00	24.188.811.330,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	103.339.786.171,48	-
21	Dinas Pertanian	-	93.613.974.250,14
	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	-	7.422.851.033,00
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.149.036.175,00	20.149.036.175,00
22	Sekretariat Daerah	34.086.394.542,61	30.016.324.987,00
23	Badan Penghubung Daerah	6.370.571.262,00	6.174.052.262,00
24	Sekretariat DPRD	575.221.451.533,00	573.710.284.502,00
25	Inspektorat	929.006.440,00	929.006.440,00
26	Paniradya Kaistimewan	-	-
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.956.145.200,00	4.956.145.200,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	218.810.519.082,10	167.599.233.808,81
29	Badan Kepegawaian Daerah	12.656.225.063,00	12.078.976.299,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	23.483.297.821,00	23.427.437.821,00
	Jumlah	2.853.277.179.121,12	2.720.687.348.965,05

Data mutase Aset berupa Gedung dan Bangunan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Saldo awal per 31 Desember 2018	2.720.687.348.965,05
--	-----------------------------



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦿꦏꦂꦠ

Tabel 5.98
Rincian Obyek Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Jalan	1.885.692.469.603,59
2.	Jembatan	321.328.904.499,00
3.	Bangunan Air Irigasi	283.428.299.036,56
4.	Bangunan Air Pasang Surut	619.769.986,00
5.	Bangunan Air Rawa	725.305.075,00
6.	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	30.584.218.645,00
7.	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	29.411.737.421,00
8.	Bangunan Air Bersih/Baku	16.308.321.707,52
9.	Bangunan Air Kotor	32.963.946.731,00
10.	Bangunan Air	84.423.958.127,00
11.	Instalasi Air Minum Bersih	7.477.834.132,54
12.	Instalasi Air Kotor	141.111.278.249,68
13.	Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	1.541.752.185,00
14.	Instalasi Pembangkit Listrik	5.682.364.299,68
15.	Instalasi Gardu Listrik	1.704.655.306,52
16.	Instalasi Pertahanan	233.906.133,34
17.	Instalasi Gas	82.236.666,67
18.	Instalasi Pengaman	9.910.959.493,00
19.	Jaringan Air Minum	110.814.726.976,57
20.	Jaringan Listrik	72.018.630.570,34
21.	Jaringan Telepon	19.872.069.604,56
22.	Jaringan Gas	67.366.700,00
	Jumlah	3.056.004.711.149,57

Adapun rincian saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.99
Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada SKPD

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)	Nilai Per 31-12-2018 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	20.082.439.038,94	15.523.800.101,94
2	Dinas Kesehatan	5.138.517.755,00	1.824.944.910,00
	RS Ghrasia	-	2.279.458.941,00
	RS Respira	-	116.411.300,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	2.597.671.103.323,02	2.443.892.517.744,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	53.093.202.983,47	70.899.530.334,28
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	95.375.000,00	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja	218.887.000,00	218.887.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.218.950.800,00	5.321.020.800,00
8	Dinas Sosial	1.215.956.007,67	1.215.956.007,67
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.702.794.400,00	975.882.400,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-	-
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	26.981.929.879,00	-



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦃꦠꦤ꧀ꦢꦫꦺꦃꦠꦶꦱꦠꦶꦩꦺꦮꦠꦶꦪꦏꦂꦠ

	Badan Lingkungan Hidup	-	9.496.877.311,00
	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	-	12.809.724.548,00
12	Dinas Perhubungan	9.965.556.986,00	9.965.556.986,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.198.034.932,00	19.176.245.032,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	103.235.000,00	70.235.000,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	172.868.000,00	-
	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	-	168.068.000,00
	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	-	26.589.900,00
16	Dinas Kebudayaan	3.283.278.139,00	254.351.600,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	5.337.566.121,00	5.169.140.027,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	115.490.671.978,00	112.463.894.248,00
19	Dinas Pariwisata	11.300.117.350,00	8.493.889.350,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	7.476.486.520,00	-
	Dinas Pertanian	-	6.609.155.660,00
	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	-	93.803.654,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.452.968.800,00	6.452.968.800,00
22	Sekretariat Daerah	23.067.915.621,47	9.202.411.100,00
23	Badan Penghubung Daerah	80.600.000,00	80.600.000,00
24	Sekretariat DPRD	522.131.759,00	522.131.759,00
25	Inspektorat	38.702.500,00	38.702.500,00
26	Paniradya Kaistimewan	-	-
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	36.567.500,00	36.567.500,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	138.958.219.373,00	5.130.407.850,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	772.038.404,00	690.370.114,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1.328.595.979,00	1.328.595.979,00
	Jumlah	3.056.004.711.149,57	2.750.548.696.456,89

Data mutase Aset berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Saldo awal per 31 Desember 2018	2.750.548.696.456,89
Penambahan:	
Belanja Modal Tahun 2019	242.190.372.586,68
Kapitalisasi dari beban pemeliharaan	277.952.790,00
reklas dari peralatan dan mesin	1.862.653.100,00
reklas dari KDP	1.820.147.337,00
reklas dari tanah	56.000.000,00
mutasi DAK	264.460.000,00
hibah Block Grant	21.428.000,00
Reklas dr Gedung dan Bangunan	6.380.642.163,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦠꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Reklas dari ATB - DED	903.092.695,00
Reklas dari ATR	53.400.200,00
Hibah	116.549.842.463,00
Reklas Dari Gedung dan bangunan melalui KDP	1.149.301.586,00
Mutasi dari Dinas Kebudayaan ke BPKA	18.830.011.654,00
	390.359.304.574,68
Pengurangan:	
Reklas ke ATR	78.712.513.196,00
Reklas ke peralatan dan mesin	1.765.261.597,00
Reklas Ke Aset Lainnya DED	104.812.500,00
Reklas ke BG	4.121.331.989,00
Reklas ke ALL (usulan penghapusan)	61.600.000,00
Mutasi ke Pemda DIY/pengelola dr disbud	66.238.900,00
Koreksi BPK	71.531.700,00
	84.903.289.882,00
Saldo akhir per 31 Desember 2019	3.056.004.711.149,57

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Rp296.525.642.342,22

Rp189.999.027.197,88

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp296.525.642.342,22 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.100
Rincian Obyek Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Buku	106.235.067.611,09
2.	Terbitan	244.907.334,94
3.	Barang-Barang Perpustakaan	814.829.064,59
4.	Barang Bercorak Kebudayaan	35.383.719.351,99
5.	Alat Olah Raga Lainnya	780.504.233,41
6.	Hewan	2.099.884.175,00
7.	Tanaman	3.218.281.951,20
8.	Aset Tetap Renovasi	147.748.448.620,00
	Jumlah	296.525.642.342,22

Adapun rincian saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.101



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya pada SKPD

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)	Nilai Per 31-12-2018 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	110.571.238.582,01	89.361.756.269,87
2	Dinas Kesehatan	581.577.274,00	192.879.304,00
	RS Ghrasia	-	318.056.370,00
	RS Respira	-	62.771.600,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	72.371.059.065,00	39.284.017.550,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	16.195.115.915,00	18.751.949.230,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24.612.000,00	245.340.880,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	16.659.900,00	16.059.900,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	52.819.709.396,00	54.528.000,00
8	Dinas Sosial	592.019.287,00	573.519.287,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	41.144.050,00	41.144.050,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	41.418.900,00	41.418.900,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.128.499.187,00	-
	Badan Lingkungan Hidup	-	981.457.536,00
	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	-	116.441.651,00
12	Dinas Perhubungan	4.260.000,00	4.260.000,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	85.835.001,00	85.835.001,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5.700.000,00	5.700.000,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	14.407.700,00	-
	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	-	5.224.900,00
	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	-	7.982.800,00
16	Dinas Kebudayaan	8.102.221.943,00	8.122.707.216,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	10.128.605.776,00	9.721.081.256,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	392.770.500,00	225.486.000,00
19	Dinas Pariwisata	34.774.000,00	1.240.906.711,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.217.865.955,20	-
	Dinas Pertanian	-	2.197.339.975,00
	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	-	20.525.980,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.217.246.870,00	2.217.246.870,00
22	Sekretariat Daerah	11.247.576.448,00	10.910.693.568,00
23	Badan Penghubung Daerah	3.263.945.650,00	3.161.440.650,00
24	Sekretariat DPRD	844.874.502,01	801.630.302,01
25	Inspektorat	37.427.461,00	37.427.461,00
26	Paniradya Kaistimewan	12.365.700,00	7.365.700,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦼꦂꦶꦠꦫꦏ꧀ꦢꦤ꧀ꦢꦫꦺꦃꦢꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦏꦸꦫꦏꦠꦫ

27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	82.858.840,00	80.199.040,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	2.599.756.390,00	258.537.190,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	126.786.300,00	126.786.300,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	723.309.750,00	719.309.750,00
	Jumlah	296.525.642.342,22	189.999.027.197,88

Data mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Saldo awal per 31 Desember 2018	189.999.027.197,88
Penambahan:	
Belanja Modal Tahun 2019	23.907.706.051,00
Reklas dari persediaan	1.857.892.500,00
Reklas dr JIJ	78.712.513.196,00
Reklas dr Gedung	4.780.838.300,00
Reklas dr Peralatan Mesin	773.234.405,23
Hibah	569.485.750,00
Penyesuaian	1.528.131.000,28
Kapitalisasi	512.020.000,00
Reklas dari Aset Lainnya	164.527.500,00
Reklas dari Tanah	4.010.200,00
Mutasi dari Biro Tapem ke Biro Umum	100.700.000,00
Mutasi dari Dikpora induk blockgrant 2017 ke Baldikmen	76.158.800,00
Koreksi BPK – Reklas dari Peralatan Mesin	161.055.300,00
	113.148.273.002,51
Pengurangan:	
Ekstrakom	250.000,00
Reklas ke ALL	19.857.497,16
Reklas ke persediaan	2.450.026.000,00
Reklas ke peralatan dan mesin	2.324.314.650,00
Penyesuaian	0,01
Reklas ke ATB	316.150.000,00
Reklas ke JIJ	53.400.200,00
Mutasi dari Ro Umum dais Ke Biro Umum Reg	167.738.000,00
Mutasi dari Dispar ke BPKA	1.206.132.711,00
Mutasi ke sekolah dari Dikpora Induk	83.788.800,00
	6.621.657.858,17
Saldo akhir per 31 Desember 2019	296.525.642.342,22



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦼꦂꦶꦠꦤꦏꦤ꧀ꦢꦫꦺꦃꦢꦫꦺꦃꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp296.364.587.042,22 termasuk Aset Tetap Renovasi sebesar Rp147.748.448.620,00. Aset Tetap Renovasi sebesar Rp147.748.448.620,00 terdiri dari aset tetap yang digunakan SKPD tetapi milik SKPD lain di lingkungan Pemda DIY sebesar Rp36.640.512.298,00 dan aset tetap yang digunakan oleh SKPD tetapi milik instansi di luar Pemda DIY sebesar Rp114.107.936.322,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.102
Rincian Data Aset Tetap Renovasi



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	65.780.986.640,00	Toilet Titik Nol milik DPU DIY 152.279.000,00
			Jalan di tanah milik Kab Gunungkidul 23.544.922.024,00
			Jalan milik DPU DIY 19.312.717.416,00
			Rehab Jembatan milik Kab Sleman 15.889.531.300,00
			Pemeliharaan Gedung milik Pemerintah Pusat 1.079.876.650,00
			Jalan milik Kab Sleman 5.801.660.250,00
2	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	16.195.115.915,00	Plumbing Toilet Titik Nol milik DPU DIY 197.931.650,00
			Landscape tempat reklokasi Eks Indra milik DPU DIY 2.720.907.532,00
			Jalan Provinsi milik DPU DIY 10.594.542.500,00
			Renovasi Pagar milik Biro Umum Setda DIY 173.622.000,00
			Interior Rg Gadri milik Kraton 1.107.447.768,00
			Kawasan Wisata Kiskendo milik Kabupaten Kulon Progo TA 2016 315.683.910,00
			Ruas Jalan Bendo-Beku TA 2018 milik Kabupaten Kulon Progo 1.084.980.555,00
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	355.578.500,00	Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Kabupaten Kulon Progo
4	Sekretariat Daerah		
	• Biro Umum dan Protokol	10.481.187.069,00	Bangunan Gedung milik Kraton Yogyakarta
5	Badan Penghubung Daerah	2.143.253.900,00	Bangunan Gedung milik SETNEG
6	Dinas Komunikasi dan Informasi	48.075.000,00	Media center ruang wartawan milik Biro Umum
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	52.740.241.396,00	Jalan milik Kabupaten 37.662.476.896,00
			Jembatan milik Kabupaten 14.301.660.500,00
			Pelabuhan Sadeng 436.427.000,00
			SLB BINA SIWI 339.677.000,00
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	4.010.200,00	Biaya sertifikasi tanah milik SMA
	Jumlah	147.748.448.620,00	

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Rp89.827.616.353,40

Rp18.735.298.170,40

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp89.827.616.353,40 terdapat dalam beberapa SKPD berikut ini:

Tabel 5.103
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)	Nilai Per 31-12-2018 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	4.029.820.833,40	5.705.664.170,40
2	Dinas Kesehatan	77.008.900,00	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	30.456.449.748,00	-
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	20.985.079.930,00	-
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	153.367.000,00	-
6	Dinas Sosial	138.302.000,00	-



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦼꦩꦺꦫꦶꦠꦤ꧀ꦢꦫꦺꦃꦢꦫꦺꦃꦶꦠꦶꦩꦼꦮꦪꦔꦏꦂꦠ

7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	130.014.600,00	-
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.596.357.100,00	-
9	Dinas Perhubungan	513.868.450,00	-
10	Dinas Kebudayaan	2.234.597.092,00	12.999.100.500,00
11	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	49.560.000,00	-
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	86.433.000,00	-
13	Dinas Pariwisata	15.700.000,00	15.700.000,00
14	Badan Penghubung Daerah	45.000.000,00	-
15	Inspektorat	13.919.179.000,00	-
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	13.652.913.000,00	14.833.500,00
17	Badan Kepegawaian Daerah	500.008.700,00	-
18	Badan Pendidikan dan Pelatihan	243.957.000,00	-
	Jumlah	89.827.616.353,40	18.735.298.170,40

Data mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Saldo awal per 31 Desember 2018	18.735.298.170,40
Penambahan:	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2019	19.089.760.830,00
Belanja Modal Tanah Tahun 2019	128.958.122,00
Koreksi BPK -Reklas dari ATB	53.693.746.568,00
	72.912.465.520,00
Pengurangan:	
Reklas ke Gedung Bangunan	1.820.147.337,00
Saldo akhir per 31 Desember 2019	89.827.616.353,40

Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp3.885.516.833,40 terdiri dari Pembangunan Gedung Akademi Komunitas A sebesar Rp2.231.290.315,00, Pembangunan Gedung Akademi Komunitas B sebesar Rp48.009.500,00, Pembangunan Gedung SLB Pembina sebesar Rp98.075.000,00, serta Pembangunan Gedung di SMA dan SMK sebesar Rp1.508.142.018,40.

b. Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM sebesar Rp5.617.511.830,00 merupakan konstruksi pembangunan infrastruktur bangunan terminal VIP Bandara NYIA di Kabupaten Kulon Progo.

c. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦲꦏꦂꦠ

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebesar Rp 89.042.240,00 merupakan biaya pendukung pengadaan tanah di BPKA.

d. Dinas Kebudayaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp39.915.882,00 merupakan biaya appraisal tanah.

e. Dinas Pariwisata

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pariwisata sebesar Rp15.700.000,00 berupa DED pembangunan Lanskap Gedung.

f. Inspektorat

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Inspektorat sebesar Rp13.472.249.000,00 merupakan pembangunan gedung kantor.

g. Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebesar Rp13.013.934.000,00 merupakan Konstruksi mutasi dari Dinas Kebudayaan.

- h. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp89.827.616.353,40 termasuk di dalamnya penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa DED yang sebelumnya disajikan sebagai Aset Tak Berwujud sebesar Rp53.693.746.568,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	144.304.000,00
2	Dinas Kesehatan	77.008.900,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	24.838.937.918,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	20.896.037.690,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	153.367.000,00
6	Dinas Sosial	138.302.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	130.014.600,00
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.596.357.100,00
9	Dinas Perhubungan	513.868.450,00
10	Dinas Kebudayaan	2.194.681.210,00
11	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	49.560.000,00
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	86.433.000,00
13	Badan Penghubung Daerah	45.000.000,00
14	Inspektorat	446.930.000,00
15	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	638.979.000,00
16	Badan Kepegawaian Daerah	500.008.700,00
17	Badan Pendidikan dan Pelatihan	243.957.000,00
	Jumlah	53.693.746.568,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦼꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦺꦠꦶꦱꦼꦩꦼꦮꦏꦂꦠ

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Rp (3.244.299.445.623,34) Rp(2.923.220.699.015,28)

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 sebesar Rp(3.244.299.445.623,34) merupakan pengakuan akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.104
Rincian Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	Jumlah
1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(767.342.185.644,37)
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(821.358.813.996,92)
3.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(1.651.140.189.017,43)
4.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(4.458.256.964,62)
	Jumlah	(3.244.299.445.623,34)

5.3.1.4. Dana Cadangan Rp0,00 Rp0,00

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.

5.3.1.5. Aset Lainnya Rp593.524.252.508,91 Rp539.411.811.278,14

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp593.524.252.508,91 meliputi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Data mutasi Aset Lainnya Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Saldo awal per 31 Desember 2018	539.411.811.278,14
Penambahan:	
Belanja Modal Tahun 2019	1.190.501.500,00
Usulan penghapusan	14.808.801.065,47
Reklas Beban Jasa Konsultasi Aplikasi ke Software	1.467.593.605,00
Akumulasi penyusutan aset lain-lain	1.970.514.087,89
Reklas dari Persediaan	95.638.000,00
Reklas dari Peralatan Mesin	1.942.757.760,00
Reklas Beban Jasa Konsultansi Perencanaan ke DED	7.661.824.790,00
Hibah	208.427.000,00
Reklas Gedung Bangunan Ke DED	2.563.832.118,00
Penyesuaian	45.608.185,00
Reklas dari jasa konsultansi ke ATB	908.450.500,00
Reklas dari Beban Pegawai	500.000,00
Pencatatan kembali ATB	277.129.450,00
Reklas peralatan jaringan ke website	139.700.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦃꦢꦒꦫꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦏꦲꦂꦠ

Mutasi DAK dari DIKPORa ke Dikmen Kota	43.425.000,00
Kapitalisasi belanja pemeliharaan Gedung	773.314.999,00
Reklas dari AT Lainnya	365.710.000,00
Reklas dari beban jasa	119.377.500,00
Reklas Jasa Konsultansi penelitian ke Kajian	79.830.000,00
Reklas dari JIJ ke DED	104.812.500,00
Reklas dari Tanah	92.242.209.801,00
Pengakuan Jamsung Jamreg Jampasca Tambang	5.202.764.997,00
Hibah ke Pemkab Bantul	1.518.621.120,00
Mutasi dari KP2TSP ke DPPM	175.316.000,00
Mutasi dari Disbud ke Disperindag (Kajian)	20.000.000,00
Mutasi dr OPD Lain	401.822.641,00
Mutasi dr BPKA	210.000.000,00
Mutasi dr Dais Disbud KP (Kajian) ke BPKA	198.290.000,00
Mutasi dr Dais Disbud KP (DED) ke BPKA	355.794.000,00
	135.092.566.619,36
Pengurangan:	
Akumulasi penyusutan Aset Lain-Lain	4.203.303.310,53
Penghapusan	11.594.980.929,02
Reklas ke JIJ	1.440.690.195,00
Penyesuaian	1.850.788.265,00
Reklas ke Peralatan Mesin	83.050.000,00
Reklas ke Tanah	215.972.008,00
Beban Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	3.788.614.485,04
Mutasi ke BPKA (Pengelola) dr Disbud Induk	554.084.000,00
Reklas ke Gedung	520.287.112,00
Reklas ke DED	1.175.733.312,00
Reklas ke AT Lainnya	164.527.500,00
Hibah ke Pemkab Bantul	1.527.384.000,00
Mutasi ke Sekretariat KPU dr BPKA	145.000.000,00
Aset yang sdh tdk disewakan	21.604.871,00
Akum Penyusutan Aset yg sdh tidak disewakan	358.833,00
Koreksi BPK- Reklas ke KDP	53.693.746.568,00
	80.980.125.388,59
Saldo akhir per 31 Desember 2019	593.524.252.508,91

Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dapat dirinci sebagai berikut:

5.3.1.5.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga **Rp325.881.130.128,87** **Rp233.825.570.058,91**

Saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp325.881.130.128,87 merupakan nilai tercatat Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dengan total harga perolehan sebesar Rp359.005.038.183,93 dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sampai dengan per 31 Desember 2019 sebesar Rp33.123.908.055,06, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.105



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

No	Nama SKPD	Sewa	Kerjasama Pemanfaatan	BGS	Pinjam Pakai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	349.847.300,00	608.885.649,00	-	-	(355.978.331,19)	602.754.617,81
2	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	2.248.483.752,00	-	-	-	(600.769.926,24)	1.647.713.825,76
3	Dinas Perhubungan	39.037.830.545,00	-	-	-	(22.886.300,00)	39.014.944.245,00
4	Dinas Sosial	2.950.084,00	-	-	-	-	2.950.084,00
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.758.059.209,00	-	-	-	(2.104.387.379,76)	6.653.671.829,24
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	122.573.112.908,00	-	3.518.000.000,00	178.930.294.199,00	(29.107.220.648,90)	275.914.186.458,10
7	Badan Penghubung Daerah	2.911.574.537,93	-	-	-	(866.665.468,97)	2.044.909.068,96
8	Satpol PP	-	-	-	66.000.000,00	(66.000.000,00)	-
	Jumlah	175.881.858.335,93	608.885.649,00	3.518.000.000,00	178.996.294.199,00	(33.123.908.055,06)	325.881.130.128,87

Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan pinjam pakai dengan data sebagai berikut:

a. Sewa sebesar Rp175.881.858.335,93

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk sewa per 31 Desember 2019 sebesar Rp175.881.858.335,93 merupakan aset daerah yang tidak dipisahkan yang pemanfaatannya dalam bentuk sewa pada beberapa SKPD sebagai berikut :

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa :

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Nilai Aset (Rp)	Keterangan Aset	Penyewa
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	349.847.300,00	Hotel Edotel	Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
2	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	2.248.483.752,00	Bangunan Mess Kaliurang Gedung Wisma Kaliurang	Masyarakat umum
3	Dinas Perhubungan	39.037.830.545,00	Tanah lahan parkir Bandara Adi Sucipto	PT. Angkasa Pura
4	Dinas Sosial	2.950.084,00	Tanah dan bangunan, Eks Rumah Dinas di Jl. Munggur 32, Yogyakarta	BUKP Gondokusuman
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.758.059.209,00	Bangunan Rusunawa Ledok Code Bangunan Pesanggrahan Balai Istirahat Karyawan (BIK) dan Balai Istirahat Pegawai (BIP) Rumah Dinas Randubelang	Masyarakat umum Pegawai dan masyarakat umum



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

7	Badan Penghubung Daerah	2.911.574.537,93	GriyaJogja, Jl. Diponegoro No.52 Menteng, Jakarta Wisma Jogja, Jl. Pedati No.116 Jakarta Timur	Masyarakat umum Masyarakat umum
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	122.573.112.908,00		
Jumlah		175.881.858.335,93		

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa pada BPKA sebagai berikut :

No	Aset	Alamat	Keterangan	Nilai Aset (Rp)
1	Tanah	Gadingan, Wates, Kulon Progo	Pertanian Tebu	279.542.000,00
2	Tanah	Hargotirto Kokap Kulonprogo	Gapoktan Manunggal	2.100.000.000,00
3	Tanah	Jl. Panjaitan 74 Suryodiningratan YK	Bang Rum Din Gol II	51.886.250,00
4	Tanah	Jl. Panjaitan 74 Suryodiningratan YK	Tanah Kosong	51.113.750,00
5	Tanah	Komplek Kolombo No. 59 Caturtunggal, Depok, Sleman	Rumah Dinas	36.191.000,00
6	Tanah	Jl. janturan 29a, Warung boto, Umbulharjo, Yogyakarta	Rumah Dinas	125.500.000,00
7	Tanah	Jl. Warung Boto UH II/ 917 Yogyakarta	Rumah Dinas	150.000.000,00
8	Tanah	Jl. janturan 29 Warung Boto, UH, Yogyakarta	Rumah Dinas	125.500.000,00
9	Tanah	Jl. Warung boto UH II/918 Yogyakarta	Rumah Dinas	150.000.000,00
10	Tanah	Jl. Kusumanegara 169 E, Yogyakarta	Rumah Dinas	525.000.000,00
11	Tanah	Komplek Kolombo No. 58, Caturtunggal, Depok, Sleman	Rumah Dinas	14.000.000,00
12	Tanah	Jl. Kusumanegara 168 H, Yogyakarta	Rumah Dinas	525.000.000,00
13	Tanah	Jl. kolombo 60, Caturtunggal, Depok, Sleman	Rumah Dinas	192.000.000,00
14	Tanah	Gemawang karangjati, Sinduadi, Sleman	Anik Suharmini	20.100.000,00
15	Tanah	Gemawang karangjati, Sinduadi, Sleman	Sri Wahyu	20.100.000,00
16	Tanah	Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Rumah Dinas	1.000.000,00
17	Tanah	Jl. P Romo 65 Kotagede, Yogyakarta	Rumdin DPRD Golongan 1	101.700.000,00
18	Tanah	JL. Sriti Caturtunggal Depok Sleman	Rumah Dinas	2.251.200.000,00
19	Tanah	Jl. DI Panjaitan 66 Yogyakarta	Disewa	3.266.000,00
20	Tanah	Jl. Kolombo 61, Caturtunggal Depok, Selman	Rumah Dinas	325.000.000,00
21	Tanah	Glugo, panggungharjo, Sewon, Bantul	Rumah Dinas	449.000.000,00
22	Tanah	Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Rumah Dinas	334.500.000,00
23	Tanah	Jumeneng, Sumberadi, Mlati, Sleman	Rumah Dinas	9.240.000,00
24	Tanah	Permata Hijau, Juwengan, Purwomartani, Sleman	Rumah Dinas	52.020.000,00
25	Tanah	Komplek Kolombo 56, Depok, Sleman, DIY	Rumah Dinas	2.450.000,00
26	Tanah	Jalan Tunjung No. 02 Baciro Yogyakarta	Rumah Tinggal a.n Setio Agus Samapto, SH	475.378.040,00
27	Tanah	Jalan Mrican Baru XI/2 Mrican Baru Caturtunggal Depok Yogyakarta	Rumah Tinggal	1.115.200.000,00
28	Tanah	Jl. Patehan Tengah 13, Kraton Yogyakarta	-	51.500.000,00
29	Tanah	Kedunggong, Wates, Kulon Progo	RM Saiyo, SPBU, TK ABA Klayonan, RM Gudeg Kendil, Kios Assesories, Halaman PKU	4.654.320.000,00
30	Tanah	Dipan, Wates, Kulon Progo	Pertokoan, Pasar Kelapa, Gapensi	6.151.340.000,00
31	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Kios desa 9 buah	89.600.000,00
32	Tanah	Dipan, Wates, Kulon Progo	Kios 2 buah dan bangunan kios 1/2 jadi	505.827.000,00
33	Tanah	Kedunggong, Wates, Kulon Progo	Kios desa 7 buah	471.417.000,00
34	Tanah	Kedunggong, Wates, Kulon Progo	Bengkel Mobil	451.526.000,00
35	Tanah	Wonosidi Lor, Wates, Kulon Progo	Tanah Bangunan Bengkel	810.020.000,00
36	Tanah	Wonocatur, Banguntapan, Bantul	PT Buanaland Agung	1.975.714.255,00
37	Tanah	Gadingsari, Sanden, Bantul	Swasta	1.500.000.000,00
38	Tanah	Jl.AM sangaji 45 Yogyakarta	STIKES	918.000.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாழ்வாசு கழவாசு கழவாசு கழவாசு கழவாசு கழவாசு

39	Tanah	Jl. Padang 4 Caturtunggal, depok, Sleman	-	161.600.000,00
40	Tanah	wates, wates Kulon Progo	Koperasi Sumber Rezeki	45.000.000,00
41	Tanah	Gedungkiwo, mantrijeron, Yogyakarta	KPN makaryo	81.000.000,00
42	Tanah	Dipan, Wates, Kulon Progo	Rumah Percontohan, Puskesmas, Rumdin Kodim, BKM Nugroho, Kios Desa	3.628.742.000,00
43	Tanah	Wonocatur, Banguntapan, Bantul	PT Anindya Mitra Internasional	476.790.255,00
44	Tanah	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	Pusat Informasi Pelayanan Anak Usia Dini	1.517.952.000,00
45	Tanah	Giwangan, Umbulharjo, Sleman	Yayasan Ambar Binangun	2.316.100.000,00
46	Tanah	Giwangan, Umbulharjo, Sleman	Yayasan Ambar binangun	619.400.000,00
47	Tanah	Caturtunggal, Depok ,Sleman	Yayasan Darmapala	2.107.500.000,00
48	Tanah	Bleberan Playen Gunung Kidul	Obyek Wisata Sri Gethuk	662.100.400,00
49	Tanah	Kel. sendang sari, pengasih, kulon progo	Sarang burung walet, EKS sabut kelapa,	1.724.000.000,00
50	Tanah	Kel. Sendangsari, pengasih, kulon progo	Sarang Burung Walet, Eks sabut kelapa, Eks gudang pangan	940.000.000,00
51	Tanah	Dipan, Wates, Kulon Progo	DPD Golkar	1.941.380.000,00
52	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	234.840.000,00
53	Tanah	Beji, Wates	Pertanian	345.565.000,00
54	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	266.090.000,00
55	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	264.860.000,00
56	Tanah	Beji, Wates, Wates, Kulon Progo	Pertanian	258.300.000,00
57	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	342.475.000,00
58	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	1.364.800.000,00
59	Tanah	Driyan, Wates, Kulon Progo	Pertanian	156.045.000,00
60	Tanah	Terbah, Wates, Kulon Progo	Pertanian	38.786.000,00
61	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	192.713.000,00
62	Tanah	Terbah, Wates, Kulon Progo	Pertanian	138.334.000,00
63	Tanah	Terbah, Wates, Kulon Progo	Pertanian	60.844.000,00
64	Tanah	Gadingan, Wates, Kulon Progo	Pertanian	240.960.000,00
65	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	183.443.000,00
66	Tanah	Mutihan, wates, Kulon Progo	Pertanian	92.185.000,00
67	Tanah	Durungan, Wates, Kulon Progo	Pertanian	123.000.000,00
68	Tanah	Mutihan, Wates, Kulon Progo	Pertanian	143.170.000,00
69	Tanah	Mutihan, Wates, Kulon Progo	Pertanian	21.424.000,00
70	Tanah	Gadingan, Wates, Kulon Progo	Pertanian	49.131.000,00
71	Tanah	Mutihan, Wates, Kulon Progo	Pertanian	82.915.000,00
72	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	101.455.000,00
73	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	243.286.000,00
74	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	311.600.000,00
75	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	164.984.000,00
76	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	48.307.000,00
77	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	94.245.000,00
78	Tanah	Bulak Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	132.355.000,00
79	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	66.744.000,00
80	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	65.817.000,00
81	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	130.707.000,00
82	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	41.200.000,00
83	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	49.955.000,00
84	Tanah	Punukan, Wates, Kulon Progo	Pertanian	65.682.000,00
85	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	184.782.000,00
86	Tanah	Punukan, Wates, Kulon Progo	Pertanian	109.224.000,00
87	Tanah	Terbah, Wates, Kulon Progo	Pertanian	69.372.000,00
88	Tanah	Terbah, Wates, Kulon Progo	Pertanian	39.114.000,00
89	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	87.241.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦫꦺꦝꦺꦫꦏꦼꦩꦼꦂꦠꦺꦤ꧀ꦭꦶꦩꦼꦮꦏꦿꦠ

90	Tanah	Terbah, Wates, Kulon Progo	Pertanian	38.950.000,00
91	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	109.120.000,00
92	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	703.840.000,00
93	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	85.116.000,00
94	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	56.498.000,00
95	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	208.369.000,00
96	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	65.190.000,00
97	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	71.012.000,00
98	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon progo	Pertanian	15.662.000,00
99	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	31.415.000,00
100	Tanah	Beji, Wates, Kulon progo	Pertanian	111.446.000,00
101	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	15.662.000,00
102	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	9.600.000,00
103	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	15.744.000,00
104	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	58.813.000,00
105	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	31.209.000,00
106	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	31.209.000,00
107	Tanah	Sentolo, Sentolo, Kulon Progo	Base camp	487.755.000,00
108	Tanah	Wonocatur, Banguntapan, Bantul	PT Buanaland Agung	4.819.500.000,00
109	Tanah	Srimulyo, Piyungan, Bantul	Tempat Parkir	1.386.325.000,00
110	Tanah	Wonocatur, Banguntapan, bantul	Tanah Pertanian	2.799.400.000,00
111	Tanah	-	Tanah milik Pemerintah	33.714.182,00
112	Tanah	-	Tanah milik Pemerintah	1.472.393,00
113	Tanah	-	Tanah milik Pemerintah	161.106.846,00
114	Tanah	-	Tanah milik Pemerintah	7.943.936,00
115	Tanah	-	Tanah milik Pemerintah	1.274.000.000,00
116	Tanah dan Bangunan	-	Tempat Parkir	6.711.300,00
117	Bangunan	Jl. Malioboro Kepatihan Danurejan Yogyakarta	Gedung Perkantoran disewa BPD DIY	102.535.755
118	Bangunan	Jl. Raya Janti KM.4, banguntapan, bantul	Bangunan gedung	1.033.385.000
119	Bangunan	Jl. RingRoad Selatan, giwangan Yogyakarta	Gedung Kantor	840.913.920
120	Bangunan	Wonocatur ,Banguntapan, Bantul	Gedung JEC	54.390.342.600
121	Bangunan	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	Gudang, Kepsek, Belajar& Adm	56.965.800
122	Bangunan	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	Ruang Perpustakaan	27.542.400
123	Bangunan	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	Kamar mandi, dapur, ruangan, ruangan	33.979.600
124	Bangunan	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	Ruang UKS, Bayi, Balok	18.988.600
125	Bangunan	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	Kamar mandi, Office, TK Kecil	54.967.000
126	Bangunan	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	TK Kecil Ruang Kelas	63.961.600
127	Bangunan	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	Kantor, Kantor Ruang Kelas Musik	85.948.400
128	Bangunan	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	Kamar penjaga sekolah, KM/WC Gudang	29.982.000
129	Bangunan	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	Ruang Tunggu	35.978.400
130	Bangunan	Jl AM Sangaji Cokrodiningratan No. 45, Jetis, Yogyakarta	Gedung sekolah AM Sangaji	175.733.000
131	Bangunan	Pelemwulung Banguntapan Bantul	Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III	33.250.000
132	Bangunan	Pelemwulung Banguntapan Bantul	Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III	80.822.641
133	Bangunan	Pelemwulung Banguntapan Bantul	Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III	33.250.000
134	Bangunan	Pelemwulung Banguntapan Bantul	Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III	33.250.000
135	Bangunan	Pelemwulung Banguntapan Bantul	Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III	33.250.000
136	Bangunan	Pelemwulung Banguntapan Bantul	Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III	33.250.000
137	Bangunan	Pelemwulung Banguntapan Bantul	Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III	33.250.000



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦴꦢꦺꦴꦩꦲꦏꦂꦠ

138	Bangunan	Pelemwulung Banguntapan Bantul	Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III	121.500.000
139	Bangunan	Jl. Kusumanegara168E Yogyakarta	Gedung Perumahan	597.790.000
140	Bangunan	Komplek Kolombo 58	Gedung Perumahan	52.966.126
141	Bangunan	Komplek Kolombo 60,CT ,Depok, Sleman	Gedung Perumahan	90.039.179
142	Bangunan	Jl Podang No 4 Caturtunggal Depok Sleman	Rumah Dinas	431.752.706
143	Bangunan	Jl Sriti No. 20 D, Demangan, Yogyakarta	Rumah Negara Gol II Tipe C	18.710.000
144	Bangunan	Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul	Rumah Dinas V	202.390.876
145	Bangunan	Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul	Rumah Dinas III	136.400.000
146	Bangunan	Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul	Rumah Dinas II	136.400.000
147	Bangunan	Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul	Rumah Dinas I	136.400.000
148	Bangunan	Jl. P.Romo No.65 Kotagede, Yogyakarta	eks Rumah Dinas dipinjam pakai BAWASLU	97.375.274
149	Bangunan	Jl Sriti No 20 G, Demangan, Yogyakarta	Eks Rumah Negara Gol II Tipe C	19.500.000
150	Bangunan	Jumeneng, Sumberadi, Mlati, Sleman	Gedung Rumah Dinas	40.932.000
151	Bangunan	Jl. Bima No. 25 C, Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Gedung Rumah Dinas, Dinas Pariwisata BA 593/07217	23.344.578
152	Bangunan	Jl Bima No. 25 B, Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Gedung Rumah Dinas	23.344.578
153	Bangunan	Jl Bima No 25 A, Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Gedung Rumah Dinas	23.344.578
154	Bangunan	Jl Bima No. 25, Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Gedung Rumah Dinas	40.019.277
155	Bangunan	Gemawang, Karangjati , Sinduadi ,Sleman	Rumah Dinas	158.875.200
156	Bangunan	Komplek Griya Permata Hijau, Juwengan, Purwomartani, Kalasan, Sleman	Eks Parsenibud	112.338.334
157	Bangunan	Komplek Colombo No. 59 Yogyakarta	Bangunan Rumah Tempat Tinggal (RTT), Dinas Sosial	36.191.000
158	Bangunan	-	Bangunan milik pemerintah	38.356.880
159	Bangunan	-	Bangunan milik pemerintah	21.283.517
160	Bangunan	-	Bangunan milik pemerintah	194.276.692
161	Bangunan	-	Bangunan milik pemerintah	19.145.790
162	Bangunan	-	Tempat Fotocopi dan kantin	39.440.000
JUMLAH				122.573.112.908

b. Kerjasama Pemanfaatan sebesar Rp608.885.649,00

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp608.885.649,00 merupakan Kerjasama Pemanfaatan aset pada BLPT-Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

c. Bangun Guna Serah sebesar Rp3.518.000.000,00

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangunan Guna Serah sebesar Rp3.518.000.000,00 merupakan aset tanah yang dikelola secara BGS oleh PT. Yogya Indah Sejahtera dengan Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan antara Pemda DIY dengan PT. Yogya Indah Sejahtera dalam Pembangunan dan Pengelolaan Malioboro Hotel di Jalan Malioboro Yogyakarta Nomor 53 tanggal 12 September 1992. Masa perjanjian selama 30 tahun dan akan berakhir Tahun 2022. Setelah perjanjian berakhir maka tanah dan bangunan Malioboro Hotel beserta fasilitasnya menjadi milik Pemda DIY.

d. Pinjam Pakai sebesar Rp178.996.294.199,00

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Pinjam Pakai sebesar Rp178.996.294.199,00 merupakan aset milik Pemda DIY yang dipinjam oleh pihak lain terdapat pada BPKA, dengan data terlampir.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

5.3.1.4.3 Aset Tidak Berwujud

Rp74.340.011.191,00

Rp118.286.569.921,00

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Daerah ditetapkan bahwa yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tak Berwujud adalah software komputer, website, lisensi dan franchise, hak cipta, paten dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang dan DED.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp74.340.011.191,00 merupakan Aset Tidak Berwujud Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.106
Rincian Aset Tidak Berwujud

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Software	31.329.775.756,00
2	Kajian	38.483.504.745,00
3	Website	1.245.281.840,00
4	Aset Tidak Berwujud Lainnya.	3.281.448.850,00
	Jumlah	74.340.011.191,00

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.107
Rincian Aset Tidak Berwujud per SKPD

No	Nama SKPD	Software (Rp)	Kajian (Rp)	Aset Tak Berwujud Lainnya (Rp)	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	4.060.814.850,00	760.059.100,00	25.250.000,00	4.846.123.950,00
2	Dinas Kesehatan	1.142.455.105,00	214.694.050,00	97.500.000,00	1.488.267.155,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	290.837.660,00	1.601.647.375,00	-	11.892.485.035,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	162.090.000,00	-	-	162.090.000,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	51.697.500,00	-	97.377.500,00	149.075.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	34.975.000,00	-	-	204.550.000,00
8	Dinas Sosial	36.966.000,00	-	-	36.966.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	150.230.000,00	-	-	150.230.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	31.850.000,00	522.412.750,00	-	662.762.750,00

**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA***ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦺꦫꦃꦢꦤꦢꦶꦩꦺꦴꦩꦶꦮꦏꦸꦫꦏꦠ*

11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	651.208.000,00	3.674.830.650,00	49.000.000,00	4.411.336.650,00
12	Dinas Perhubungan	567.129.808,00	1.586.312.500,00	-	2.153.442.308,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.177.807.500,00	-	-	6.177.807.500,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	444.494.000,00	-	89.496.000,00	533.990.000,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	341.811.000,00	1.754.179.000,00	-	2.385.119.540,00
16	Dinas Kebudayaan	3.228.521.875,00	6.905.850.700,00	1.077.063.350,00	11.378.013.425,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.280.350.022,00	117.239.440,00	1.287.935.000,00	2.685.524.462,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	376.349.500,00	81.299.000,00	78.533.000,00	668.613.500,00
19	Dinas Pariwisata	204.605.000,00	1.812.696.050,00	-	2.017.301.050,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	109.537.000,00	918.788.780,00	39.100.000,00	1.206.325.780,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	428.965.340,00	20.000.000,00	107.539.000,00	556.504.340,00
22	Sekretariat Daerah	1.486.561.910,00	917.757.000,00	-	2.404.318.910,00
23	Badan Penghubung Daerah	-	-	-	-
24	Sekretariat DPRD	412.405.245,00	519.036.200,00	79.140.000,00	1.120.433.245,00
25	Inspektorat	411.201.200,00	-	-	411.201.200,00
26	Paniradya Kaistimewan	-	-	-	-
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.991.010.625,00	6.348.103.700,00	-	9.339.114.325,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	5.110.077.816,00	579.395.000,00	209.050.000,00	5.898.522.816,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	746.166.500,00	-	-	775.416.500,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	399.657.300,00	149.203.450,00	44.465.000,00	624.475.750,00
	Jumlah	1.329.775.756,00	8.483.504.745,00	3.281.448.850,00	74.340.011.191,00

5.3.1.4.4 Aset Lain-lain**Rp177.654.783.122,10****Rp176.854.108.228,29**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Daerah ditetapkan bahwa yang termasuk dalam klasifikasi Aset Lain-lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah/ yang akan dihapus dan aset tetap dalam kondisi rusak berat.

Saldo Aset Lain-lain sebesar Rp177.654.783.122,10 berasal dari nilai perolehan Aset Lain-lain sebesar Rp192.257.646.730,49 dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp14.602.863.608,39 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.108
Rincian Nilai Buku Aset Lain-lain per SKPD



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦒꦺꦴꦩꦠꦺꦤ꧀ꦪꦺꦴꦏꦿꦏꦂꦠ

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)	Nilai Per 31-12-2018 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	6.494.061.614,20	3.662.658.224,02
2	Dinas Kesehatan	594.188.858,00	-
	RS Grhasia	-	554.233.672,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	158.716.242.424,27	158.719.355.709,27
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	458.446,00	458.446,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	150.644.077,00	149.452.077,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	74.525.000,00	-
7	Dinas Sosial	350.477.782,34	346.500.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	3.220.000,00	-
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	623.894.491,00	-
	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	-	563.449.491,00
10	Dinas Perhubungan	857.974.650,00	1.046.408.590,00
11	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	123.107.000,00	123.107.000,00
12	Dinas Kebudayaan	49.749.364,50	4.070.321.171,86
13	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	3.529.928.603,00	3.529.928.603,00
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	190.106.762,00	244.400.379,02
15	Dinas Pariwisata	34.761.000,00	-
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	129.431.678,65	-
	Dinas Pertanian	-	1.102.022.103,65
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.963.450,00	-
18	Sekretariat Daerah	8.033.341,97	175.000.000,00
19	Inspektorat	-	1.435.396.198,11
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	562.500,00	-
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	5.711.552.079,17	1.131.416.563,36
22	Badan Kepegawaian Daerah	4.900.000,00	-
	Jumlah	177.654.783.122,10	176.854.108.228,29

5.3.1.4.5 Aset Non Lancar Lainnya

Rp15.648.328.066,94

Rp10.445.563.069,94

Saldo Aset Non Lancar Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp15.648.328.066,94 merupakan Uang Jaminan terkait dengan ijin pertambangan. Aset Non Lancar Lainnya-Uang Jaminan tersebut dalam bentuk deposito dan tabungan atas nama Perusahaan Penambang qq. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM. Jaminan tersebut akan dikembalikan kepada Perusahaan Penambang apabila perjanjian penambangan telah berakhir, dan menjadi pendapatan Pemda DIY ketika Perusahaan Penambang melanggar kesepakatan yang diatur dalam perjanjian. Uang Jaminan sebesar Rp15.648.328.066,94 meliputi Jaminan Kesungguhan sebesar Rp813.685.401,00, Jaminan Reklamasi sebesar Rp8.574.210.126,76 dan Jaminan Pasca Tambang sebesar Rp6.260.432.539,18 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Palapa Kudu Wacana Kudu Muliya Wacana Wacana

Tabel 5.109

Rincian Jaminan Kesungguhan per 31 Desember 2019

BPD DIY CABANG UTAMA

No	No.Rekening	Nama Rekening	DEPOSITO	TABUNGAN	Saldo Per 31 Des 2019
1	001221031745	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CENTRAL STONE P	50.000,00	532.474,00	582.474,00
2	001311005801	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CENTRAL STONE P	3.500.000,00	-	3.500.000,00
3	001221031849	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TRIKARSA REKA B	50.000,00	420.781,00	470.781,00
4	001311005880	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TRIKARSA REKA B	3.132.000,00	-	3.132.000,00
5	001311005890	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ADINDA PUTRA P	500.000,00	-	500.000,00
6	001221031861	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT GUNUNG SEJAHTERA	50.000,00	15.546,00	34.454,00
7	001311005891	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT GUNUNG SEJAHTERA	750.000,00	-	750.000,00
8	001221031885	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KRT JAYANINGRAT	50.000,00	519.746,00	569.746,00
9	001311005915	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV RIMBA SARANA	500.000,00	-	500.000,00
10	001221031890	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SELO MANDIRI S	50.000,00	494.515,00	544.515,00
11	001221031889	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV WIDYA SEGARA K	50.000,00	294.180,00	344.180,00
12	001311005917	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KRT JAYANINGRAT	700.000,00	-	700.000,00
13	001311005919	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV WIDYA SEGARA K	2.550.000,00	-	2.550.000,00
14	001311005920	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG Q CV SELO MANDIRI S	500.000,00	-	500.000,00
15	001311005918	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KRT JAYANINGRAT	500.000,00	-	500.000,00
16	001311005926	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PETRUS JOKO LEGOWO	700.000,00	-	700.000,00
17	001311005927	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PETRUS JOKO LEGOWO	700.000,00	-	700.000,00
18	001311005934	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT HELIZA MANDIRI S	500.000,00	-	500.000,00
19	001311005943	DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ DJIDUL	500.000,00	-	500.000,00
20	001311005949	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HERI SUWARNO	500.000,00	-	500.000,00
21	001311005952	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKARDI	550.000,00	-	550.000,00
22	001311005953	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WIDAYAT	500.000,00	-	500.000,00
23	001311005956	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MITRA GRAHA D	500.000,00	-	500.000,00
24	001311005957	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUMARYANTA	500.000,00	-	500.000,00
25	001311005961	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TIRTA REJA	594.300,00	-	594.300,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெர்தாபா கரகா கரகா கரகா கரகா கரகா கரகா

No	No.Rekening	Nama Rekening	DEPOSITO	TABUNGAN	Saldo Per 31 Des 2019
26	001311005962	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SEJAHTERA INDRA P	630.000,00	-	630.000,00
27	001311005965	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ UMAR SYAMSUDIN H	550.000,00	-	550.000,00
28	001311005975	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT DAMAI MULIA P	500.000,00	-	500.000,00
29	001221031963	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT DEWATA SARI PRIMA	50.000,00	210.286,00	260.286,00
30	001311005985	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT DEWATA SARI PRIMA	500.000,00	-	500.000,00
31	001311005986	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BUKIT BATU INDAH	500.000,00	-	500.000,00
32	001311005988	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT FIRST LIME I	500.000,00	-	500.000,00
33	001311005997	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TINUS BUDIMAN	500.000,00	-	500.000,00
34	001311005998	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KUSUMA ARGA MUKTI	500.000,00	-	500.000,00
35	001311005999	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KUSUMA ARGA MUKTI	500.000,00	-	500.000,00
36	001311006000	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SUGIH ALAMANUGROH	500.000,00	-	500.000,00
37	001311006001	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV MERPATI JAYA M	500.000,00	-	500.000,00
38	001311006002	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SUGIH ALAMANUGROH	500.000,00	-	500.000,00
39	001311006003	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV EMPAT JAYA	500.000,00	-	500.000,00
40	001311006007	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ UD GUNUNG GEDE	500.000,00	-	500.000,00
41	001311006009	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV GIRI KENCANA	500.000,00	-	500.000,00
42	001311006010	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV GIRI KENCANA	500.000,00	-	500.000,00
43	001311006012	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV INTI CALCIUM I	500.000,00	-	500.000,00
44	001221032191	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BUMI KALIMASADA	50.000,00	466.139,00	516.139,00
45	001311006139	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BUMI KALIMASADA	3.500.000,00	-	3.500.000,00
46	001221032357	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PANCA MITRA BUANA	50.000,00	504.577,00	554.577,00
47	001221032358	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SIWI ARYANI	50.000,00	207.700,00	257.700,00
48	001311006205	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PANCA MITRA BUANA	3.675.000,00	-	3.675.000,00
49	001311006206	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SIWI ARYANI	2.250.000,00	-	2.250.000,00
50	001311006213	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV AJI PRATAMA	500.000,00	-	500.000,00
51	001311006264	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUBANI	500.000,00	-	500.000,00
52	001311006265	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KARYONO	500.000,00	-	500.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெர்தாபுரம் காவல் காவல் காவல் காவல் காவல் காவல் காவல்

No	No.Rekening	Nama Rekening	DEPOSITO	TABUNGAN	Saldo Per 31 Des 2019
53	001311006406	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TRIKARSA REKA B	650.000,00	-	650.000,00
54	001311006408	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUGIARTO	500.000,00	-	500.000,00
55	001311006428	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PANCA MANUNGGAL M	500.000,00	-	500.000,00
56	001221032669	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT AGUNG BARA C	50.000,00	63.606,00	113.606,00
57	001311006440	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT AGUNG BARA C	1.600.000,00	-	1.600.000,00
58	001221032788	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MATARAM CITRA P	50.000,00	349.671,00	399.671,00
59	001311006517	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MATARAM CITRA P	3.200.000,00	-	3.200.000,00
60	001221032792	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT CITRA MATARAM K	50.000,00	92.860,00	142.860,00
61	001311006520	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT CITRA MATARAM K	500.000,00	-	500.000,00
62	001221032837	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BATU PRIMA M	50.000,00	620.847,00	670.847,00
63	001311006566	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BATU PRIMA M	3.500.000,00	-	3.500.000,00
64	001311006593	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PANDU DUMADI L	500.000,00	-	500.000,00
65	001311006594	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PANDU DUMADI L	500.000,00	-	500.000,00
66	001311006632	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKARMAN	1.000.000,00	-	1.000.000,00
67	001221032886	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV JAYA REJEKI	50.000,00	511.740,00	561.740,00
68	001311006642	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV JAYA REJEKI	1.400.000,00	-	1.400.000,00
69	001221032926	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ANUGERAH S D A	50.000,00	692.538,00	742.538,00
70	001311006680	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ANUGERAH S D A	1.750.000,00	-	1.750.000,00
71	001311006700	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT DAMAI MITRA C	500.000,00	-	500.000,00
72	001221033010	DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TUNAS MEKAR	50.000,00	61.409,00	111.409,00
73	001311006709	DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TUNAS MEKAR	650.000,00	-	650.000,00
74	001311006710	DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TUNAS MEKAR	700.000,00	-	700.000,00
75	001221033020	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SELO ARTO WIGUNO	50.000,00	87.420,00	137.420,00
76	001311006713	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SELO ARTO WIGUNO	650.000,00	-	650.000,00
77	001311006714	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SELO ARTO WIGUNO	850.000,00	-	850.000,00
78	001221033179	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GOTSA RANGGA K	100.000,00	54.336,00	45.664,00
79	001311006827	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GOTSA RANGGA K	500.000,00	-	500.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெர்தாபுரம் காவல் காவல் காவல் காவல் காவல் காவல் காவல்

No	No.Rekening	Nama Rekening	DEPOSITO	TABUNGAN	Saldo Per 31 Des 2019
80	001221033236	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ JUMARI	100.000,00	78.472,00	21.528,00
81	001221033239	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV GUNUNG MULIA	100.000,00	98.591,00	1.409,00
82	001311006854	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ JUMARI	500.000,00	-	500.000,00
83	001311006858	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV GUNUNG MULIA	700.000,00	-	700.000,00
84	001311006859	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GOTSANG RANGGA K	500.000,00	-	500.000,00
85	001311006862	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUMANTO	500.000,00	-	500.000,00
86	001311006863	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WALIDI	500.000,00	-	500.000,00
87	001311006899	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUPRPTO	500.000,00	-	500.000,00
88	001221033274	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ RATMI SETYO HADI	100.000,00	617.379,00	717.379,00
89	001311006904	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ RATMI SETYO HADI	500.000,00	-	500.000,00
90	001311006915	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SISWO HADI SUTRISNO	500.000,00	-	500.000,00
91	001221033303	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PURWANTO	100.000,00	67.491,00	32.509,00
92	001311006942	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PURWANTO	500.000,00	-	500.000,00
93	001221033324	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASMARASENA	100.000,00	438.730,00	538.730,00
94	001311006964	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASMARASENA	500.000,00	-	500.000,00
95	001221033328	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KALI KUNING K	100.000,00	9.160,00	109.160,00
96	001311006969	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KALI KUNING K	700.000,00	-	700.000,00
97	001221033342	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT CAKRA WIJAYA K	100.000,00	797.737,00	897.737,00
98	001311006985	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT CAKRA WIJAYA K	3.250.000,00	-	3.250.000,00
99	001311006986	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT CAKRA WIJAYA K	3.500.000,00	-	3.500.000,00
100	001221033345	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MARALAUT SAMUDRA	100.000,00	575.593,00	675.593,00
101	001311006994	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MARALAUT SAMUDRA	1.500.000,00	-	1.500.000,00
102	001311006995	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MARALAUT SAMUDRA	3.500.000,00	-	3.500.000,00
103	001311007006	DINAS PUP ESDM JAMSUNG QQ CV PUSANG KEMBAR	500.000,00	-	500.000,00
104	001311007007	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KALI KUNING K	700.000,00	-	700.000,00
105	001221033354	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ERNAWAN FAUZY	100.000,00	95.052,00	4.948,00
106	001311007010	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ERNAWAN FAUZY	700.000,00	-	700.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெர்தாஹா காவகா காவகா காவகா காவகா காவகா

No	No.Rekening	Nama Rekening	DEPOSITO	TABUNGAN	Saldo Per 31 Des 2019
107	001221033357	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KENCONO BUWONO	100.000,00	185.658,00	285.658,00
108	001311007014	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KENCONO BUWONO	2.500.000,00	-	2.500.000,00
109	001221033371	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ NGADIMIN	100.000,00	94.363,00	5.637,00
110	001311007029	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ NGADIMIN	500.000,00	-	500.000,00
111	001221033384	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ JULIUS ADI SAPUTRA	100.000,00	61.495,00	161.495,00
112	001311007046	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASDIE FITRI NUGROHO	500.000,00	-	500.000,00
113	001311007047	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ JULIUS ADI SAPUTRA	1.750.000,00	-	1.750.000,00
114	001311007056	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KELOMPOK SIDO KOPEN	650.000,00	-	650.000,00
115	001221033415	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT TIRTA MULYA S	100.000,00	75.406,00	24.594,00
116	001221033416	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV MITRA BANGKIT S	100.000,00	75.406,00	24.594,00
117	001221033417	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG RATMAKA Y	100.000,00	75.406,00	24.594,00
118	001311007071	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT TIRTA MULYA S	500.000,00	-	500.000,00
119	001311007072	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV MITRA BANGKIT S	500.000,00	-	500.000,00
120	001311007073	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG RATMAKA Y	500.000,00	-	500.000,00
121	001311007094	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CAKRAWALA G S	500.000,00	-	500.000,00
122	001311007097	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BAROKAH SUMBER R	500.000,00	-	500.000,00
123	001311007098	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KALI OPAK S	500.000,00	-	500.000,00
124	001221033559	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKARJA	100.000,00	244.104,00	344.104,00
125	001311007104	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKARJA	2.930.000,00	-	2.930.000,00
126	001311007114	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUSILA HARI	500.000,00	-	500.000,00
127	001221033590	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PUTRA DIAFAN JAYA	100.000,00	118.402,00	218.402,00
128	001311007126	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PUTRA DIAFAN JAYA	2.100.000,00	-	2.100.000,00
129	001311007131	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT GUNUNG SEJAHTERA	650.000,00	-	650.000,00
130	001311007149	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ANDES LEO PURNAMA	600.000,00	-	600.000,00
131	001311007156	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV JAYA REJEKI	3.350.000,00	-	3.350.000,00
132	001221033694	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SAWALA C	100.000,00	9.403,00	90.597,00
133	001311007210	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SAWALA C	650.000,00	-	650.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெர்தாபுரம் காவல் காவல் காவல் காவல் காவல் காவல் காவல்

No	No.Rekening	Nama Rekening	DEPOSITO	TABUNGAN	Saldo Per 31 Des 2019
134	001311007211	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SAWALA C	650.000,00	-	650.000,00
135	001311007229	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HARTOYO	500.000,00	-	500.000,00
136	001221033812	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SAHABAT SEJAHTERA	100.000,00	363.275,00	463.275,00
137	001221033813	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SARANA JAYA M	100.000,00	521.745,00	621.745,00
138	001221033814	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SARI MULIA	100.000,00	458.435,00	558.435,00
139	001311007234	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SAHABAT SEJAHTERA	500.000,00	-	500.000,00
140	001311007235	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SARANA JAYA M	500.000,00	-	500.000,00
141	001311007236	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SARI MULIA	500.000,00	-	500.000,00
142	001311007240	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MAJU MANUNGGAL A	500.000,00	-	500.000,00
143	001311007241	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ RUDHI HARSONO	500.000,00	-	500.000,00
144	001221033840	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BUMI MATARAM	100.000,00	475.266,00	575.266,00
145	001311007244	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TUMPU HARAPAN	500.000,00	-	500.000,00
146	001311007245	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BUMI MATARAM	500.000,00	-	500.000,00
147	001221033857	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HARIYADI	100.000,00	169.063,00	269.063,00
148	001311007262	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HARIYADI	2.600.000,00	-	2.600.000,00
149	001221033947	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SARI BHUMI K	100.000,00	224.415,00	324.415,00
150	001311007337	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SARI BHUMI K	2.350.000,00	-	2.350.000,00
151	001221033971	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SAWAL RIYANDOKO	100.000,00	441.097,00	541.097,00
152	001311007364	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SAWAL RIYANDOKO	924.000,00	-	924.000,00
153	001221033982	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KARYONO	100.000,00	478.915,00	578.915,00
154	001311007372	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KARYONO	500.000,00	-	500.000,00
155	001221033987	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SURADAL	100.000,00	442.240,00	542.240,00
156	001311007379	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SURADAL	500.000,00	-	500.000,00
157	001311007412	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KARYONO	4.500.000,00	-	4.500.000,00
158	001221034092	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GATOT SUBANDI	100.000,00	460.851,00	560.851,00
159	001221034091	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SUKAJAYA SARANA	100.000,00	460.851,00	560.851,00
160	001311007454	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SUKAJAYA SARANA	5.000.000,00	-	5.000.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

No	No.Rekening	Nama Rekening	DEPOSITO	TABUNGAN	Saldo Per 31 Des 2019
161	001311007456	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GATOT SUBANDI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
162	001221034104	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TRI AGUS ANTORO	100.000,00	460.839,00	560.839,00
163	001311007457	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TRI AGUS ANTORO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
164	001221034141	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ERFAN PRABOWO	100.000,00	460.828,00	560.828,00
165	001221034140	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YOHAN SCORPHY ASMARA	100.000,00	460.828,00	560.828,00
166	001311007461	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YOHAN SCORPHY ASMARA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
167	001311007463	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ERFAN PRABOWO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
168	001221034205	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DESTI PUJILESTARI RR	100.000,00	594.184,00	694.184,00
169	001311007475	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DESTI PUJILESTARI RR	5.000.000,00	-	5.000.000,00
170	001311007479	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SARANA JAYA M	5.000.000,00	-	5.000.000,00
171	001221034212	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARMIAT YELI FIRNADI	100.000,00	465.811,00	565.811,00
172	001311007481	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARMIAT YELI FIRNADI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
173	001311007484	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KRT JAYANINGRAT	5.000.000,00	-	5.000.000,00
174	001221034259	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KAYON	100.000,00	811.248,00	911.248,00
175	001221034260	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV MAJU MAPAN S	100.000,00	605.006,00	705.006,00
176	001221034261	DINAS PUP ESDM DIY QQ DRS. H. MULYONO JAMSUNG	100.000,00	811.305,00	911.305,00
177	001311007521	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ANUGERAH S D A	5.000.000,00	-	5.000.000,00
178	001311007522	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KAYON	5.000.000,00	-	5.000.000,00
179	001311007523	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV MAJU MAPAN S	5.000.000,00	-	5.000.000,00
180	001311007524	DINAS PUP ESDM DIY QQ DRS. H. MULYONO JAMSUNG	5.000.000,00	-	5.000.000,00
181	001311007525	DINAS PUP ESDM DIY QQ DRS. H. MULYONO JAMSUNG	5.000.000,00	-	5.000.000,00
182	001221034284	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASDIE FITRI NUGROHO	100.000,00	442.636,00	542.636,00
183	001221034282	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAAD SUDYARTO	100.000,00	442.636,00	542.636,00
184	001311007539	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAAD SUDYARTO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
185	001311007540	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASDIE FITRI NUGROHO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
186	001221034288	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GALANG PRAYEDHA	100.000,00	442.623,00	542.623,00
187	001311007544	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GALANG PRAYEDHA	5.000.000,00	-	5.000.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦤꦶꦢꦤ꧀ꦢꦼꦫꦤ꧀ꦢꦼꦫꦤ꧀ꦠꦶꦱꦠꦼꦩꦮꦪꦏꦂꦠ

No	No.Rekening	Nama Rekening	DEPOSITO	TABUNGAN	Saldo Per 31 Des 2019
188	001311007553	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KAYON	5.000.000,00	-	5.000.000,00
189	001311007564	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SURADAL	4.500.000,00	-	4.500.000,00
190	001311007571	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SAWAL RIYANDOKO	4.076.000,00	-	4.076.000,00
191	001221034339	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YUNI MARWANTO	100.000,00	426.635,00	526.635,00
192	001311007581	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YUNI MARWANTO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
193	001221034359	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CAHAYA INDRA L	100.000,00	424.465,00	524.465,00
194	001311007606	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CAHAYA INDRA L	5.000.000,00	-	5.000.000,00
195	001311007609	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BUMI MATARAM	5.000.000,00	-	5.000.000,00
196	001221034365	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WISNU SUBIANTO	100.000,00	424.433,00	524.433,00
197	001311007613	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WISNU SUBIANTO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
198	001221034380	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ LUSIUS WIDIYANA	100.000,00	429.425,00	529.425,00
199	001311007630	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ LUSIUS WIDIYANA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
200	001221034392	DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. SAHABAT OSCAR U	100.000,00	692.056,00	792.056,00
201	001311007647	DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. SAHABAT OSCAR U	5.000.000,00	-	5.000.000,00
202	001221034400	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG SETYOKO	100.000,00	429.298,00	529.298,00
203	001311007661	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG SETYOKO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
204	001221034448	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG SUPROBO	100.000,00	408.403,00	508.403,00
205	001311007671	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG SUPROBO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
206	001311007719	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASMARA SENA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
207	001311007743	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG Q CV SELO MANDIRI S	5.000.000,00	-	5.000.000,00
208	001221034625	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CINTIA DEWATA M	100.000,00	390.260,00	490.260,00
209	001311007748	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CINTIA DEWATA M	5.000.000,00	-	5.000.000,00
210	001221034632	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WAHID MUSTOFA	100.000,00	390.247,00	490.247,00
211	001311007757	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WAHID MUSTOFA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
212	001221034640	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SARDI	100.000,00	390.221,00	490.221,00
213	001311007772	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SARDI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
214	001311007830	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SARI MULIA	5.000.000,00	-	5.000.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦤ꧀ꦢꦒꦫꦶꦠꦺꦩꦼꦮꦫꦠꦏꦠꦤ꧀ꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

No	No.Rekening	Nama Rekening	DEPOSITO	TABUNGAN	Saldo Per 31 Des 2019
215	001221034740	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DWI LAKSONO	100.000,00	546.982,00	646.982,00
216	001311007833	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DWI LAKSONO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
217	001221034751	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BERKAH PUTRA MAJU	100.000,00	369.863,00	469.863,00
218	001311007841	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BERKAH PUTRA MAJU	5.000.000,00	-	5.000.000,00
219	001221034759	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DONI BIMO SAPTOTO	100.000,00	369.848,00	469.848,00
220	001221034758	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TAMBANG JAYTRASS I	100.000,00	369.848,00	469.848,00
221	001311007844	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TAMBANG JAYTRASS I	5.000.000,00	-	5.000.000,00
222	001311007845	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DONI BIMO SAPTOTO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
223	001221034789	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KULONPROGO BUMI S	100.000,00	374.866,00	474.866,00
224	001311007863	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KULONPROGO BUMI S	5.000.000,00	-	5.000.000,00
225	001221034804	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV HATAM	100.000,00	637.564,00	737.564,00
226	001311007875	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV HATAM	5.000.000,00	-	5.000.000,00
227	001221034838	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CAHAYA	100.000,00	353.813,00	453.813,00
228	001311007896	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CAHAYA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
229	001221034848	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DAVID OKTA NUGRAHA	100.000,00	353.803,00	453.803,00
230	001311007902	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DAVID OKTA NUGRAHA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
231	001221034927	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARI EDI PAMBUDI	100.000,00	358.675,00	458.675,00
232	001311007952	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARI EDI PAMBUDI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
233	001311007982	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TITO YUNANTO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
234	001221034940	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TITO YUNANTO	100.000,00	337.794,00	437.794,00
235	001221035072	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ANDI PATOTORI A	100.000,00	625.783,00	725.783,00
236	001311008020	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ANDI PATOTORI A	5.000.000,00	-	5.000.000,00
237	001311008021	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ANDI PATOTORI A	5.000.000,00	-	5.000.000,00
238	001221035237	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. WATULANWEDHI	100.000,00	526.087,00	626.087,00
239	001221035238	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT TUNGGUL JAYA	100.000,00	342.612,00	442.612,00
240	001311008076	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SAHABAT SEJAHTERA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
241	001311008077	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. WATULANWEDHI	5.000.000,00	-	5.000.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦿꦶꦠꦫꦤ꧀ ꦢꦫꦺꦃꦢꦫꦺꦃꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦏꦼꦩꦫꦠ

No	No.Rekening	Nama Rekening	DEPOSITO	TABUNGAN	Saldo Per 31 Des 2019
242	001311008078	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT TUNGGUL JAYA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
243	001221035251	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV NDEREK LANGKUNG	100.000,00	342.606,00	442.606,00
244	001221035256	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TRIYANDI MULKAN	100.000,00	342.606,00	442.606,00
245	001311008080	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV NDEREK LANGKUNG	5.000.000,00	-	5.000.000,00
246	001311008082	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TRIYANDI MULKAN	5.000.000,00	-	5.000.000,00
247	001221035261	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. ALAM CAHAYA K	100.000,00	342.598,00	442.598,00
248	001311008084	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. ALAM CAHAYA K	5.000.000,00	-	5.000.000,00
249	001221035304	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUBANAR HARIMURTI	100.000,00	321.679,00	421.679,00
250	001311008103	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUBANAR HARIMURTI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
251	001221035313	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ALOYSIUS YUNIARTO	100.000,00	321.669,00	421.669,00
252	001221035314	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PETRUS CANISIUS APRI	100.000,00	321.669,00	421.669,00
253	001221035316	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SANTOSO TRI HARJONO	100.000,00	597.198,00	697.198,00
254	001311008112	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ALOYSIUS YUNIARTO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
255	001311008113	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PETRUS CANISIUS APRI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
256	001311008114	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SANTOSO TRI HARJONO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
257	001311008115	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SANTOSO TRI HARJONO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
258	001221035340	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BUDI UTOMO	100.000,00	321.614,00	421.614,00
259	001311008125	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BUDI UTOMO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
260	001221035392	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ AHMAD SHOKHEH	100.000,00	326.586,00	426.586,00
261	001311008155	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ AHMAD SHOKHEH	5.000.000,00	-	5.000.000,00
262	001221035438	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARIS YULIANTO	100.000,00	305.567,00	405.567,00
263	001311008191	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARIS YULIANTO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
264	001221035443	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YOYON SETIAWAN	100.000,00	305.541,00	405.541,00
265	001311008199	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YOYON SETIAWAN	5.000.000,00	-	5.000.000,00
266	001221035448	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKIJATMO	100.000,00	310.581,00	410.581,00
267	001311008208	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKIJATMO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
268	001221035451	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HM SLAMET RAHARJO	100.000,00	573.516,00	673.516,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

No	No.Rekening	Nama Rekening	DEPOSITO	TABUNGAN	Saldo Per 31 Des 2019
269	001311008218	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HM SLAMET RAHARJO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
270	001311008219	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HM SLAMET RAHARJO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
271	001221035481	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ EDY DJUNARKO	100.000,00	310.533,00	410.533,00
272	001221035480	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TUGIYONO	100.000,00	310.533,00	410.533,00
273	001311008227	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TUGIYONO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
274	001311008228	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ EDY DJUNARKO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
275	001221035486	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUJANMO	100.000,00	573.463,00	673.463,00
276	001311008233	DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. SAHABAT OSCAR U	5.000.000,00	-	5.000.000,00
277	001311008234	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV HATAM	5.000.000,00	-	5.000.000,00
278	001311008236	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUJANMO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
279	001311008237	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUJANMO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
280	001221035498	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ MUJIYONO	100.000,00	310.521,00	410.521,00
281	001311008239	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ MUJIYONO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
282	001221035515	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ FIRMAN ARDESTA P	100.000,00	289.648,00	389.648,00
283	001221035514	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YUNI ASTUTI	100.000,00	289.648,00	389.648,00
284	001311008246	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YUNI ASTUTI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
285	001311008247	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ FIRMAN ARDESTA P	5.000.000,00	-	5.000.000,00
286	001221035533	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PUTRA POTROGATEN	100.000,00	289.627,00	389.627,00
287	001311008254	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PUTRA POTROGATEN	5.000.000,00	-	5.000.000,00
288	001221035604	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PURYADI	100.000,00	294.540,00	394.540,00
289	001311008312	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PURYADI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
290	001221035673	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TITIM DWI SISWANTI	100.000,00	273.513,00	373.513,00
291	001311008355	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TITIM DWI SISWANTI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
292	001221035679	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT ARDIANTO KARYA M	100.000,00	437.004,00	537.004,00
293	001311008357	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT ARDIANTO KARYA M	5.000.000,00	-	5.000.000,00
294	001221035685	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ANUGRAH BAGAS W	100.000,00	278.531,00	378.531,00
295	001311008363	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ANUGRAH BAGAS W	5.000.000,00	-	5.000.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெர்தா காவலகம் காவலகம் காவலகம் காவலகம் காவலகம்

No	No.Rekening	Nama Rekening	DEPOSITO	TABUNGAN	Saldo Per 31 Des 2019
296	001221035740	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ IRFAN NUGROHO	100.000,00	437.217,00	537.217,00
297	001221035742	DINAS PUP ESDM JAMSUNG QQ PT. LINTANG BUMI S	100.000,00	278.441,00	378.441,00
298	001311008380	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ IRFAN NUGROHO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
299	001311008381	DINAS PUP ESDM JAMSUNG QQ PT. LINTANG BUMI S	5.000.000,00	-	5.000.000,00
300	001221035755	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. REKA TATA MEDIA	100.000,00	257.578,00	357.578,00
301	001311008392	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. REKA TATA MEDIA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
302	001221035768	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HERU ISWADI	100.000,00	257.551,00	357.551,00
303	001221035770	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PRAMUDYA AFGANI	100.000,00	257.551,00	357.551,00
304	001311008402	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HERU ISWADI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
305	001311008404	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PRAMUDYA AFGANI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
306	001221035792	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MALEKO	100.000,00	262.469,00	362.469,00
307	001311008423	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MALEKO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
308	001221035816	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG KRISMIYANTA	100.000,00	241.587,00	341.587,00
309	001311008436	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG KRISMIYANTA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
310	001221035819	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ EKO SANTOSO	100.000,00	241.577,00	341.577,00
311	001311008439	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ EKO SANTOSO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
312	001221035877	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DARUWAN NURHIDAYAT	100.000,00	459.241,00	559.241,00
313	001311008492	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DARUWAN NURHIDAYAT	5.000.000,00	-	5.000.000,00
314	001311008493	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DARUWAN NURHIDAYAT	5.000.000,00	-	5.000.000,00
315	001311008494	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ RATMI SETYO HADI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
316	001221035888	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SEHAT SEHAT S	100.000,00	246.458,00	346.458,00
317	001311008501	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SEHAT SEHAT S	5.000.000,00	-	5.000.000,00
318	001221036069	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV RISKY MANUNGGAL	100.000,00	403.744,00	503.744,00
319	001311008597	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV RISKY MANUNGGAL	5.000.000,00	-	5.000.000,00
320	001311008598	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV RISKY MANUNGGAL	5.000.000,00	-	5.000.000,00
321	001311008667	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YULI RAHMAD WIDADA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
322	001221036135	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YULI RAHMAD WIDADA	100.000,00	201.579,00	301.579,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெர்தாபுரதா கரதா கரதாபுரதாபுரதாபுரதா

No	No.Rekening	Nama Rekening	DEPOSITO	TABUNGAN	Saldo Per 31 Des 2019
323	001311008671	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DWI LAKSONO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
324	001221036248	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUTANTO	100.000,00	180.618,00	280.618,00
325	001311008715	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUTANTO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
326	001221036260	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KRESNA BHARA PUTR	100.000,00	187.118,00	287.118,00
327	001311008726	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV MAJU MAPAN S	5.000.000,00	-	5.000.000,00
328	001311008727	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KRESNA BHARA PUTR	5.000.000,00	-	5.000.000,00
329	001221036444	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GIYOTO WIRANTO	100.000,00	166.187,00	266.187,00
330	001311008763	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GIYOTO WIRANTO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
331	001221036507	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TUNAS AGRAPANA S	100.000,00	151.802,00	251.802,00
332	001221036508	DINAS PUP ESDM DIY QQ PT. GEO PRIMA PERSADA JAMSUNG	100.000,00	151.802,00	251.802,00
333	001311008808	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. TUNAS AGRAPANA SENTOSA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
334	001311008809	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. GEO PRIMA PERSADA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
335	001221036648	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. HARTAMA MAKMUR A	100.000,00	158.217,00	258.217,00
336	001311008871	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. HARTAMA MAKMUR ABADI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
337	001221036737	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BAHTERA USAHA SEJ	100.000,00	143.843,00	243.843,00
338	001221036733	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV EMPAT JAYA	100.000,00	143.843,00	243.843,00
339	001221036735	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KUSUMA ARGA MUKTI	100.000,00	160.527,00	260.527,00
340	001311008910	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. EMPAT JAYA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
341	001311008911	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. KUSUMA ARGA MUKTI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
342	001311008912	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. BAHTERA USAHA SEJATI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
343	001311008925	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. DEWATA SARI PRIMA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
344	001221036756	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV GRAHA SEJAHTERA	100.000,00	143.811,00	243.811,00
345	001311338925	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. GRAHA SEJAHTERA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
346	001221036899	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT CAKRAWALA SEMESTA	100.000,00	108.541,00	208.541,00
347	001311009018	DINAS PUP ESDM DIY QQ PT. CAKRAWALA SEMESTA JAMSUNG	5.000.000,00	-	5.000.000,00
348	001221036935	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KENCANA JAYA	100.000,00	115.017,00	215.017,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெர்தாபுரம் காவல் காவல் காவல் காவல் காவல் காவல் காவல்

No	No.Rekening	Nama Rekening	DEPOSITO	TABUNGAN	Saldo Per 31 Des 2019
349	001311009047	DINAS PUP ESDM DIY QQ CV. KENCANA JAYA JAMSUNG	5.000.000,00	-	5.000.000,00
350	001221036942	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ADINDA PUTRA P	100.000,00	115.005,00	215.005,00
351	001311009051	DINAS PUP ESDM DIY QQ CV. ADINDA PUTRA PERKASA JAMSUNG	5.000.000,00	-	5.000.000,00
352	001221036951	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV WALUYO LESTARI	100.000,00	94.158,00	194.158,00
353	001221036952	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT GAWI MAJU KARSA	100.000,00	94.158,00	194.158,00
354	001311009064	DINAS PUP ESDM DIY QQ CV. WALUYO LESTARI JAMSUNG	5.000.000,00	-	5.000.000,00
355	001311339065	DINAS PUP ESDM DIY QQ PT. GAWI MAJU KARSA JAMSUNG	5.000.000,00	-	5.000.000,00
356	001221036974	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. GERBANG MENOREH	100.000,00	94.140,00	194.140,00
357	001221036976	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SEDEKAH BUMI P M	100.000,00	94.140,00	194.140,00
358	001311009083	DINAS PUP ESDM DIY QQ PT. GERBANG MENOREH JAMSUNG	5.000.000,00	-	5.000.000,00
359	001311009083	DINAS PUP ESDM DIY QQ PT. SEDEKAH BUMI PUTRA MANDIRI JAMSUNG	5.000.000,00	-	5.000.000,00
360	001221036978	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT ARSA KAYANA PROGO	100.000,00	94.139,00	194.139,00
361	001221036979	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SUGIH ALAMANUGROH	100.000,00	94.139,00	194.139,00
362	001311009089	DINAS PUP ESDM DIY QQ PT ARSA KAYANA PROGO JAMSUNG	5.000.000,00	-	5.000.000,00
363	001311009092	DINAS PUP ESDM DIY QQ PT SUGIH ALAM ANUGROHO JAMSUNG	5.000.000,00	-	5.000.000,00
364	001221036986	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ EDY MULYANTO	100.000,00	100.652,00	200.652,00
365	001311009094	DINAS PUP ESDM DIY QQ EDY MULYANTO JAMSUNG	5.000.000,00	-	5.000.000,00
366	001311009250	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV LEMBAH PROGO MULYO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
367	001221037310	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV LEMBAH PROGO MULYO	100.000,00	75.969,00	175.969,00
368	001311009271	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ADIA BIMALA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
369	001221037334	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ADIA BIMALA	100.000,00	50.957,00	150.957,00
370	001311009303	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT CITRA MATARAM K	5.000.000,00	-	5.000.000,00
371	001311009320	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BALANGAN CITRA MANDIRI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
372	001221037420	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BALANGAN CITRA MANDIRI	100.000,00	36.579,00	136.579,00
373	001311009328	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV EMPAT LIMA MUDA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
374	001221037435	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV EMPAT LIMA MUDA	100.000,00	43.085,00	143.085,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

No	No.Rekening	Nama Rekening	DEPOSITO	TABUNGAN	Saldo Per 31 Des 2019
375	001311009329	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MULTINTES	5.000.000,00	-	5.000.000,00
376	001221037436	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MULTINTES	100.000,00	43.083,00	143.083,00
377	001311009382	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV LEMBAH PROGO MULYO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
378	001311009404	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT WAHYU ALAM PURNAMA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
379	001221037516	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT WAHYU ALAM PURNAMA	100.000,00	24.533,00	124.533,00
380	001311009420	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PASI DANADIPA GAJENDRA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
381	001221037541	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PASI DANADIPA GAJENDRA	100.000,00	7.858,00	107.858,00
382	001311009443	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PROGO JAYA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
383	001221037594	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PROGO JAYA	100.000,00	14.343,00	114.343,00
384	001311009472	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV HIDAKA PUTRA JAYA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
385	001221037660	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV HIDAKA PUTRA JAYA	100.000,00	6.500,00	93.500,00
386	001311009495	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT WAHYU ALAM PURNAMA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
387	001221037660	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV DEANDELS INDONESIA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
388	001221037701	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV DEANDELS INDONESIA	100.000,00	-	100.000,00
		JUMLAH	769.961.300,00	43.724.101,00	813.685.401,00

Tabel 5.110
Rincian Jaminan Reklamasi per 31 Desember 2019

BPD DIY CABANG WATES					
No	Nomor Rekening	Nama Rekening	DEPOSITO	TABUNGAN	Saldo Per 31 Des 2019
1	003.211.013076	Dinas PUP ESDM QQ UD. Putra Diafan Jaminan Reklamasi	4.374.875,00	4.214.065,00	8.588.940,00
2	003.311.001635	Dinas PUP ESDM QQ UD. Putra Diafan Jaminan Reklamasi	40.100.000,00	-	40.100.000,00
		JUMLAH	44.474.875,00	4.214.065,00	48.688.940,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

BANK PASAR					
No	Nomor Rekening	Nama Rekening	DEPOSITO	TABUNGAN	Saldo Per 31 Des 2019
1	4822/X/D/12/00	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. DEWATA BUMI NUSANTARA	44.670.000,00	-	44.670.000,00
2	4900/XI/D/12/00	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV. CIPTA JAYA SAKTI	43.700.000,00	-	43.700.000,00
3	4912/XII/D/12/00	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. HARMAK INDONESIA	50.040.000,00	-	50.040.000,00
4	5227/V/D/13/118	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.BEDJOE OETOMO-KISIK	18.690.000,00	-	18.690.000,00
5	5754/III/D/14/29	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.HANDIKA KARYA	150.700.000,00	-	150.700.000,00
6	6195/VIII/D/14/123	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.LAJU JAYA SAKTI	51.200.000,00	-	51.200.000,00
7	6375/IX/D/14/29	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.ELLYTA KARYA PRATAMA	51.500.000,00	-	51.500.000,00
8	650.601.029.861	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. MINERAL DAYA GEMILANG	5.945.203,00	9.734.511,00	15.679.714,00
9	650.601.030.367	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. DEWATA BUMI NUSANTARA	14.152.839,00	9.094.570,00	23.247.409,00
10	650.601.030.579	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV. CIPTA JAYA SAKTI	13.397.378,00	8.830.534,00	22.227.912,00
11	650.601.030.602	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. HARMAK INDONESIA	15.294.485,00	9.833.432,00	25.127.917,00
12	650.601.031.380	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.BEDJOE OETOMO-KISIK	5.119.563,00	8.650.148,00	13.769.711,00
13	650.601.032.864	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.HANDIKA KARYA	33.292.717,00	55.123.591,00	88.416.308,00
14	650.601.035.097	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.LAJU JAYA SAKTI	9.909.204,00	9.711.690,00	19.620.894,00
15	650.601.035.425	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.ELLYTA KARYA PRATAMA	9.191.965,00	10.020.099,00	19.212.064,00
16	9832/VIID/17/135	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. MINERAL DAYA GEMILANG	92.000.000,00	-	92.000.000,00
		JUMLAH	608.803.354,00	120.998.575,00	729.801.929,00

BNI TRIKORA					
No	Nomor Rekening	Nama Rekening	DEPOSITO	TABUNGAN	Saldo Per 31 Des 2019
1	0710409108	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Desti Pujilestari	80.000.000,00	4.694.249,00	84.694.249,00
2	0711289528	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Bangun Adhi Prasodjo	38.300.000,00	2.247.365,00	40.547.365,00
3	0717680389	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Ghozin Asrori	39.100.000,00	2.168.134,00	41.268.134,00
4	0720074133	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ R KHOIRUDIN	75.500.000,00	3.951.464,00	79.451.464,00
5	0723918871	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV TIRTA REJA	41.100.000,00	2.151.057,00	43.251.057,00
6	0725673406	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BAMBANG RATMAKA YULIANTA	84.100.000,00	4.401.565,00	88.501.565,00
7	0733051871	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ SUKARTIJO	52.600.000,00	2.584.212,00	55.184.212,00
8	0739192045	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV AJI PRATAMA	69.350.000,00	3.407.133,00	72.757.133,00
9	0751120551	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ UD JATI PERKASA	41.100.000,00	1.887.785,00	42.987.785,00
10	0757512882	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV SURYA DARMA	120.100.000,00	5.730.012,00	125.830.012,00
11	0765207450	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV TRIKARSA REKA BUWANA	58.000.000,00	2.485.058,00	60.485.058,00
12	0768376572	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV RIMBA SARANA	13.900.000,00	551.366,00	14.451.366,00
13	0775963061	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV GIRI KENCANA	68.900.000,00	2.733.058,00	71.633.058,00
14	0779126960	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT AMERTA GIRI LESTARI	39.500.000,00	1.445.691,00	40.945.691,00
15	0795633595	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ RATMI SETYO HADI	170.700.000,00	6.353.072,00	177.053.072,00
16	0798269848	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV SENO WATU AJI	165.100.000,00	6.144.655,00	171.244.655,00
17	0799697895	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV SURYO RAGIL MANDIRI	46.000.000,00	1.393.339,00	47.393.339,00
18	0802607128	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT PASIR ALAM SEJAHTERA	62.100.000,00	1.881.006,00	63.981.006,00
19	0803709162	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ MIFTAH FARID	74.300.000,00	2.039.721,00	76.339.721,00
20	0805785619	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT BATU MULYO BERJAYA	45.900.000,00	1.260.065,00	47.160.065,00
21	0816170512	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT KALI GENDOL PERKASA	20.150.000,00	490.058,00	20.640.058,00
22	0817378837	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ASMARA SENA	65.250.000,00	1.586.921,00	66.836.921,00
23	0822179696	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV SARANA JAYA MAKMUR	39.600.000,00	843.428,00	40.443.428,00
24	0823310417	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BINZAMIN	46.300.000,00	986.129,00	47.286.129,00
25	0827790894	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ RIZKY PRATAMA PAKU DEWA	50.700.000,00	1.079.843,00	51.779.843,00
26	0828032272	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ IRFAN NUGROHO	133.900.000,00	3.171.966,00	137.071.966,00
27	0835692649	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT JAGO JAYA CEMERLANG	31.400.000,00	476.705,00	31.876.705,00
28	0828783138	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ DONNY ARDANA	23.200.000,00	421.903,00	23.621.903,00
29	0833766455	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ICHSAN HADI YULIATNO	102.900.000,00	2.080.958,00	104.980.958,00
30	0837781786	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT SURYA WATU KENCANA	105.800.000,00	1.785.898,00	107.585.898,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

BRI CABANG CIK DITIRO					
No	Nomor Rekening	Nama Rekening	SALDO PEMBUKAAN	TABUNGAN	Saldo Per 31 Des 2019
41	0029.01.015843-40-9	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Caldomill Indonesia	75.750.000,00	6.496.420,00	82.246.420,00
42	0029.01.015861-40-7	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Central Stone Perkasa	113.500.000,00	10.207.734,00	123.707.734,00
43	0029.01.015926-40-1	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV Bumi Mataram	75.500.000,00	2.717.933,00	78.217.933,00
44	0029.01.015928-40-3	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV Temon Sarana Perkasa	79.400.000,00	2.858.387,00	82.258.387,00
45	0029.01.015956-40-6	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Ngadimin	62.500.000,00	4.968.204,00	67.468.204,00
46	0029.01.015977-40-2	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV Lestari Karya	104.400.000,00	8.298.997,00	112.698.997,00
47	0029.01.015990-40-0	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Nuri	36.250.000,00	2.881.574,00	39.131.574,00
48	0029.01.015993-40-8	Dinas PUP ESDM Jamrek qq H Sukamto	32.855.000,00	2.611.688,00	35.466.688,00
49	0029.01.016036-40-3	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT Citra Mataram Konstruksi	78.900.000,00	6.271.918,00	85.171.918,00
50	0029.01.016130-40-1	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Wahyono	42.450.000,00	2.882.626,00	45.332.626,00
		JUMLAH	4.072.360.440,76	392.844.366,00	4.465.204.806,76

Tabel 5.111
Rincian Jaminan Pasca Tambang per 31 Desember 2019

BANK PASAR					
No	Nomor Rekening	Nama Rekening	DEPOSITO	TABUNGAN	Saldo Per 31 Des 2019
1	9834/VII/D/17/135	DINAS PUP ESDM JAMPASCATAMBANG QQ PT. MINERAL DAYA	7.326.000,00	-	7.326.000,00
2	11543/X/D/18/135	DINAS PUP-ESDM DIY JAMINAN PASCATAMBANG QQ CV BEDJOE	66.850.000,00	-	66.850.000,00
3	11544/X/D/18/135	DINAS PUP-ESDM DIY JAMINAN PASCATAMBANG QQ CV HANDIKA	358.929.675,00	-	358.929.675,00
		JUMLAH	433.105.675,00	-	433.105.675,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

BNI TRIKORA					
No	Nomor Rekening	Nama Rekening	DEPOSITO	TABUNGAN	Saldo Per 31 Des 2019
1	0710408820	Dinas PUP ESDM Jampas qq Desti Pujilestari	82.500.000,00	4.840.994,00	87.340.994,00
2	0711295270	Dinas PUP ESDM Jampas qq PT. Bangun Adhi Prasodjo	59.700.000,00	3.503.080,00	63.203.080,00
3	0717678733	Dinas PUP ESDM Jampas qq Ghozin asrori	52.800.000,00	2.927.810,00	55.727.810,00
4	0720073468	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ R KHOIRUDIN	67.500.000,00	3.749.948,00	71.249.948,00
5	0723921135	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV TIRTA REJA	49.400.000,00	2.585.459,00	51.985.459,00
6	0725640437	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ BAMBANG RATMAKA YULIANTA	40.500.000,00	2.119.656,00	42.619.656,00
7	0733073827	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ SUKARTIJO	52.300.000,00	2.569.469,00	54.869.469,00
8	0739194814	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV AJI PRATAMA	31.150.000,00	1.530.383,00	32.680.383,00
9	0751122219	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ UD JATI PERKASA	49.400.000,00	2.269.013,00	51.669.013,00
10	0757513943	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV SURYA DARMA	68.900.000,00	2.952.081,00	71.852.081,00
11	0765208307	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV TRIKARSA REKA BUWANA	33.000.000,00	1.413.911,00	34.413.911,00
12	0768378955	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV RIMBA SARANA	56.450.000,00	2.239.203,00	58.689.203,00
13	0775963538	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV GIRI KENCANA	56.300.000,00	2.233.255,00	58.533.255,00
14	0779127294	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT AMERTA GIRI LESTARI	154.000.000,00	6.274.184,00	160.274.184,00
15	0795634022	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ RATMI SETYO HADI	51.400.000,00	1.718.819,00	53.118.819,00
16	0798267909	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV SENO WATU AJI	165.100.000,00	6.144.655,00	171.244.655,00
17	0799698458	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV SURYO RAGIL MANDIRI	48.100.000,00	1.456.945,00	49.556.945,00
18	0802606645	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT PASIR ALAM SEJAHTERA	44.400.000,00	1.344.871,00	45.744.871,00
19	0803710098	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ MIFTAH FARID	36.200.000,00	993.780,00	37.193.780,00
20	0805786395	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT BATU MULYO BERJAYA	58.400.000,00	1.603.228,00	60.003.228,00
21	0816171469	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT KALI GENDOL PERKASA	151.950.000,00	4.110.949,00	156.060.949,00
22	0817379669	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ASMARA SENA	55.300.000,00	1.344.929,00	56.644.929,00
23	0822183080	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV SARANA JAYA MAKMUR	40.650.000,00	865.792,00	41.515.792,00
24	0823309332	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ BINZAMIN	32.300.000,00	687.945,00	32.987.945,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

25	0827790293	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ RIZKY PRATAMA PAKU DEWA	30.900.000,00	658.127,00	31.558.127,00
26	0828031675	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ IRFAN NUGROHO	94.200.000,00	2.006.337,00	96.206.337,00
27	0835691816	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT JAGO JAYA CEMERLANG	30.800.000,00	467.596,00	31.267.596,00
28	0828782442	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ DONNY ARDANA	128.900.000,00	2.606.758,00	131.506.758,00
29	0833766068	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ICHSAN HADI YULIATNO	53.300.000,00	969.289,00	54.269.289,00
30	0838015732	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT SURYA WATU KENCANA	111.700.000,00	1.885.488,00	113.585.488,00
31	0839213585	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ SUSENO	111.400.000,00	1.880.424,00	113.280.424,00
32	0841833048	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT SEMESTA INDONESIA ALAM RAYA	22.100.000,00	335.515,00	22.435.515,00
33	0858482793	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ SYACHIRUL AFIF	66.700.000,00	401.899,00	67.101.899,00
34	0860713397	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ERNAWAN FAUZI	31.800.000,00	191.609,00	31.991.609,00
35	0860830055	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ DONNY ARDANA	79.400.000,00	478.423,00	79.878.423,00
36	0869876760	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA	27.400.000,00	165.097,00	27.565.097,00
37	0864277695	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV WATULANWEDHI	74.800.000,00	450.705,00	75.250.705,00
38	0867922859	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT ARDIANTO KARYA MANDIRI	58.700.000,00	173.688,00	58.873.688,00
39	0870554162	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ JUMARI	46.900.000,00	138.772,00	47.038.772,00
40	0880136368	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ TRI ASIH DESTARI	68.500.000,00	202.684,00	68.702.684,00
41	0880139392	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ROSLAN	35.000.000,00	103.561,00	35.103.561,00
42	0896340059	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV KUSUMA ARGA MUKTI	56.300.000,00	-	56.300.000,00
43	0897832302	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ KRT JAYANINGRAT	54.100.000,00	-	54.100.000,00
44	0898048927	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ANDI PATOTORI ARISMUNANDAR	74.600.000,00	-	74.600.000,00
45	0899115463	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ANDI PATOTORI ARISMUNANDAR	70.300.000,00	-	70.300.000,00
46	0899557296	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ASDIE FITRI NUGROHO	36.000.000,00	-	36.000.000,00
		JUMLAH	2.901.500.000,00	74.596.331,00	2.976.096.331,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

BRI CABANG CIK DITIRO					
No	Nomor Rekening	Nama Rekening	DEPOSITO	TABINGAN	Saldo Per 31 Des 2019
1	0029.01.014220.40.4	Dinas PUP ESDM QQ Anang Tri Hardiyanto Jaminan Pasca Tambang	57.275.860,00	7.521.040,00	64.796.900,00
2	0029.01.014221.40.0	Dinas PUP ESDM QQ PT Gunung Sejahtera Temon Pasca Tambang	52.952.000,00	6.953.106,00	59.905.106,00
3	0029.01.014243.40.2	Dinas PUP ESDM QQ PT Jogja Parahita Utama Pasca Tambang	17.350.000,00	2.278.479,00	19.628.479,00
4	0029.01.014393.40.1	Dinas PUP ESDM QQ CV Cahaya Pasca Tambang	5.000.000,00	602.694,00	5.602.694,00
5	0029.01.014443-40.0	Dinas PUP ESDM QQ PT Hargo Willis Indonesia Pasca Tambang	36.330.000,00	4.379.420,00	40.709.420,00
6	0029.01.014413.40.5	Dinas PUP ESDM QQ CV Trikarya Pasca Tambang	11.999.100,00	1.446.274,00	13.445.374,00
7	0029.01.014471.40.3	Dinas PUP ESDM QQ PT Pasir Alam Sejahtera Pasca Tambang	7.795.000,00	939.653,00	8.734.653,00
8	0029.01.014607-40-2	Dinas PUP ESDM QQ Giarto Jaminan Pasca Tambang	95.604.600,00	12.351.314,00	107.955.914,00
9	0029.01.014823-40-6	Dinas PUP ESDM QQ PT Agung Bara Cemerlang Pasca Tambang	22.258.830,00	2.875.613,00	25.134.443,00
10	0029.01.014823-40-6	Dinas PUP ESDM QQ PT Bumi Kalimasada Jaminan Pasca Tambang	6.100.000,00	788.107,00	6.888.107,00
11	0029.01.014945-40-2	Dinas PUP ESDM QQ CV Bedjoe Oetomo Jaminan Pasca Tambang	65.935.000,00	8.517.933,00	74.452.933,00
12	0029.01.014950-40-7	Dinas PUP ESDM QQ Sumaryanta Jaminan Pasca Tambang	45.850.000,00	5.923.513,00	51.773.513,00
13	0029.01.014959-40-1	Dinas PUP ESDM QQ Suwandi Jaminan Pasca Tambang	23.065.000,00	2.979.860,00	26.044.860,00
14	0029.01.014981-40-8	Dinas PUP ESDM QQ PT Jago Jaya Cemerlang Jaminan Pasca Tambang	7.405.000,00	573.194,00	7.978.194,00
15	0029.01.015044-40-3	Dinas PUP ESDM QQ Nurdianto Jaminan Pasca Tambang	51.700.000,00	4.003.614,00	55.703.614,00
16	0029.01.015046-40-5	Dinas PUP ESDM JamPas qq Dedek Handoko	63.300.000,00	4.901.806,00	68.201.806,00
17	0029.01.015201-40-3	Dinas PUP ESDM JamPas qq H Umar Syamsudin	87.500.000,00	6.775.860,00	94.275.860,00
18	0029.01.015306-40-7	Dinas PUP ESDM JamPas qq Heri Suwarno (KUBE Sido Maju)	130.700.000,00	11.749.787,00	142.449.787,00
19	0029.01.015332-40-8	Dinas PUP ESDM Jampas qq Petrus Joko Legowo	33.800.000,00	2.617.487,00	36.417.487,00
20	0029.01.015442-40-7	Dinas PUP ESDM JamPas qq Parno	4.650.000,00	360.039,00	5.010.039,00
21	0029.01.015444-40-9	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Anindya Mitra Internasional	7.500.000,00	580.792,00	8.080.792,00
22	0029.01.015536-40-0	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Kali Gendol Perkasa	91.772.860,00	7.106.994,00	98.879.854,00
23	0029.01.015557-40-6	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Harmak Indonesia	99.553.449,00	8.123.440,00	107.676.889,00
24	0029.01.015636-40-4	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Maju Manunggal Abadi	102.648.000,00	9.513.629,00	112.161.629,00
25	0029.01.015636-40-4	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Batu Prima Mandiri	18.900.000,00	1.699.172,00	20.599.172,00
26	0029.01.015654-40-2	Dinas PUP ESDM JamPas qq Tuwuh Rusdi Wuryanto	20.850.000,00	1.874.404,00	22.724.404,00
27	0029.01.015600-40-3	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Pasir Alam Sejahtera	23.384.000,00	2.102.350,00	25.486.350,00
28	0029.01.015705-40-7	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Trikarya	35.997.300,00	2.937.226,00	38.934.526,00
29	0029.01.015707-40-9	Dinas PUP ESDM JamPas qq Aris Yulianto	40.700.000,00	3.320.913,00	44.020.913,00
30	0029.01.015721-40-3	Dinas PUP ESDM JamPas qq Purwanto	39.200.000,00	3.198.860,00	42.398.860,00
31	0029.01.015741-40-3	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Selo Mandiri Sejahtera	36.100.000,00	3.095.787,00	39.195.787,00
32	0029.01.015748-40-5	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Dewata Bumi Nusantara	75.000.000,00	6.431.880,00	81.431.880,00
33	0029.01.015758-40-0	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Muncul Karya	13.519.844,18	1.159.534,00	14.679.378,18
34	0029.01.015775-40-2	Dinas PUP ESDM JamPas qq Koperasi Petruk	130.000.000,00	11.691.680,00	141.691.680,00
35	0029.01.015793-40-0	Dinas PUP ESDM JamPas qq Muhammad Affan	19.850.000,00	1.702.360,00	21.552.360,00
36	0029.01.015801-40-7	Dinas PUP ESDM JamPas qq Sumanto	55.110.000,00	4.726.020,00	59.836.020,00
37	0029.01.015804-40-5	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Tirta Mulya Sarana	45.000.000,00	3.859.074,00	48.859.074,00
38	0029.01.015812-40-8	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Sahabat Sejahtera Group	63.850.000,00	5.475.880,00	69.325.880,00
39	0029.01.015814-40-0	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Sari Mulia	66.250.000,00	5.681.447,00	71.931.447,00
40	0029.01.015817-40-8	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Sarana Jaya Makmur	65.050.000,00	5.578.660,00	70.628.660,00
41	0029.01.015832-40-8	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Sari Bhumi Khatulistiwa	12.025.000,00	1.031.054,00	13.056.054,00
42	0029.01.015838-40-4	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Widya Segara Karya	6.250.000,00	535.820,00	6.785.820,00
43	0029.01.015844-40-5	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Caldomill Indonesia	6.281.000,00	538.447,00	6.819.447,00
44	0029.01.015862-40-3	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Central Stone Perkasa	9.500.000,00	814.680,00	10.314.680,00
45	0029.01.015930-40-0	Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Bumi Mataram	40.250.000,00	1.448.907,00	41.698.907,00
46	0029.01.015929-40-9	Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Temon Sarana Perkasa	41.210.000,00	1.483.653,00	42.693.653,00
47	0029.01.015966-40-1	Dinas PUP ESDM Jampas qq Ngadimin	46.700.000,00	1.681.333,00	48.381.333,00
48	0029.01.015976-40-6	Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Lestari Karya	194.900.000,00	15.492.862,00	210.392.862,00
49	0029.01.015991-40-6	Dinas PUP ESDM Jampas qq Nuri	44.600.000,00	3.545.376,00	48.145.376,00
50	0029.01.015992-40-2	Dinas PUP ESDM Jampas qq H Sukanto	39.200.000,00	3.115.942,00	42.315.942,00
51	0029.01.016035-40-7	Dinas PUP ESDM Jampas qq PT Citra Mataram Konstruksi	49.050.000,00	3.899.048,00	52.949.048,00
52	0029.01.016129-40-0	Dinas PUP ESDM Jampas qq Wahyono	45.250.000,00	3.072.673,00	48.322.673,00
53	002901017316408	Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Widya Segara Karya	49.950.000,00	-	49.950.000,00
54	002901017317404	Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Muncul Karya	40.600.000,00	-	40.600.000,00
55	002901017352404	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT AGUNG BARA CEMERLANG	66.800.000,00	-	66.800.000,00
56	002901017352404	Dinas PUP ESDM Jampas QQ PT Agung Bara Cemerlang	66.800.000,00	-	66.800.000,00
JUMLAH			2.636.171.843,18	215.058.690,00	2.851.230.533,18

5.3.2 **Kewajiban**

Rp41.219.264.667,61

Rp39.281.990.195,66



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦼꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦏ꧀ꦢꦼꦫꦫꦏ꧀ꦢꦶꦩꦺꦴꦪꦏꦂꦠ

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2019 sebesar Rp41.219.264.667,61 merupakan Kewajiban Jangka Pendek dengan penjelasan sebagai berikut:

5.3.2.1	<u>Kewajiban Jangka Pendek</u>	<u>Rp41.219.264.667,61</u>	<u>Rp39.281.990.195,66</u>
----------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp41.219.264.667,61 merupakan saldo Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp15.648.328.066,94, Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp4.493.192.975,67, Utang Belanja sebesar Rp3.117.387.223,00 dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp17.960.356.402,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.3.2.1.1	<u>Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</u>	<u>Rp15.648.328.066,94</u>	<u>Rp10.445.563.069,94</u>
------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2019 sebesar Rp15.648.328.066,94 merupakan Utang Jaminan yang terdiri dari Jaminan Kesungguhan sebesar Rp813.685.401,00, Jaminan Reklamasi sebesar Rp8.574.210.126,76 dan Jaminan Pasca Tambang sebesar Rp6.260.432.539,18 .

Jaminan tersebut dalam bentuk deposito dan tabungan atas nama Perusahaan Penambang qq. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM. Jaminan tersebut akan dikembalikan kepada Perusahaan Penambang apabila perjanjian penambangan telah berakhir, dan menjadi pendapatan Pemda DIY ketika Perusahaan Penambang melanggar kesepakatan yang diatur dalam perjanjian.

5.3.2.1.2	<u>Utang Bunga</u>	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>
------------------	---------------------------	----------------------	----------------------

Saldo Utang Bunga per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.

5.3.2.1.3	<u>Bagian Lancar Utang Jangka Panjang</u>	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>
------------------	--	----------------------	----------------------

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.

5.3.2.1.4	<u>Pendapatan Diterima Dimuka</u>	<u>Rp4.493.192.975,67</u>	<u>Rp4.346.132.759,72</u>
------------------	--	----------------------------------	----------------------------------

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.493.192.975,67 merupakan penerimaan pembayaran dari pihak lain kepada Pemda DIY terkait dengan pemakaian aset daerah yang tidak dipisahkan namun sampai dengan per 31 Desember 2019 belum dikonsumsi/dimanfaatkan.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.112
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per SKPD



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா குளாப நகர நிர்வாக இயக்குனரகம்

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)	Nilai Per 31-12-2018 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	6.000.000,00	-
2	Dinas Perhubungan	839.000.000,00	817.000.000,00
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	150.000,00	-
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	12.500.000,00	-
5	Dinas Pariwisata	2.708.333,33	9.208.333,33
6	Sekretariat Daerah	179.972.450,77	-
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	3.452.862.191,57	3.519.924.426,39
Jumlah		4.493.192.975,67	4.346.132.759,72

Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Perhubungan merupakan penerimaan pembayaran sewa lahan parkir Bandara Adi Sucipto dari PT. Angkasa Pura namun sampai dengan per 31 Desember 2019 belum menjadi hak Dinas Perhubungan sebesar Rp839.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Periode Sewa	Nilai Sewa	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
1	02-05-2019 s.d. 01-05-2020	102.000.000,00	01-01-2020 s.d. 01-05-2020	34.000.000,00
2	01-08-2018 s.d. 31-07-2020	1.380.000.000,00	01-01-2020 s.d. 31-07-2020	805.000.000,00
Jumlah		1.482.000.000,00		839.000.000,00

Pendapatan Diterima Dimuka pada BPKA sebesar Rp3.452.862.191,57 merupakan penerimaan sewa barang milik daerah pada BPKA dari pihak ketiga namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 belum dimanfaatkan oleh pihak penyewa dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Aset	Pihak Penyewa	Periode Sewa	Nilai Sewa (Rp)	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai (Rp)
BPKA INDUK						
1.	Tanah dan Bangunan	PT. Formula Land Jl. Dr. Sutomo No 66 Yogyakarta	01/09/2015 s.d 31/08/2016	52.900.000,00	1-1-2020 s/d 31-8-2020	51.595.890,41
			01/09/2016 s/d 31/08/2017	58.200.000,00		
			01/09/2017 s/d 31/08/2018	64.000.000,00		
			01/09/2018 s/d 31/08/2019	70.400.000,00		
			01/09/2019 s/d 31/08/2020	77.500.000,00		
2.	Bangunan	BPD DIY	01/07/2017 s.d 30/06/2022	602.500.000,00	1-1-2020 s/d 30-06-2020	59.754.794,52
			01/07/2017 s.d 30/06/2018	120.500.000,00		
			01/07/2018 s.d 30/06/2019	120.500.000,00		
			01/07/2019 s.d 30/06/2020	120.500.000,00		
			01/07/2020 s.d 30/06/2021	120.500.000,00		
			01/07/2021 s.d 30/06/2022	120.500.000,00		
3.	Tanah	PT. Selo Adi Karto	01/04/2018 s.d 31/03/2020	203.200.000,00	1-1-2020 s/d 31-03-2020	25.052.054,79
			01/04/2018 s.d 31/03/2019	101.600.000,00		



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாது டாஃரஃ இஸ்திமேவா யோக்யகார்டா

			01/04/2019 s.d 31/03/2020	101.600.000,00		
4.	Tanah dan Bangunan	Yayasan Wira Husada STIKES T/F 0274-513176	17/09/2019 s.d 16/09/2020	225.000.000,00	1-1-2020 s/d 16-9-2020	159.657.534,25
5.	Tanah	Pemdes Sumbermulyo	01/07/2019 s.d 30/06/2020 01/07/2020 s.d 31/06/2021	2.500.000,00 2.500.000,00	1-1-2020 s/d 30-6-2020	1.239.726,03
6.	Tanah dan Bangunan	BUKP Gondokusuman	01/09/2019 s.d 31/08/2022 01/09/2019 s.d 31/08/2020 01/09/2020 s.d 31/08/2021 01/09/2021 s.d 31/08/2022	60.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00	1-1-2020 s/d 31-8-2020	13.315.068,49 20.000.000,00 20.000.000,00
7.	Tanah	Yayasan Perguruan Dharma Pala Sleman Akta Notaris 26/2008 tgl 28 November 2008	20/11/2017 s.d 19/11/2021 20/11/2017 s.d 19/11/2018 20/11/2018 s.d 19/11/2019 20/11/2019 s.d 19/11/2020 20/11/2020 s.d 19/11/2021	14.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00	1-1-2020 s/d 19-11-2020	3.097.260,27 3.500.000,00
8.	Tanah	Pemkab Bantul	28/03/2019 s.d 27/03/2020	14.500.000,00	1-1-2020 s/d 27-3-2020	3.416.438,36
9.	Tanah	dr. Soedarman Jalan Di. Panjaitan No 66 Mantrijeron, Suryodiningratan, Yogyakarta	03/09/2018 s.d 02/09/2023 03/09/2018 s.d 02/09/2019 03/09/2019 s.d 02/09/2020 03/09/2020 s.d 02/09/2021 03/09/2021 s.d 02/09/2022 03/09/2022 s.d 02/09/2023	175.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00	1-1-2020 s/d 2-9-2020	23.493.150,68 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
10.	Tanah	Drs. Djuwardi KPRI Sumber Rejeki Kulon Progo	21/02/2019 s.d 20/02/2020 21/02/2020 s.d 20/02/2021	6.200.000,00 6.200.000,00 12.400.000,00	1-1-2020 s/d 20-2-2020	866.301,37 6.200.000,00
11.	Tanah dan Bangunan	Sri Andayani	01/06/2019 s.d 31/05/2020	13.300.000,00	1-1-2020 s/d 31-5-2020	5.502.191,78
12.	Tanah	PT. BUANALAND AGUNG	01/05/2019 s.d 30/04/2020	3.342.000.000,00	1-1-2020 s/d 30-4-2020	1.098.739.726,03
13.	Tanah	PT. YIS (PT. Yogya Indah Sejahtera)	01/10/2019 s.d 30/09/2020	1.505.700.000,00	1-1-2020 s/d 30-09-2020	1.126.181.095,89
14.	Tanah	Talenta Body Repair	25/03/2018 s.d 24/03/2020	50.000.000,00	1-1-2020 s/d 24-03-2020	11.369.863,01
15.	Tanah	Tien Setiantoro	25/03/2018 s.d 23/03/2020 25/03/2018 s.d 23/03/2019 25/03/2019 s.d 23/03/2020	28.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00	1-1-2020 s/d 23-03-2020	3.145.205,48
		Aris Purnomo	01/09/2019 s.d 31/08/2021 01/09/2019 s.d 31/08/2020	5.000.000,00 2.500.000,00	1-1-2020 s/d 31-8-2020	1.664.383,56 2.500.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா குடிமகன்களின் நலனை கருக்கொள்ளும் அரசாங்கம்

			01/09/2020 s.d 31/08/2021	2.500.000,00		
		Sumartiningsih	01/09/2016 s.d 31/08/2021	12.210.200,00	1-1-2020 s/d 31-8-2020	1.625.796,49
			01/09/2016 s.d 31/08/2017	2.442.040,00		2.442.040,00
			01/09/2017 s.d 31/08/2018	2.442.040,00		
			01/09/2018 s.d 31/08/2019	2.442.040,00		
			01/09/2019 s.d 31/08/2020	2.442.040,00		
			01/09/2020 s.d 31/08/2021	2.442.040,00		
		Roos Ani	01/09/2016 s.d 31/08/2021	9.157.650,00	1-1-2019 s/d 31-8-2019	1.219.347,37
			01/09/2016 s.d 31/08/2017	1.831.530,00		1.831.530,00
			01/09/2017 s.d 31/08/2018	1.831.530,00		
			01/09/2018 s.d 31/08/2019	1.831.530,00		
			01/09/2019 s.d 31/08/2020	1.831.530,00		
			01/09/2020 s.d 31/08/2021	1.831.530,00		
		Suka Astuti	01/09/2019 s.d 31/08/2021	7.200.000,00	1-1-2019 s/d 31-8-2019	2.396.712,33
			01/09/2019 s.d 31/08/2020	3.600.000,00		3.600.000,00
			01/09/2020 s.d 31/08/2021	3.600.000,00		
16.	Sebagian Tanah dan Bangunan	Badan Anti Korupsi	01/12/2018 s.d 30/11/2020	16.500.000,00	1-1-2020 s/d 30-11-2020	10.984.931,51
		Sarjuri	01/09/2019 s.d 31/08/2020	6.050.000,00	1-1-2020 s/d 31-8-2020	4.027.808,22
17.	Sebagian Tanah dan Bangunan	Ir. Bambang Priambodo	01/01/2019 s.d 31/12/2020	72.000.000,00	1-1-2020 s/d 31-12-2020	36.000.000,00
			01/01/2019 s.d 31/12/2019	36.000.000,00		
			01/01/2020 s.d 31/12/2020	36.000.000,00		
18.	Tanah	YB Pratomo	01/02/2017 s.d 31/01/2022	109.891.800,00	1-1-2020 s/d 31-1-2020	1.866.655,23
			01/02/2017 s.d 31/01/2018	21.978.360,00		21.978.360,00
			01/02/2018 s.d 31/01/2019	21.978.360,00		21.978.360,00
			01/02/2019 s.d 31/01/2020	21.978.360,00		21.978.360,00
			01/02/2020 s.d 31/01/2021	21.978.360,00		
			01/02/2021 s.d 31/01/2022	21.978.360,00		
19.	Tanah dan Bangunan (Rumah Daerah)	Aswin Kumala Darma Saputra	01/08/2019 s.d 31/07/2021	35.000.000,00	1-1-2020 s/d 31-7-2020	10.164.383,56
			01/08/2019 s.d 31/07/2020	17.500.000,00		17.500.000,00
			01/08/2020 s.d 31/07/2021	17.500.000,00		
20.	Tanah	Muhyudi Prabowo	01/01/2018 s.d 31/12/2021	3.150.000,00	1-1-2020 s/d 31-12-2020	1.050.000,00
			01/01/2018 s.d 31/12/2018	1.050.000,00		
			01/01/2019 s.d 31/12/2019	1.050.000,00		
			01/01/2020 s.d 31/12/2020	1.050.000,00		
21.	Tanah dan Bangunan	Early Childhood Care and Development Resource Center (ECCD-RC)	01/04/2016 s.d 31/03/2021	72.500.000,00	1-1-2020 s/d 31-3-2020	3.575.342,47
			01/04/2016 s.d 31/03/2017	14.500.000,00		14.500.000,00
			01/04/2017 s.d 31/03/2018	14.500.000,00		
			01/04/2018 s.d 31/03/2019	14.500.000,00		
			01/04/2019 s.d 31/03/2020	14.500.000,00		
			01/04/2020 s.d 31/03/2021	14.500.000,00		



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாழ்வாசு கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

22.	Tanah dan Bangunan	CV. Plainthing Group	08/04/2019 s.d 07/04/2021	42.000.000,00	1-1-2020 s/d 07-4-2020	5.580.821,92
			08/04/2019 s.d 07/04/2020	21.000.000,00		21.000.000,00
			08/04/2020 s.d 07/04/2021	21.000.000,00		
23.	Tanah dan Bangunan	Lembaga Konsumen Yogyakarta	01/06/2018 s.d 31/05/2021	10.600.000,00	1-1-2019 s/d 31-5-2019	1.461.735,16
			01/06/2018 s.d 31/05/2019	3.533.333,33		3.533.333,33
			01/06/2019 s.d 31/05/2020	3.533.333,33		
			01/06/2020 s.d 31/05/2021	3.533.333,33		
24.	Tanah dan Bangunan	BADKO TKA TPA	10/03/2018 s.d 09/03/2020	12.000.000,00	1-1-2020 s/d 9-3-2020	987.397,26
			10/03/2018 s.d 09/03/2019	5.300.000,00		
			10/03/2019 s.d 09/03/2020	5.300.000,00		
25.	Tanah dan Bangunan	Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Desaku (LP2 Desaku)	01/02/2019 s.d 31/01/2021	16.500.000,00	1-1-2020 s/d 31-1-2020	700.684,93
			01/02/2019 s.d 31/01/2020	8.250.000,00		8.250.000,00
			01/02/2020 s.d 31/01/2021	8.250.000,00		
26	Tanah dan Bangunan	Jl. Warung boto UH II/918 Yogyakarta	01/12/2018 s/d 30/11/2020	7.600.000,00	1-1-2020 s/d 30-11-2020	6.954.520,55
27	Tanah	Eks TKD Wates	05/07/2019 s/d 04/07/2020	256.216.741,00	1-1-2020 s/d 04-07-2020	65.984.585,35
JUMLAH						3.257.485.030,61
KPPD KULON PROGO						
1	Bangunan	PT BRI (PERSERO) Cabang Wates (ATM)	01/08/2019 s.d 31/07/2020	3.000.000,00	01/01/2020 s.d 31/07/2020	1.750.684,93
		PT BNI (PERSERO) Cabang UGM (ATM)	01/08/2019 s.d 31/07/2020	3.000.000,00	01/01/2020 s.d 31/07/2020	1.750.684,93
			01/08/2020 s.d 31/07/2021	3.000.000,00	01/08/2020 s.d 31/07/2021	3.000.000,00
		Dhanang Budi Hermanto (Fotocopy)	01/08/2019 s.d 31/07/2020	4.400.000,00	01/01/2020 s.d 31/07/2020	2.567.671,23
		CV Pandean Baru Motor (Saptono Budi Raharjo)	01/08/2019 s.d 31/07/2020	4.000.000,00	01/01/2020 s.d 31/07/2020	2.334.246,58
		Koperasi Binangun Sejati (Bagiyo Prayitno/Parkir)	01/08/2019 s.d 31/07/2020	15.520.000,00	01/01/2020 s.d 31/07/2020	9.056.876,71
		Painem (Kantin)	01/08/2019 s.d 31/07/2020	3.270.000,00	01/01/2020 s.d 31/07/2020	1.908.246,58
		PT. BANK BPD DIY Cabang Wates (Sewa Kantor Kas BPD)	01/01/2017 s.d 31/12/2021	53.750.000,00	01/01/2020 s.d 31/12/2021	21.500.000,00
PT. BANK BPD DIY Cabang Wates (ATM BPD)	01/01/2017 s.d 31/12/2021	15.000.000,00	01/01/2020 s.d 31/12/2021	6.000.000,00		
JUMLAH						49.868.410,96
KPPD SLEMAN						



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦤꦶꦢꦺꦫꦺꦢꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦏꦂꦠ

1	Bangunan	PT BPD (PERSERO) Cabang Sleman (Kantor Kas)	01/01/2019 s.d 31/12/2023	95.000.000,00	01/01/2020 s.d. 31/12/2023	76.000.000,00
		PT BPD (PERSERO) Cabang Sleman (ATM)	01/04/2019 s.d 31/03/2024	81.775.000,00	01/01/2020 s.d 31/03/2024	69.508.750,00
JUMLAH						145.508.750,00
TOTAL						.452.862.191,57

Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Pariwisata sebesar Rp2.708.333,33 merupakan penerimaan sewa sebagian bangunan pada TIC Jl. Malioboro dari Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat namun sampai dengan per 31 Desember 2019 belum menjadi hak Dinas Pariwisata DIY dengan rincian sebagai berikut:

No	Periode Sewa	Nilai Sewa	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
1	01-06-2018 s.d. 31-05-2020	19.500.000,00	01-01-2020 s.d. 31-05-2020	2.708.333,33

Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Kesehatan sebesar Rp6.000.000,00 merupakan Pemanfaatan Aset Tanah RS Grhasia, namun sampai dengan per 31 Desember 2019 belum menjadi hak RS Grhasia dengan rincian sebagai berikut:

No	Periode Sewa	Nilai Sewa	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
1	01-01-2019 s.d. 31-12-2020	12.000.000,00	01-01-2020 s.d. 31-12-2020	6.000.000,00

Pendapatan Diterima Dimuka pada pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp12.500.000,00 merupakan sewa cafe di Grahata Pustaka, namun sampai dengan per 31 Desember 2019 belum menjadi hak Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan rincian sebagai berikut:

No	Periode Sewa	Nilai Sewa	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
1	01-07-2019 s.d 30-06-2020	25.000.000,00	01-01-2020 s.d 30-06-2020	12.500.000,00

Pendapatan Diterima Dimuka pada pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp150.000,00 merupakan sewa ruangan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, namun sampai dengan per 31 Desember 2019 belum menjadi hak Dinas Komunikasi dan Informatika dengan rincian sebagai berikut:

No	Periode Sewa	Nilai Sewa	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
1	01-08-2019 s.d 31-01-2020	900.000,00	01-01-2020 s.d 31-01-2020	150.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா குவாசு கவாசு கவாசு கவாசு கவாசு கவாசு கவாசு கவாசு

Pendapatan Diterima Dimuka pada pada Sekretariat Daerah (Biro Umum) sebesar Rp179.972.451,67 merupakan Sewa basement untuk server, namun sampai dengan per 31 Desember 2019 belum menjadi hak Biro Umum dengan rincian sebagai berikut:

No	Periode Sewa	Nilai Sewa	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
1	09-05-2017 s.d 08-05-2022	275.000.000,00	01-01-2020 s.d 08-05-2022	132.916.666,67
2	28-02-2019 s.d. 08-05-2022	65.541.985,00	28-02-2020 s.d 08-05-2022	47.055.785,00
	Jumlah	340.541.985,00		179.972.451,67

5.3.2.1.5 Utang Belanja

Rp3.117.387.223,00

Rp2.694.657.266,00

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.117.387.223,00 merupakan Beban Pemda DIY atas pemakaian barang atau jasa sampai dengan 31 Desember 2019 tetapi belum dibayar oleh Pemda DIY terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp37.869.101,00 serta Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp3.079.518.122,00 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.113
Rincian Utang Belanja per SKPD



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦴꦩꦠꦺꦤ꧀ꦢꦶꦪꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦏꦸꦫꦏꦠ

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)	Nilai Per 31-12-2018 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.105.937.347,00	826.270.421,00
2	Dinas Kesehatan	199.198.814,00	90.518.227,00
	RS Grhasia	-	58.363.888,00
	RS Paru Respira	-	37.560.303,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	475.433.021,00	441.465.449,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	12.158.807,00	17.142.017,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.359.252,00	9.252.669,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	12.407.893,00	8.793.965,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32.605.057,00	43.079.724,00
8	Dinas Sosial	80.175.754,00	75.643.612,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	52.863.388,00	54.755.023,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	22.044.634,00	16.163.425,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	35.586.000,00	-
	Badan Lingkungan Hidup	-	-
	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	-	63.330.263,00
12	Dinas Perhubungan	37.364.769,00	31.628.231,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.187.270,00	9.067.964,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	11.143.274,00	7.000.055,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	7.142.645,00	-
	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	-	4.163.015,00
	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	-	10.843.200,00
16	Dinas Kebudayaan	133.321.213,00	109.538.618,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	122.889.577,00	96.792.324,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	72.935.773,00	48.713.631,00
19	Dinas Pariwisata	12.859.483,00	9.547.350,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	43.329.360,00	-
	Dinas Pertanian	-	65.973.737,00
	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	-	18.692.342,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	27.356.652,00	-
22	Sekretariat Daerah	193.137.888,00	139.495.272,00
23	Badan Penghubung Daerah	18.418.280,00	22.913.220,00
24	Sekretariat DPRD	68.153.023,00	49.014.923,00
25	Inspektorat	3.839.781,00	16.752.628,00
26	Paniradya Kaistimewan	-	-
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	721.375,00	1.223.772,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	244.996.426,00	226.271.284,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	30.368.027,00	39.083.407,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	31.452.440,00	45.603.307,00
	Jumlah	3.117.387.223,00	2.694.657.266,00

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek

Rp17.960.356.402,00

Rp21.795.637.100,00

Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp17.960.356.402,00 merupakan Utang Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 5/KEP/2020 tanggal 13 Januari 2020. Utang tersebut timbul sebagai konsekuensi adanya penerimaan Pajak Daerah melebihi target yang telah ditetapkan. Rincian Utang Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah (Rp)
----	----------------	-------------



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦫꦺꦢꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦿꦏꦠꦂ

5.4. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

	2019	2018
5.4.1. Pendapatan - LO	<u>Rp5.976.451.390.819,34</u>	<u>Rp5.773.546.712.951,83</u>

Pendapatan LO Tahun 2019 sebesar Rp5.976.451.390.819,34 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO, Pendapatan Transfer - LO, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO dengan rincian sebagai berikut:

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah - LO	<u>Rp2.138.478.675.001,98</u>	<u>Rp2.079.778.676.273,03</u>
---	--------------------------------------	--------------------------------------

Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2019 sebesar Rp2.138.478.675.001,98 meliputi Pendapatan Pajak Daerah - LO, Pendapatan Retribusi - LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO dengan rincian sebagai berikut:

5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah - LO	<u>Rp1.773.956.439.572,00</u>	<u>Rp1.717.303.203.238,00</u>
--	--------------------------------------	--------------------------------------

Pendapatan Pajak Daerah - LO sebesar Rp1.773.956.439.572,00 terdiri dari Pendapatan Pajak yang sudah diterima oleh Kas Daerah dan tambahan Piutang Pajak pada Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.114
Rincian Pendapatan Pajak Daerah - LO

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	814.553.090.400,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	491.575.859.800,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	276.358.776.194,00
4	Pajak Air Permukaan - LO	1.212.766.300,00
5	Pajak Rokok - LO	190.255.946.878,00
	Jumlah	1.773.956.439.572,00

5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO	<u>Rp31.824.694.405,91</u>	<u>Rp29.476.826.230,80</u>
--	-----------------------------------	-----------------------------------

Pendapatan Retribusi Daerah - LO sebesar Rp31.824.694.405,91 terdiri dari Pendapatan Retribusi yang sudah diterima oleh Kas Daerah dan tambahan Piutang Retribusi pada Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.115
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦺꦴꦩꦶꦠꦺꦩꦺꦴꦪꦏꦂꦠ

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	-
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	5.163.934.647,74
3	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	-
4	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO	6.652.434.000,00
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	15.525.756.554,88
6	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	229.110.123,29
7	Retribusi Tempat Penagihan/Pesanggrahan/Villa - LO	739.835.000,00
8	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	47.652.500,00
9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga - LO	320.135.500,00
10	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	2.920.946.080,00
11	Retribusi Izin Trayek - LO	55.530.000,00
12	Retribusi Izin Perikanan - LO	1.250.000,00
13	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	168.110.000,00
Jumlah		31.824.694.405,91

5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO **Rp152.365.307.047,00** **Rp130.633.339.753,16**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO sebesar Rp152.365.307.047,00 merupakan pendapatan yang sudah menjadi hak Pemda DIY sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp152.116.566.716,00 (Metode Ekuitas) yang menambah Investasi Permanen dan yang diterima secara kas sebesar Rp248.740.331,00 (Metode Perolehan) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.116
Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PT. Taru Martani (Metode Ekuitas)	(428.270.790,76)
2	PT. BPD DIY (Metode Ekuitas)	137.110.950.000,00
3	PT. Anindya Mitra Internasional (Metode Ekuitas)	5.857.227.333,81
4	PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) (Metode Perolehan)	248.740.331,00
5	Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) (Metode Ekuitas)	9.576.660.172,96
Jumlah		152.365.307.047,00

Penjelasan rincian tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. PT. Taru Martani

Kepemilikan saham Pemda DIY pada PT. Taru Martani sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar 99,996%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada PT. Taru Martani menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2019 PT. Taru Martani mencatat laba sebesar Rp371.744.079,00 dan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 99,996% sehingga Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp371.729.209,24 (99,996% x Rp371.744.079,00). Bagian Laba Tarumartani Tahun 2019 dikoreksi sebesar Rp800.000.000,00 karena adanya penyetoran Bagian Laba Tahun 2018 yang disetorkan Tahun 2019. Dengan demikian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2019 pada PT. Tarumartani adalah sebesar (Rp428.270.790,76).

2. PT. BPD DIY

Kepemilikan saham Pemda DIY pada PT. BPD DIY sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar 51%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada PT. BPD DIY menggunakan metode ekuitas dimana



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2019 PT. BPD DIY mencatat laba sebesar Rp268.845.000.000,00 dan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 51% sehingga Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp137.110.950.000,00 (51% x Rp268.845.000.000,00). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO dan menambah nilai Investasi Permanen - Penyertaan Modal sebesar Rp137.110.950.000,00.

3. PT. Anindya Mitra Internasional

Kepemilikan saham Pemda DIY pada PT. Anindya Mitra Internasional sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar 99,951%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada PT. Anindya Mitra Internasional menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2019 PT. Anindya Mitra Internasional mencatat laba sebesar Rp5.860.098.782,21 dan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 99,951% sehingga Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp5.857.227.333,81 (99,951% x Rp5.860.098.782,21). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO dan menambah nilai Investasi Permanen - Penyertaan Modal sebesar Rp5.857.227.333,81.

4. PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA)

Penyertaan Modal Pemda DIY pada PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp660.000.000,00 dengan prosentase kepemilikan sebesar 0,223%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi, nilai kepemilikan kurang dari 20% maka penilaian Investasi Permanen dalam bentuk penyertaan modal menggunakan metode harga perolehan, sehingga pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO adalah pada saat direalisasikan atau saat diterima pembayarannya. Pada Tahun 2019, Pemda DIY telah menerima Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO pada PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) sebesar Rp248.740.331,00 atas hak laba PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) Tahun 2018.

5. Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)

Kepemilikan saham Pemda DIY pada BUKP sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar 83,140%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada BUKP menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2019 BUKP mencatat laba sebesar Rp11.518.715.627,81 dan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 83,140% sehingga Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp9.576.660.172,96 (83,140% x Rp11.518.715.627,81). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO dan menambah nilai Investasi Permanen Modal sebesar Rp9.576.660.172,96.

5.4.1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Rp180.332.233.977,07 Rp202.365.307.051,07

Yang Sah - LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO sebesar Rp180.332.233.977,07 terdiri dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO yang telah diterima oleh Kas Daerah dan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.117

Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦿꦏꦂꦠ

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO sebesar Rp706.035.310,00 merupakan penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta untuk sharing Biaya Pengelolaan IPAL sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 5/PERJ/GUB/IV/2015 atau 16.1/PK/Bt/2015 atau 17.1/PK.KDH/A/2015 atau 39/Perj.YK/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Sistem Terpusat beserta addendumnya. Rincian Bantuan Keuangan terdiri dari Pemda Kabupaten Bantul sebesar Rp84.852.930,00, Pemda Kabupaten Sleman sebesar Rp92.971.390,00, dan Pemda Kota Yogyakarta sebesar Rp528.210.990,00.

5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO Rp229.959.280.811,36 Rp365.002.161.396,80

Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO Tahun 2019 sebesar Rp229.959.280.811,36 didapat dari Pendapatan Hibah - LO. Pendapatan Hibah - LO sebesar Rp229.959.280.811,36 terdiri Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.119

Rincian Pendapatan Hibah - LO dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Hibah dari Dealer Otomotif	4.667.663.000,00
2	Hibah dari Main Dealer	28.800.000,00
3	Hibah dari PT. Jasa Raharja	3.852.000.000,00
4	Hibah Barang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	66.055.395.374,36
5	Hibah Barang pada Dinas Kesehatan	12.103.300,00
6	Hibah Barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.623.566.379,00
7	Hibah Barang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.687.708.000,00
8	Hibah Barang pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	224.440.000,00
9	Hibah Barang pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	244.626.950,00
10	Hibah Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan	6.364.635.739,00
11	Hibah Barang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	870.921.200,00
12	Hibah Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	448.900.000,00
13	Hibah Barang pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	134.839.842.869,00
14	Hibah Barang pada Badan Pendidikan dan Pelatihan	38.678.000,00
	Jumlah	229.959.280.811,36

Hibah Barang pada OPD berikut:

1. Hibah Barang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp66.055.395.374,36 berasal dari Block Grant, Komite Sekolah, dan BPD DIY
2. Hibah Barang pada Dinas Kesehatan sebesar Rp12.103.300,00 berasal dari Kementerian Kesehatan
3. Hibah Barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp8.623.566.379,00 berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦫꦺꦴꦩꦶꦠꦺꦴꦪꦏꦂꦠ

4. Hibah Barang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp3.687.708.000,00 berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Hibah Barang pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp224.440.000,00 berasal dari CSR BPD DIY
6. Hibah Barang pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp244.626.950,00 berasal dari Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional, dan Pemerintah Daerah Lain
7. Hibah Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp6.364.635.739,00 berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan
8. Hibah Barang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp870.921.200,00 berasal dari Kementerian Pertanian
9. Hibah Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp448.900.000,00 berasal dari Kementerian Perdagangan
10. Hibah Barang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp134.839.842.869,00.
11. Hibah Barang pada Badan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp38.678.000,00 berasal dari BPD Jateng dan dari peserta Diklatpim II/III/IV

5.4.2. Beban Rp4.871.151.715.959,20 Rp4.457.407.063.165,48

Realisasi Beban Pemda DIY Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.871.151.715.959,20 merupakan penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran dan konsumsi aset selama periode Tahun Anggaran 2018, terdiri dari dari Beban Operasi dan Beban Transfer sebesar dengan rincian sebagai berikut:

5.4.2.1. Beban Operasi Rp3.854.207.914.909,49 Rp3.675.142.198.835,92

Realisasi Beban Operasi Pemda DIY Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.854.207.914.909,49 terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

5.4.2.1.1. Beban Pegawai Rp1.551.059.704.219,00 Rp1.510.521.124.541,00

Beban Pegawai Pemda DIY Tahun 2019 sebesar Rp1.551.059.704.219,00 merupakan kompensasi terhadap pegawai yang harus dibayarkan kepada pegawai negeri sipil dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai Tahun 2019 sebesar Rp1.551.059.704.219,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.120

Rincian Beban Pegawai per Obyek Beban



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

No.	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
1	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	795.081.963.553,00	787.813.885.116,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	440.567.196.757,00	439.799.043.321,00
3	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	12.905.294.694,00	12.665.000.000,00
4	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	46.177.496.341,00	43.650.000.000,00
5	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	968.441.119,00	973.167.286,00
6	Uang Lembur	359.856.000,00	449.375.000,00
7	Beban Honorarium PNS	82.511.790.075,00	67.566.248.808,00
8	Beban Honorarium Non PNS	155.085.927.362,00	141.045.085.964,00
9	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	-	-
10	Beban Pegawai BLUD	14.823.529.468,00	14.654.471.296,00
11	Beban Pegawai BOS	2.578.208.850,00	1.904.847.750,00
	Jumlah	1.551.059.704.219,00	1.510.521.124.541,00

Realisasi Beban Pegawai Pemda DIY Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.551.059.704.219,00 dengan rincian pada masing-masing SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.121
Rincian Beban Pegawai per SKPD



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ပဝၢ်ပူၢ်သးကၢသးကၢဃူၤပၤပၤပၤပၤပၤ

Beban Barang dan Jasa sebesar Rp1.246.156.710.165,83 merupakan penurunan manfaat ekonomis dalam periode Tahun 2019 yang menurunkan ekuitas, pengeluaran, konsumsi aset dan timbulnya kewajiban akibat transaksi barang dan jasa.

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 per obyek beban adalah sebagai berikut:

Tabel 5.122
Rincian Beban Barang dan Jasa per Obyek Beban

No.	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
1	Beban Bahan Pakai Habis	267.585.682.692,31	170.955.551.493,48
2	Beban Persediaan Bahan/Material	107.404.127.480,03	103.439.497.186,00
3	Beban Jasa Kantor	233.135.955.648,00	295.857.769.926,21
4	Beban Premi Asuransi	2.592.347.803,39	1.870.496.359,34
5	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	13.293.870.131,00	10.854.970.127,00
6	Beban Persediaan Cetak dan Penggandaan	35.685.089.829,00	32.738.714.434,92
7	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gedung Parkir	17.315.001.542,10	13.908.117.069,32
8	Beban Sewa Sarana Mobilitas	9.795.109.411,00	9.956.242.200,00
9	Beban Sewa Alat Berat	283.178.500,00	716.283.000,00
10	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	34.910.883.209,00	35.667.642.372,00
11	Beban Makanan dan Minuman	101.669.856.297,00	92.905.029.640,72
12	Beban Persediaan Pakaian Dinas dan Atributnya	919.158.330,00	1.380.364.000,00
13	Beban Persediaan Pakaian Kerja	4.047.156.150,00	5.127.847.259,00
14	Beban Persediaan Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	4.613.839.350,00	3.340.839.110,00
15	Beban Perjalanan Dinas	95.272.402.957,00	93.302.649.306,00
16	Beban Pemeliharaan	85.440.166.287,00	83.905.624.021,62
17	Beban Jasa Konsultansi	49.240.061.136,00	47.983.089.465,00
18	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.226.300.065,00	3.373.254.280,00
19	Beban Barang Untuk Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.211.489.695,00	-
20	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	25.204.232.000,00	40.647.419.900,00
21	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	6.060.286.119,00	4.979.840.562,00
22	Beban Honorarium Non Pegawai	-	14.100.000,00
23	Honorarium PNS	-	-
24	Honorarium Non PNS	-	-
25	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	125.834.340.534,00	126.294.489.151,00
26	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.416.175.000,00	14.894.755.000,00
Jumlah		1.246.156.710.165,83	1.194.114.585.863,61

Realisasi Beban Barang dan Jasa Pemda DIY Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.246.156.710.165,83 dengan rincian pada masing-masing SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.123
Rincian Beban Barang dan Jasa per SKPD



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦺꦤ꧀ ꦢꦫꦺꦝ ꦢꦫꦺꦝ ꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦂ ꦪꦺꦒꦿꦏꦂꦠ

No.	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	307.644.288.346,00	293.483.031.695,87
2	Dinas Kesehatan	79.690.534.290,50	65.778.663.245,50
3	RS Ghrasia	-	10.828.680.756,82
4	RS Paru Respira	-	10.476.565.755,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	182.386.939.276,00	118.538.325.172,00
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	29.964.773.416,00	30.139.532.163,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.533.115.399,00	9.374.053.241,00
8	Dinas Perhubungan	15.321.633.394,00	112.010.313.900,58
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	21.324.356.737,00	-
10	Badan Lingkungan Hidup	-	10.031.317.285,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	6.776.523.151,00	-
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	-	6.711.395.317,00
13	Dinas Sosial	32.699.867.513,00	25.202.435.340,00
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17.206.631.795,00	15.995.027.985,00
15	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	8.130.319.600,00	-
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	-	5.501.781.443,00
17	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	5.314.761.334,00	-
18	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	-	2.641.259.055,00
19	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	-	2.673.675.409,00
20	Dinas Kebudayaan	252.381.208.790,31	205.796.966.563,72
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.582.967.915,00	3.982.295.868,00
22	Satuan Polisi Pamong Praja	4.122.847.883,00	4.468.376.266,00
23	Sekretariat Daerah	50.528.062.453,00	42.074.022.005,00
24	Sekretariat DPRD	53.173.467.718,00	57.896.689.706,00
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	27.489.390.064,49	-
26	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	-	25.648.409.379,47
27	Badan Pendidikan dan Pelatihan	12.955.865.209,00	11.266.249.687,00
28	Inspektorat	3.091.805.429,00	3.234.078.200,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	14.096.281.500,00	11.435.025.662,00
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.642.986.137,00	12.054.176.305,40
31	Badan Penghubung Daerah	2.695.608.675,00	-
32	Kantor Perwakilan Daerah	-	2.441.053.088,00
33	Sekretariat Paramparapraja	-	223.371.017,00
34	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	15.227.359.945,53	-
35	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	-	2.442.503.159,00
36	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.783.009.045,00	11.937.974.980,25
37	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	16.311.802.955,00	-
38	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	-	16.003.149.545,00
39	Dinas Pertanian	-	11.038.055.841,00
40	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	-	10.132.727.845,00
41	Dinas Pariwisata	15.271.275.967,00	17.899.552.915,00
42	Dinas Kelautan dan Perikanan	18.133.497.921,00	14.808.318.301,00
43	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.052.193.450,00	9.945.531.766,00
44	Paniradya Kaistimewan	623.334.857,00	-
	Jumlah	1.246.156.710.165,83	1.194.114.585.863,61

5.4.2.1.4. Beban Bunga **Rp0,00** **Rp0,00**

Realisasi Beban Bunga Pemda DIY Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00.

5.4.2.1.5. Beban Subsidi **Rp76.067.609.352,00** **Rp0,00**

Realisasi Beban Subsidi Pemda DIY Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp76.067.609.352,00. Beban Subsidi tersebut merupakan bantuan biaya produksi yang diberikan kepada PT. Anindya Mitra Internasional yang merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang diberi hak pengelolaan dan pengoperasian angkutan perkotaan bersubsidi Trans Jogja sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penugasan Pengelolaan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan Sistem Buy The Service kepada PT. Anindya Mitra Internasional. Dalam melaksanakan pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DIY
Diponegoro
Kraton
Sri Sultan Hamengkubuwono
Kusuma

PT. AMI berhak atas subsidi, pendapatan dari tiket dan pendapatan lain-lain, dan mengusulkan tarif layanan angkutan.

5.4.2.1.6. Beban Hibah **Rp638.980.684.355,00** **Rp587.035.545.684,00**

Realisasi Beban Hibah Pemda DIY Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp638.980.684.355,00 merupakan Beban Hibah berupa uang di PPKD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.124

Rincian Beban Hibah

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Hibah Urusan Pendidikan	534.434.895.000,00
2	Hibah Urusan Kesehatan	1.000.000.000,00
3	Hibah Urusan Ketentraman, Keteriban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	110.000.000,00
4	Hibah Urusan Sosial	287.500.000,00
5	Hibah Urusan Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.101.973.024,00
6	Hibah Urusan Pangan	575.000.000,00
7	Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.005.000.000,00
8	Hibah Urusan Komunikasi dan Informatika	1.152.800.540,00
9	Hibah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	537.533.573,00
10	Hibah Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	5.930.000.000,00
11	Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur	5.950.000.000,00
12	Hibah Untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi	-
13	Hibah Urusan Keistimewaan	85.895.982.218,00
	Jumlah	638.980.684.355,00

5.4.2.1.7. Beban Bantuan Sosial **Rp702.000.000,00** **Rp450.000.000,00**

Realisasi Beban Bantuan Sosial Pemda DIY Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp702.000.000,00 merupakan Beban Bantuan Sosial untuk program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan anak bermasalah sosial dan pelayanan dan perlindungan lanjut usia terlantar serta keluarga rentan dan miskin sebanyak 47 penerima.

5.4.2.1.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi **Rp341.047.688.355,47** **Rp382.271.554.370,79**

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemda DIY Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp341.047.688.355,47 dengan rincian Beban Penyusutan sebesar Rp341.047.688.355,47 dan Amortisasi Rp0,00 Rincian Beban Penyusutan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.125

Rincian Beban Penyusutan per Obyek Beban

No.	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	147.758.261.904,45	169.514.978.611,88
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	75.065.156.045,80	103.798.510.528,50
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	114.682.427.493,64	106.710.375.920,06
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.242.994.950,78	1.448.628.940,09
5	Beban Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	2.298.847.960,80	799.060.370,26
	Jumlah	341.047.688.355,47	382.271.554.370,79

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemda DIY Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp341.047.688.355,47 dengan rincian pada masing-masing SKPD sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Tabel 5.126

Rincian Beban Penyusutan per SKPD

No.	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	88.886.464.917,45	135.053.907.482,52
2	Dinas Kesehatan	15.273.006.006,93	5.662.944.828,28
3	RS Ghrasia	-	3.381.279.503,72
4	RS Paru Respira	-	6.708.724.158,04
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	110.379.071.667,50	84.735.534.501,35
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	3.732.244.202,84	15.052.407.828,21
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	812.867.318,70	899.603.473,88
8	Dinas Perhubungan	12.886.573.667,07	15.021.840.746,97
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.912.720.980,56	-
10	Badan Lingkungan Hidup	-	1.170.723.224,51
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	1.089.283.959,33	-
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	-	1.087.339.305,48
13	Dinas Sosial	3.816.156.625,21	4.013.813.925,09
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.584.604.149,15	4.915.210.539,56
15	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.069.025.311,81	-
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	-	574.162.058,33
17	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	585.907.455,48	-
18	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	-	231.922.445,56
19	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	-	305.507.212,85
20	Dinas Kebudayaan	13.404.988.787,72	11.639.971.533,58
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	653.451.700,78	400.947.369,33
22	Satuan Polisi Pamong Praja	734.999.302,80	510.063.011,02
23	Sekretariat Daerah	6.069.814.458,26	10.135.891.545,00
24	Sekretariat DPRD	11.619.910.884,20	10.183.776.977,07
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	16.674.639.568,36	-
26	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	-	16.880.356.394,80
27	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1.738.593.986,07	1.493.516.088,31
28	Inspektorat	321.317.495,93	321.317.495,92
29	Badan Kepegawaian Daerah	1.606.419.444,72	1.813.077.257,61
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.932.606.438,43	3.130.819.211,64
31	Badan Penghubung Daerah	586.573.263,45	-
32	Kantor Perwakilan Daerah	-	502.887.118,45
33	Sekretariat Paramparapraja	-	297.501.745,19
34	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	7.076.313.933,98	-
35	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	-	573.265.759,78
36	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.275.936.508,53	7.200.371.740,56
37	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	8.696.155.945,20	-
38	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	-	7.929.544.153,25
39	Dinas Pertanian	-	5.279.684.394,73
40	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	-	2.753.109.743,40
41	Dinas Pariwisata	2.772.054.731,18	1.107.018.538,76
42	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.967.684.316,35	20.115.077.567,30
43	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.215.422.726,64	1.188.435.490,74
44	Paniradya Kaistimewa	672.878.600,75	-
	Jumlah	341.047.688.355,47	382.271.554.370,79

5.4.2.1.9. Beban Penyisihan Piutang

Rp125.793.687,19

Rp290.161.713,70

Beban Penyisihan Piutang Pendapatan sebesar Rp125.793.687,19 terdiri dari Beban Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp9.335.795,00, Beban Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp2.188.719,51, Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp57.834.128,86 dan Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya sebesar Rp56.435.043,82.

Beban Penyisihan Piutang berada pada OPD berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Beban Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp9.335.795,00 pada BPKA
2. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp57.454,00 pada BPKA
3. Beban Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp2.188.719,51 pada DLHK
4. Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya sebesar Rp56.435.043,82, pada Dinas Kesehatan
5. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp57.776.674,86 pada DPUPESDM

5.4.2.1.10. Beban Lain-lain **Rp67.724.775,00** **Rp459.226.662,82**

Realisasi Beban Lain-lain Pemda DIY Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp67.724.775,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (BLPT) untuk kegiatan kapasitas building.

5.4.2.2. Beban Transfer **Rp1.016.943.801.049,71** **Rp782.264.864.329,56**

Realisasi Beban Transfer Pemda DIY Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.016.943.801.049,71 terdiri dari Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, dan Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.127
Rincian Beban Transfer

No.	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	731.506.477.128,71	702.346.618.129,56
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	281.452.614.421,00	75.991.545.000,00
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	1.560.062.700,00	1.530.000.000,00
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2.424.646.800,00	2.396.701.200,00
Jumlah		1.016.943.801.049,71	782.264.864.329,56

5.4.3. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional - LO **Rp1.105.299.674.860,14** **Rp1.316.139.649.786,35**

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional - LO sebesar Rp1.105.299.674.860,14 berasal dari Pendapatan - LO sebesar Rp5.976.451.390.819,34 dikurangi dengan Beban sebesar Rp4.871.151.715.959,20.

5.4.4. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional - LO **Rp5.446.791.027,53** **Rp5.038.690.450,50**

Surplus Non Operasional - LO sebesar Rp7.053.355.779,00 merupakan dikurangi dengan Defisit Non Operasional sebesar Rp1.606.564.751,47. Surplus Non Operasional berasal dari Surplus penjualan aset non lancar sedangkan Defisit Non Operasional berasal dari kerugian penjualan aset non lancar - LO.

Surplus Non Operasional - LO sebesar Rp7.053.355.779,00 merupakan Surplus Non Operasional - LO yang berasal dari:

1. Penjualan minyak kayu putih pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp6.992.284.172,00
2. Penjualan benih tanaman pangan dan hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp61.071.607,00 (penjualan tanaman pangan al. padi, kedelai, dan jagung).

Defisit Non Operasional sebesar Rp1.606.564.751,47 berasal dari kerugian:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦩꦺꦯꦫꦶꦏꦤ꧀ ꦢꦼꦫꦲꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦶ ꦪꦺꦒꦶꦪꦏꦂꦠ

1. Penjualan Alat Teknologi Tepat Guna pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp155.262.745,00
2. Penjualan benih tanaman pangan dan hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp1.451.302.006,47 (penjualan hortikultura al. sayur-sayuran, susu, dan semen beku).

5.4.5. Surplus/Defisit sebelum Rp1.110.746.428.109,67 Rp1.321.178.340.236,85
Pos Luar Biasa - LO

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa - LO sebesar Rp1.110.746.428.109,67 berasal dari Surplus/Defisit Kegiatan Operasional - LO sebesar Rp1.105.299.637.082,71 ditambah dengan Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional - LO sebesar Rp5.446.791.027,53.

5.4.5.1. Pos Luar Biasa Rp0,00 Rp0,00

Pos Luar Biasa berasal dari Pendapatan Luar Biasa dikurangi dengan Beban Luar Biasa. Pada Tahun 2019 tidak ada transaksi dari Pos Luar Biasa.

5.4.6. Surplus/Defisit - LO Rp1.110.746.465.887,67 Rp1.321.178.340.236,85

Surplus/Defisit - LO sebesar Rp1.110.746.465.887,67 merupakan selisih antara seluruh Pendapatan - LO baik Operasional dan Non Operasional sebesar Rp5.983.504.746.598,34 dan Beban baik Operasional maupun Non Operasional sebesar Rp4.872.758.280.710,67.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

*Provinsi DIY
Kabupaten Sleman*

5.6. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi adalah penerimaan kas dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian, Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Bantuan Keuangan dan Pemda Lainnya, Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya dan Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa dikurangi dengan pembayaran untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil dan Kejadian Luar Biasa dalam Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

5.6.1.1 Arus Masuk Kas Rp5.696.004.211.789,50 Rp5.440.671.834.465,93

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.696.004.211.789,50 berasal dari:

**Tabel 5.128
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi**

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	1,773,940,604,572.00	1,717,291,718,438.00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	42,420,048,683.08	43,625,223,035.16
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	85,960,824,196.14	85,097,737,606.37
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	177,120,836,332.28	192,201,359,404.40
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	56,035,674,200.00	93,097,809,176.00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	24,907,600.00	44,756,323.00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1,351,102,020,000.00	1,314,262,108,053.00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	978,540,310,453.00	910,032,137,851.00
9	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	1,162,772,688,443.00	973,435,532,429.00
10	Penerimaan Dana Penyesuaian	58,831,799,000.00	37,250,000,000.00
11	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-
12	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya	706,035,310.00	651,492,150.00
13	Penerimaan Hibah	8,548,463,000.00	73,681,960,000.00
14	Penerimaan Dana Darurat	-	-
15	Penerimaan Lainnya	-	-
16	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas	5,696,004,211,789.50	5,440,671,834,465.93

5.6.1.2. Arus Keluar Kas (Rp4.509.447.244.845,17) (Rp4.163.575.804.386,43)

Arus keluar Kas untuk Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.509.477.244.845,17 dipergunakan untuk:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel 5.129
Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	1.553.763.754.881,00	1.512.793.109.461,00
2	Pembayaran Barang dan Jasa	1.072.294.764.575,00	1.122.418.868.628,08
3	Pembayaran Bunga	-	-
4	Pembayaran Subsidi	76.067.609.352,00	-
5	Pembayaran Hibah	735.398.604.386,46	718.940.165.615,57
6	Pembayaran Bantuan Sosial	51.143.429.903,00	37.041.423.324,40
7	Pembayaran Bantuan Keuangan	285.437.323.921,00	79.918.246.200,00
8	Pembayaran Tidak Terduga	-	-
9	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	735.341.757.826,71	692.463.991.157,38
10	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	-	-
11	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
12	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	4.509.447.244.845,17	4.163.575.804.386,43

5.6.1.3. Arus Kas Bersih dari **Rp1.186.556.966.944,33** **Rp1.277.096.030.079,50**
Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.186.556.966.944,33 berasal dari:

Tabel 5.130
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	5,696,004,211,789.50	5.440.671.834.465,93
2	Arus Keluar Kas	(4,509,447,244,845.17)	(4.163.575.804.386,43)
	Jumlah Arus Kas Masuk Bersih	1,186,556,966,944.33	1.277.096.030.079,50

5.6.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi adalah penerimaan kas dari Pencairan Dana Cadangan, Penjualan atas Tanah, Penjualan atas Peralatan dan Mesin, Penjualan atas Gedung dan Bangunan, Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan, Penjualan atas Aset Tetap Lainnya, Penjualan Aset Lainnya, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen, dikurangi dengan pengeluaran kas untuk Pembentukan Dana Cadangan, perolehan atas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Aset Lainnya, Penyertaan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Modal Pemerintah Daerah, dan Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen dalam Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

5.6.2.1. Arus Masuk Kas Rp6.016.930.667,00 Rp5.459.506.979,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi dalam Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp6.016.930.667,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.131
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1	Pencairan Dana Cadangan	-	-
2	Penjualan Atas Tanah	-	-
3	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	809.386.651,00	1.194.652.600,00
4	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	2.115.355.000,00	764.650.000,00
5	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
6	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	250.179.000,00	-
7	Penjualan atas Aset Lainnya	178.100.000,00	548.007.447,00
8	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-
9	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	2.663.910.016,00	2.952.196.932,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	6.016.930.667,00	5.459.506.979,00

Penjelasan:

Arus kas masuk dari Penjualan atas Peralatan dan Mesin sebesar Rp809.386.651,00 merupakan Penjualan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai sebesar Rp217.075.000,00, penjualan kendaraan dinas roda dua sebesar Rp142.981.808,00 dan penjualan kendaraan dinas roda empat sebesar Rp449.329.843,00 . Aset yang dijual tersebut merupakan aset yang akan dihapuskan karena telah usang dan rusak berat.

Arus kas masuk dari Penjualan atas Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.115.355.000,00 merupakan penjualan bahan-bahan bekas bangunan (bongkaran) yang akan dihapuskan.

Arus kas masuk dari Penjualan atas Aset Tetap Lainnya sebesar Rp250.179.000,00 merupakan penjualan drum bekas sebesar Rp3.954.000,00, Penjualan Hasil Pertanian sebesar Rp199.225.000,00 dan Penjualan Hasil Kehutanan sebesar Rp47.000.000,00.

Arus kas masuk dari Penjualan atas Aset Lainnya sebesar Rp178.100.000,00 merupakan Penjualan Hasil Penebangan Pohon sebesar Rp168.100.000,00, dan Penjualan Alat Tepat Guna sebesar Rp10.000.000,00.

Arus kas masuk dari penerimaan investasi non permanen sebesar Rp2.663.910.016,00 merupakan penerimaan pembayaran dana bergulir dari masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.132
Rincian Penerimaan Kembali Dana Bergulir Tahun 2019



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாதுகாசு கருகாசு கருகாசு கருகாசு கருகாசு கருகாசு

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	DPM PHP Tahun Anggaran 2011	105.000.000,00
	DPM LUEP (Pelimpahan dari Dinas Pertanian Serah terima per Oktober 2011)	118.346.750,00
	DPM PHP Tahun Anggaran 2012	4.000.000,00
	LDPM	2.500.000,00
	Jumlah	229.846.750,00
2	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	Ketahanan Pangan di 14 Kecamatan 2003	2.400.000,00
	Fasilitasi Perkuatan Modal Usaha Koperasi (Pasca Gempa) 2006	63.477.467,00
	Ketahanan Pangan 2007	41.550.000,00
	Modal Bergulir Koperasi (Pasca Gempa) 2008	600.000,00
	Program Fasilitasi Pengembangan Koperasi 2010	1.000.000,00
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2011	800.000,00
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi (Pasca Erupsi) 2011	1.000.000,00
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2013	26.316.300,00
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2016	837.494.499,00
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2017	1.001.029.800,00
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2017 ABT	458.395.200,00
	Jumlah	2.434.063.266,00
	Total	2.663.910.016,00

5.6.2.2. **Arus Keluar Kas** **(Rp1.243.800.185.484,85)** **(Rp1.154.827.726.327,74)**

Arus keluar Kas untuk Aktivitas Investasi dalam Tahun Anggaran 2019 sebesar (Rp1.243.800.185.484,85) dipergunakan untuk:

Tabel 5.133
Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
2	Perolehan atas Tanah	469.142.424.222,00	362.819.024.678,00
3	Perolehan atas Peralatan dan Mesin	159.857.330.876,00	147.918.637.501,00
4	Perolehan atas Gedung dan Bangunan	138.986.381.949,17	280.823.210.093,93
5	Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	242.118.840.886,68	309.525.083.527,81
6	Perolehan atas Aset Tetap Lainnya	23.907.706.051,00	29.185.301.667,00
7	Perolehan atas Aset Lainnya	1.190.501.500,00	2.556.468.860,00
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	198.597.000.000,00	20.000.000.000,00
9	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	10.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	1.243.800.185.484,85	1.154.827.726.327,74



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கிழவா கிழவா கிழவா கிழவா கிழவா கிழவா கிழவா

ArusKas dari Aktivitas Transitoris dalam Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.6.4.1. Arus Masuk Kas Rp6.013.143.620.114,68 Rp1.635.075.731.546,00

Arus masuk kas dari Aktivitas Transitoris dalam Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp6.013.143.620.114,68. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.135
Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	256.480.109.538,00	185.040.982.042,00
2	Pengembalian UP/GU/TU	42.781.245.870,37	33.736.212.554,00
3	Pengesahan SPJ UP/GU/TU	5.707.365.457.874,31	1.409.472.321.917,00
4	Sisa Uang Persediaan	6.516.806.832,00	6.826.215.033,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	6.013.143.620.114,68	1.635.075.731.546,00

Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris merupakan arus masuk kas dari penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga oleh BUD sebesar Rp256.480.109.538,00, Pengembalian UP/GU/TU sebesar Rp42.781.245.870,37, Pengesahan SPJ UP/GU/TU sebesar Rp5.707.365.457.874,31 dan Sisa Uang Persediaan sebesar Rp6.516.806.832,00, merupakan Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran PPKD yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp212.411.977,00 dan Sisa Dana BOS Tahun 2019 yang berada di SMAN/SMKN sebesar Rp6.304.394.855,00.

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp256.480.109.538,00 terdiri dari:

Tabel 5.136
Rincian Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Iuran Wajib Pensiun	56.416.310.996,00
2	PPh Pasal 21	70.796.306.346,00
3	Taperum	1.052.213.000,00
4	PPn	105.012.518.167,00
5	PPh Pasal 22	4.555.672.637,00
6	PPh Pasal 23	7.304.307.479,00
7	PPh Pasal 4 (2)	11.246.487.371,00
8	PPh 26	50.612.964,00
9	Pajak Daerah	45.680.578,00
	Jumlah	256.480.109.538,00

Arus Masuk Kas juga berasal dari Pengembalian UP/GU/TU sebesar Rp42.781.245.870,37, Pengesahan SPJ UP/GU/TU sebesar Rp5.707.365.457.874,31 dan Sisa Uang Persediaan sebesar Rp6.516.806.832,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.137



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Rincian Perhitungan Sisa Kas

NO	SKPD	SP2D UP/GU/TU	SPJ UP/GU/TU	Pengembalian	Sisa Kas
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.283.028.011.958,00	1.265.337.166.307,00	11.386.450.796,00	6.304.394.855,00
2.	Dinas Kesehatan	117.105.335.871,00	114.586.887.688,00	2.518.448.183,00	-
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	348.742.941.358,68	348.306.203.308,68	436.738.050,00	-
4.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	518.550.250.398,00	516.796.766.512,83	1.753.483.885,17	-
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.884.802.630,00	10.709.403.207,00	175.399.423,00	-
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	17.982.096.390,00	17.575.183.677,00	406.912.713,00	-
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	78.951.213.437,00	78.121.366.874,00	829.846.563,00	-
8.	Dinas Sosial	59.682.569.396,00	59.261.572.786,00	420.996.610,00	-
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	36.221.129.209,00	35.881.196.303,00	339.932.906,00	-
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	12.189.388.957,00	11.880.800.554,00	308.588.403,00	-
11.	DLHK	57.299.584.235,00	57.042.253.228,00	257.331.007,00	-
12.	Dinas Perhubungan	34.946.744.727,00	34.599.872.064,00	346.872.663,00	-
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	21.751.002.974,00	21.563.930.125,00	187.072.849,00	-
14.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	16.765.959.500,00	16.662.266.097,00	103.693.403,00	-
15.	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	9.981.676.814,00	9.812.580.624,00	169.096.190,00	-
16.	Dinas Kebudayaan	384.098.144.361,00	376.174.231.367,46	7.923.912.993,54	-
17.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	29.697.138.930,00	29.588.663.934,00	108.474.996,00	-
18.	Dinas Kelautan dan Perikanan	30.009.793.660,00	29.681.303.942,00	328.489.718,00	-
19.	Dinas Pariwisata	32.451.644.668,00	32.193.961.638,00	257.683.030,00	-
20.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	60.450.516.438,00	59.391.886.853,34	1.058.629.584,66	-
21.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21.293.844.186,00	20.959.483.012,00	334.361.174,00	-
22.	Gubernur	3.248.890.330,00	3.248.890.330,00	-	-
23.	Sekretariat Daerah	94.139.343.832,00	91.033.378.236,00	3.105.965.596,00	-
24.	Paniradya Kaistimewan	3.129.420.772,00	3.079.749.592,00	49.671.180,00	-
25.	Badan Penghubung Daerah	5.611.830.637,00	5.605.000.848,00	6.829.789,00	-
26.	DPRD	36.455.579.794,00	36.455.579.794,00	-	-
27.	Sekretariat DPRD	69.661.877.848,00	64.978.316.650,00	4.683.561.198,00	-



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

NO	SKPD	SP2D UP/GU/TU	SPJ UP/GU/TU	Pengembalian	Sisa Kas
28.	Inspektorat	28.506.831.297,00	28.316.950.651,00	189.880.646,00	-
29.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.648.306.912,00	20.164.998.679,00	483.308.233,00	-
30.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	146.255.479.973,00	145.356.161.571,00	899.318.402,00	-
31.	PPKD	1.947.445.751.985,00	1.945.126.375.455,00	2.106.964.553,00	212.411.977,00
32.	Badan Kepegawaian Daerah	200.406.706.000,00	199.411.590.183,00	995.115.817,00	-
33.	Badan Pendidikan dan Pelatihan	19.069.701.099,00	18.461.485.783,00	608.215.316,00	-
	JUMLAH	5.756.663.510.576,68	5.707.365.457.874,31	42.781.245.870,37	6.516.806.832,00

5.6.4.2. Arus Keluar Kas Rp6.013.143.620.114,68 Rp1.635.075.731.546,00

Arus keluar kas dari aktivitas Transitoris dalam Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp6.013.143.620.114,68. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.138
Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1	Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	256.480.109.538,00	185.040.982.042,00
2	Penerbitan SP2D UP/GU/TU	5.756.663.510.576,68	1.450.034.749.504,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	6.013.143.620.114,68	1.635.075.731.546,00

5.6.4.3. Arus Kas Bersih Rp0,00 Rp0,00

Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris dalam Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp0,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.139
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1	Arus Kas Masuk	6.013.143.620.114,68	1.635.075.731.546,00
2	Arus Kas Keluar	(6.013.143.620.114,68)	1.635.075.731.546,00
	Jumlah Arus Kas Bersih	-	-

**5.6.5 Kenaikan Rp(51.226.287.873,52) Rp127.727.810.730,76
(Penurunan) Kas**

Penurunan Bersih Kas milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp(51.226.287.873,52) berasal dari:

Tabel 5.140
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
----	--------	-----------------	-----------------



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦺꦠꦶꦱꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

1	Aktivitas Operasi	1.186.556.966.944,33	1.277.096.030.079,50
2	Aktivitas Investasi	(1.237.783.254.817,85)	(1.149.368.219.348,74)
3	Aktivitas Pendanaan	-	-
4	Aktivitas Transitoris	-	-
	Jumlah	(51.226.287.873,52)	127.727.810.730,76

5.6.6 Saldo Akhir Kas Rp433.555.460.454,42 Rp474.856.235.612,94

Sisa Kas Daerah milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2019 sebesar Rp433.555.460.454,42 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp474.856.235.612,94 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.141
Rincian Kas Per 31 Desember 2019**

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1	Kas di Kasda	385.653.593.288,36	164.745.158.077,68
2	Deposito Berjangka	-	270.000.000.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.145.501.321,00	11.380.663.802,42
4	Kas di Bendahara Penerimaan	54.694.388,00	31.101.900,00
5	Kas di BLUD	27.714.169.998,06	25.637.323.088,84
	Jumlah Sisa Kas (SiLPA)	420.567.958.995.42	471.794.246.868,94
1	Kas Lainnya	12.987.501.459,00	3.061.988.744,00
	Jumlah Kas (Neraca)	433.555.460.454,42	474.856.235.612,94

Penjelasan:

Kas di Kasda sebesar Rp385.653.593.288,36 merupakan kas dalam penguasaan BUD di Rekening Giro Kas Daerah pada Bank BPD DIY nomor 001.111.000059 dengan rincian saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp384.574.069.424,36, Jasa Giro bulan Desember sebesar Rp1.007.992.164,00, dan Pengembalian Belanja SP2D LS masih di Pihak Ketiga sebesar Rp71.531.700,00.

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp7.145.501.321,00 merupakan sisa uang persediaan pada Bendahara Pengeluaran PPKD sebesar Rp212.411.977,00, sisa Dana BOS Tahun 2018 pada rekening sekolah SMA/SMK/SLN Negeri sebesar Rp474.194.489,00, sisa Dana BOS Tahun 2019 pada rekening sekolah SMA/SMK/SLB Negeri sebesar Rp6.304.394.855,00 dan kelebihan Sisa Beasiswa Kartu Cerdas Pendidikan Menengah yang disetor ke Kasda sebesar Rp142.500.000,00.

Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran PPKD sebesar Rp212.411.977,00 terdiri dari sisa Belanja Subsidi ke PT AMI sebesar Rp211.476.977,00, sisa Belanja Bantuan Keuangan Khusus Urusan Keistimewaan ke Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp565.000,00 dan sisa Belanja Bantuan Keuangan Khusus Urusan Keistimewaan ke Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp370.000,00, namun sampai dengan 31 Desember 2019 belum dikembalikan ke rekening Kas Daerah. Pengeluaran Belanja Subsidi dan Bantuan Keuangan Khusus Keistimewaan dilakukan dengan SP2D TU.

Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp54.694.388,00 merupakan penerimaan pendapatan yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke rekening Kas Daerah yaitu pada :



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦏ꧀ꦢꦤꦢꦫꦺꦴꦩꦤꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦏꦫꦠ

- a. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM (Balai Pialam) sebesar Rp996.000,00
- b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp23.610.000,00.
- c. Dinas Perhubungan (Balai Perpakiran) sebesar Rp1.279.000,00.
- d. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp509.388,00.
- e. Dinas Kebudayaan sebesar Rp28.300.000,00

Kas di BLUD sebesar Rp27.714.169.998,06 merupakan merupakan Sisa Anggaran Lebih Tahun Berjalan pada BLUD yang terdiri dari RS. Ghrasia, RS Paru Respira, Bapel Jamkessos, Balai Pelatihan Kesehatan, Balai Laboratorium Kesehatan dan Balai Latihan Pendidikan dan Teknik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.142
Rincian Kas di BLUD

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	RS Grhasia, Dinas Kesehatan Saldo giro per 31 Desember 2019 Rp8.050.637.168,15 dan Jasa Giro bulan Desember 2019 sebesar Rp1.507.292,00	8.052.144.460,15
2	RS Paru Respira, Dinas Kesehatan Saldo giro per 31 Desember 2019 Rp8.498.691.402,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2019 sebesar Rp14.018.095,00	8.512.709.497,00
3	Balai Pelayanan Jamkessos, Dinas Kesehatan Saldo giro per 31 Desember 2019 Rp2.056.640.821,29 dan Jasa Giro bulan Desember 2019 sebesar Rp3.427.484,00	2.060.068.305,29
4.	Balai Pelatihan Kesehatan, Dinas Kesehatan Saldo giro per 31 Desember 2019 Rp3.059.265.645,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2019 sebesar Rp7.155.998,00	3.066.421.643,00
5.	Balai Laboratorium Kesehatan, Dinas Kesehatan Saldo giro per 31 Desember 2019 Rp3.369.245.847,62 dan Jasa Giro bulan Desember 2019 sebesar Rp2.002,00	3.369.247.849,62
6.	BLPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Saldo giro per 31 Desember 2019 Rp2.647.482.487,00, Jasa Giro bulan Desember 2019 sebesar Rp4.023.756,00 dan penerimaan tahun 2019 yang belum disetor ke rekening BLUD sebesar Rp2.072.000,00	2.653.578.243,00
	Jumlah	27.714.169.998,06

Kas Lainnya sebesar Rp12.987.501.549,00 merupakan sisa Kas di Rekening SMA/SMK yang terdiri dari Sisa Dana yang berasal dari serah terima P3D Tahun 2016 sebesar Rp637.366.476,00, Beasiswa Pendidikan Menengah pada Sekolah Negeri sebesar Rp8.399.331.000,00 dan Beasiswa Pendidikan Menengah pada Sekolah Swasta sebesar Rp2.620.767.000,00.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிய நகரம் நகரம் நகரம் நகரம் நகரம் நகரம் நகரம்

1.5. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas berisi informasi tentang Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, serta Ekuitas Akhir. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2019 dijelaskan sebagai berikut:

5.5.1 Ekuitas Awal

Rp9.095.978.154.318,13 Rp7.731.723.566.685,84

Saldo Ekuitas Awal Tahun 2019 sebesar Rp9.095.978.154.318,13 mengalami kenaikan sebesar Rp1.364.254.587.632,29 atau 17,64% dibandingkan dengan Ekuitas Awal Tahun 2018 yaitu sebesar Rp7.731.723.566.685,84. Rincian Ekuitas Awal sebesar Rp9.095.978.154.318,13 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.143
Rincian Ekuitas Awal

No	Uraian	Ekuitas Awal
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.436.967.170.489,42
2	Dinas Kesehatan	51.347.478.339,90
	RS Ghrasia	65.518.962.956,80
	RS Respira	54.897.913.409,14
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	2.726.713.519.498,52
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	563.181.352.581,01
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.943.261.495,98
6	Satuan Polisi Pamong Praja	5.056.435.933,53
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.751.474.897,01
8	Dinas Sosial	96.617.292.411,52
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	26.109.439.658,81
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	23.648.839.393,17
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-
	Badan Lingkungan Hidup	21.607.959.972,81
	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	73.875.362.880,48
12	Dinas Perhubungan	160.716.681.661,07
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	39.619.817.450,56
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	11.911.474.247,67
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	-
	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	4.391.697.212,74
	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	1.205.756.831,40
16	Dinas Kebudayaan	457.769.396.663,48
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	162.438.859.177,27
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	169.345.561.006,56
19	Dinas Pariwisata	38.900.686.422,49
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-
	Dinas Pertanian	211.248.294.800,45
	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	10.110.263.500,31



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

پښتو ژباړه : پښتو ژباړه پښتو ژباړه پښتو ژباړه

No	Uraian	Ekuitas Awal
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	31.142.437.858,08
22	Gubernur dan Wakil Gubernur	-
23	Sekretariat Daerah	217.780.143.652,83
24	Badan Penghubung Daerah	25.554.190.054,72
25	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-
26	Sekretariat DPRD	149.254.021.010,82
27	Inspektorat	5.263.901.447,65
28	Paniradya Kaistimewan	-
	Sekretariat Parampara Praja	1.183.755.617,90
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.503.237.437,10
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	747.318.814.561,57
31	PPKD/BUD	1.422.540.828.724,90
32	Badan Kepegawaian Daerah	13.684.102.948,94
33	Badan Pendidikan dan Pelatihan	27.857.768.111,52
	Jumlah	9.095.978.154.318,13

5.5.2 Surplus/Defisit

Rp1.110.746.465.887,67 **Rp1.321.178.340.236,85**

Surplus/Defisit LO Tahun 2019 sebesar Rp1.110.746.465.887,67 merupakan Surplus/Defisit LO Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.144
Rincian Surplus (Defisit) – LO per SKPD

No	Uraian	Pendapatan - LO	Beban	Surplus (Defisit) LO
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	5.177.370.951,00	1.210.255.662.343,45	(1.205.078.291.392,45)
2	Dinas Kesehatan	39.839.987.058,22	152.777.933.726,25	(112.937.946.668,03)
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	7.161.595.947,24	334.320.132.986,45	(327.158.537.039,21)
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	-	47.893.360.193,84	(47.893.360.193,84)
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	11.197.361.965,78	(11.197.361.965,78)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-	17.139.493.286,80	(17.139.493.286,80)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	26.895.680.299,43	(26.895.680.299,43)
8	Dinas Sosial	723.000.000,00	61.740.790.582,21	(61.017.790.582,21)
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.835.118.500,00	37.645.078.017,15	(34.809.959.517,15)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-	12.578.972.588,33	(12.578.972.588,33)
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	16.076.605.457,74	55.069.296.154,07	(38.992.690.696,33)
12	Dinas Perhubungan	2.285.568.600,00	38.592.671.892,07	(36.307.103.292,07)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.650.000,00	25.158.687.569,53	(25.154.037.569,53)
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.800.000,00	14.646.861.227,81	(14.643.061.227,81)
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	226.090.000,00	9.973.800.049,48	(9.747.710.049,48)
16	Dinas Kebudayaan	986.235.500,00	292.984.880.935,03	(291.998.645.435,03)
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	470.540.800,00	33.400.641.826,20	(32.930.101.026,20)
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.615.078.500,00	34.882.918.218,35	(33.267.839.718,35)
19	Dinas Pariwisata	88.212.890,00	22.798.218.991,18	(22.710.006.101,18)
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	757.337.565,00	52.769.538.282,98	(52.012.200.717,98)
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	144.616.692,00	21.717.282.875,64	(21.572.666.183,64)
22	Gubernur dan Wakil Gubernur	-	3.248.890.330,00	(3.248.890.330,00)
23	Sekretariat Daerah	115.186.200,90	94.954.578.320,26	(94.839.392.119,36)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦺꦠꦶꦱꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

No	Uraian	Pendapatan - LO	Beban	Surplus (Defisit) LO
24	Badan Penghubung Daerah	533.845.000,00	5.954.955.360,45	(5.421.110.360,45)
25	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	36.455.579.794,00	(36.455.579.794,00)
26	Sekretariat DPRD	-	74.057.865.770,20	(74.057.865.770,20)
27	Inspektorat	-	15.227.972.338,93	(15.227.972.338,93)
28	Paniradya Kaistimewan	-	3.656.327.192,75	(3.656.327.192,75)
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	19.959.355.200,70	(19.959.355.200,70)
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	2.059.931.907.118,88	152.152.473.733,85	1.907.779.433.385,03
31	PPKD/BUD	3.837.972.715.817,36	1.732.694.094.756,71	2.105.278.621.060,65
32	Badan Kepegawaian Daerah	2.493.800.000,00	199.933.705.473,72	(197.439.905.473,72)
33	Badan Pendidikan dan Pelatihan	4.061.484.000,00	20.023.218.427,07	(15.961.734.427,07)
	Jumlah	5.983.504.746.598,34	4.872.758.280.710,67	1.110.746.465.887,67

5.5.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar **Rp136.637.702.665,29** **Rp43.076.247.395,44**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar Tahun 2019 sebesar Rp136.637.702.665,29 merupakan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.145
Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

No	Uraian	Nilai (Rp.)	Keterangan
1	Penyerahan Hibah	(4.530.281.192,00)	Penyerahan barang milik daerah kepada institusi diluar Pemerintah Daerah DIY
2	Penyesuaian awal dan koreksi	11.526.891.609,85	merupakan koreksi-koreksi yang berasal dari proses rekonsiliasi awal tahun karena adanya perubahan kelembagaan yang mengakibatkan adanya OPD baru, gabung, pecah dan hilang sehingga berdampak pada penyajian aset-aset pada OPD lama Contoh: BLH dan Dinas Kehutanan hilang menjadi OPD DLHK, Biro Administrasi Kesra pecah menjadi Biro Bina Mental dan Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat; dan juga penyesuaian atas kesalahan kesalahan pencatatan pada Laporan Keuangan periode sebelumnya.
3	Mutasi antar SKPD	68.838.499.299,07	perpindahan aset tetap keluar dan masuk
4	Penghapusan	(6.885.074.096,58)	merupakan penghapusan aset tetap yang kondisinya rusak berat atau usang dan dikeluarkan dari neraca setelah proses pemindahtanganan selesai.
5	Ekstrakomtabel	(5.743.246.196,08)	merupakan aset aset yang dikeluarkan dari pencatatan neraca karena nilainya dibawah kapitalisasi



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦼꦂꦶꦠꦗꦼꦢꦁꦢꦒꦼꦂꦠꦶꦩꦼꦮꦪꦒꦺꦴꦏꦂꦠ

No	Uraian	Nilai (Rp.)	Keterangan
6	Perubahan Nilai Persediaan dan Pencatatan Persediaan dari Hasil Produksi	2.659.721.360,00	merupakan koreksi nilai persediaan ternak, bibit ikan dan bibit tanaman sesuai dengan kebijakan akuntansi maka nilai ternak disajikan sebesar nilai wajar pada saat disajikan per 31 Desember 2019 (ada ikan yang beranak pinak)
7	Koreksi Penyertaan Modal	70.600.079.029,16	merupakan penyesuaian atas nilai penyertaan modal per 31 Desember 2018 audited dengan data ekuitas pada laporan keuangan BUMD 2018 audited.
8	Pencatatan Pendapatan Diterima Dimuka	1.092.631.722,53	merupakan pengakuan/pencatatan pendapatan diterima dimuka
9	Penyesuaian Penyisihan Piutang	48.344.211,20	merupakan transaksi pengurangan penyisihan piutang karena sudah dibayar
10	Lain-lain	(422.848.121,86)	merupakan tampungan transaksi yang tidak masuk dalam kategori diatas, diantaranya penggunaan saldo kas lainnya (P3D 2016) pada DIKPOA, Penyisihan Dana Bergulir, Penyisihan pajak LLPAD, Pengakuan gedung berupa extracom yang sudah dikapitalisasi pada Balai KPH dan selisih retur obat pada RS Ghrasia.
11	Koreksi BPK	(547.014.960,00)	Koreksi BPK atas LKPD TA 2019 unaudited berupa: 1) Koreksi tambah dan kurang untuk aset lainnya sebesar (Rp296.371.981,00); 2) koreksi atas pendapatan bunga dari kas lainnya sebesar (Rp108.804.329,00); 3) koreksi atas nilai Aset Tetap - Peralatan Mesin yang tidak memenuhi batas kapitalisasi senilai (Rp141.838.650,00).
	Jumlah	136.637.702.665,29	



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦿꦏꦠꦫ

Tabel 5.146
Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi
dan Kesalahan Mendasar per SKPD

No	Uraian	Dampak Perubahan
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	56.358.044.250,64
2	Dinas Kesehatan	6.349.529.961,31
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	317.169.627.456,73
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	(508.001.397.213,66)
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100.940.994,54
6	Satuan Polisi Pamong Praja	207.194.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32.541.664,00
8	Dinas Sosial	427.292.022,53
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	16.494.226.019,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	21.856.877.417,48
12	Dinas Perhubungan	4.989.555.073,93
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.724.572.963,35
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	251.832.800,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	95.056.327,41

No	Uraian	Dampak Perubahan
16	Dinas Kebudayaan	(125.301.616.464,82)
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	(972.579.562,08)
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.231.280.252,47
19	Dinas Pariwisata	3.756.200.722,35
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.079.656.107,65
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	570.887.497,00
22	Gubernur dan Wakil Gubernur	-
23	Sekretariat Daerah	14.026.575.638,62
24	Badan Penghubung Daerah	469.993.620,01
25	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-
26	Sekretariat DPRD	(3.300.750.948,50)
27	Inspektorat	(1.435.396.198,11)
28	Paniradya Kaistimewan	1.677.935.962,58
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	49.043.990,00
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	388.992.205.004,92
31	PPKD/BUD	(77.628.057.260,72)
32	Badan Kepegawaian Daerah	(32.000.000,00)
33	Badan Pendidikan dan Pelatihan	398.430.566,66
	Jumlah	136.637.702.665,29

5.5.4 Ekuitas Akhir

Rp10.343.362.322.871,10

Rp. 9.095.978.154.318,13

Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2019 adalah sebesar Rp10.343.362.322.871,10 merupakan kekayaan bersih yang dimiliki Pemda DIY dengan rincian per SKPD sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Tabel 5.147
Rincian Ekuitas Akhir per SKPD

No	Uraian	Ekuitas Akhir
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.557.422.076.509,61
2	Dinas Kesehatan	179.762.825.687,12
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	3.058.195.690.829,72
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	524.083.361.686,34
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.556.243.731,74
6	Satuan Polisi Pamong Praja	5.699.320.323,73
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	72.009.703.135,58
8	Dinas Sosial	94.565.366.637,84
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	40.839.783.963,66
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	22.950.667.358,84
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	116.853.960.307,36
12	Dinas Perhubungan	161.692.715.906,93
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	43.749.482.969,38
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	14.178.711.916,86
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	5.531.290.946,07

No	Uraian	Ekuitas Akhir
16	Dinas Kebudayaan	415.657.130.631,09
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	157.641.801.722,99
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	172.375.226.982,68
19	Dinas Pariwisata	52.052.629.791,66
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	229.930.924.085,77
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	30.894.325.491,44
22	Gubernur dan Wakil Gubernur	-
23	Sekretariat Daerah	227.893.463.423,09
24	Badan Penghubung Daerah	25.674.229.162,28
25	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-
26	Sekretariat DPRD	136.873.720.942,12
27	Inspektorat	16.917.483.561,61
28	Paniradya Kaistimewan	2.285.113.979,73
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.757.924.905,40
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	1.196.011.323.389,32
31	PPKD/BUD	1.721.481.369.198,80
32	Badan Kepegawaian Daerah	13.129.987.658,22
33	Badan Pendidikan dan Pelatihan	26.694.466.034,11
	Jumlah	10.343.362.322.871,10



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦿꦏꦂꦠ

BAB VI.

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

1.1. Perubahan Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2019 mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Daerah tersebut menggantikan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Perubahan kelembagaan dilaksanakan berdasarkan efektifitas pemerintahan, efisiensi, manfaat, akuntabilitas, keterbukaan, partisipasi dan pendayagunaan kearifan local. Perdas Nomor 1 Tahun 2018 meliputi pembentukan perangkat daerah, jabatan pada perangkat daerah dan Parampara Praja.

Perangkat daerah yang ditetapkan terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah, meliputi:
 - a. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum
 - 1) Biro Tata Pemerintahan
 - 2) Biro Hukum
 - 3) Biro Organisasi
 - 4) Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol
 - b. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan
 - 1) Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - 2) Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan
 - c. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
 - 1) Biro Bina Mental Spiritual
 - 2) Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat
2. Paniradya Kaistimewan
3. Sekretariat DPRD
4. Inspektorat
5. Dinas Daerah
 - a. Dinas Pariwisata
 - b. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - d. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - e. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - f. Dinas Kelautan dan Perikanan
 - g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - h. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral
 - i. Dinas Perhubungan
 - j. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*)
 - k. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - l. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
 - m. Dinas Kesehatan
 - n. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

- o. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
 - p. Dinas Sosial
 - q. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)
 - r. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
 - s. Satuan Polisi Pamong Praja
6. Badan Daerah
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset
 - c. Badan Kepegawaian Daerah
 - d. Badan Pendidikan dan Pelatihan
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Badan Penghubung Daerah

Perubahan kelembagaan meliputi pembentukan perangkat daerah baru, perubahan nomenklatur, pemecahan perangkat daerah dan penggabungan perangkat daerah. Pembentukan perangkat daerah baru yaitu Paniradya Kaistimewan yang merupakan pendayagunaan kearifan lokal.

Paniradya Kaistimewan dibentuk dengan tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan urusan keistimewaan dan pengoordinasian administratif urusan keistimewaan. Selain itu terdapat pembentukan Parampara Praja.

Parampara Praja adalah lembaga non struktural yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pertimbangan, saran dan pendapat mengenai urusan keistimewaan kepada Gubernur. Anggota Parampara Praja paling banyak 9 (sembilan) orang terdiri dari akademisi/teknokrat, unsur Kasultanan dan unsur Kadipaten, serta tokoh masyarakat yang dipilih dan diangkat oleh Gubernur, mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Parampara Praja berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan difasilitasi oleh Paniradya Kaistimewan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, tata kerja, tugas, dan fungsi Parampara Praja diatur dengan Peraturan Gubernur.

Perubahan kelembagaan tersebut berpengaruh pada entitas akuntansi pada pengguna anggaran yaitu:

1. Rumah Sakit Ghrasia dan Rumah Sakit Paru Respira pada Tahun 2018 merupakan pengguna anggaran, tetapi pada Tahun 2019 berubah menjadi merupakan unit pelaksana teknis (kuasa pengguna anggaran) pada Dinas Kesehatan.
2. Badan Lingkungan Hidup digabung dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Badan Kerjasama dan Penanaman Modal digabung dengan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu menjadi Dinas Perijinan dan Penanaman Modal.
4. Dinas Pertanian digabung dengan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
5. Sekretariat Parampara Praja dihapus dan fungsi fasilitasi untuk Parampara Praja dilaksanakan oleh Paniradya Kaistimewan.
6. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dipecah menjadi Biro Bina Mental dan Biro Pemberdayaan Masyarakat.
7. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah berubah menjadi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.
8. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat berubah menjadi Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan sebagian fungsi bidang digabung pada Biro Pemberdayaan Masyarakat.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦫꦺꦴꦩꦠꦺꦴꦩꦲꦏꦂꦠ

9. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset berubah menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset.

1.2. Pelaksanaan Dana Keistimewaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan pengaturan keistimewaan DIY berdasarkan asas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhinneka-tunggal-ika-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal. Pengaturan keistimewaan DIY bertujuan untuk:

1. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis;
2. Mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat;
3. Mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Menciptakan pemerintahan yang baik; dan
5. Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Kewenangan Istimewa DIY berada di Provinsi. Kewenangan tersebut meliputi:

1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
3. Kebudayaan;
4. Pertanahan; dan
5. Tata ruang.

Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan Keistimewaan didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat. Selanjutnya ketentuan lebih lanjut atas kewenangan keistimewaan tersebut diatur dalam Perda Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara. Dana Keistimewaan dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY. Pengalokasian dan penyalurannya Dana Keistimewaan melalui mekanisme transfer ke daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2014 yang didanai dengan Dana Keistimewaan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan.

Pengelolaan Dana Keistimewaan Tahun 2019 mengacu pada berbagai perundangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, sedangkan hal-hal khusus diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan. Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2019 dilaksanakan oleh OPD Pemda DIY, OPD Pemda Kabupaten/Kota sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemda Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo. Penugasan secara rinci terkait dengan pelaksanaan Dana Keistimewaan diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦧꦼꦩꦸꦠꦶꦠꦺꦭꦺꦁꦠꦶꦩꦺꦮꦏꦂꦠ

1.3. Informasi Non Keuangan Lainnya

Berdasarkan Surat KPK RI Nomor B/7163/KSP.00/10-16/08/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Percepatan Pembenahan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) kepada Para Gubernur/Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia, KPK mempunyai wewenang dalam melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Salah satu upaya KPK dalam memerankan fungsi *trigger mechanism* adalah mendorong pembenahan pengelolaan BMD di seluruh Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah DIY diminta untuk melakukan percepatan pembenahan pengelolaan BMD dengan mengirmkan data Aset Tanah Bermasalah kepada KPK. Dalam menindaklanjuti surat dari KPK tersebut Pemda DIY telah mengirimkan secara berkala perkembangan Data Aset Tanah bermasalah ke Korwil V KPK . Berdasarkan Surat terakhir KPK dengan Nomor B/1663/KSP.00/10-16/04/2020 tanggal 1 April 2020 mengenai permintaan data tindak lanjut perkembangan konflik aset tanah bermasalah dapat kami sajikan perkembangan penyelesaian permasalahan Aset Tanah Bermasalah Pemda DIY sebagai berikut :

PERKEMBANGAN KONFLIK ASET DENGAN SWASTA/PERORANGAN
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Nama Aset	Nama pihak Swasta/Perorangan	Satuan/ Luas	Nilai (rupiah)	Permasalahan	Progress
1	Tanah bangunan bioskop	Sukrisno Wibowo	5.170	Rp.29.700.295.851,-	- salah satu penghuni yang tidak bersedia diberi uang pengganti, menggugat Kementerian ATR dan Kantah Kota Yogyakarta ke PTUN Yogyakarta, dan Pemda DIY sebagai pihak tergugat intervensi	Setelah putusan PTUN kasasi Mahkamah Agung RI yang dimenangkan oleh pihak penggugat, tindak lanjut Kementerian ATR sebagai pihak tergugat akan mengajukan peninjauan kembali
2	Tanah bangunan kantor pemerintah	Murdiyanto selaku Lurah Kedung Keris Nglipar Gunungkidul	15.000	Rp.226.525.000,-	-BPKA DIY bersama Kantor Pertanahan Gunung Kidul, Dinas Pertanian dan Pemerintah Desa Kedung Keris disaksikan dukuh mengadakan pengukuran dengan batas batas yang telah disepakati . Setelah dilakukan pengukuran berdasarkan gu (gambar ukur) oleh kantor pertanahan kabupaten gunung kidul hasilnya seluas ±20.000 m² . -berdasarkan hasil pengukuran tersebut saudara Murdiyanto selaku lurah Kedung Keris Nglipar Gunungkidul tidak mau menandatangani GU (gambar ukur) dengan alasan sudah melebihi dari permohonan pengukuran ke kantor pertanahan kabupaten Gunungkidul	-berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan dan Pemerintah Desa Kedung Keris. - telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DIY dengan surat nomor 180/3977 tanggal 4 maret 2020 untuk dilakukan permohonan pendampingan hukum



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

					-meskipun sudah dikuasai oleh Pemerintah Daerah DIY sejak tahun 1980 akan tetapi tanah tersebut juga masih tercatat dalam buku inventaris di desa kedung keris nglipar gunung kidul	
3	Tanah bangunan kantor pemerintah	Pemerintah Desa Sumber Agung	10.327	Rp. 379.750.000,-	- sertifikat ganda,pemerintah desa juga mempunyai sertifikat tanah tetapi sudah dibatalkan bpn/ kementerian ATR, sehingga yang berlaku hanya 1 sertifikat yaitu atas nama Pemerintah Daerah DIY - saat ini masih dikuasai pemerintah desa sumber agung dan disewakan kepada pihak ketiga untuk kios dan gudang	- Pemda DIY sudah berkoordinasi dengan pemerintah desa sumber agung pemerintah kabupaten sleman, kantor pertanahan sleman
4	Tanah bangunan untuk kantor pemerintah	PT. Respati Mandiri	13.977	-	Berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah DIY nomor 85/hak/kpts/1977 tertanggal 16 april 1977, Pemda DIY memberikan hak pakai atas tanah terletak di kampung Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta seluas 15.497 m ² . Kepada yayasan dana pendidikan perkebunan (YDPP) selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, yang kemudian diperpanjang sampai dengan 2004 Pada tahun 2004, YDPP mengajukan permohonan untuk dapat mengalihkan hak pakai kepada pihak lain, namun pemda diy memberikan jawaban pemberian hak pakai kepada ydpp tidak berarti perubahan kepemilikan aset dari pemda diy kepada ydpp, sehingga setiap perubahan kepemilikan harus dilakukan dengan prosedur dan mendapat perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada tahun 2010 telah terbit sertifikat HGB nomor 265 atas nama PT. Respati Mandiri keluasan : 13.439 m ² dan sertifikat HGB nomor 266 atas nama PT. Respati Mandiri keluasan : 538 m ²	-Pemda DIY memohon kepada kanwil BPN provinsi diy untuk melakukan pencabutan keputusan kepala kanwil BPN Provinsi DIY nomor 47/HGB/BPN.34/2010 tanggal 30 agustus 2010 tentang pemberian hak guna bangunan atas nama PT. Respati Mandiri. -Telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DIY dengan berkirim Surat Perihal Permohonan Pendapat Hukum (Legal Opinion) tanah di jalan Batikan dengan nomor 590/1811 tanggal 3 Februari 2020 -Terbitnya Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi DIY Nomor 141/M.4/Gph.2/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 mengenai Pendapat Hukum Jaksa Pengacara Negara terhadap Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tanah di Jalan Batikan Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦤꦏꦤ꧀ꦢꦤꦤꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦏꦿꦲꦏꦂꦠ

5	Tanah dan rumah negara golongan II tipe B permanen	Sdr. Setio Agus Samapto, SH	701	Rp.475.378.040,-	Tanah dan bangunan yang disewa sdr. Setio Agus Samapto, SH telah berakhir pada tanggal 30 november 2018, namun hingga saat ini yang bersangkutan masih menghuni meskipun sudah ada surat peringatan ke-1,2 dan 3 Dari pihak penghuni rumah dinas tersebut mengajukan gugatan perdata ke PN Yogyakarta	-Pemda DIY telah membuat surat peringatan ke 1,2, dan 3 -Terbit surat perintah nomor 943/1006 dari sekda diy kepada kasatpol pp untuk pengosongan rumah dinas tersebut - telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DIY dengan surat nomor 180/3826 tanggal 2 maret 2020 untuk dilakukan permohonan pendampingan Pengosongan
6	Tanah bangunan rumah negara tanpa golongan	Warga RT 04 Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan.	5.104	Rp.1.000.000,-	- ditanah tersebut terdapat rumah dinas yang dahulu dihuni oleh bapak sudirman dan di sebelah rumah dinas tersebut terdapat banyak pemukiman warga . Mayoritas yang menguasai tanah eks. Prambusia adalah orang mantan pegawai kementerian kesehatan eks prambusia. Saat ini ada beberapa yang sudah berpindah ke perumahan ngipik namun mereka juga masih memanfaatkan dan menguasai tanah di eks prambusia tersebut untuk disewakan sebagai kos-kosan atau kontrakan.	-Pemda DIY telah melakukan koordinasi dengan ketua RW 01 dan RT 04 Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan. Ada sekitar 23 rumah dan 29 kepala keluarga dan kurang lebih 87 orang penduduk yang berada dilingkungan tersebut - sudah dilakukan pengukuran ulang oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta - saat ini sedang dilakukan proses penilaian oleh appraisal untuk nantinya dilakukan pemanfaatan
7	Tanah jalan di jalur jalan lintas selatan	Pihak -pihak yang melakukan pembebasan tanah untuk JJLS	2.492.325	Rp.607.092.336.070,-	Pengadaan tanah dari tahun 2005 sampai dengan 2012 pensertifikatan terkendala karena tidak tersedianya peta bidang yang pada saat itu proses pengadaan tanah dilakukan oleh Tim 9 (sembilan) namun berita acara pelepasan sudah lengkap, sedangkan untuk memproses sertifikat ke BPN diperlukan berkas antara lain peta bidang	Koordinasi dengan BPN dan Kantah kabupaten kota dalam rangka percepatan pensertifikatan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦢꦫꦺꦴꦩꦤꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 merupakan laporan keuangan berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 merupakan hasil konsolidasi Laporan Keuangan 33 Entitas Akuntansi pada Pengguna Anggaran dan 116 Entitas Akuntansi pada Kuasa Pengguna Anggaran. Laporan Keuangan tersebut disusun dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Untuk penyajian aset tetap di neraca didukung dengan SIPKD Modul Aset. Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan oleh Entitas Pelaporan dalam hal ini oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset.

Perencanaan anggaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan dalam pelaporan kode rekening pendapatan dan belanja yang digunakan dalam penganggaran dikonversi sesuai dengan Bagan Akun Standar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan Tahun 2019 yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.

Yogyakarta, 31 Desember 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X